

**ETNOGRAFIS
PERKEMBANGAN
PENDIDIKAN
ISLAM**

Dr. Ali Halidin, M.Pd.I.

Editor:

Dr. St. Zakiah, M.Pd.I.

Kata Pengantar:

Prof. Dr. Syahabuddin, M.Ag

Rektor IAIN Bone

Judul Buku: Etnografis Perkembangan Pendidikan Islam

Penulis: Dr. Ali Halidin, M.Pd.I.

Nama Pengarang: Dr. Ali Halidin, M.Pd.I.

Penyunting: Dr. St. Zakiah, M.Pd.I.

Nama Editor: Dr. St. Zakiah, M.Pd.I.

Desain Sampul: Tim Kertasentuh

Desain Isi: Isa Saburai

ISBN: 978-623-8092-15-4

xii + 774 hlm; A5

Cetakan Pertama, Desember 2022

Diterbitkan oleh: **Nusantara Press, IAIN Parepare**

PENERBIT KERTASENTUH

Jl. Sabar Ya , No. 62 Rt.02/Rw.17

Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat *Ilahi Rabbi*, yang telah menganugraahkan segala nikmat, rahmat dan inayah- Nya kepada penulis sehingga buku dengan judul *INTEGRASI PENGEMBANGAN KEILMUWAN DI PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM* dapat terbit dan segera dikaji oleh para akademisi, praktisi dan ilmuwan.

Konsep integrasi keilmuwan yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKIN) berbeda-beda, jika dikaitkan dengan lembaga, maka akan ditemukan fakta yang bertolak belakang. Dalam kaidah Islam disebutkan bahwa “*Al ismu Yadullu ‘ala Maa Yusamma*” (Nama menunjukkan apa yang dinamai). Benarkan nama lembaga seperti Sunan Kalijaga, Sunan Ampel dan Sunan Maulana Malik Ibrahim tercermin dalam pengembangan

keilmuan Universitas Islam Negeri (UIN) di Indonesia sebagai sebuah contoh PTKIN di Indonesia ataukah hanya sekedar kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama yang mengadopsi aspek lokalitas dimana lembaga itu berada. Hal ini tentu perlu dikaji, telaah dan bahkan diteliti. Dari hasil penelitian yang penulis temukan menunjukkan bahwa UIN Sunan Ampel Surabaya memang tampak lebih matang dalam intenalisasi spirit Sunan Ampel dalam pengembangan keilmuannya dan kelembagaan. UIN Sunan Ampel mengembangkan konsep keilmuan dengan model menara kembar tersambung atau sering disebut "*integrated twin tower*". Konsep keilmuan tersebut memiliki tujuan untuk membangun struktur keilmuan yang mana antara ilmu agama dan ilmu umum berkembang sesuai dengan karakteristik dan obyek kajian dari masing-masing ilmu. Namun, keduanya harus dapat berjalan secara bersama, memadai, wajar dan saling menyapa dengan berpedoman pada al Qur'an dan al Hadist. Di sisi lain, nuansa integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum juga tergambar pada logo UIN Sunan Ampel yang merangkum perpaduan tradisi lokal dan kemajemukan sebagaimana cara dakwah Sunan Ampel.

Berbeda dengan Sunan Kalijaga yang lebih banyak menggunakan pendekatan konsep akulturasi budaya dalam dakwahnya, dalam bahasa lain konsep UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yakni; "**Integrasi-interkoneksi**"

merupakan upaya untuk mendialogkan dan mengkombinasikan antara agama-ilmu atau ilmu-agama, sehingga terbentuk suatu keilmuan baru yang mengkaji umum dan agama yang pada akhirnya melahirkan suatu keilmuan yang sejalan dengan agama Islam atau sebaliknya. Sunan Kalijaga dalam berdakwah tidak serta merta menghapus agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Jawa, melainkan menerapkan sikap toleransi terhadap kepercayaan tersebut. Sunan Kalijaga berdakwah dengan cara menciptakan hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan para wali. Hal ini bertujuan agar para wali dapat dengan mudah untuk menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat, baik dilakukan dengan cara terbuka atau tertutup. Sikap dan cara Sunan Kalijaga yang tidak bersikap antipati terhadap agama dan kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran Islam membawa kesuksesan Sunan Kalijaga dalam berdakwah.

Jika dilihat dari perspektif Al-Jabiri, UIN Yogyakarta unggul dari aspek *Bayani* dan *Burhani* (kajian teks dan riset empiris) akan tetapi masih dianggap lemah dan kurang dari aspek *Irfani*. Kegiatan tasawuf, dzikir dan ritus keagamaan kurang berkembang dan digaungkan di kampus tersebut.

Berbeda dengan UIN Malang Sunan Maulana Malik Ibrahim yang memiliki semangat Islamisasi dengan konsep integrasi “pohon-keilmuan”. Pemilihan nama Maulana

Malik Ibrahim muncul setelah konsep integrasi keilmuan sudah matang dan dijadikan sebagai pedoman pengembangan akademik dan kelembagaan kampus. Yang menarik adalah Maulana Malik Ibrahim dipilih setidaknya pada dua alasan, pertama karena mayoritas warga kampus memilih hal itu, alasan kedua adalah karena Maulana Malik Ibrahim lebih tua dari Sunan Ampel, yang secara filosofis dapat dimaknai bahwa UIN Malang selalu ingin menjadi lebih terdepan dan mendahului UIN Surabaya karena melekat nama pada lembaganya.

Tiga UIN tersebut memang telah berhasil berhasil membangun grand design pengembangan lembaganya, namun dalam tataran pengembangan keilmuan masih menyisakan pekerjaan rumah yang tidak mungkin selesai dalam waktu 3-5 tahun, melainkan butuh waktu 15-20 tahun agar integrasi tidak hanya menjadi suatu konsep yang ideal dalam tataran konseptual tetapi menjadi membumi dan bisa diterjemahkan dan bahkan wujudnya dapat dirasan melalui produksi ilmu pengetahuan dan teknologi serta berdampak nyata kepada masyarakat.

Akhirnya, penulis menyampaikan rasa terima kasih atas semua pihak yang telah membantu terbitnya buku ini sekaligus juga menyadari bahwa masih banyak kekurangan buku ini. Mudah-mudahan karya ini ini dapat memberikan manfaat bagi para pimpinan, pengelola perguruan tinggi, akademisi dan mahasiswa yang sedang mengkaji

tentang integrasi keilmuan dan agama dalam kerangka kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Bone, 9 Agustus 2022

Penulis

PENGANTAR PENULIS

Bismillahirrahmani Rahim

Segala puji bagi Allah Swt, atas segala limpahan rahmatNya, dan atas selesainya penulisan buku ilmiah referensi ilmu pendidikan Islam ini. Penyusunan buku ini telah dipersiapkan sejak 1 tahun lamanya. Buku ini dimaksudkan sebagai tambahan pemikiran dan keilmuan pendidikan Islam, yang diharapkan akan bermanfaat bagi masyarakat Islam yang ada di Indonesia, terutama lagibagi sivitas akademika dalam lingkup PTKI Kemenetrian Agama Republi Indonesia.

Buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap Institusi tempat tempat penulis bernaung bekerja dan mencari nafkah sebagai dosen Ilmu Pendidikan Islam pada Fakultas Tarbiyah dan Pascasarjana IAIN Bone Sulawesi Selatan. Untu itu, ucapan terima

kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak memberikan saran, ide dan gagasan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terutama kepada Bapak Rektor IAIN Bone, Prof. Dr. Syahabudin, M.Ag, yang telah banyak mendorong penulis dan memberikan bantuan biaya atas penulisan dan penerbitan buku melalui program Gemar Menulis Buku (GEMUK), dan juga kepada sahabat saya Bapak Wakil Rektor II IAIN Bone Dr. Hasbi Siddik, M.Pd.I, yang tidak henti-hentinya memotivasi untuk segera menyelesaikan buku Referensi Kilmuan ini dengan judul Etnografi Pendidikan Islam. Tidak lupa pula saya ucapkan terimah kasih yang setinggi-tingginya kepada sahabat Dr. Ishak, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN bone, yang menjadi teman diskusi dan beradu argumen dikala waktu senggang sambil minum kopi dan dalam beberapa pertemuan akademik, ide-ide yang diberikan sangat mencerahkan.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan buku ini sampai buku ini terbit, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terutama kepada saudara Editor yang banyak memberikan masukan dan telaah akademik, sehingga selesainya buku ini, dan juga para pakar yang bukunya penulis kutip untuk memenuhi tuntunan garis besar perkuliahan, serta sahabat Majdi, MH, sebagai desain sampul dan tata letak sehingga buku ini memilii nilai estetika yang tinggi bagi para pembacanya.

Penulis sangat menyadari dalam buku ini masih banyak kekurangan, dan tentunya masih jauh dari kesempurnaan dan masih akan ditemukan kekurangan disana sini, untuk itu, penulis membuka diri menerima saran dan kritikan sebagai bahan perbaikan ke depan terhadap isi dalam buku ini. Terakhir, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa, peneliti dan masyarakat pada umumnya dalam pengembangan khasanah keilmuan Islam khususnya pada bidang Ilmu Pendidikan Islam.

Bone, 15 Desember 2022

Penulis

DAFTAR ISI

1.	Guru Penggerak Masa Depan Pendidikan Bangsa	10
2.	Metode Belajar Pendidikan Merdeka	30
3.	Pendidikan Taman Siswa Dasar Kebijakan Di Indonesia	55
4.	Pendidikan Merdeka Di Indonesia	71
5.	MERDEKA BELAJAR POTRET INDONESIA	90
6.	PROBLEMATIKA BELAJAR	123
7.	Merdeka Belajar Menurut Filsafat	
	Pendidikan Humanisme	143
	Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan	192
8.	Pendidikan Sesuai Zaman	250
9.	Guru Penggerak Dan Inkuiri Apresiatif	283
10.	Guru Baper (Bawa Perubahan)	310
11.	Rogram Guru Penggerak Prototipe	
12.	Pembelajaran Manusia	339

GURU PENGGERAK MASA DEPAN **G**PENDIDIKAN BANGSA

“Bangsa yang besar adalah bangsa yang memprhatian Guru-gurunya, karena guru akan menghasilkan propesi lain”

A. KEBERHASILAN GURU

Pendidikan merupakan proses memfasilitasi pembelajaran, atau perolehan pengetahuan, keterampilan, nilai, moral, kepercayaan, dan kebiasaan (Suardi, M., 2018; Hodson, D., 2009). Melalui pendidikan orang dapat memiliki pemahaman terhadap sesuatu yang membuat dirinya menjadi manusia yang kritis dalam berpikir dan bertindak. Ukuran keberhasilan pendidikan dilihat dari keterlibatan dan peran serta guru sebagai pendidik, siswa sebagai peserta didik, materi pembelajaran yang diberikan, metode pengajaran dan sarana prasarana yang disediakan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia yang baru, Nadiem Makarim, sejak menerbitkan surat

edaran nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan merdeka belajar dalam penentuan kelulusan peserta didik menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan, “Merdeka Belajar” atau “Kebebasan Belajar”. Konsep “Kebebasan Belajar”, yaitu membebaskan institusi pendidikan dan mendorong peserta didik untuk berinovasi dan mendorong pemikiran kreatif. Konsep ini kemudian diterima mengingat visi misi Pendidikan Indonesia ke depan demi terciptanya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing diberbagai bidang kehidupan.

Menghadapi era revolusi industry 4.0, yang menekankan konsep merdeka belajar, setiap lembaga pendidikan diharapkan memiliki daya saing dan inovasi yang mampu berkolaborasi supaya tidak mengalami ketertinggalan. Di era revolusi 4.0, sistem pendidikan diharapkan mampu mewujudkan peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir kritis dan mampu menyelesaikan masalah, kreatif dan inovatif serta memiliki ketrampilan untuk berkomunikasi dan berkolaborasi (Yamin dan Syahrir, 2020).

Konsep merdeka belajar merupakan respons terhadap kebutuhan sistem pendidikan pada era revolusi industry 4.0. Nadiem Makarin sebagai Menteri Pendidikan RI, sebagai mana yang dikutip oleh tempo. com 2019, menegaskan bahwa merdeka belajar merupakan

kemerdekaan berfikir yang dimulai dari guru. Menurut Bell Hooks pada Osman, ahmed., and special akello (2015) mendidik sebagai praktik kebebasan adalah bentuk pengajaran dan pembelajaran yang menarik dan mengasyikan bagi guru dan peserta didik. Dalam praktik kebebasan ini, kedua belah pihak sama-sama pemain dalam berkontribusi dan berbagi pengalaman belajar (Simonson, M., Zvacek, S. M., & Smaldino, S., 2019). Peserta didik tidak hanya diajarkan informasi yang mereka harapkan untuk diingat dan diingat ketika ditanya, sebaliknya mereka belajar untuk berpikir kritis dengan cara yang tidak konformis dan tidak terkekang. Guru yang mendidik sebagai praktik kebebasan mengajar tidak hanya untuk berbagi informasi tetapi untuk berbagi dalam pertumbuhan intelektual dan spiritual peserta didik.

Pembelajaran merdeka belajar menciptakan peserta didik tidak hanya pintar dalam menghafal pembelajaran tetapi memiliki analisa dan penalaran yang tajam dalam mengatasi suatu masalah. Peserta didik juga diharapkan mampu memiliki karakter. Dalam pembelajaran merdeka belajar guru harus memiliki kemampuan dalam menguasai materi pembelajaran dan mengembangkannya secara mendalam menjadi materi yang menarik dan menyenangkan untuk didiskusikan dengan menggunakan teknologi sebagai media dalam

pembelajaran, sehingga peserta didik memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan yang ada pada dirinya. Daya cipta dan kreatif siswa akan tumbuh jika guru mampu mendesain pembelajaran yang menantang mereka untuk berkreasi secara aktif.

Pendidikan berpusat pada peserta didik dengan fokus pada pribadi peserta didik, pengalaman, perspektif, latar belakang, bakat, minat, kapasitas dan kebutuhan mereka pada pembelajaran. Dalam konteks ini, strategi pendidikan baru harus mendorong interaksi antara guru dan peserta didik. Praktik kreatif dalam pendidikan harus membantu peserta didik untuk bekerja membangun pengetahuan mereka melalui mendefinisikan hal-hal, yang sangat penting di mata mereka, dan dalam prosesnya, memperkuat rasa percaya diri dan individualitas mereka.

Mereka juga melibatkan pengembangan kualitas pribadi peserta didik, termasuk rasa tanggung jawab yang kuat dalam diri sendiri dan orang lain. Dengan perkembangan kebijakan pendidikan, tentu guru harus mampu untuk beradaptasi dengan kebijakan yang berlaku. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam pembelajaran, Sebagai tenaga profesional maka guru harus mampu menyelenggarakan pembelajaran yang bermutu, yang dapat menghasilkan generasi yang

terdidik, generasi yang mampu bersaing secara global dan memiliki moral yang baik (Murniarti, 2021). Guru harus mampu mengubah paradigma yang lama dengan mengikuti kebijakan-kebijakan yang baru. Dalam menghadapi era industry 4.0, guru harus mampu meng*Upgrade* dirinya dengan mengembangkan kompetensi pedagogiknya, sehingga mampu membimbing dan mengarahkan peserta didik untuk menggunakan daya nalarnya dengan baik. Guru yang memiliki kemerdekaan berpikir tentu mampu memberikan stimulus yang merangsang peserta didik untuk menggunakan daya nalarnya dengan baik dan memiliki daya cipta sesuai dengan bakat dan kemampuan yang mereka miliki.

Untuk menciptakan pembelajaran yang merdeka bagi peserta didik, tentu guru harus mampu menggunakan daya kreatifnya dalam mendesain pembelajaran dengan menggunakan berbagai metode dan media pembelajaran yang ada. Proses pembelajaran akan menarik dan menyenangkan jika guru mampu mendesain pembelajaran dengan kreatif. Guru bisa memilih metode-metode yang cocok dengan menggunakan media pembelajaran untuk membantu peserta didik mampu mengerti dan memahami materi yang diajarkan. Dengan metode pembelajaran yang bervariasi dan penggunaan media pembelajaran yang tepat akan tercipta

pembelajaran yang tidak monoton. Dengan demikian, tujuan dan kebijakan pemerintah tentang merdeka belajar akan tercapai dengan baik.

Fenomena yang terjadi bahwa masih banyak guru merasa bingung dan tidak terbiasa dengan penggunaan media pembelajaran. Metode yang digunakan guru dalam pembelajaran hanya metode caramah atau penugasan saja. Guru ibarat teko dan peserta didik sebagai gelas. Gurumemberi materi dan peserta didik hanya menunggu dengan pasif. Dalam hal ini pembelajaran tidak berpusat pada peserta didik, namun pada guru. Proses pembelajaran yang seperti ini mengerdilkan daya pikir dan kreatifitas peserta didik, karena peserta didik tidak diberi kesempatan dalam mengekspresikan dirinya secara bebas dan merdeka. Dalam hal penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), selama ini masih ada beberapa guru hanya melakukan *copy paste*. Hal ini terjadi karena banyaknya komponen-komponen yang harus dimuat secara rinci dalam RPP sehingga banyak menghabiskan waktu, padahal guru harus melakukan proses pembelajaran.

Dalam program merdeka belajar guru harus memiliki pemikiran yang bebas dan merdeka dalam mendesain pembelajaran yang ada sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Guru memiliki kemerdekaan dalam

memilih elemen-elemen dari kurikulum untuk dikembangkan dalam proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kebebasan yang dimiliki guru dalam memilih elemen-elemen yang ada dalam kurikulum harus mampu menciptakan pembelajaran yang menantang peserta didik untuk memiliki pemikiran yang kritis dalam memecahkan berbagai masalah yang ada, mampu menumbuhkan daya cipta yang kreatif serta memiliki karakter yang baik dalam menjalin komunikasi dan kerja sama dengan orang lain.

Maka untuk mewujudkan program merdeka belajar, pemerintah merekrut program guru penggerak dalam menggerakkan para guru untuk melaksanakan tugasnya sebagai guru dalam pembelajaran merdeka belajar. Maka artikel ini diharapkan mampu memberikan informasi tentang guru penggerak dan perannya dalam merdeka belajar di Indonesia.

B. MERDEKA BELAJAR

Kebebasan atau merdeka adalah kondisi terpenting dalam hampir semua aspek kehidupan manusia. Kebebasan atau merdeka itu sendiri adalah persoalan utama dalam kehidupan manusia. Sejarah mencatat bahwa banyak orang dari berbagai lapisan masyarakat bergerak dan memprotes untuk mencari kebebasan atau merdeka

dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam kaitannya dengan dunia pendidikan, belajar adalah salah satu isu yang selalu menjadi topik hangat dalam literatur kebebasan. Colin Lankshear seorang professor di University of Auckland pernah berpendapat; "Kebebasan atau merdeka dan pembelajaran telah dikaitkan dalam filsafat dan teori pendidikan dalam tradisi barat sejak zaman Yunani, dan sangat penting dalam debat Pendidikan pada abad ke-21."

Konsep merdeka belajar bukanlah konsep yang baru di dunia pendidikan. Negara- negara lain di dunia seperti Amerika, Brasil, Philipines sudah lama menerapkan konsep ini. Di Indonesia sendiri, konsep tentang Merdeka belajar sudah dimulai sejak Nadiem Makarim sebagai terpilih menjadi pendidikan. Ide dari gagasan ini dilandasi oleh esensi kemerdekaan berpikir untuk menciptakan suasana belajar yang bahagia tanpa dibebani dengan pencapaian skor atau nilai tertentu (Sudaryanto, S., Widayati, W., & Amalia, R., 2020). Konsep merdeka belajar pertama-tama hendaknya dimulai dalam pola pikir para guru sebelum mereka mengajarkannya kepada peserta didik.

Association of American Colleges & Universities (AAC & U) pernah menyebutkan bahwa: "Kebebasan akademis tidak hanya menyiratkan kebebasan dari batasan tetapi juga kebebasan bagi pengajar dan

mahasiswa untuk bekerja dalam komunitas ilmiah untuk mengembangkan kualitas intelektual dan pribadi yang dibutuhkan warga negara dalam demokrasi yang dinamis dan dalam ekonomi yang kuat.” Setiap Guru dituntut untuk mampu menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dan merdeka bagi para peserta didiknya, sehingga murid dapat berdiskusi dengan guru untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuannya serta peserta didik diharapkan mampu memiliki karakter yang pemberani, mampu berpikir secara mandiri, trampil dalam bergaul, memiliki etika serta kecakapan dalam berpikir secara kritis.

Kita semua tahu bahwa sistem pendidikan yang baik adalah memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam menggali kemampuan dan potensi pribadi. Dengan cara ini, peserta didik diberi kebebasan untuk belajar, menciptakan suasana kelas yang baru di mana mereka mampu mengembangkan pemikiran, pertanyaan, dan imajinasi mereka. Dalam konteks merdeka belajar, pendidik atau guru harus mendorong peserta didik untuk bekerja secara kolaboratif dan mengajukan pertanyaan secara kreatif tentang ide dan masalah dalam berbagai disiplin ilmu (Wagner, C. S., Wagner, C. S., & Graber., 2018; Bashan, B., & Holsblat, R., 2017). Sebagai pemikir kreatif, mereka mencoba membayangkan dan mengeksplorasi berbagai alternatif, dan berpikir dengan

cara yang berbeda. Pendekatan seperti itu diperlukan sebagai landasan akademis yang kokoh untuk meningkatkan kecerdasan mereka, termasuk “soft skill” seperti pemahaman, empati dan keterampilan dalam berkomunikasi. Penggunaan bahan pembelajaran yang berbeda dan berbagai sumber memungkinkan peserta didik dengan berbagai gaya belajar memahami informasi dengan cara yang paling efektif (Siahaan, C., & Sihotang, H., 2021).

Pembelajaran dipupuk oleh interaksi multidimensi antara peserta didik dan guru. Untuk belajar sendiri, peserta didik membutuhkan waktu yang tidak terbatas untuk bermain, bereksplorasi, mengatasi kebosanan, menemukan minat sendiri, dan mengejar minat tersebut. Hal ini tentunya membantu peserta didik mengembangkan keterampilan penalaran analitis dan kritis dengan penekanan khusus pada mengeksplorasi dan mengevaluasi sesuatu yang bersaing dengan perspektif yang berbeda. Kebebasan peserta didik untuk belajar membutuhkan kebebasan guru untuk mengajar, dan ini berhubungan erat satu sama lain. Sistem pendidikan saat ini perlu mengadopsi metode dan strategi baru yang mampu mendukung tujuan pendidikan dan menjamin kebebasan belajar dan mengajar.

Filosofi merdeka belajar mengandung makna yang sangat mendalam yakni mengajarkan semangat dan

cara mendidik anak menjadi manusia yang merdeka batinnya, merdeka pikirannya dan merdeka fisiknya. Dengan merdeka belajar, tercipta suatu ekosistem pendidikan nasional yang lebih sehat sehingga menghadirkan iklim inovasi yang mampu menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter. Konsep merdeka belajar sangat memperhitungkan kemampuan dan keunikan kognitif individu peserta didik. Berbagai kebijakan dari Nadiem Makarin tentang konsep-konsep dalam merdeka belajar adalah:

- a. Kebijakan tentang penghapusan Ujian Sekolah Berstandar Nasional

Sesuai dengan amanat Nadiem Makarin yang ada pada peraturan Menteri dan kebudayaan No.43 pada tahun 2019 bahwa pelaksanaan ujian sekolah yang berstandarnasional terakhir dilaksanakan pada tahun 2020. Ujian sekolah dikembalikan pada esensinya bahwa penilaian tersebut dilakukan oleh guru dan sekolah. Maka kelulusan dari peserta didik diakhir jenjang merupakan wewenang dari sekolah. Sekolah diberi kebebasan dan keleluasaan dalam penyelenggaraan ujian tersebut. Pengawasan dan evaluasi dari pelaksanaan ujian di sekolah menjadi tugas dan tanggung jawab dari pemerintah daerah melalui dikbud. Pemerintah

daerah akan memeriksa dan memastikan apakah ujian yang dilakukan disekolah adalah ujian yang berkualitas sesuai dengan mutu yang diharapkan. Maka untuk mencapai mutu yang diharapkan pemerintah daerah harus mengumpulkan beberapa guru dalam sekolah di wilayahnya untuk melaksanakan pelatihan dalam menyusun soal-soal sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

- b. Penggantian Ujian Nasional menjadi penilaian assesmen kompetensi minimum dan survei karakter Sesuai dengan keputusan Menteri pendidikan pelaksanaan ujian nasional yang terkahir adalah tahun 2020. Penyelenggaraan UN untuk tahun 2021 dilaksanakan melalui penilaian assesmen kompetensi minimum (AKM) dan survei karakter menjadi akan diganti dengan sistem yang baru, yaitu Assesmen kompetensi minimum dan survei karakter.

Assesmen kompetensi minimum (AKM) dalam merdeka belajar, peserta didik diharapkan memiliki kemampuan berliterasi dan kemampuan numerik. Dalam bidang literasi, peserta didik tidak hanya mampu menghafal dan menerapkan materi yang dibaca, namun diharapkan mampu untuk memiliki pemikiran yang kritis dalam

memahami materi yang diberikan. Dalam hal kemampuan numerik, peserta didik diharapkan mampu berpikir secara luas, tidak hanya sekedar mampu menghafal rumus-rumus atau formula yang ada namun lebih dari itu, peserta didik harus mampu menemukan dan memiliki konsep dasarnya dalam penyelesaian masalah yang lebih luas. Fokus dari AKM ini adalah menciptakan peserta didik yang mampu berfikir secara kritis dengan menggunakan kemampuan kognitifnya.

Survei karakter dilaksanakan di sekolah bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik memiliki pengetahuan, pemahaman dan pengaplikasian dari asas Pancasila dalam berinteraksi dengan sesamanya di sekolah. Menurut Nadiem Makarin, survei karakter sangat penting dilakukan di sekolah dalam mengetahui bagaimana keadaan peserta didik dalam hal keamanan dan sikap toleransi yang diimplementasikan dalam sikap gotong royong dan saling menghargai satu sama lain. Maka bentuk test yang dikerjakan oleh peserta didik berupa test yang sifatnya personal terkait opini peserta didik mengenai gotong royong, Bhinneka tunggal ika, tetapi juga terkait esensi dan behavior dari topik-topik tersebut.

Dalam konsep ini penilaian tidak berfokus pada ujian nasional seperti penilaian sebelumnya namun pada penugasan dan portofolio. Maka peserta didik akan memiliki ruang dalam mengembangkan minat dan bakat mereka. Dengan konsep ini diharapkan kedepan tidak ada lagi stigma peserta didik yang pintar dan bodoh karena setiap manusia telah tercipta dengan bakat alami yang dimiliki masing-masing. Semua anak punya potensi yang berbeda dan pasti akan menghasilkan suatu karya yang besar jika diasah dan dilatih. Maka cara penilaiannya tidak bisa dilakukan dengan test yang sama secara formal kepada setiap orang.

c. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Sebelum melakukan pembelajaran guru harus melakukan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). RPP harus disusun dengan 13 komponen secara rinci dan mendetail sehingga RPP terdiri dari lembaran-lembaran yang sangat banyak. Guru terbebani dengan tugas-tugas administrasi dan kurang fokus pada pembelajaran. Untuk menyikapi hal ini, menteri pendidikan membuat kebijakan baru terkait dengan penyusunan RPP. Komponen dalam kebijakan yang baru tentang rencana pelaksanaan

pembelajaran, terdiri dari (1) Tujuan pembelajaran (2) Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses pembelajaran. (3) Penilaian yang terdiri dari penilaian kognitif, afektif dan sikap. Dengan RPP yang selebar ini, guru diberi kebebasan untuk lebih kreatif dalam mengembangkannya secara efektif dan efisien sesuai dengan situasi yang ada demi perkembangan peserta didik.

- d. Kebijakan dalam penentuan penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi yang lebih luas. Dalam kebijakan ini, penerimaan siswa baru dilaksanakan dengan sistem zonasi yang lebih luas dan fleksibel. Tujuan dari kebijakan zonasi ini adalah untuk meningkatkan akses dan kualitas yang merata dari beberapa daerah yang ada. Pemerataan kualitas pendidikan diharapkan mampu menjadikan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah di Indonesia dengan tujuan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu mengelola sumber daya alam yang ada. Komposisi PPDB adalah jalur zonasi minimal 50%, Jalur Afirmasi minimal 15%, jalur perpindahan 5% sedangkan jalur prestasi adalah sisanya 30 % yang disesuaikan dengan kondisi daerah.

C. GURU PENGGERAK

Indonesia adalah salah satu negara yang menerapkan pola pendidikan dengan Guru Penggerak dalam pembelajaran merdeka belajar. Guru penggerak dalam merdeka belajar merupakan seseorang yang mampu mengarahkan peserta didik dalam mengembangkan dirinya secara menyeluruh, yang memiliki pemikiran yang kritis, dan daya cipta yang kreatif. Dalam pembelajaran merdeka belajar, guru penggerak harus mampu melaksanakan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, sehingga pendidikan profil pelajar pancasila dapat terwujud dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Nadiem Makariem, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI menegaskan bahwa ujung tombak dari transformasi Pendidikan merdeka belajar adalah guru penggerak. Guru penggerak tak hanya mengikuti kurikulum yang ditentukan, melainkan, berupaya mengubah semua aktivitas belajar untuk mencapai atau menjaga standar Profil Pelajar Pancasila, yaitu peserta didik yang beriman, bertakwa, memiliki akhlak yang mulia, lebih kreatif, mampu bergotong royong, memiliki jiwa kebhinekaan yang global, berpikir kritis, serta memiliki kemandirian.

Guru penggerak dalam pembelajaran harus mampu menyeimbangkan tuntutan zaman dalam era modern dalam hal pendidikan karakter sebagai dasar bagi peserta didik untuk tetap bijaksana dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin berkembang, dan memiliki sikap yang kritis dalam menanggapi segala informasi yang ada. Guru penggerak adalah guru yang menggerakkan guru yang lain dalam pembelajaran merdeka belajar untuk mengembangkan potensi peserta didik secara holistic. Guru penggerak dalam merdeka belajar tidak hanya memiliki kemampuan dalam mengelola pembelajaran secara efektif tetapi harus mampu menciptakan hubungan yang baik dengan peserta didik dalam komunitas persekolahan dengan menggunakan teknologi yang ada demi peningkatan mutu pembelajaran serta harus melakukan refleksi dan evaluasi terus menerus dalam perbaikan praktek pembelajaran yang terus menerus. Guru penggerak harus mampu menjadi teladan yang memiliki kemampuan dan daya juang untuk membawa suatu perubahan yang baik dalam ekosistem pendidikan dalam sekolahnya maupun dalam unit sekolah yang lain.

Sesuai dengan program menteri pendidikan dan kebudayaan tentang guru penggerak dalam merdeka belajar, diharapkan para guru mampu untuk bersinergi dan berkolaborasi untuk mencapai perubahan pen-

didikan kearah yang lebih baik dalam meningkatkan mutu pendidikan yang berkualitas dan memiliki daya saing. Guru penggerak harus mampu menggerakkan rekan guru yang lain untuk selalu berinovasi. Sebagai guru dalam Pendidikan merdeka belajar, tentu harus mampu memiliki kompetensi kepribadian yang matang, baik secara moral maupun dalam hal spiritual sehingga menjadi menjadi role model bagi peserta didik dan semua warga sekolah.

Guru penggerak merupakan pemimpin pembelajaran dalam merdeka belajar yang memiliki kemampuan dalam menggerakkan ekosistem pendidikan untuk mewujudkan Pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Menjadi guru penggerak, harus lulus seleksi dan mengikuti program pendidikan dan pelatihan selama sembilan bulan. Hasil yang diharapkan dari pelatihan atau pendidikan dari program guru penggerak adalah:

1. Guru memiliki kemampuan yang mandiri dan merdeka dalam mengembangkan kompetensinya sebagai pengajar sekaligus mampu menggerakkan rekan guru yang lain untuk mampu berinovasi dalam meningkatkan kualitas *output* dari Pendidikan.
2. Dalam pembelajaran merdeka belajar, guru harus mampu berpihak pada peserta didik. Guru harus

mampu menggerakkan peserta didiknya untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimilikinya, untuk mencapai tujuan dari pendidikan sesuai dengan visi sekolah.

3. Guru harus memiliki kemampuan untuk berinovasi dalam mengembangkan kualitas dari sekolahnya. Untuk meningkatkan kualitas dari pendidikan sekolah, guru harus mampu menjalin kerja sama dengan orang tua dan komunitas sehingga bertumbuh sikap mandiri dan memiliki jiwa kepemimpinan.
4. Guru harus memiliki kompetensi kepribadian yang baik. Seorang guru diharapkan memiliki kematangan emosional, baik secara moral maupun spiritual dalam bersikap dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari, sesuai dengan kode etik yang berlaku di masyarakat.
5. Guru harus mampu mengelola pembelajaran dengan berpusat pada peserta didik dengan menciptakan komunikasi yang baik dengan orang tua dari peserta didik.

D. PERAN GURU PENGGERAK DALAM MERDEKA BELAJAR

Revolusi industry 4.0 dan peradaban 5.0 telah memberikan pengaruh terhadap bidang kehidupan, sehingga terjadi disrupsi teknologi dan inovasi, termasuk dalam pendidikan. Guru menghadapi tantangan yang sangat besar di era disrupsi teknologi sekarang karena informasi dan sumber belajar sangat mudah diperoleh. Meskipun demikian tentu peran guru tidak sepenuhnya dapat tergantikan oleh canggihnya teknologi, karena teknologi merupakan hasil dari otak manusia yang bisa salah dan keliru atau bisa disalah gunakan. Teknologi juga tidak bisa diteladani, karena tidak punya perasaan dan tidak punya empati.

Pendidikan selalu terjadi di rumah dan juga di sekolah. Di rumah orang tua adalah guru utama Pendidikan dan di sekolah Guru adalah pendidik utama. Maka benar yang dikatakan nadiem Nadiem (2019) bahwa “Pendidikan merupakan apa yang terjadi di ruang kelas dandi rumah. Teknologi tidak mungkin menggantikan koneksi itu. Harus ada koneksi batin agar *trust* tercipta dan proses belajar mengajar menjadi lebih efektif”. Maka secanggih apapun teknologi tidak dapat menggantikan peran guru karena sentuhan sang guru kepada peserta didik memiliki kekhasan yang tidak bisa diberikan oleh teknologi. Menghadapi

pesatnya perkembangan teknologi sekarang ini, guru dituntut untuk terus belajar dan belajar dalam mengikuti perkembangan teknologi supaya pengetahuan yang dimiliki *terupdate* dan tidak ketinggalan dari peserta didik dalam hal penggunaan dan pemanfaatan teknologi. Dengan kemampuan yang dimiliki, guru harus mampu membimbing dan mengarahkan peserta didik dalam menggunakan teknologi dengan baik dan memiliki manfaat bagi proses pembelajaran. (Mulyasa, 2021:1-2).

Guru harus mampu mengembangkan dirinya dalam mengikuti perkembangan teknologi yang semakin berkembang. Guru harus mampu menerima hal-hal baru dalam setiap perubahan yang ada dengan membimbing dan mengarahkan peserta didik untuk siap menghadapi karakteristik kehidupan yang berbeda khususnya dalam menghadapi era industry 4.0. (Dadang dalam bandungkita.id 2020). Untuk menghadapi era industry 4.0 guru harus mampu mengubah pola pikirnya. Guru harus memiliki visi kedepan dalam mengembangkan pembelajaran yang lebih bermutu. Untuk meningkatkan kualitas peserta didik, tentu salah satu yang paling dibutuhkan adalah kualitas guru sebagai tenaga pengajar dan pendidik. Hanya guru yang memiliki kualitas yang tinggi mampu menciptakan peserta didik yang berkualitas tinggi pula.

Tugas guru tidak sebatas mengajarkan materi kepada peserta didik namun harus mampu memberi teladan bagi yang lain sebagai pemimpin dalam pendidikan dimasa yang akan datang.

Guru penggerak tidak sebatas melaksanakan tugasnya sebagai pengajar dalam menyiapkan perencanaan pembelajaran, menyampaikan materi kepada peserta didik namun harus memiliki kemauan dan kemampuan dalam hal memimpin, berinovasi serta melakukan perubahan (Sirait, S., Murniarti, E., & Sihotang, H. ,2021). Guru penggerak merdeka belajar harus mampu mengajar dan mengelola pembelajaran dengan efektif dengan menggunakan teknologi yang ada, mampu berbahasa Inggris untuk meningkatkan mutu pendidikan serta harus melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran terus menerus (Pendi, Y. O., 2020). Sebagai seorang guru penggerak harus memiliki kemampuan untuk berkreasi secara inovatif dan dengan energik melayani peserta didik serta mampu membangun hubungan yang baik antara guru dan sekolah dengan komunitas yang lebih luas menjadi pembelajar sekaligus agen penggerak perubahan.

Adapun peran dari guru penggerak dalam pendidikan (Sutikno, M. S., 2007; Manizar, E. ,2015)

- 1) Guru menjadi penggerak dalam komunitas belajar bagi rekan guru disekolah dan wilayahnya. Menjadi pelatih bagi rekan guru merupakan peran dari guru penggerak. Diharapkan kehadiran guru penggerak mampu membawa suatu perubahan yang baik bagi guru yang digerakkan khususnya dalam kualitas mengajar peserta didik dan kemandirian guru dalam mengembangkan dirinya secara mandiri.
- 2) Guru penggerak berperan dalam melatih rekan guru dalam mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Guru yang digerakkan oleh guru penggerak harus mampu mendesain dan mengelola pembelajarannya semenarik mungkin sehingga peserta didik termotivasi untuk belajar dan berkreasi sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Motivasi yang ada dalam diri peserta didik memungkinkan dirinya untuk meningkatkan prestasi akademiknya secara mandiri.
- 3) Guru penggerak menjadi agen perubahan dalam hal peningkatan kualitas kepemimpinan peserta didik di sekolah
- 4) Guru penggerak harus mampu menciptakan suatu ruang sebagai wadah untuk berdiskusi dan

berkolaborasi bersama dengan rekan guru dan mereka yang memiliki kepentingan atau pemangku kepentingan baik yang ada di lingkungan pendidikan sekolah maupun di luar sekolah dengan tujuan peningkatan kualitas dalam pembelajaran.

- 5) Guru penggerak harus menjadi pemandu dalam proses pembelajaran yang menciptakan suasana nyaman dan damai dalam ekosistem pembelajaran. Dengan pembelajaran yang nyaman peserta didik terdorong untuk mengembangkan dirinya menjadi pribadi yang bernalar kritis, kreatif, berhati mulia dan memiliki sikap toleransi.
- 6) Mengembangkan diri secara aktif. Guru penggerak harus selalu *upgrade* dirinya dalam mengikuti perkembangan zaman. Guru harus mampu meningkatkan dan mengembangkan kompetensinya sebagai guru secara mandiri.
- 7) Menjadi motivator. Guru merupakan motivator dalam pembelajaran dalam memacu aktivitas belajarnya. Guru penggerak harus menjadi panutan yang mampu mengarahkan dan mengubah perilaku dan karakter peserta didik kearah yang lebih baik. Melahirkan generasi bangsa

yang berkualitas yang memiliki keilmuan dan kedalaman spritual sebagai ujung tombak bagi kemajuan bangsa.

Merdeka belajar merupakan kemerdekaan berpikir baik bagi guru maupun peserta didik dalam pembelajaran. Ide dari gagasan merdeka belajar dilandasi oleh esensi kemerdekaan berpikir untuk menciptakan suasana belajar yang bahagia tanpa dibebani dengan pencapaian skor atau nilai tertentu. Konsep merdeka belajar pertama-tama hendaknya dimulai dalam pola pikir para guru sebelum mereka mengajarkannya kepada peserta didik. Pembelajaran dalam merdeka belajar memberi keleluasaan dan kebebasan bagi guru dalam mendesain pembelajaran yang kontekstual dan bermakna sesuai dengan standar profil pelajar pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, berkebhinekaan global, bernalar kritis dan mandiri.

Pokok-pokok kebijakan merdeka belajar adalah

- (1). Pelaksanaan ujian sekolah yang berstandar nasional berakhir tahun 2020. Pada tahun 2021 pemerintah memberi wewenang kepada sekolah dalam pelaksanaan ujian sekolah dibawah pengawasan pemerintah

daerah.

- (2). Penggantian ujian nasional menjadi penilaian assesmen kompetensi minimum dan survei karakter.
- (3) Penyederhanaan rencana pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dari 13 komponen menjadi 3 komponen.
- (4) Kebijakan dalam penentuan penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi yang lebih luas.

Peran guru penggerak dengan guru biasa (guru tidak penggerak) tidak memiliki perbedaan yang sangat signifikan, karena sama-sama memiliki tugas sebagai guru penggerak dalam pembelajaran untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menarik dan menyenangkan sehingga peserta didik termotivasi untuk mengembangkan potensinya secara mandiri. Namun yang membedakan adalah bahwa guru penggerak memiliki peran khusus dalam merdeka belajar yaitu menjadi guru yang mampu mengelola pembelajaran dengan menggunakan teknologi yang ada dengan melakukan refleksi dan perbaikan terus menerus sehingga peserta didik terdorong untuk meningkatkan prestasi akademiknya secara mandiri. Peserta didik dalam merdeka belajar harus memiliki kemampuan

dalam berpikir kritis, kreatif, bertakwa kepada Tuhan yang maha esa, memiliki akhlak yang mulia, mampu bergotong royong, memiliki kebhinekaan yang global dan memiliki kemandirian.

Di samping tugasnya sebagai pengajar, guru penggerak bertugas menjadi pelatih dan penggerak bagi guru yang lain dalam mengembangkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif yang berpusat pada peserta didik serta mampu menjadi panutan dan pembawa perubahan yang baik dalam ekosistem pendidikan.

METODE BELAJAR PENDIDIKAN MERDEKA

“Penyesuaian metode dan strategi mengajar, termasuk program pendidikan kekinian sesutau yang mutlak dilakukan oleh bangsa ini”

A. METODIKA

Pada bab ini membahas metode pembelajaran dalam pembangunan Pendidikan Merdeka Belajar. Pendidikan Merdeka Belajar merupakan respon terhadap kebutuhan sistem pendidikan pada era Revolusi Industri 4.0. Di era Revolusi Industri 4.0 kebutuhan utama yang ingin dicapai dalam sistem pendidikan atau lebih khusus dalam metode pembelajaran yaitu siswa atau peserta didik yaitu penguasaan terhadap literasi baru. Literasi baru tersebut yaitu. *Pertama*, literasi data. *Kedua*, literasi teknologi. *Terakhir*, literasi manusia.

Selain itu, dalam sistem Pendidikan Merdeka Belajar tetap mengutamakan juga pendidikan karakter. Dan metode yang digunakan beragam, namun dalam sistem pendidikan merdeka belajar metode *Blended Learning* sangat ideal sebagai metode pembelajaran. Metode *Blended Learning* yaitu menggabungkan keunggulan pembelajaran yang dilakukan secara tatap-muka dan secara virtual. Dalam penelitian ini menguatkan teori dari Peter Fisk tentang tren kecenderungan pendidikan pada era industri 4.0.

Era revolusi industri 4.0 memiliki tantangan sekaligus peluang bagi lembaga pendidikan. Syarat maju dan berkembang lembaga pendidikan harus memiliki daya inovasi, dan dapat berkolaborasi. Jika tidak mampu berinovasi dan berkolaborasi, maka akan tertinggal jauh ke belakang. Namun jika sebaliknya, lembaga pendidikan akan mampu menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat memajukan, mengembangkan, dan mewujudkan cita-cita bangsa yaitu membelajarkan manusia. Menjadikan manusia pembelajar bukan hal mudah seperti membalikkan telapak tangan. Lembaga pendidikan harus mampu menyeimbangkan sistem pendidikan dengan perkembangan zaman. Di era Revolusi Industri 4.0, sistem pendidikan diharapkan dapat mewujudkan peserta

didik memiliki keterampilan yang mampu berfikir kritis dan memecahkan masalah, kreatif dan inovatif serta ketrampilan komunikasi dan kolaborasi. Juga keterampilan mencari, mengelola dan menyampaikan informasi serta trampil menggunakan informasi dan teknologi sangat dibutuhkan (Eko Risdianto, 2019 : 4).

Di era Revolusi Industri 4.0 lembaga pendidikan tidak hanya membutuhkan literasi lama yaitu membaca, menulis, dan menghitung, akan tetapi juga membutuhkan literasi baru. Literasi baru yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan dapat dibagi tiga yaitu. *Pertama*, literasi data. Literasi ini merupakan kemampuan untuk membaca, menganalisis dan menggunakan informasi (big data) di dunia digital. *Kedua*, literasi teknologi. Literasi ini memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi (*Coding Artificial Intelligence & Engineering Principles*). *Terakhir*, literasi manusia. Literasi berupa penguatan humanities, komunikasi, dan desain. Berbagai aktivitas literasi tersebut dapat dilakukan oleh siswa dan guru.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nadiem Anwar Makarim saat berpidato pada acara Hari Guru Nasional (HGN) tahun 2019 mencetuskan konsep “Pendidikan Merdeka Belajar”. Konsep ini merupakan respons terhadap kebutuhan

sistem pendidikan pada era revolusi industri 4.0. Nadiem Makarim menyebutkan merdeka belajar merupakan kemerdekaan berfikir. Kemerdekaan berfikir ditentukan oleh guru (Tempo.co, 2019). Jadi kunci utamamenunjang sistem pendidikan yang baru adalah guru.

Nadiem Makarim (2019) mengatakan guru tugasnya mulia dan dan sulit. Dalam sistem pendidikan nasional guru ditugasi untuk membentuk masa depan bangsa namun terlaludiberikan aturan dibandingkan pertolongan. Guru ingin membantu murid untuk mengejar ketertinggalan di kelas, tetapi waktu habis untuk mengejar administrasi tanpa manfaat yang jelas. Guru mengetahui potensi siswa tidak dapat diukur dari hasil ujian, namun guru dikerjar oleh angka yang didesak oleh berbagai pemangku kepentingan. Guru ingin mengajak murid ke luar kelas untuk belajar dari dunia sekitarnya, tetapi kurikulum yang begitu pada menutup petualangan. Guru sangat frustrasi bahwa di dunia nyata bahwa kemampuan berkarya dan berkolaborasi menentukan kesuksesan anak, bukan kemampuan menghafal. Guru mengetahui bahwa setiap murid memiliki kebutuhan berbeda, tetapi keseragaman mengalahkan keberagaman sebagai prinsip dasar birokrasi. Guru ingin setiap murid terinspirasi, tetapi guru tidak

diberi kepercayaan untuk berinovasi (Nadiem Makarim dalam Kemendikbud.go.id, 2019).

R. Suyanto Kusumaryono (2019) menilai bahwa konsep “Merdeka Belajar” yang dicetuskan oleh Nadiem Makarim dapat ditarik beberapa poin (R. Suyanto Kusumaryono dalam Kemendikbud.go.id, 2019). *Pertama*, konsep “Merdeka Belajar” merupakan jawaban atas masalah yang dihadapi oleh guru dalam praktik pendidikan. *Kedua*, guru dikurangi bebannya dalam melaksanakan profesinya, melalui keleluasaan yang merdeka dalam menilai belajar siswa dengan berbagai jenis dan bentuk instrumen penilaian, merdeka dari berbagai pembuatan administrasi yang memberatkan, merdeka dari berbagai tekanan intimidasi, kriminalisasi, atau mempolitisasi guru.

Ketiga, membuka mata kita untuk mengetahui lebih banyak kendala-kendala apa yang dihadapi oleh guru dalam tugas pembelajaran di sekolah, mulai dari permasalahan penerimaan peserta didik baru (input), administrasi guru dalam persiapan mengajar termasuk RPP, proses pembelajaran, serta masalah evaluasi seperti USBN-UN (output). *Keempat*, guru yang sebagai garda terdepan dalam membentuk masa depan bangsa melalui proses pembelajaran, maka menjadi penting untuk dapat menciptakan

suasana pembelajaran yang lebih *heppy* di dalam kelas, melalui sebuah kebijakan pendidikan yang nantinya akan berguna bagi guru dan siswa. *Terakhir*, dicetuskannya konsep “Merdeka Belajar” pada saat Nadiem Makarim memberikan pidato pada acara Hari Guru Nasional (HGN) tersebut, diasumsikan tidak lagi menjadi gagasan melainkan lebih pada sebuah kebijakan yang akan dilaksanakan.

B. REKONSTRUKSI PENDIDIKAN

Kesimpulan dari konsep merdeka belajar merupakan tawaran dalam merekonstruksi sistem pendidikan nasional. Penataan ulang sistem pendidikan dalam rangka menyongsong perubahan dan kemajuan bangsa yang dapat menyesuaikan dengan perubahan zaman. Dengan cara, mengembalikan hakikat dari pendidikan yang sebenarnya yaitu pendidikan untuk memanusiakan manusia atau pendidikan yang membebaskan. Dalam konsep merdeka belajar, antara guru dan murid merupakan subyek di dalam sistem pembelajaran. Artinya guru bukan dijadikan sumber kebenaran oleh siswa, namun guru dan siswa berkolaborasi penggerak dan mencari kebenaran. Artinya posisi guru di ruang kelas bukan untuk menanam atau menyeragamkan kebenaran menurut

guru, namun menggali kebenaran, daya nalar dan kritisnya murid melihat dunia dan fenomena. Peluang berkembangnya internet dan teknologi menjadi momentum kemerdekaan belajar. Karena dapat meretas sistem pendidikan yang kaku atau tidak membebaskan. Termasuk mereformasi beban kerja guru dan sekolah yang terlalu dicurahkan pada hal yang administratif.

Oleh sebabnya kebebasan untuk berinovasi, belajar dengan mandiri, dan kreatif dapat dilakukan oleh unit pendidikan, guru dan siswa. Saat ini antara guru dan siswa memiliki pengalaman yang mandiri termasuk di lingkungan. Dan dari pengalaman yang ada tersebut akan didiskusikan di ruang kelas dan lembaga pendidikan. Adaptasi sistem pendidikan di era Revolusi Industri 4.0 harus distimulasi dengan proses literasi baru tersebut. Siswa/peserta didik pada era industri 4.0 memiliki pengalaman yang padat dengan dunia digital atau visual saat ini. Dan tugas guru, kepala sekolah termasuk lembaga pendidikan dapat mengarahkan, memimpin, dan menggali daya kritis dan potensi siswanya. Dalam proses pembelajaran dibangun ekosistem pendidikan yang memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya nalar, karakter, inovasi, kemandirian, kenyamanan, dan keahlian siswa. Maka merdeka belajar dapat

membentuk sumber daya yang unggul atau berkualitas untuk menuntaskan peluang pendidikan pada era Industri 4.0 dengantujuan kemajuan bangsa dan negara. Berdasarkan uraian latar belakang dan masalah di atas, maka sangat perlu untuk meneliti dan mendalami metode pembelajarandalam sistem pendidikan merdeka belajar. Dalam artikel ini akan menjawab pertanyaan penelitian, *bagaimana metode pembelajaran dalam menunjang pembangunan pendidikanmerdeka belajar?*

C. LOKUS PENDIDIKAN MERDEKA

Pada bagian sesungguhnya menguraikan metode pembelajaran dalam merespon era Revolusi Industri 4.0. Karena pendidikanmerdeka belajar merupakan respon terhadap era baru ini, maka sangat relevan untuk melihat data muktahir dan diskursus para scholar tentang metode pembelajaran. Diskursus oleh scholar yang fokus meneliti di Indonesia akan lebih dominan diuraikan oleh penulis. Namun satu kepastian dalam era Revolusi Industri 4.0 kebutuhan utama yang ingin dicapai dalam sistem pendidikan atau lebih khusus dalam metode pembelajaranyaitu siswa atau peserta didik yaitu penguasaan terhadap literasi baru.

Literasi baru tersebut yaitu. *Pertama*, literasi data. Literasi ini merupakan kemampuan untuk membaca, menganalisis dan menggunakan informasi (big data) di dunia digital. *Kedua*, literasi teknologi. Literasi ini memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi (*Coding Artificial Intelligence & Engineering Principles*). *Terakhir*, literasi manusia. Literasi berupa penguatan humanities, komunikasi, dan desain. Berbagai aktivitas literasi tersebut dapat dilakukan oleh siswa dan guru. Dan sistem dan atau metode pembelajaran pada pendidikan merdeka belajar mempunyai target yang sama. Jika peserta didik atau siswa dapat menguasai literasi baru ini, maka akan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul dalam membangun masa depan Indonesia. Namun selain literasi baru, sistem pendidikan di era Revolusi Industri 4.0 tetap melakukan pembangunan karakter, seperti kejujuran, religius, kerja keras atau tekun, tanggung jawab, adil, disiplin, toleran, dan lain-lain.

Ada beberapa scholar yang telah meneliti sistem pembelajaran dalam merespon era Industri 4.0 di Indonesia. Hamidulloh Ibda dan E Rahmadi (2018), Muhammad Alfarizqi Nizamuddin Ghiffar, Eliza Nurisma, Cucu Kurniasih, dan Caraka Putra Bhakti (2018), Ayik Wulandari, Putri Handayani, dan Dody

Rahayu Prasetyo (2019), Aprilia Riyana Putri dan Muhammad Alie Muzakki (2019), Eko Rusdianto (2019), Dan Delipiter Lase (2019). Scholar di atas dapat memberikan gambaran metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam sistem pendidikan merdeka belajar.

Hamidulloh Ibda dan E Rahmadi (2018) menyebutkan bahwa dalam era Revolusi Industri 4.0 lembaga pendidikan harus mengutamakan literasi baru. Artikel yang ditulis Hamidulloh Ibda dan E Rahmadi menegaskan bahwa lembaga pendidikan tidak cukup menerapkan literasi lama (membaca, menulis, berhitung), tetapi harus menerapkan literasi baru (literasi data, literasi teknologi dan literasi sumber daya manusia atau humanisme). Selain itu, Hamidulloh Ibda dan E Rahmadi juga membahas tantangan dan peluang pendidikan di era Revolusi Industri 4.0.

Penguatan literasi baru, guru menjadi kunci perubahan, yang didukung oleh revitalisasi kurikulum berbasis literasi dan penguatan peran guru yang memiliki kompetensi digital. Guru berperan membangun generasi berkompentensi, berkarakter, memiliki kemampuan literasi baru, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Hamidulloh Ibda dan E Rahmadi mengatakan juga bahwa lembaga pendidikan sebagai dasar penentu kecerdasan intelektual, spiritual, dan

emosional pada anak, harus memperkuat keterampilan literasi abad 21. Mulai aspek kreatif, pemikiran kritis, komunikatif, dan kolaboratif. Lembaga pendidikan harus memperkuat literasi baru dan revitalisasi kurikulum berbasis digital. Revitalisasi kurikulum mengacu pada lima nilai dasar dari peserta didik yang baik, yaitu ketahanan, kemampuan beradaptasi, integritas, kompetensi, dan peningkatan berkelanjutan. Pendidik harus menjadi guru digital, paham komputer, dan bebas dari penyakit akademis (Hamidulloh Ibda dan E Rahmadi, 2018: 1).

Artikel yang ditulis oleh Hamidulloh Ibda dan E Rahmadi hasil penelitiannya di Guru Madrasah Ibtidaiyah, jadi fokusnya hanya pada lembaga pendidikan dasar Islam. Walaupun terfokus di lembaga pendidikan Islam, hasil penelitian ini disepakati oleh semua scholer tentang tantangan dan peluang lembaga pendidikan di era Revolusi Industri 4.0. Lihat juga tulisan Eko Rusdianto (2019), Delipiter Lase (2019). Namun kekurangan dalam artikel ini tidak membahas secara khusus metode pembelajaran yang harus diterapkan oleh lembaga pendidikan dan guru dalam sistem pembelajaran. Sehingga artikel ini masih secara umum.

Muhammad Alfarizqi Nizamuddin Ghiffar, Eliza Nurisma, Cucu Kurniasih, dan Caraka Putra Bhakti

(2018) menjawab kekurangan dari riset Hamidulloh Ibda dan E Rahmadi. Mereka menawarkan model atau metode pembelajaran berbasis Blended Learning dalam era Revolusi Industri 4.0. Model Blended Learning merupakan penggabungan dari metode belajar yang offline (tatap muka, dan lain-lain) dengan metode pembelajaran yang online (e-learning). Secara khusus Muhammad Alfarizqi Nizamuddin Ghiffar, Eliza Nurisma, Cucu Kurniasih, dan Caraka Putra Bhakti menulis artikel ini secara khusus meningkatkan *critical thinking*. Dalam era Revolusi Industri 4.0 merupakan era dimana hidup manusia berorientasi pada teknologi, seperti penguasaan teknologi, dunia maya, big data, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan permasalahan di era Revolusi Industri 4.0 lebih kompleks, dan manusia harus mampu bertahan dan mengatasi permasalahannya (Muhammad Alfarizqi Nizamuddin Ghiffar, Eliza Nurisma, Cucu Kurniasih, dan Caraka Putra Bhakti, 2018: 85).

Namun artikel ini hanya mementingkan dimensi literasi baru yaitu literasi teknologi, data, dan manusia dalam metode pembelajaran *Blended Learning*. Masalah yang kompleks akan menghinggapai manusia kedepan yaitu berkaitan dengan keterampilan dalam penguasaan teknologi, dunia maya, dan big data. Padahal masalah moral dan etika tetap menjadi

masalah utama juga di era Revolusi Industri 4.0 atau masalah dalam pembangunan *critical thinking*. Jadi kekurangan dalam artikel yang ditulis oleh Muhammad Alfarizqi Nizamuddin Ghiffar, Eliza Nurisma, Cucu Kurniasih, dan Caraka Putra Bhakti mengesampingkan aspek atau dimensi pembangunan karakter dalam model pembelajaran. Sedangkan Ayik Wulandari, Putri Handayani, dan Dody Rahayu Prasetyo (2019) menawarkan metode Education Mini Club (EMC) sebagai solusi dalam menghadapi tantangan pendidikan di era Revolusi Industri 4.0. Metode EMC yang ditawarkan oleh Ayik Wulandari, Putri Handayani, dan Dody Rahayu Prasetyo sebagai respon terhadap proses pembelajaran yang kurang sesuai dengan keadaan siswa yang tidak suka dengan metode pembelajaran yang monoton. Dari hasil pengamatannya di MTs Nu Ibtidaul Falah, ada peningkatan hasil belajar dengan menggunakan metode Education Mini Club (EMC). Data tersebut diperoleh dari hasil nilai *pree test* (sebelum di terapkan nya medode Educatin Mini Club (EMC) di dibandingkan dengan nilai setelah di terapkanyametode EMC ini hasil nilai yang diperoleh lebih bagus setelah di terapkannya metode EMC. Sebelum di terapkannya ada beberapa siswa yang belum mncapai Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) yang di tetapkan pihak sekolah setelah di terapkan metode EMC ini siswa

semua telah mencapai KKM (Ayik Wulandari, Putri Handayani, dan Dody Rahayu Prasetyo, 2019 : 51).

Riset yang dilakukan oleh Ayik Wulandari, Putri Handayani, dan Dody Rahayu Prasetyo mengamati Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) dengan menggunakan metode EMC pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam(IPA). Dalam sistem pendidikan di era Revolusi Industri 4.0 murid atau peserta didik diharuskan untuk menguasai literasi baru dan mencapai pembangunan karakter. Agar dapat mencapai kesuksesan pendidikan di era Revolusi Industri 4.0, yang menjadi kunci utamanya adalah guru dengan terlebih dahulu untuk menguasai literasi baru. Oleh sebab itu, dalam riset ini, ketuntasan yang menjadi indikator dalam penilainnya cenderung belum mensyaratkan sepenuhnya tantangan pendidikan di era Revolusi Industri 4.0. Dan penelitian ini sudah cukup memberikan masukan secara metodologi model dan atau metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran di era Revolusi Industri 4.0. Terutama menjawab tantangan model pembelajaran yang terlalu monoton atau tidak adanya inovasi.

Setelah diskursus pembangunan metode pembelajaran dalam pendidikan era Revolusi Industri 4.0, Aprilia Riyana Putri dan Muhammad Alie Muzakki (2019) menyempurnakan dengan menawarkan media

pembelajaran. Dalam metode pembelajaran, media pembelajaran membuat peserta didik (siswa/mahasiswa) akan lebih mudah memahami apa yang di terangkan oleh guru maupun dosen dalam proses pembelajaran baik di dalam kelas maupun diluar kelas. Ada berbagai macam jenis media, seperti mediacetak yaitu; buku, modul, lks dan juga media elektronik yaitu; video, audio, presentasi multimedia dan juga bisa menggunakan konten daring atau online.

Di setiap akhir proses pembelajaran, setiap pendidik melakukan evaluasi pembelajaran untuk mengukur sejauh mana kemampuan siswa dalam memahami apa yang sudah diterangkan dengan berbagai macam cara, bisa dengan memberi kuis, presentasi secara berkelompok, test tertulis dan juga menggunakan media kahoot yaitu dengan cara memasukkan soal pilihan ganda ke aplikasi kahoot yang memang menggunakan fasilitas internet agar handphone siswa bisa terkoneksi langsung untuk menjawab kuis yang disajikan oleh pendidik melalui media kahoot tersebut. Para siswa bisa melihat hasilnya secara langsung dengan urutan peringkat. Ada dua tipe dalam menggunakan kahoot yaitu klasik dan mode.

Pemanfaatan media kahoot untuk menghadapi revolusi industri 4.0 dalam dunia pendidikan sesuai

karena hampir semua pendidik maupun siswa bisa menggunakan media kahoot dan dalam realisasinya mereka juga menggunakan internet sebagai alat untuk mencari referensi tambahan dalam proses belajar maupun mengajar baik untuk mencari informasi materi, audio dan video pembelajaran serta memanfaatkan aplikasi-aplikasi pendidikan yang tersedia secara gratis di play store yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan proses pembelajaran yang mudah di fahami dan menarik serta menyenangkan (Aprilia Riyana Putri dan Muhammad Alie Muzakki, 2019).

Riset yang dilakukan oleh Aprilia Riyana Putri dan Muhammad Alie Muzakki tidak hanya menawarkan media pembelajaran. Namun kahoot tepatnya menjadi instrumen dalam metode pembelajaran. Jadi riset ini sesungguhnya menyimpulkan metode pembelajaran dalam era Revolusi Industri 4.0 yaitu menggunakan metode E-Learning. Walaupun tidak menyebut, e-learning secara langsung, namun aplikasi dan cara kahoot digunakan sebagai pelaksanaan metode pembelajaran e-learning (belajar online). Dari diskursus scholer, metode pembelajaran di era Revolusi Industri 4.0 dapat menentukan kesuksesan pembelajaran. Dan metode yang digunakan beragam, dan dalam artikel ini pemangku kepentingan sedapat

mungkin menentukan metode pembelajaran yang dapat mencapai tujuan dari sistem pendidikan merdeka belajar. Oleh sebabnya, artikel ini menjadi referensi dalam menepurnakan sistem pendidikan merdeka belajar, yang akan dijadikan sistem pendidikan yang baru di Indonesia. Langkah pemerintah untuk meneruskan kebijakan pendidikan merdeka belajar akan merombak kurikulum pendidikan dengan lebih menekankan pada konsep STEAM (*Science, Technology, Engineering, the Arts, dan Mathematics*), menyelaraskan kurikulum pendidikan nasional dengan kebutuhan industri di masa mendatang. Dan metode pembelajaran harus dapat merepresentasikan keberagaman yang ada di Indonesia. Agar capaian tujuan satuan pendidikan, yaitu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul. Jika pendidikan merdeka belajar sudah benar-benar program yang baik, maka disini dibutuhkan ketegasan dan keberanian untuk mewujudkan dan menjalankan program program tersebut dengan baik. Jangan sampai program yang sudah tersusun dengan baik namun dalam pelaksanaannya hanya sebatas formalitas belaka (Eko Rusdianto, 2019 : 4).

D. BLENDED LEARNING DAN ORIENTASI BELAJAR

Berdasarkan sembilan tren atau kecenderungan terkait dengan pendidikan di era Revolusi Industri 4.0 yaitu antara lain. *Pertama*, belajar pada waktu dan tempat yang berbeda. *Kedua*, pembelajaran individual. *Ketiga*, siswa memiliki pilihan dalam menentukan bagaimana mereka belajar. *Empat*, pembelajaran berbasis proyek. *Lima*, pengalaman lapangan. *Enam*, interpretasi data. *Tujuh*, penilaian beragam. *Delapan*, keterlibatan siswa. *Terakhir*, mentoring. *Blended Learning* merupakan metode pembelajaran yang digunakan dalam sistem pendidikan merdeka belajar. *Blended learning* disimpulkan juga dari berbagai riset dan perdebatan scholar dalam merespon sistem dan metode pembelajaran di era Revolusi Industri 4.0. Secara khusus, riset yang dilakukan oleh Muhammad Alfarizqi Nizamuddin Ghiffar, Eliza Nurisma, Cucu Kurniasih, dan Caraka Putra Bhakti (2018) akan disempurnakan dalam artikel ini.

Menerapkan konsep cara belajar yang aktif, inovatif, dan nyaman harus dapat mewujudkan peserta didik sesuai kebutuhan zaman atau era industri 4.0. Demi tercapainya tujuan pendidikan yaitu mewujudkan murid atau peserta didik yang berfikir kritis dan memecahkan masalah, kreatif dan

berinovasi, terampil berkomunikasi dan berkolaborasi, dan berkarakter. Oleh sebab itu, dalam rencana pelaksanaan kegiatan belajar harus mampu melewati tantangan dan memanfaatkan peluang pendidikan di era Revolusi Industri 4.0. Dan guru menjadi kunci keberhasilan sistem pendidikan, oleh sebab itu harus dapat beradaptasi dengan sistem pendidikan yang baru agar memiliki kompetensi dan keterampilan. Penguatan literasi baru pada guru sebagai kunci perubahan, termasuk revitalisasi kurikulum berbasis literasi dan penguatan peran guru yang memiliki kompetensi digital. Maka metode *Blended Learning* sangat ideal sebagai metode pembelajaran di sistem pendidikan merdeka belajar. Karena antara penguasaan kompetensi literasi baru, sistem pengajaran harus tetap membangun karakter dengan mengkombinasikan metode-metode pengajaran yang konvensional, seperti tatapmuka atau yang ditawarkan oleh Ayik Wulandari, Putri Handayani, dan Dody Rahayu Prasetyo (2019) yaitu metode Education Mini Club (EMC) sebagai respon terhadap proses pembelajaran monoton.

Blended Learning pada dasarnya merupakan gabungan keunggulan pembelajaran yang dilakukan secara tatap-muka dan secara virtual (Sevima.com: 2018). *Blended learning* adalah sebuah kemudahan

pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pengajaran, dan gaya pembelajaran, memperkenalkan berbagai pilihan mediadialog antara guru dengan peserta didik atau murid. *Blended learning* juga sebagai sebuah kombinasi pengajaran langsung (*face-to-face*) dan pengajaran online, tapi lebih daripada itu sebagai elemen dari interaksi sosial. *Blended learning* merupakan pembelajaran yang didukung oleh kombinasi efektif dari cara penyampaian, cara mengajar dan gaya pembelajaran yang berbeda serta ditemukan pada komunikasi terbuka di antara seluruh bagian yang terlibat dalam pendidikan. Sedangkan untuk keuntungan dari penggunaan *blended learning* sebagai sebuah kombinasi pengajaran langsung (*face-to-face*) dan pengajaran online, dan sebagai elemen dari interaksi sosial yaitu: (1) adanya interaksi antara pengajar dan murid/peserta didik; (2) pengajaran pun bisa secara online ataupun tatap muka langsung; (3) *blended learning = combining instructional modalities* (ordelivery media); (4) *blended learning = combining instructional methods* (Sevima.com: 2018). Manfaat dari penggunaan *e-learning* dan juga *blended learning* dalam dunia pendidikan saat ini adalah *e-learning* memberikan fleksibilitas dalam memilih waktu dan tempat untuk mengakses pelajaran.

Guru-guru dan peserta didik dalam pelaksanaan pengajaran nanti tidak perlu mengadakan perjalanan menuju sekolah, *e-learning* bisa dilakukan dari mana saja baik yang memiliki akses ke Internet ataupun tidak. E-learning memberikan kesempatan bagi guru-guru dan siswa/peserta didik secara mandiri memegang kendali atas keberhasilan tujuan pendidikan. Siswa/peserta didik bebas menentukan kapan akan mulai, kapan akan menyelesaikan, dan bagian mana dalam satu modul yang ingin dipelajarinya terlebih dulu. Seandainya, setelah diulang masih ada hal yang belum ia pahami, pembelajar bisa menghubungi guru melalui email, chat atau ikut dialog interaktif pada waktu-waktu tertentu. Bisa juga membaca hasil pelajaran di *message board* yang tersedia di LMS (*Learning Management System*) yang akan dibuat dalam sistem e-learning.

Jadi metode *Blended Learning* akan mempercepat terjadinya perubahan sosial dan budaya dalam sistem pendidikan. Karena metode pembelajaran ini akan memenuhi kebutuhan pada pengajaran di era Revolusi Industri 4.0. Dalam metode *Blended Learning* akan transformasi pendidikan, di mana ada penerimaan cara-cara baru atau suatu perbaikan dalam cara suatu masyarakat memenuhi kebutuhan – kebutuhan

di dunia pendidikan. Seperti guru dapat berperan membangun generasi berkompetensi, berkarakter, memiliki kemampuan literasi baru, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Dengan cara bebas berinovasi dengan para siswa, dan dapat lebih nyaman dalam sikap hidup, tindakan, keputusan, dan pendekatan terhadap segala jenis pengetahuan yang didasari dengan penuh kegembiraan.

Termasuk bebas dan merdeka dalam menggunakan semua media pembelajaran. Baik media cetak yaitu; buku, modul, LKS. Maupun media elektronik yaitu; video, audio, presentasi multimedia dan juga bisa menggunakan konten daring atau online. Media pembelajaran tersebut memenuhi kecenderungan pendidikan di era Revolusi Industri 4.0 yang disebut oleh Peter Fisk. Kemudian akselerasi terhadap penuntasan kompetensi utama dalam pembelajaran yaitu literasi baru dapat dipenuhi segera. Dan dalam metode *Blended Learning* tetap dapat membangun pendidikan karakter. Artinya selain, mewujudkan siswa atau peserta didik yang mampu berfikir kritis atau memecahkan masalah, kreatif dan inovatif, dapat berkomunikasi dan berkolaborasi, dan berkarakter. Namun juga dapat mewujudkan siswa dan peserta didik yang jujur, relegius, kerja keras/tekun, tanggung jawab, adil, disiplin, toleran, dan lain-lain. Singkatnya

dalam metode ini, dapat mewujudkan tujuan sistem pendidikan merdeka belajar yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul.

Pembangunan pendidikan merdeka belajar dalam telaah metode pembelajaran yaitu sistem dan pengajarannya harus memenuhi kecenderungan dalam pendidikan di era Revolusi Industri 4.0. Di era Revolusi Industri 4.0 kebutuhan utama yang ingin dicapai dalam sistem pendidikan atau lebih khusus dalam metode pembelajaran yaitu siswa atau peserta didik yaitu penguasaan terhadap literasi baru. Literasi baru tersebut yaitu. *Pertama*, literasi data. *Kedua*, literasi teknologi. *Terakhir*, literasi manusia. Dan sistem dan atau metode pembelajaran pada pendidikan merdeka belajar mempunyai target yang sama. Jika peserta didik atau siswa dapat menguasai literasi baru ini, maka akan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul dalam membangun masa depan Indonesia. Namun selain literasi baru, sistem pendidikan merdeka belajar tetap melakukan pembangunan karakter pada peserta didik, seperti kejujuran, religius, kerja keras/tekun, tanggung jawab, adil, disiplin, toleran, dan lain-lain.

Tujuannya tentu ingin mencapai tujuan pendidikan yaitu mewujudkan murid atau peserta didik yang berfikir kritis dan memecahkan masalah, kreatif dan

berinovasi, terampil berkomunikasi dan berkolaborasi, dan berkarakter. Oleh sebab itu, dalam rencana pelaksanaan kegiatan belajar harus mampu melewati tantangan dan memanfaatkan peluang pendidikan di era Revolusi Industri 4.0. Dan guru menjadi kunci keberhasilan sistem pendidikan merdeka belajar, oleh sebab itu harus dapat beradaptasi dengan sistem pendidikan yang baru agar memiliki kompetensi dan keterampilan. Penguatan literasi baru pada guru sebagai kunci perubahan, termasuk revitalisasi kurikulum berbasis literasi dan penguatan peran guru yang memiliki kompetensi digital. Maka metode *Blended Learning* sangat ideal sebagai metode pembelajaran di sistem pendidikan merdeka belajar. Metode pembelajarannya yaitu menggabungkan keunggulan pembelajaran yang dilakukan secara tatap-muka dan secara virtual.

PENDIDIKAN TAMAN SISWA DASAR KEBIJAKAN DI INDONESIA

“Taman siswa menjadi sejarah ide dan gagasan bahwa bangsa ini mampu membuat sekolah”

A. PENDIDIKAN YANG MEMANUSIAKAN

Pendidikan berasal dari kata didik, mendidik berarti memelihara dan membentuk latihan Sugihartono (2007: 3). Pendidikan memiliki arti yang sangat penting dalam membentuk jati diri dan pengetahuan peserta didik. Pendidikan sendiri merupakan garda terdepan dalam pembentukan masyarakat yang berkualitas dan berintegritas tinggi. Oleh sebab itu, kualitas dan kuantitas pendidikan harus dikelola dengan baik yang kedepannya dapat mempengaruhi kualitas masyarakat yang nantinya akan berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan negara.

Pada hakikatnya, pendidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia, karena

pendidikan sendiri adalah media dalam membina kepribadian dan mengembangkan potensi yang dimiliki manusia. Kualitas manusia sebagai makhluk multi dimensional sangat ditentukan oleh proses pendidikannya. Hal ini berarti bahwa proses yang baik dan benar akan berimplikasi secara signifikan terhadap kualitas outputnya. Secara alami pendidikan merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia.

Perlu disadari bahwa keadaan yang tercipta dalam masyarakat pada saat ini merupakan hasil dari pendidikan dan pembelajaran yang diperoleh dari orang tua dan pendidik pada masa lampau, sehingga dapat disimpulkan bahwa mendidik anak sama halnya dengan mendidik bangsa ini. Oleh karena itu perlu diperhatikan lagi dengan seksama bagaimana proses pendidikan yang akan dilaksanakan terhadap peserta didik dimasa sekarang yang hasilnya akan menentukan kemana arah bangsa ini melangkah (Dewantara, 1977: 3).

Untuk mendapatkan sistem pendidikan yang bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara maka sistem pendidikan yang diterapkan haruslah relevan dengan keadaan yang akan dihadapi oleh bangsa ini. Maka dari itu sebagai pendidik haruslah memahami bagaimana sifat dan perilaku masyarakat yang sedang dihadapi, agar nantinya sistem pendidikan

yang sedang diterapkan dapat berjalan dengan baik (Dewantara, 1977: 3).

Para pendidik harus memahami dengan betul bahwa Negara Indonesia ini terbentuk tidak hanya oleh satu golongan saja, akan tetapi terbentuk atas berbagai suku, golongan, ras dan pemeluk agama yang masing-masing kelompok memiliki perbedaan dalam hal pandangan dan keyakinan dalam bermasyarakat. Akan tetapi dengan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat, hal ini mampu menciptakan satu keadaan atau satu kondisi yang dapat membentuk satu harmoni bermasyarakat dalam satu naungan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* sehingga mereka memahami bahwa perbedaanlah yang menciptakan negara ini. Proses pendidikan di sekolah sejatinya adalah bagaimana mengantarkan para peserta didik untuk menjadi warga negara yang baik serta dapat berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitarnya (Birsyada, 2016: 1).

Ki Hadjar Dewantara (1977: 3) menyatakan bahwa pengaruh pendidikan pada umumnya mampu memerdekan manusia atas hidupnya secara lahir, sedangkan merdekanya hidup secara batin terdapat dalam pendidikan. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya baik lahir maupun batin tidak tergantung pada orang lain akan tetapi bersandar atas kekuatan yang dia miliki.

B. HUMANISME METODE PENDIDIKAN KI HADJAR DEWANTARA

Filsafat pendidikan humanisme merupakan suatu bentuk filsafat pendidikan yang memandang bahwa manusia memiliki satu kehidupan yang diisi dengan kreatifitas dan kebahagiaan, yang tidak membutuhkan persetujuan ataupun dukungan dari entitas supernatural manapun, dimana entitas ini sama sekali tidak ada (Lamont, 1997: 15). Pendidikan dengan mengedepankan filsafat humanisme memandang proses belajar bukan hanya sebagai sarana transformasi pengetahuan saja, tetapi lebih dari itu, proses belajar merupakan bagian dari mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan (Baharuddin & Esa Nur Wahyuni, 2007: 142-143). Filsafat humanisme memandang bahwa belajar bukan sekadar pengembangan kualitas kognitif saja, tetapi juga dalam pembelajarannya menekankan pada pentingnya emosi atau perasaan, komunikasi yang terbuka, dan nilai-nilai yang dimiliki setiap peserta didik.

Pada prinsipnya pendidikan harus bebas nilai (*value free*) dan mampu membebaskan masyarakat dari kungkungan ketidakmampuan dirinya. Josep Situmorang (dalam Surajiyo, 2005: 84) menyatakan bahwa faktor sebagai indikator bahwa ilmu itu bebas nilai adalah ilmu harus bebas dari pengaruh eksternal

seperti faktor ideologis, agama, budaya, dan sosial kemudian diperlukan adanya kebebasan usaha ilmiah agar otonom ilmu terjamin serta dalam pelaksanaan penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dianggap menghambat kemajuan ilmu pengetahuan.

Ki Hadjar Dewantara (1977: 4) mengemukakan bahwa dalam pendidikan harus senantiasa diingat bahwa kemerdekaan atau kebebasan memiliki tiga macam sifat yaitu: berdiri sendiri (*zelfstanding*), tidak tidak bergantung pada orang lain (*onafhankelijk*) dan dapat mengatur dirinya sendiri (*vrijheld, zelfbeschikking*). Kebebasan yang diusung dalam pendidikan humanis adalah kebebasan yang bebas nilai. Kebebasan dalam segala aspek kehidupan. Pendidikan bertujuan untuk mengajar, memanusiakan, dan mengarahkan anak didik agar mencapai akhir sempurna (A. Sudiarja dalam Yamin, 2010: 155).

Pendidikan selalu memiliki tujuan yang berkaitan dengan apa yang akan dicapai. Pendidikan humanis bertujuan agar dalam proses pembelajaran menjadikan peserta didik dan menempatkan peserta didik sebagai manusia yang bebas. Bebas menentukan dan bebas melakukan hal positif. Apapun yang dilakukan oleh peserta didik dalam pandangan pendidikan positif yang bersifat humanis itu dapat dibenarkan sepanjang

tidak mengekang hak peserta didik sebagai individu yang bebas.

Dalam berbagai tulisan tentang pendidikan yang ditulis oleh Ki Hadjar Dewantara, pendidikan harus dimulai dari persamaan persepsi pemangku pendidikan tentang mendidik itu sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara mendidik dalam arti yang sesungguhnya adalah proses memanusiakan manusia (humanisasi), yakni pendidikan yang membina peserta didik untuk tumbuh dan berkembang baik lahir maupun batin sesuai dengan kodratnya, metode pendidikan yang diterapkan inilah yang disebut *Among-method*. Selain itu dalam proses berlangsungnya pendidikan, guru tidak hanya memberikan pengetahuan yang penting dan baik saja kepada peserta didik akan tetapi guru juga harus mampu memberikan pengajaran mengenai pendidikan karakter yang dapat menumbuhkan minat untuk mengeksplorasi pengetahuan yang diperoleh dimana pengetahuan tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Dewantara, 1977: 48).

Sistem *Among* yang diterapkan Ki Hadjar Dewantara dalam Pendidikan Taman Siswa bertujuan untuk menekankan bahwa guru dapat menjadi pamong bagi siswasesuai dengan fase pertumbuhan dan perkembangan siswa, serta menjadikan peserta didik

terbebas dari tekanan-tekanan dan paksaan yang akan membebani dan menghilangkan prinsip kemerdekaan dalam pendidikan (Fauziah, 03 Juli 2017). Dalam Oendang-Oendang Taman Siswa, B. Sendi Pendidikan, Pasal 7 diterangkan bahwa dalam Sistem *Among* (*Amongsteem*) memiliki dua hal pokok yang mendasari dalam pelaksanaannya, yang pertama adalah kemerdekaan dimana kemerdekaan ini digunakan sebagai syarat untuk menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batin peserta didik untuk mampu mewujudkan kemerdekaan dalam dirinya, dan yang kedua adalah kodrat alam yang dimana hal ini merupakan syarat untuk mencapai kemajuan perkembangan peserta didik dengan baik dan cepat (Persatuan Perguruan Taman Siswa, 1922).

Salah satu bentuk dari Sistem *Among* adalah kewajiban para guru dalam berlaku sebagai pemimpin yang mampu mempengaruhi dan memberikan dorongan dari belakang kepada para peserta didik, membangkitkan pemikiran-pemikiran dan memberikan motivasi untuk berkembang kepada peserta didik apabila berada ditengah-tengah mereka, dan mampu memberikan contoh yang baik dan menjadi inspirasi ketika berada didepan peserta didik (Surjomihardjo, 1986: 29). Asas tersebut sangat populer di kalangan masyarakat sehingga semboyan *Tut Wuri Handayani*

yang artinya di belakang memberi dorongan, dimana sampai sekarang semboyan tersebut digunakan sebagai lambang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Semboyan ini memiliki bentuk lengkap *Ing Ngarso Sung Tuladha (di depan memberikan contoh), Ing Madyo Mangun Karso (di tengah memberikan semangat), Tut Wuri Handayani (di belakang memberikan dorongan)* (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978: 5)

C. METODE MONTESSORI-TAGORE

Dalam pelaksanaan proses pendidikan di Taman Siswa tidak hanya menitik beratkan pada bagaimana guru seharusnya mengajar tetapi bagaimana metode belajar yang akan diterapkan dapat sesuai dengan asas kemanusiaan dan asas kemerdekaan dalam berpikir serta sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Ki Hadjar Dewantara menjelaskan mengenai metode yang ingin ditempuhnya adalah Metode Montessori-Tagore (Surjomihardjo, 1986: 28).

Maria Montessori dengan *Montessori-schoolen*-nya benar-benar memelihara suasana kemerdekaan dan menghormati individualitas dalam usaha pendidikan (Surjomihardjo, 1986: 74). Montessori menghargai kecakapan anak-anak terutama untuk men-

stimulasi dan mengoptimalkan perkembangan kognitif dan panca-inderanya serta meniadakan segala bentuk paksaan, dan hukuman. Tetapi hal ini dikritik oleh Ki Hadjar Dewantara, karena dalam metode tersebut semata-mata hanya mengembangkan psikologis namun sama sekali tidak menyentuh batin dan jauh dari tujuan religius peserta didik (Dewantara, 1977: 273).

Sedangkan dalam metode pendidikan yang diterapkan Rabindranath Tagore cenderung membentuk suatu sistem dimana pendidikan semata-mata digunakan sebagai alat untuk memperkokoh kehidupan kemanusiaan yang sedalam-dalamnya, yaitu sisi religius. Tetapi dalam sistem pendidikan sangat kurang dalam menekankan masalah-masalah kognitif dan psikologis (Surjomihardjo, 1986: 75). Melihat dua hal tersebut Ki Hadjar Dewantara berusaha menggabungkan kedua metode agar saling menutupi kekurangannya sehingga metode yang akan ditempuhnya tidak hanya mengembangkan kemampuan kognitif dan psikologis peserta didik tetapi mampu mengembangkan sisi religiusitas dan batin dari peserta didik, serta peserta didik berperan sebagai pelaku utama (*student center*) yang memaknai proses pengalaman dalam proses belajarnya sendiri. Sehingga peserta didik mendapatkan kemampuan untuk memahami

potensi diri, mengembangkan potensi dirinya secara positif dan meminimalkan potensi diri yang bersifat negatif.

Hal ini perlu disadari bahwa pendidikan yang hanya menekankan pada aspek intelektual belaka hanya akan menjauhkan peserta didik dari masyarakatnya. Namun, ternyata pendidikan sampai sekarang ini hanya menekankan pada pengembangan daya cipta, dan kurang memperhatikan pengembangan olah rasa dan karsa. Jika hal ini berlanjut terus maka akan menjadikan manusia kurang humanis atau manusiawi. Kesatuan kebangsaan terwujud sebagai kesatuan negara yang merdeka, akan tetap kemerdekaan dalam berpolitik akan tidak bermakna apabila tidak berisikan hidup dan penghidupan yang merdeka. Dan hidup serta penghidupan itulah yang sepenuhnya merupakan kebudayaan bangsa yang harus dipertahankan, oleh karena itu pendidikan dan pengajaran termasuk dalam usaha untuk menumbuhkan nilai-nilai kebudayaan bagi suatu bangsa. (Dewantara, 1977: 185)

Bagi Ki Hajar Dewantara, para guru hendaknya menjadi pribadi yang bermutu dalam kepribadian dan kerohanian, baru kemudian menyediakan diri untuk menjadi sesesok figur yang memberikan pendidikan dan segala pengalaman yang dia dapatkan yang dapat berpengaruh besar terhadap tumbuh kembangnya

peserta didik. (Dewantara, 1977: 26) Dengan kata lain, yang diutamakan sebagai guru pertama-tama adalah fungsinya sebagai model atau figur keteladanan, baru kemudian sebagai fasilitator atau pendidik (Surjomi-hardjo, 1986: 29).

Jadi, sudah saatnya pendidikan di Indonesia kembali pada esensi yang diperjuangkan oleh bapak pendidikan nasional bahwa idealnya pendidikan hendaknya memperkaya setiap individu tetapi perbedaan antara masing-masing pribadi harus tetap dipertimbangkan. Tujuan akhir dari pendidikan sendiri adalah menciptakan peserta didik menjadi seorang manusia yang sempurna dan guru hendaknya rela mengorbankan kepentingan-kepentingan pribadinya demi kepentingan para peserta didiknya. Peserta didik yang diharapkan adalah peserta didik yang berkepribadian merdeka, keselarasan antara jasmani dan rohani, menjadi anggota masyarakat yang berguna, dan bertanggungjawab atas kebahagiaan dirinya dan kesejahteraan orang lain (Indrakusuma, 1973: 69).

Pendidikan harus dapat menjadi wadah yang bukan hanya mengembangkan kemampuan daya cipta (kognitif) namun secara karsa (afektif) dan karya (psikomotorik) harus proposional karena tujuan pendidikan adalah keberhasilan peserta didik baik menjadi manusia (individu) maupun anggota masyarakat

(manusia sosial) (Indrakusuma, 1973: 71). Pendekatan humanistik menganggap peserta didik sebagai *a whole person* atau orang sebagai suatu kesatuan. Dengan kata lain, pembelajaran tidak hanya mengajarkan materi atau bahan ajar yang menjadi sasaran, tetapi juga membantu peserta didik mengembangkan diri mereka sebagai manusia. Keyakinan tersebut telah mengarahkan munculnya sejumlah teknik dan metodologi pembelajaran yang menekankan aspek humanistik pembelajaran (Azies, 1996: 23)

Dalam metodologi semacam itu, pengalaman peserta didik adalah yang terpenting dan perkembangan kepribadian mereka serta penumbuhan perasaan positif dianggap penting dalam pembelajaran mereka. Pendekatan humanistik mengutamakan peranan peserta didik dan berorientasi pada kebutuhan. Menurut pendekatan ini, materi atau bahan ajar harus dilihat sebagai suatu totalitas yang melibatkan orang secara utuh, bukan sekedar sebagai sesuatu yang intelektual semata-mata. Seperti halnya guru, peserta didik adalah manusia yang mempunyai kebutuhan emosional, spritual, maupun intelektual. Peserta didik hendaknya dapat membantu dirinya dalam proses belajar mengajar. Peserta didik bukan sekedar penerima ilmu yang pasif (Purwo, 1989: 212).

D. ANTARA KI HADJAR DEWANTARA DENGANNADIEM ANWAR MAKARIM

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim, menetapkan empat program pokok kebijakan Pendidikan Merdeka Belajar, dimana salah satunya adalah dalam pelaksanaan Ujian Nasional akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter. (Makarim, 2019).

Nadiem Makarim (Tempo, 2019) menjelaskan bahwa nantinya guru sebagai pemicu terlaksanya kemerdekaan berpikir pada peserta didik sehingga guru dalam melaksanakan proses penilaian kompetensi peserta didik dan menerjemahkan kompetensi dasar pada pembelajaran harus melalui proses interpretasi, refleksi dan proses pemikiran secara mandiri supaya dengan terjadinya proses refleksi dan meta kognitif pada guru maka barulah terjadi proses refleksi dan meta kognitif pada peserta didik.

Hal ini pula juga sejalan dengan apa yang dilakukan Ki Hadjar Dewantara ketika menjabat sebagai Menteri Pendidikan Republik Indonesia yang pertama, telah menerbitkan pokok-pokok pikiran dalam Pembaruan Pendidikan Nasional sebagai bentuk implementasi gagasan dasar yang bertujuan menciptakan subsistem pendidikan yang mampu menunjang secara kritis sistem pendidikan nasional dalam pelaksanaan pembangunan bangsa secara menyeluruh pada masa itu. Guru tidak lagi sebagai orang yang hanya ahli mengajar di depan kelas, tetapi di dalam masa pembagunan sekarang ini guru juga harus memiliki kemampuan-kemampuan lain sebagai pengajar, pendidik, pengawas kegiatan peserta didik, pembimbing dan pemilik wawasan yang tepat mengenai kepustakaan yang relevan dengan tugasnya. (Surjomihardjo, 1986: 208).

Pada intinya baik Ki Hadjar Dewantara maupun Nadiem Anwar Makarim sendiri memusatkan pentingnya pendidikan nasional ini kepada guru, guru dituntut untuk lebih sekedar mengajar yang baik tetapi harus memiliki kemampuan-kemampuan yang mampu mengembangkan pola pikir peserta didik, tanpa harus melakukan pemaksaan akan tetapi melakukan bimbingan agar ketika peserta didik mulai keluar dari konteks yang dipelajari, guru mampu membawa

kembali ke konteks yang benar. Pendidikan merdeka tidak akan berjalan dengan baik apabila hanya mengandalkan kecakapan siswa dalam memproses pengetahuan afektif, kognitif dan psikomotorik tetapi harus diimbangi dengan kecakapan guru dalam menginterpretasi kurikulum dan materi yang disesuaikan dengan keadaan peserta didik maupun keadaan masyarakat di sekitar.

Pada akhirnya inti dari mendidik dalam arti yang sesungguhnya adalah membina peserta didik untuk tumbuh dan berkembang baik lahir maupun batin sesuai dengan kodratnya. Pendidikan merdeka yang dalam prosesnya mengedepankan humanisme tidak akan berjalan selaras tanpa adanya peran penting dari guru itu sendiri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Makarim meluncurkan program belajar dengan konsep Pendidikan Merdeka, konsep yang digagas mengarah pada kebebasan peserta didik dalam berpikir kritis dan cerdas. Terwujudnya konsep *Ing Ngarso Sung Tuladha, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani* diharapkan mampu memenuhi tujuan dari proses Pendidikan Merdeka yang secara efektif bermanfaat bagi Otoritas Kebijakan Pendidikan, Pendidik, Peserta didik, dan Bimbingan Konseling di Indonesia.

P

ENDIDIKAN MERDEKA DI INDONESIA

“Merdeka memiliki anonym untuk merdeka disemua bidang, termasuk pendidikan, harus lepas dari cengkraman kepentingan”

A. KEBEBASAN BERPIKIR DARI TEKANAN BIROKRATIF

Ki Hadjar Dewantara mengungkapkan bahwa dampak mengajar adalah membantu membebaskan manusia secara eksontris, sedangkan pendidikan membebaskan manusiasecara esontris (Dewantara, 1977). Pendidikan merupakan pilar utama untuk membebaskan peserta didik dalam proses yang berkelanjutan sehingga terjadi perubahan menuju potensi eksternal dan internal yang ideal sebagai satu kesatuan yang ingin dicapai. Ki Hadjar Dewantara menekankan pencapaian nilai- nilai spiritual sebagai tujuan dari nilai-nilai pendidikan yang sangat signifikan (Thalib, 2017). Oleh karena itu pendidikan adalah pembinaan yang diberikan kepada peserta didik, dilaksanakan secara terus menerus, dengan berbagai potensi kecerdasan, agar peserta

didik mampu mandiri jasmani dan rohaninya, mampu secara bebas (mandiri) mengembangkan potensi-potensi unik dengan fitrahnya (kodrat alam) masing-masing.

Keunikan manusia dengan kecerdasan berbeda-beda sesuai dengan kodratnya dijelaskan oleh Howard Gardner dengan teori *multiple intelligence*. Teori ini familiar bagi guru karena memberikan keyakinan bahwa setiap peserta didik memiliki keunggulan. Setiap orang adalah unik dan memiliki cara unik dalam berkontribusi dalam kegidupan masyarakat. Kecerdasan linguistik, logis, intrapersonal, interpersonal, musik, visual, kinestetik, natural, dan eksistensial merupakan contoh *multiple intelligence*. Kecerdasan ini adalah kemampuan untuk memecahkan masalah dan menciptakan produk yang bermanfaat bagi satu atau lebih budaya dalam masyarakat (Gardner, 2011). *Multiple intelligence* harus diwujudkan karena tidak dapat diciptakan sendiri. Kecerdasan ini merupakan potensi alam menurut kehendak Tuhan.

Agar pengaruh bawaan dan lingkungan berkembang secara optimal, maka perlu dilakukan secara berkesinambungan. Menurut progresivisme, manusia mampu mengembangkan dan memurnikan lingkungan dengan kecerdasannya melalui metode ilmiah untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan, secara individu maupun sosial (Gutek, 1997). Progresivisme memandang bahwa lingkungan,

baik manusia maupun non-manusia, selalu berubah. Ini karena kemampuan manusia untuk mempelajari hal-hal baru, memprediksi dan mengantisipasi yang akan terjadi di masa depan. Dalam dunia pendidikan, progresivisme berpendapat bahwa siswa harus diberi kebebasan dan kemandirian untuk melakukan eksperimen. Mereka diharapkan dapat secara mandiri menemukan solusi yang disukai untuk setiap masalah di masa depan dengan menggabungkan kompetensi, keterampilan diri, dan hasil belajar (Barnadib, 2002).

Konsep pendidikan merdeka Ki Hadjar Dewantara tidak hanya kebebasan berpikir, tetapi juga implementasi nilai-nilai luhur yang diwarisi oleh ajaran Ki Hadjar Dewantara. Implementasi konsep pendidikan merdeka Ki Hadjar Dewantara dapat menjadi alternatif era pembelajaran saat ini, dengan mencermati kondisi belajar mengajar yang dilakukan di sekolah hingga perguruan tinggi (Subekhan & Annisa, 2018). Hal ini dilakukan dalam upaya menghadapi tantangan, mengantisipasi dampak, dan membangkitkan harapan masyarakat global dengan menggambarkan budaya asli Indonesia (Abdullah, 2019).

Sebagai pahlawan nasional dan pendiri pendidikan nasional, gagasan Ki Hadjar Dewantara tentang sistem pendidikan melalui sistem *among* telah banyak dipelajari dan diterapkan di lembaga pendidikan di seluruh Indonesia. Karena pemikiran strategisnya

yang komprehensif tentang pendidikan di Indonesia dengan mengadaptasi budaya asli Indonesia, hampir semua aspek kehidupan selalu berorientasi pada pemikirannya, oleh karena itu, bangsa Indonesia tidak akan pernah melupakan jasa-jasanya (NTowaf, 2016). Ini menempatkannya pada tingkat yang sama dengan pendidik terkenal dunia seperti John Dewey, Montessori, Frobel, Peztaozzi, dan Rabindranath Tagore.

Konsep Ki Hadjar Dewantara tentang pendidikan merdeka yang selama ini dijadikan acuan bagi Pendidikan Nasional, akhirnya mengilhami kebijakan pemerintah, bahwa kebebasan belajar harus melayani kebebasan dan otonomi lembaga pendidikan, yaitu bebas dari birokratisasi, guru dan dosen bebas dari birokrasi yang rumit, dan mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih keterampilan yang sesuai dengan potensinya.

Salah satu kebijakan pemerintah yang terilhami pemikiran dan konsep pendidikan merdeka Ki Hadjar Dewantara adalah kebijakan merdeka belajar. Konsep merdeka belajar bermaksud untuk mengembalikan sistem pendidikan nasional kepada undang-undang untuk memberikan kemerdekaan kepada sekolah dalam menginterpretasikan kompetensi kurikulum kedalam bentuk penilaian (Sekretariat GTK, 2020). Sehingga merdeka belajar merupakan program

kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah RI melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang dimaksudkan untuk mengembalikan sistem pendidikan nasional pada esensi undang-undang. Hal yang ditempuh adalah dengan memberikan kebebasan kepada sekolah, guru, dan siswa dalam berinovasi, memberikan kebebasan untuk belajar secara kreatif dan mandiri, dimana kebebasan berinovasi ini harus dimulai dari guru sebagai penggerak pendidikan nasional. Merdeka belajar merupakan merdeka pikir yang harus dimulai dari guru dengan asumsi bagaimana akan terjadi pada siswa jika tidak terjadi pada guru.

Konsep pendidikan merdeka Ki Hadjar Dewantara sebagai pusat pendidikan nasional perlu dikaji ulang dengan menganalisis sejauh mana tujuan, metode, materi, evaluasi, dan pelaksanaan pendidikan dalam kerangka pembelajaran merdeka yang ditawarkan Ki Hadjar Dewantara lebih lengkap berhubungan dengan kebijakan pemerintah Indonesia saat ini atau telah menyimpang dari konsepnya. Berdasarkan masalah yang telah diuraikan, maka penting untuk menganalisis dan menggali benang merah konsep pendidikan merdeka dalam perspektif Ki Hadjar Dewantara,

termasuk unsur-unsur apa saja yang terkandung dalam konsep tersebut dan bagaimana relevansinya dengan konsep pendidikan merdeka di Indonesiasaat ini.

B. PENDIDIKAN MERDEKA PERSPEKTIF KI HADJAR DEWANTARA

Ki Hadjar Dewantara lahir dengan nama RM Soewardi Suryaningrat. Lahir pada hari Kamis Legi, tanggal 2 Mei 1889. Ki Hadjar Dewantara merupakan anggota keluarga Keraton Puro Pakualam Yogyakarta. Ki Hadjar Dewantara merupakan anak kelima dari pasangan Kanjeng Pangeran Haryo Suryaningrat dan Raden Ayu Sandiyah (Rahardjo, 2018).

Pandangan Ki Hadjar Dewantara tentang pendidikan tertuang dalam dua hal, yang pertama adalah tri pusat pendidikan yang menyebutkan bahwa peserta didik dalam memperoleh pendidikan dilakukan melalui lingkungan keluarga, lingkungan perguruan, dan lingkungan masyarakat. Tri pusat pendidikan mampu mencetak calon pemimpin berkarakter yang memegang teguh semboyan *ing ngarsa sung, ing madya mangun karsa*, dan *tut wuri handayani* (Musyafa, 2015). Kedua adalah sistem among. Menurut cara berlakunya, sistem among disebut sistem Tut Wuri Handayani (Widodo, 2017).

Konsep pendidikan Ki Hadjar Dewantara berdasarkan atas asas kemerdekaan yang berarti manusia mendapatkan kebebasan dari Tuhan yang Maha Esa dalam mengatur kehidupan yang dijalani sesuai dengan aturan masyarakat. Dilihat dari segi tujuan pendidikan, pendidikan menurut Ki Hadjar Dewantara bertujuan sebagai tuntunan hidup, yang berarti pendidikan menuntun kekuatan kodrat alam agar menjadi manusia merdeka secara fisik, mental, dan rohani. Manusia merdeka adalah orang yang mampu berkembang secara utuh, selaras dengan aspek kemanusiaan, mampu menghargai dan menghormati kemanusiaan orang lain (Widyastono, 2014).

Pendidik hendaklah berkepribadian, bermutu, dan memiliki jiwa kerohanian, menyiapkan peserta didik menjadi pembela negara. Sedangkan peserta didik hendaknya memiliki prinsip kemerdekaan agar peserta didik dapat leluasa dalam mengembangkan cipta, rasa, dan karsa dalam belajar. Peserta didik tidak melalaikan kewajibannya terhadap Tuhan, lingkungan, masyarakat, dan terhadap dirinya sendiri. Menurut Ki Hadjar Dewantara, pendidikan dapat diartikan sebagai usaha pengembangan budi pekerti (spiritualitas), akal (intelektual), dan jasmani peserta didik beserta fitrahnya dan masyarakatnya. Tiga komponen yang harus dikembangkan melalui

pendidikan yaitu karakter (afektif), pikiran (kognitif), dan fisik (psikomotor). Komponen-komponen tersebut harus sama-sama dikembangkan. Sinergi dari komponen-komponen tersebut selaras dengan fitrah masyarakat tempat tinggal peserta didik (Pelau, 2020).

Konsep di atas dirumuskan oleh Ki Hadjar Dewantara dalam bentuk konsep panca dharmataman siswa yang disusun pada tahun 1947. Konsep ini juga dikenal dengan *the principles of 1922*. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: prinsip kemerdekaan, prinsip sifat alami, prinsip kebudayaan, dan prinsip kebangsaan. Prinsip pertama, prinsip kemerdekaan. Menurut pandangan Ki Hadjar Dewantara, hakikat kemerdekaan bukanlah semata-mata kebebasan individu dari aturan dan kekuasaan lain, melainkan kemampuan untuk merdeka, tidak menggantungkan diri terhadap uluran tangan orang lain.

Prinsip kedua, prinsip sifat alami. Menurut Ki Hadjar Dewantara, pendidikan dan pengajaran yang mulia terletak pada fitrah manusia. Untuk memahami sifat alami, manusia harus memiliki kebersihan pikiran yang terletak pada tujuan berpikir, halusny akal, daya kemauan, dan kesempurnaan cipta, rasa dan karsa. Prinsip ketiga, prinsip kebudayaan. Ki Jahar Dewantara berpendapat bahwa kebudayaan adalah hasil

keluhuran budi manusia dalam perjuangannya melawan alam dan zaman. Lebih lanjut Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa kemajuan budaya tidaklepas dari prinsip “*trikon*” yaitu: kontinuitas, konvergensi, dan konsentrisitas. Budaya tersebut harus dikembangkan berdasarkan budaya lokal, bukan budaya bangsa lain.

Prinsip keempat, prinsip kebangsaan. Fungsi asas kebangsaan adalah mempersatukan keragaman budaya menjadi bangsa Tunggal Ika. Kebangsaan menjadi faktor perekat dalam masyarakat majemuk untuk bersatu sehingga masalah primordial harus dikesampingkan. Pendidikan menanamkan rasa nasionalisme kepada anak-anak untuk cinta bangsa, rasa senasib, dan memperkokoh solidaritas dan keutuhan bangsa. Untuk mewujudkan menusia yang merdeka perlu diterapkan sistem pendidikan Ki Hadjar Dewantara yang mengimplementasikan prinsip-prinsip kebebasan yang terdapat dalampanca dharma tersebut. Peserta didik diberikanhak untuk merdeka dalam belajar, bebas menerapkan apa yang telah dipelajari untuk diinternalisasikan. Pendidikan merdeka menurut Ki Hadjar Dewantara berarti memberikan kebebasan profesional kepada peserta didik agar mereka dapat mencapai cita-citanya.

C. KEMERDEKAAN DALAM SISTEM AMONG

Melanjutkan konsep nilai-nilai luhur pancadharmas yang diimplementasikan di taman siswa, Ki Hadjar Dewantara mengimplementasikan sistem among. Kondisi pendidikan Indonesia yang terpengaruh oleh sistem barat menjadi latar belakang lahirnya sistem among. Pendidikan sistem barat sarat akan hukuman, perintah, dan ketertiban. Ki Hadjar Dewantara menilai bahwa pendidikan tersebut akan merusak budi pekerti anak, karena anak selalu dibawah paksaan dan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya (Indrayani, 2018).

Sistem among merupakan sistem pendidikan budaya timur yang sepenuhnya mengendalikan, mengatur, dan membimbing peserta didik secara proporsional, yang berkonotasi erat dengan *momong*, *among*, dan *ngemong* (Dewantara, 1977). *Momong* dapat diartikan sebagai merawat dengan penuh kasih sayang dan tulus. *Among* dalam bahasa Indonesia berarti memberikan teladan (contoh) baik dan buruk tanpa mengambil hak peserta didik untuk bertumbuh dan berkembang sesuai dengan suasana batin. Sedangkan *ngemong* adalah proses mengamati, merawat dan menjaga agar peserta didik dapat mengembangkan diri, bertanggung jawab dan disiplin berdasarkan nilai-nilai yang diperoleh sesuai kodrat-

nya (Raharjo, 2018).

Sistem among diyakini mampu menopang fitrah (kodrat alam) peserta didik melalui pengembangan kemampuan alamiah pada diri setiap peserta didik. Dalam sistem among, yang diutamakan bukan “perintah paksaan” tetapi dengan tuntunan agar peserta didik berkembang secara lahir maupun batin sesuai dengan kodrat alamnya (Yamin, 2009). Menurut Ki Hadjar Dewantara, guru tidak boleh memimpin peserta didik, tetapi guru menjadi bagian dari kegiatan peserta didik terutama ketika peserta didik melakukan suatu kesalahan. Cara yang dipakai adalah tertib damai, tata-tentrem, tetapi tidak melakukan pembiaran (Tauchid dkk, 1962). Artinya, Ki Hadjar Dewantara menerapkan batasan koridor normatif. Demokrasi menurut Ki Hadjar Dewantara adalah demokrasi dengan batasan. Guru mengamati peserta didik tumbuh sesuai fitrahnya, yaitu sesuai dengan diri pesertadidik (Djohar & Istiningsih, 2017).

Makna dari uraian di atas adalah sistem among memberikan kemerdekaan kepada peserta didik untuk melakukan hal sesuai dengan kemauannya sendiri, akan tetapi tetap mendapatkan pengawasan guru yang berperansebagai fasilitator. Sistem among memberikankemerdekaan kepada peserta didik untuk belajar berdasarkan pengalamannya sendiri. Menurut

Ki Hadjar Dewantara, fungsi pertama guru adalah menjadi figur teladan (model), kemudian setelah itu berperan sebagai fasilitator. Guru memiliki peranan penting dalam mendidik sehingga peserta didik memiliki kualitas terbaik. Guru harus berpikir, berperasaan, dan bersikap.

Kebijakan merdeka belajar dirancang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim. Kebebasan belajar menurut Nadiem Anwar Makarim adalah kebebasan berpikir. Hal tersebut dapat dinyatakan sebagai: 1) konsep merdeka belajar merupakan solusi permasalahan guru yang dihadapi selama proses pembelajaran, 2) mengurangi beban guru dalam menjalankan profesinya, mandiri atau bebas dalam menentukan penilaian pembelajaran dengan perangkat yang sesuai, bebas dari pemenuhan administrasi pembelajaran, dan bebas dari tekanan, kriminalisasi, dan politik terhadap guru, 3) memberikan gambaran konkrit permasalahan yang dihadapi guru ketika mengajar di sekolah, mulai dari masalah penerimaan siswa baru, administrasi guru dalam pembelajaran, hingga Ujian Nasional, dan 4) guru harus berada di garda terdepan dalam mencetak generasi penerus bangsa dengan merancang suasana dan kondisi pembelajaran

yang dapat menarik perhatian siswa (Mustagfiroh, 2020).

Terdapat empat kebijakan utama dalam merdeka belajar (Kemendikbud, 2019). *Pertama*, ujian nasional menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Kompetensi yang ditekankan dalam asesmen ini adalah numerasi dan literasi dasar yang berdasarkan pada soal tes PISA. Asesmen dilaksanakan untuk kelas 4, 8, dan 9. Hal ini yang menyebabkan asesmen ini berbeda dengan ujian nasional, dimana jika ujian nasional dilaksanakan pada akhir setiap jenjang pendidikan. *Kedua*, ujian nasional berstandar nasional langsung diserahkan kepada pihak sekolah. Dalam menentukan penilaian, sekolah memperoleh kemerdekaan, yaitu sekolah bebas menentukan penilaian baik berbentuk portofolio, karya tulis, dll.

Ketiga, meringkat format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Dengan alasan efisiensi, maka RPP dibuat dalam format satu halaman saja. Harapannya, guru tidak tersitas waktunya dalam proses pembuatan administrasi pembelajaran, sehingga waktunya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kompetensi maupun belajar. *Keempat*, memperluas sistem zonasi kecuali daerah 3T dalam sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB). Sistem PPDB akan

memberikan kesempatan yang lebih banyak bagi pendaftar melalui jalur prestasi dan afirmasi. Penentuan daerah zonasi diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah.

D. GURU JANGAN TERPENJARA

Berdasarkan temuan kajian di atas, konsep pendidikan yang digagas oleh Ki Hadjar Dewantara selaras dengan konsep merdeka belajar. Keduanya menitikberatkan pada kemandirian dan keluwesan lembaga pendidikan dalam menggali potensi maksimal yang dimiliki oleh peserta didik, karena secara fitrahnya setiap peserta didik memiliki keterampilan dan potensi yang beragam. Relevansi konsep pendidikan merdeka Ki Hadjar Dewantara dan konsep merdeka terletak pada aspek tujuan pendidikan, sistem pembelajaran, guru, dan siswa.

Pertama tujuan pendidikan. Berdasarkan prinsip Taman Siswa, setiap individu memiliki hak untuk dapat mengatur dirinya sendiri dengan tetap memperhatikan ketertiban, ketentraman, kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, pendidikan harus dapat mendorong peserta didik untuk mandiri sekaligus membina tumbuh kembangnya potensi bawaan sesuai dengan fitrahnya. Sebagaimana yang diungkap-

kan oleh teori konvergensi bahwa perkembangan peserta didik merupakan sebuah kombinasi antara potensi bawaan dan pengaruh lingkungan (Stern, 2018), sehingga pendidikan sangat berperan dalam hal ini.

Gardner (2011) menunjukkan bahwa setiap individu memiliki kecerdasan majemuk (multiple intelligence). Hal ini relevan dengan kebijakan pemerintah Indonesia bahwa pendidikan merdeka harus mampu memberikan keleluasaan terhadap peserta didik, misalnya ujian nasional yang hanya mengukur kecerdasan intelektual saja, sedangkan kecerdasan peserta didik lebih daripada itu. Jika konsep merdeka belajar tidak diterapkan dalam praktik pendidikan di Indonesia, maka tujuan pendidikan tersebut akan sulit untuk terwujud.

Kedua sistem pembelajaran, sistem among merupakan respon Ki Hadjar Dewantara terhadap upaya pendidikan dalam menciptakan manusia merdeka yang seluas-luasnya, baik jasmani maupun rohani, sesuai dengan fitrah masing-masing, yang dilakukan secara berkelanjutan mulai dari usia dini hingga dewasa. Hal ini sesuai dengan konsep progresivisme yang digagas oleh John Dewey, yang menghendaki adanya keluwesan untuk memajukan pendidikan yang demokratis, memberikan kemandirian dan kemerdekaan kepada peserta didik, serta

memungkinkan berkembangnya potensi peserta didik dengan baik (Dewey, 1964). Hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk meniadakan Ujian Nasional. Sehingga kelulusan siswa benar-benar sesuai dengan kompetensi dan karakteristik unik dari setiap peserta didik.

Ketiga guru. Guru harus memposisikan peserta didik sebagai pusat dalam proses belajar. Guru harus menjadi fasilitator yang selalu mendorong dan membimbing peserta didik untuk menemukan pengalaman belajar melalui usaha mereka sendiri, sekaligus bekerjasama dengan orang tua untuk memastikan perkembangan mereka. Guru harus mengikuti prinsip pembelajaran MERDEKA, yaitu menantang dan menyenangkan, efektif dan efisien, rasional dan realistis, demokratis, empati, kreatif dan kontekstual, dan berkeadilan (Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 2017).

Sejalan dengan kebijakan pemerintah tentang merdeka belajar, guru tidak harus terpenjara oleh sejumlah administrasi pembelajaran, sehingga dapat lebih mudah untuk fokus dalam membina siswa. Misalnya, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dapat disederhanakan atau diringkas dalam bentuk RPP 1 lembar, dengan tujuan agar guru lebih fokus dalam meningkatkan kompetensi. Sehingga nanti-

nya peran guru dalam pembelajaran akan lebih aktif, serta dapat memaksimalkan posisinya sebagai fasilitator dalam menggali dan membangkitkan berbagai potensi siswa (Rosyadi, 2017).

Keempat siswa. Tujuan pendidikan dalam konsep Ki Hadjar Dewantara adalah bagaimana peserta didik dapat diarahkan dan dibimbing sesuai dengan kompetensi yang dimiliki berdasarkan fitrahnya, sehingga peserta didik dapat mencapai kemandirian jasmani dan rohani, pikiran, dan tenaga untuk hidup mandiri dan bermasyarakat (Dewantara, 1977). Sejalan dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang memberikan kebebasan kepada setiap peserta didik untuk memilih berdasarkan potensi dan bakat yang dimiliki secara demokratis. Serta memberikan hak kemerdekaan kepada mahasiswa untuk dapat mengambil Sistem Kredit Semester (SKS) di luar universitas paling lama dua semester atau setara dengan 40 SKS, dan juga memberikan kemerdekaan untuk dapat mengambil SKS pada program studi lain pada universitas yang sama selama satu semester atau setara 20 SKS (Kemendikbud, 2020).

Perspektif Ki Hadjar Dewantara yang mengadopsi ide-ide dari berbagai disiplin ilmu serta dari tokoh-tokoh Barat sangatlah komprehensif. Ki Hadjar Dewantara bertekad untuk merancang konsep pendidikan dengan kemerdekaan sebagai inti tujuan

pendidikan. Beliau membumikan konsep Panca Dharma di Taman Siswa, kemudian mengimplementasikan sistem among dengan metode berjenjang dari anak usia dini hingga dewasa. Hingga pada tingkat puncaknya, peserta didik dewasa mampu menemukan kemandirian esontris dan eksontris, yaitu menjadikan individu yang berdaulat berakhlak mulia.

Pemikiran Ki Hadjar Dewantara inisejalan dengan kebijakan pemerintah Indonesia, dalam hal ini kebijakan merdeka belajar, yang menyatakan bahwa peserta didik memiliki hak untuk merdeka berdasarkan pada potensi bawaan setiap individu. Kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan pikiran, jiwa, dan raga sesuai dengan Panca Dharma yang diterapkandalam sistem among di Taman Siswa. Hal ini sangat relevan dengan apa yang dihadirkan oleh pemerintah Indonesia dengan merdeka belajar. Merdeka belajar bertujuan agar siswa bebas berkembang sesuai dengan fitrahnya sendiri, memberikan pengalaman yang lebih langsung dalam belajar, dan guru dapat membimbing dan menjadi fasilitator bagi peserta didik dengan baik. Lembaga pendidikan harus memberikan dukungan pendidikan untukperubahan siswa, dan haruslah ada sinergi yang baik antar lembaga pendidikan serta orang tuasebagai bagian dari tri pusat pendidikan.

“Satu kata yang senantiasa dirindukan oleh masing-masing individu bangsa, yaitu Merdeka”

A. MOMONG, AMONG, DAN NGEMONG

Pendidikan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan martabat bagi seluruh umat manusia. Pendidikan yang berkualitas akan mencerminkan masyarakat maju. Pendidikan juga menjadikan adanya landasan perubahan budaya. Kebiasaan yang ada di zaman sebelumnya akan berubah sejalan dengan perubahan yang diperoleh dari proses pendidikan. Pendidikan mampu menghasilkan hal-hal yang kreatif dan inovatif. Ketika negara menciptakan kehidupan yang lebih layak dan maju bagi seluruh rakyatnya, maka pendidikan merupakan elemen penting yang harus disiapkan untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

Dalam konteks pendidikan di Indonesia, pendidikan

merupakan suatu hal yang sangat mendasar, penting dan bernilai. Proses pendidikan di sekolah sejatinya adalah bagaimana mengantarkan para peserta didik untuk menjadi warga negara yang baik serta dapat berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitarnya (Birsyada, 2016: 1). Pendidikan menjadi dasar dapat dilihat di konstitusi resmi Negara Republik Indonesia, terutama pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke-empat, secara eksplisit dinyatakan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi tanggung jawab Negara. Setelah Indonesia merdeka pemerintah terus melakukan perbaikan dengan cara melakukan perubahan kebijakan-kebijakan di sektor pendidikan untuk menjadikan pendidikan di Indonesia semakin baik. Saat ini di Indonesia sistem pendidikan telah beralih pada sistem “Merdeka Belajar”.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan slogan Merdeka Belajar yang menjadi arah kebijakan era Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim terinspirasi dari filosofi Bapak Pendidikan Nasional yakni Ki Hajar Dewantara (Jawa Pos : 2020). Jika dilihat dari aspek filosofi, dasar-dasar yang dapat dirujuk dari konsep pembelajaran yang dikemukakan oleh Ki Hajar yakni ***Momong, Among dan Ngemong***. *Momong* yang berarti bahwa pendidikan itu bersifat mengasuh. Mendidik adalah mengasuh anak dalam dunia nilai-nilai. Dalam sistem *among* ini, pengajaran berarti

mendidik anak menjadi manusia yang merdeka batinnya, merdeka pikirannya, dan merdeka tenaganya. *Mengemong* anak berarti memberi kebebasan anak bergerak menurut kemauannya, tetapi pamong akan bertindak, kalau perlu dengan paksaan, apabila keinginan anak-anak berpotensi membahayakan keselamatannya. Pada penelitian ini penulis mengkaji secara kritis terkait pemikiran dua tokoh besar tersebut dalam kaitannya dengan Merdeka Belajar.

B. TUT WURI HANDAYANI

Pendidikan merupakan proses pembentukan kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia (Dewey, 1964). Pendidikan juga diartikan sebagai pemberian bekal yang tidak ada pada masa kanak-kanak namun dibutuhkan pada masa dewasa (Rousseau, 2007: 69). Terdapat banyak ahli ilmu pendidikan yang dalam kiprahnya mampu mengubah sistem pendidikan menjadi lebih baik. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Gutek (1974) bahwa pendidikan merupakan suatu modal untuk mengantarkan peserta

didik ke dalam suatu budaya yang akan tumbuh terus menerus. Hal tersebut sejalan pendapat dari Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan yang baik adalah yang sesuai dengan tumbuh kembang anak. Driyakarya juga berpendapat bahwa fungsi dari pendidikan yaitu memanusiaikan manusia. Artinya manusia dibekali ilmu pengetahuan agar dia menyadari kodratnya sebagai manusia yakni memiliki hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawabkannya. Pembekalan yang diberikan tidak hanya kemampuan pengetahuan semata tetapi juga attitude (berkelakuan baik sesuai dengan norma dan nilai) serta soft skill. Itulah fungsi dari pendidikan.

Merujuk dari esensi dan fungsi pendidikan, maka tujuan dari adanya pendidikan yaitu manusia di didik agar dia terdidik dan mampu mendidik manusia lainnya. Sehingga tidak melupakan kodratnya sebagai manusia seutuhnya yang berbudi pekerti baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Dengan demikian pendidikan yang baik tidak hanya sebatas melibatkan pengelolaan kurikulum semata di sekolah, tetapi perlu ditekankan bahwa pendidikan juga wajib ditanamkan sedini mungkin di lingkungan keluarga dan juga masyarakat. Untuk mendapatkan sistem pendidikan yang bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara maka sistem pendidikan yang

diterapkan haruslah relevan dengan keadaan yang akan dihadapi oleh bangsa ini. Maka dari itu sebagai pendidik haruslah memahami bagaimana sifat dan perilaku masyarakat yang sedang dihadapi, agar nantinya sistem pendidikan yang sedang diterapkan dapat berjalan dengan baik (Dewantara, 2013).

Oleh karena itu syarat utama pendidik adalah mampu sebagai sosok tauladan. Konsep pendidik seperti yang diungkapkan oleh Ki Hadjar Dewantara di atas, yakni *ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani* harus diimplementasikan oleh guru semaksimal mungkin pada saat proses belajar mengajar. Jika konsep ini dipenuhi, maka dalam diri pendidik tersebut menunjukkan wibawanya pada dirinya. Di samping itu guru atau pendidik merupakan sosok yang *digugu lan ditiru (diikuti dan ditiru)* akan menjadi bukti kebenarannya. Merdeka Belajar merupakan suatu program kebijakan yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim. Dalam esensi kemerdekaan berpikir, Nadiem Anwar menyatakan bahwa guru harus mempunyai jiwa yang mereka terlebih dahulu mengajarkannya pada pesertadidik. Dengan demikian guru harus mempunyai jiwa yang

mendidik yang matang, tanpa adanya rasa tekanan agar mampu menyalurkan ilmunya kepada peserta didik secara tepat.

Nadiem menyebut bahwa kurikulum merupakan dasar akan adanya pembelajaran. Pembelajaran dalam sistem Merdeka Belajar memandang bahwa pembelajaran harus diimplementasikan menggunakan model pembelajaran yang inovatif. Pada tuntutan saat ini *blended learning* menjadi salah satu model pembelajaran pilihan untuk diimplementasikan di dunia pendidikan. Menurut Bersin (2004) menjelaskan bahwa *blended learning* merupakan kombinasi berbagai media pembelajaran yang berbeda agar tercipta program pembelajaran yang optimum. Adanya model pembelajaran *blended learning* ini, akan mengoptimalkan peran guru dan teknologi di dunia pendidikan.

Dengan demikian guru perlu didorong untuk menerapkan berbagai model pembelajaran inovatif yang memungkinkan siswa belajar lebih merdeka sesuai kemampuan dan potensinya. Terlebih model pembelajaran yang memanfaatkan perkembangan TIK yang sudah sangat berkembang pesat dan dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran. Dengan TIK proses pembelajaran akan terjadi dengan mudah dan sangat memungkinkan siswa untuk belajar mandiri dan

pastinya belajar lebih membahagiakan karena pastinya anak-anak lebih termotivasi belajar dengan teknologi terutama internet dan *gadget*.

Oleh karenanya, untuk mewujudkan hal ini, guru harus memiliki kemampuan mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Pada tahun mendatang, sistem pembelajaran akan berubah dari yang awalnya bernuansa tatap muka atau secara langsung akan berubah menjadi pembelajaran jarak jauh. Nuansa pembelajaran akan lebih menyenangkan, karena peserta didik tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi peserta didik juga dapat mencari sendiri pengetahuan baru yang akan diperolehnya. Hasil pembelajaran tidak hanya mengandalkan sistem ranking yang menurut beberapa survei hanya meresahkan anak dan orang tua, karena sebenarnya setiap anak memiliki bakat dan kecerdasannya dalam bidang masing-masing. Suatu saat nanti akan terbentuk para pelajar yang siap kerja, kompeten, dan berbudi luhur (Mustaghfirah: 2020). Konsep Merdeka Belajar ala Nadiem Makarim terdorong karena keinginannya menciptakan suasana belajar yang nyaman dan bahagia tanpa dibebani dengan pencapaian skor atau nilai tertentu. Ada empat pokok kebijakan baru Kemendikbud RI (Kemendikbud, 2019: 1-, yaitu:

Ujian Nasional Ujian Nasional akan dirubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Asesmen ini menekankan kemampuan penalaran literasidasar dan numerik yang didasarkan pada praktik terbaik tes PISA. Berbeda dengan Ujian Nasional yang dilaksanakan di akhir jenjang pendidikan, asesmen ini akan dilaksanakan di kelas 4, 8, dan 11. Hasilnya diharapkan menjadi masukan bagi lembaga pendidikan untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya sebelum peserta didik menyelesaikan pendidikannya (Kemendikbud, 2019: 1).

Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) akan diserahkan secara langsung pada sekolah. Menurut Kemendikbud, sekolah diberikan kemerdekaan dalam menentukan bentuk penilaian, seperti portofolio, karya tulis, atau bentuk penugasan lainnya (Kemendikbud, 2019: 2) Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Menurut Nadiem Makarim, agar lebih efisien RPP cukup dibuat satu halaman saja. Melalui penyederhanaan administrasi, diharapkan waktu guru yang tersita untuk proses pembuatan administrasi dapat dialihkan untuk kegiatan belajar dan peningkatan kompetensi (Kemendikbud, 2019: 3). Dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), sistem zonasi diperluas (tidak termasuk daerah 3T. Bagi peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi dan

prestasi, akan diberikan kesempatan yang lebih banyak dalam sistem PPDB. Pemerintah daerah diberikan kewenangan secara langsung untuk menentukan daerah zonasi (Kemendikbud, 2019: 4).

Nadiem membuat kebijakan merdeka belajar bukan tanpa alasan. Hasil penelitian *Programme for International Student Assessment (PISA)* tahun 2019 menunjukkan hasil penilaian yang kurang memuaskan pada peserta didik Indonesia. Hasil tersebut menunjukkan bahwa untuk bidang matematika dan literasi, Indonesia menduduki posisi ke-74 dari 79 Negara. Melihat hasil tersebut, Nadiem membuat gebrakan penilaian dalam kemampuan minimum, meliputi literasi, numerasi, dan survei karakter. Literasi bukan hanya mengukur kemampuan membaca, tetapi juga kemampuan menganalisis isi bacaan beserta memahami konsep dibalikinya. Pada kemampuan numerasi, yang dinilai bukan pelajaran matematika, tetapi penilaian terhadap kemampuan peserta didik dalam menerapkan konsep numerik dalam kehidupan nyata. Satu aspek sisanya, yakni survei karakter, bukanlah sebuah tes, melainkan pencarian sejauh mana penerapan nilai-nilai budi pekerti, agama, dan Pancasila yang telah dipraktekkan oleh peserta didik.

Ki Hajar Dewantara memaknai 'dasar-j jiwa' yaitu suatu keadaan jiwa yang asli menurut kodratnya

sendiri, sebelum ada pengaruh dari luar; jadi yang dibawa oleh anak ketika lahir di dunia ini. Ki Hajar Dewantara (Dewantara, 2013) menafsirkan ada tiga aliran yang berhubungan dengan soal daya pendidikan dalam dasar jiwa. Tujuan Pendidikan dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara ialah memerdekan hidup dan kehidupan anak, lahir dan batin. Teori jiwa merdeka, memandang bahwa tujuan pendidikan pada hakikatnya ialah memerdekan hidup, dan kehidupan anak baik lahir maupun batin. Yang pertama ialah aliran lama yang sekarang sudah hampir tidak diakui kebenarannya di kalangan kaum cendekiawan. Menurut aliran ini, anak yang lahir di dunia itu diumpamakan sehelai kertas yang belum ditulis sehingga kaum pendidik boleh mengisi kertas yang kosong itu menurut kehendaknya. Artinya si pendidik berkuasa seluasnya untuk membentuk watak atau budi seperti yang diinginkan. Teori ini dinamakan teori tabula rasa (lapisan lilin yang masih dapat dicoret-coret oleh si pendidik).

Aliran yang kedua ialah aliran negatif, yang berpendapat, bahwa anak itu lahir sebagai sehelai kertas yang sudah ditulis sepenuhnya, sehingga tidak mungkin pendidikan dari siapapun dapat mengubah watak anak. Pendidikan hanya dapat mengawasi dan mengamati, jangan sampai ada pengaruh-pengaruh

jahat yang mendekati anak. Jadi pendidikan menurut aliran negatif ini dianggap dapat mengolah pengaruh-pengaruh dari luar, akan tetapi tidak dapat mewujudkan budi pekerti yang tidak nampak di dalam jiwa anak.

Aliran ketiga ialah aliran yang terkenal dengan nama '*convergentie- theorie*', seperti sudah kita sebutkan tadi. Teori ini mengajarkan bahwa anak yang dilahirkan itu boleh diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulis penuh, akan tetapi semua tulisan-tulisan itu suram. Menurut aliran ini ditetapkan, bahwa pendidikan itu berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang suram itu dan berisi baik, agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Segala tulisan yang mengandung arti jahat hendaknya dibiarkan, agar jangan sampai menjadi tebal, bahkan makin suram. (Kuswandi, 2005: 298). Ketika seseorang memiliki jiwa merdeka maka akan bebas menyalurkan bakatnya. Hakikatnya jiwa itu memiliki unsur cipta, rasa, dan karsa. Dengan demikian menurut Ki Hajar Dewantara, jiwa merdeka adalah cara berpikir yang positif, berperasaan luhur dan indah, dan berkemauan mulia (Hadiwijoyo, 2016:25). Berdasarkan keempat sumber nilai jiwa merdeka hasil buah pikir Ki Hajar Dewantara.

NILAI	DESKRIPSI
Berpikir positif	Memahami sesuatu secara obyektif sesuai apa adanya. Segala sesuatu tidak perlu Ditanggapi dengan kekhawatiran, kecurigaan, syirik, iri hati, isu, gosip, apalagi fitnah.
Berperasaan luhur dan indah	Dalam mempertimbangkan dan menghayati sesuatu harus didasari petunjuk Tuhan menurut agamanya dan mensejahterakan sertamembahagiakan diri dan umat manusia pada umumnya.
Berkemauan mulia	Kemauan untuk hidup tertib damai (tata tentrem) dan salambahagia (karta raharja}.

Tabel 3.1 Nilai dan Deskripsi Pendidikan Jiwa Merdeka

Melalui cara berpikir yang positif, berperasaan yang luhur dan inilah, berkemauan yang mulia, akan menghasilkan perbuatan yang terpuji yaitu perbuatan yang berguna bagi diri sendiri, bagi Tuhannya, bagi sesama manusia, serta bagi kelestarian dan perkembangan alam sekitar. Implikasinya seorang guru

senantiasa memberi arahan dan tuntunan kepada anak didiknya untuk kemajuan jiwa dan raganya sesuai kodratnya. Dengan adanya kemampuan dan keterampilan yang telah dipelajari, peserta didik diharapkan dapat mencari dan menemukan sendiri solusi alternatif yang dapat digunakan untuk mengatasi setiap permasalahan yang dihadapinya (Barnadib, 2002:58-59).

Implikasi konsep pendidikan jiwa merdeka Ki Hajar Dewantara terhadap tujuan pembelajaran berupa teori jiwa merdeka memberikan implikasi bahwa penetapan tujuan pembelajaran juga harus mencakup hal yang berkaitan tentang memerdekakan hidup, dan kehidupan anak baik lahir maupun batin. Nilai-nilai dalam pendidikan jiwa merdeka seperti cara berpikir yang positif, berperasaan luhur dan Hajar Dewantara, teridentifikasi sejumlah nilai untuk tujuan pendidikan sebagaiberikut ini. indah, dan berkemauan mulia dapat dimasukkan dalam desain pembelajaran, bagian komponen tujuan pembelajaran.

C. PENGEMBANGAN KODRAT ANAK

Ki Hajar Dewantara salah seorang tokoh pendidikan di Indonesia yang memiliki beberapa pemikiran tentang pendidikan. Pemikiran mengenai pendidikan tersebut

diantaranya yang akan menjadi bahasan utama artikel ini ialah pendidikan jiwa merdeka. Merdeka diartikan sebagai (1) tidak hidup terperintah, (2) berdiri tegak karena kekuatan sendiri dan (3) cakap mengatur hidupnya dengan tertib (Dewantara, 2013: 399). Beberapa syarat sistem merdeka antara lain yaitu jika ada reward atau hukuman yang diberikan kepada siswa terlebih dahulu perlu ada kesepakatan antara siswa dan guru. Siswa juga diberi keleluasaan untuk mengembangkan kreativitasnya sendiri sesuai dengan kodratnya sendiri tanpa bantuan dari guru. Jika ada kesalahan yang dilakukan oleh siswa barulah guru mengingatkan dan menyampaikan yang seharusnya dilakukan oleh siswa. Siswa perlu mengetahui kesalahan yang dilakukannya, kebaikan dan tidak menyukai kejahatan dan diajarkan tentang arti kemerdekaan yang mengandung tiga arti yaitu merdeka dari perintah orang lain, tidak tergantung pada orang lain dan pandai dalam mengatur ketertiban hidupnya sendiri. Anak harus dididik menghormati kemerdekaan orang lain atau turut mengatur ketertiban dan keamanan umum dan turut menanggung juga tertib damainya keadaan (sosial) (Dewantara, 2013: 402).

Pendidikan yang dilakukan Ki Hadjar Dewantara adalah pendidikan yang memerdekakan. Seperti yang

disampaikan murid langsung Ki Hadjar Dewantara, Nyi Iman Sudiyat (Prihatni,2014), Ki Hadjar Dewantara senantiasa menegaskan bahwa pendidikan akan berjalan dengan baik jika anak didik merdeka batinnya, merdeka lahirnya, merdeka pikirannya dan merdeka tenaganya. Hal ini selaras dengan tujuan pendidikan yaitu membangun manusialahir batinnya dan dengan keluhuran akal budi dan jasmaninya menjadi anggota masyarakat yang berguna dan bertanggungjawab atas kesejahteraan bangsa dan tanah air serta manusia pada umumnya. Dalam azas Tamansiswa Ki Hajar Dewantara disebutkan “Pendidikan yang diberikan hendaknya dapat menjadikan manusia yang merdeka”. Kemerdekaan disini bukan berarti bebas berbuat sesuka hati, kemerdekaan disini haruslah bertumpu pada ketertiban dan menghormati hak-hak orang lain.

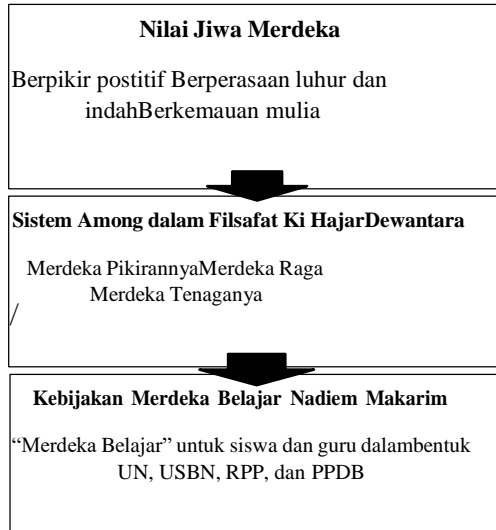
Tentang hakikat merdeka, menurut paham Ki Hajar Dewantara, bukan berarti seseorang itu bebas dan lepas dai perintah serta penguasaan orang lain. Akan tetapi, sanggup dan kuatnya berdiri sendiri tak bergantung pada orang lain. Dalam pendidikan harus senantiasa diingat, bahwa kemerdekaan itu bersifat tiga macam: Berdiri sendiri (Zelfstanding), tidak tergantung orang lain (onafhankelijk) dan dapat mengatur dirinya sendiri (vrijheid, zelfbeschikking). Manusia merdeka lahir batin ialah manusia yang

memiliki: 1) hak untuk mengatur perikehidupan sendiri dalam keserasian hidup bersama, 2) kebebasan dari rasa takut dan kemelaratan, 3) kedaulatan dalam arti mampu berdikari secara lahir batin, 4) kemampuan untuk melihat segala sesuatu sebagai suatu realitas berdasarkan kenyataan dan kebenaran, 5) rasa pengabdian dan keikhlasan mengabdikan tanpa pamrih kepada Dewantara dengan Nadiem Anwar Makarim

Dari pemaparan konsep kebijakan “Merdeka Belajar” yang telah dipaparkan sebelumnya oleh Mendikbud Nadiem Tuhan, kemanusiaan, dan kebenaran menurut keyakinan masing-masing (Prihatni dkk, 2015). Konsep merdeka belajar Ki Hajar Dewantara juga terletak pada semboyannya yakni *Tut Wuri Handayani*. Semboyan pendidikan tersebut mengandung tiga unsur yang menuniukkan kekhasan Indonesia, yakni pertama, *Ing Ngarsa Sung Tuladha*, artinya seorang pendidik selalu berada di depan memberi teladan. Kedua, *Ing Madya Mangun Karsa*, artinya seorang pendidik selalu berada di tengah-tengah para muridnya dan terus-menerus memprakarsai atau memotivasi peserta didiknya untuk berkarya, membangun niat, semangat, dan menumbuhkan ide-ide agar peserta didiknya produktif dalam berkarya. Ketiga, *Tut Wuri Handayani*, artinya seorang pendidik selalu mendukung dan menopang

(mendorong) para muridnya berkarya ke arah yang benar bagi hidup masyarakat.

Menurut Ki Hajar Dewantara (Dewantara:2013) makna “pedagogik” terdiri dari tiga unsur yakni **Momong, Among dan Ngemong**, yang berarti bahwa pendidikan itu bersifat mengasuh. Mendidik adalah mengasuh anak dalam dunia nilai-nilai. Dalam sistem among ini, pengajaran berarti mendidik anak menjadi manusia yang merdeka batinnya, merdeka pikirannya, dan merdeka tenaganya. Mengemong anak berarti memberi kebebasan anak bergerak menurut kemauannya, tetapi pamong akan bertindak, kalau perlu dengan paksaan, apabila keinginan anak-anak berpotensi membahayakan keselamatannya. Melihat ketiga unsur tersebut, unsur *among* yang dijadikan landasan berdirinya kebijakan Merdeka Belajar. Makarim, terdapat kesejajaran antara konsep “Merdeka Belajar” dengan konsep pendidikan menurut filsafat Ki Hajar Dewantara. Kedua konsep tersebut sama-sama menekankan adanya kemerdekaan dan keleluasaan dalam memaksimalkan kemampuan dimiliki oleh guru dan pesertadidik. Jika dirumuskan kedua konsep tersebut sama-sama mengandung makna “Dasar Jiwa yang Merdeka” antara guru dan peserta didik.



Gambar 3.1 Turunan Konsep Merdeka Belajar

Dalam gambar tersebut tergambar bahwa adanya akar atau muara kebijakan merdeka belajar Nadiem Makarim ini tercetuskan. Kebijakan ini cenderung condong pada filsafat Ki Hajar Dewantara. Perspektif Ki Hajar Dewantara pendidikan merupakan suatu upaya pendewasaan seseorang dengan metode among (mengemong). Terkait dengan upaya mengimplementasikan metode among Ki Hajar Dewantara mengajukan lima asas pendidikan yang dikenal dengan sebutan pancadharma (kodrat alam, kemerdekaan, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan). Kedua, asas

kemerdekaan. Asas ini mengandung arti bahwa pengajaran berarti proses mendidik peserta didik menjadi manusia yang merdeka batinnya, merdeka pikirannya, guru dapat menjalankan tugasnya mengajar mendidik dengan totalitas tanpa dibebani syarat administratif yang berat. Berikut akan dijabarkan dalam bagan relevansi filosofi Ki Hajar Dewantara sebagai dasar kebijakan pendidikan nasional Merdeka Belajar dan merdeka tenaganya. Dalam konteks mendidik, pendidik atau guru tidak hanya memberi pengetahuan yang perlu dan baik, tetapi juga mendidik murid agar dapat mengembangkan sendiri wawasan pengetahuannya (kemandirian dalam belajar) yang berfaedah untuk membangun khazanah umum. Maka pengetahuan yang baik dan perlu adalah yang memberikan manfaat untuk keperluan lahir dan batin dan untuk membangun kehidupan bersama yang harmonis, yang berpihak pada keselamatan dan kebahagiaan.

Khazanah pemikiran Ki Hadjar Dewantara asas kemerdekaan berkaitan dengan upaya membentuk peserta didik menjadi pribadi yang memiliki kebebasan yang bertanggung jawab sehingga menciptakan keselarasan dengan masyarakat (Samho, 2013). Asas ini bersandar pada keyakinan bahwa setiap manusia memiliki potensi dasar untuk menggapai kebebasan

yang mengarah kepada pencapaian tujuan hidupnya. Pencapaian ke arah pribadi yang merdeka itu ditempuh melalui proses panjang yang disebut belajar. Proses ini berjenjang dari tingkat dasar sampai pada tingkat tinggi. Namun, perhatian kita hendaknya tidak difokuskan pada tingkatan-tingkatannya semata, tapi juga pada prosesnya sebagai kegiatan yang memerdekakan peserta didik. Dalam pengertian itu, pendidikan membantu proses pembebasan peserta didik dari kelemahan-kelemahan yang membelenggu dirinya untuk berkembang menjadi pribadi yang profesional dan penuh tanggung jawab.

Melihat konsep filsafat dari Ki Hajar Dewantara menunjukkan bahwa pendidikan yang baik adalah pendidikan humanis yakni memanusiakan manusia. Konsep inilah yang dipakai Nadiem dalam merumuskan kebijakan Merdeka Belajar. Pendidikan yang baik bersifat terbuka dan tidak memaksa peserta didik. Dengan demikian hasil penelitian kepustakaan ini menunjukkan bahwa adanya relevansi yang mendasar implementasi kebijakan Merdeka Belajar dengan filsafat yang dikemukakan oleh tokoh besar Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara.

Dari berbagai uraian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pertama, teori jiwa merdeka yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara memandang bahwa

tujuan pendidikan pada hakikatnya ialah memerdekakan hidup, dan kehidupan anak baik lahir maupun batin. Kedua, dalam semboyannya yakni makna pedagogik menurut Ki Hajar Dewantara terdapat tiga unsur yakni sistem *momong*, *among*, dan *ngemong*. Pada sistem *among* mengandung makna bahwa pengajaran berarti mendidik anak menjadi manusia merdeka hatinya, merdeka pikirannya, merdeka tenaganya. Sistem *among* inilah yang dijadikan landasan terbentuknya kebijakan “Merdeka Belajar”. Ketiga, antara konsep “merdeka belajar” yang dicetuskan oleh Mendikbud Nadiem Anwar Makarim memiliki kesejajaran dengan konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yakni keduanya sama-sama menekankan adanya kemerdekaan dan keleluasaan lembaga.

D. PROGRAM MERDEKA BELAJAR

Merdeka belajar merupakan program kebijakan yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk mengembalikan sistem pendidikan nasional kepada esensi undang-undang dengan memberi kebebasan kepada sekolah, guru dan murid untuk bebas berinovasi, bebas untuk belajar dengan mandiri dan kreatif, dimana kebebasan berinovasi ini harus

dimulai dari guru sebagai penggerak pendidikan nasional. Kebijakan program “Merdeka Belajar” diluncurkan untuk mewujudkan kualitas SDM Indonesia terutama di era revolusi industry 4.0. Kebijakan program “Merdeka Belajar” meliputi empat pokok kebijakan yaitu Penilaian USBN Komprehensif, UN diganti dengan assessment penilaian, RPP dipersingkat dan zonasi PPDB lebih fleksibel. Prof. Dr. Hj. Sylviana Murni, SH, M.Si dalam

Seminar Nasional “Merdeka Belajar: Dalam Mencapai Indonesia Maju 2045” yang diselenggarakan di Universitas Negeri Jakarta, pada tanggal 10 Maret 2020 memaparkan empat program kebijakan “Merdeka Belajar” yaitu sebagai berikut:



Gambar 1. Program Merdeka Belajar (Murni, 2020)

Harris Iskandar, selalu Plt. Dirjen Paud, Dikdasdan Dikmen dalam Seminar Nasional “Merdeka Belajar: Dalam Mencapai Indonesia Maju 2045” yang diselenggarakan di Universitas Negeri Jakarta, pada tanggal 10 Maret 2020 juga memaparkan empat program kebijakan “Merdeka Belajar” yaitu sebagai berikut:

TEROBOSAN MERDEKA BELAJAR



Gambar 2. Terobosan Merdeka Belajar(Iskandar, 2020)

Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd, selaku gurubesar tetap Universitas Negeri Jakarta sekaligus Ketua Umum Pengurus Besar PGRI dalam Seminar Nasional “Merdeka Belajar: Dalam Mencapai Indonesia Maju 2045” yang diselenggarakan di Universitas Negeri Jakarta, pada tanggal 10 Maret 2020 menjelaskan empat program kebijakan “Merdeka Belajar” yaitu sebagai berikut:

KEBIJAKAN	PENJELASAN
1. USBN menjadi asesmen oleh sekolah	menilai kompetensi siswa, melalui tes tertulis dan bentuk penilaian lain yang komprehensif. Guru dan sekolah lebih merdeka dalam menilai hasil belajar siswa. Anggaran USBN dialihkan untuk pengembangan kapasitas guru dan sekolah.
2. UN diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum & Survei Karakter	tidak mengukur penguasaan materi mapel dlm kurikulum seperti yang diukur melalui UN selama ini. UN ke depan dilakukan untuk pemetaan kompetensi minimum literasi & numerasi siswa, dan memperkuat aplikasi pembelajaran yang diukur oleh PISA dan TIMSS. Dilakukan di tengah jenjang sekolah (kelas 4, 8, 11).
3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)	Guru bebas memilih, membuat, mengembangkan, dan menggunakan format RPP atas prakarsa dan inovasi sendiri. RPP dipersingkat yang berisi tujuan, kegiatan dan asesmen pembelajaran. Penulisan RPP efisien dan efektif agar guru punya waktu untuk menyiapkan dan evaluasi proses pembelajaran secara terarah
4. Sistem Zonasi PPDB dilaksanakan secara fleksibel	mengatasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Ada patokan standar PPDB antar-daerah, yaitu: jalur zonasi menerima siswa minimal 50%, jalur afirmasi minimal 15%, jalur perpindahan maksimal 5%, dan jalur prestasi atau sisa 0-30%, sesuai dengan kondisi daerah. "Daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi.

Gambar 3. Kebijakan Pendidikan Nasional “Merdeka Belajar” (Rosyidi, 2020)

Keempat program “Merdeka Belajar” dapat diuraikan sebagai berikut: USBN 2020. Sebelumnya konsep pelaksanaan Ujian Sekolah Berbasis Nasional mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Tetapi berdasarkan Permen-dikbud Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ujian yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional, khususnya pada Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa ujian yang diselenggara-

kan oleh satuan pendidikan merupakan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan yang bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Selanjutnya pada Pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa bentuk ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan berupa portofolio, penugasan, tes tertulis atau bentuk kegiatan lain yang ditetapkan satuan pendidikan sesuai dengan kompetensi yang diukur berdasarkan Standar Nasional Pendidikan. Kemudian pada Pasal 6 ayat 2 menyatakan bahwa kelulusan peserta didik ditetapkan oleh satuan pendidikan/ program pendidikan yang bersangkutan. Dengan demikian jika mengacu pada Permendikbud No 43 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ujian yang diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional ini menunjukkan bahwa sekolah dan guru merdeka dalam menilai hasil belajar siswa. UN.

Ujian Nasional merupakan kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan sesuai dengan Permendikbud Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang kemudian diganti menjadi Permendikbud Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara-

an Ujian yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional. Terkait dengan pelaksanaan UN tahun 2020 sebagaimana disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merupakan kegiatan UN yang terakhir. Selanjutnya di tahun 2021 mendatang UN akan diganti dengan istilah Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter.

Asesmen dimaksud untuk mengukur kemampuan peserta didik untuk bernalar menggunakan bahasa dan literasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika atau numerasi dan penguatan pendidikan karakter. Teknis pelaksanaan ujian tersebut dilakukan di tengah jenjang sekolah seperti kelas IV SD, kelas VIII SMP dan Kelas XI SMA dengan maksud dapat mendorong guru dan sekolah untuk memetakan kondisi pembelajaran serta mengevaluasi sehingga dapat memperbaiki mutu pembelajaran. Hasil ujian asesmen ini tidak digunakan sebagai tolok ukur seleksi siswa ke jenjang berikutnya. Namun arah kebijakan ini mengacu pada level internasional, mengikuti tolok ukur penilaian yang termuat dalam *Programme for International Student Assessment (PISA)* dan *Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS)*

tetapi penuh kearifan local. Untuk kompetensi PISA lebih difokuskan pada penilaian kemampuan membaca, matematika dan sains yang diberlakukan pada Negara-negara yang tergabung dalam *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD). Sementara untuk kompetensi TIMSS lebih menekankan pada penilaian kemampuan matematika dan sains sebagai indicator kualitas pendidikan yang tergabung dalam wadah *International Association for the Evaluation of Educational Achievement*.

Permasalahan RPP Berdasarkan Surat Edaran Mendikbud Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penyederhanaan RPP, meliputi: (1) Penyusunan RPP dilakukan dengan prinsip efisien, efektif dan berorientasi pada siswa; (2) dari 13 komponen RPP yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah yaitu identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kelas, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran dan penilaian hasil pembelajaran disederhanakan menjadi komponen inti yang terdiri dari tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran dan penilaian

pembelajaran (*assessment*) yang wajib dilaksanakan oleh guru dan komponen lainnya hanya sebagai pelengkap; (3) sekolah, kelompok guru matapelajaran dalam sekolah, Kelompok Kerja Guru/ Musyawarah Guru Mata Pelajaran (KKG/ MGMP) dan individu secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan dan mengembangkan format RPP secara mandiri untuk sebesar-besarnya keberhasilan belajar siswa. Dengan adanya kemerdekaan dalam menyusun RPP diharapkan akan lebih banyak interaksi antara guru dan siswa yang lebih aktif, dinamis dengan model pembelajaran yang tidak kaku. PPDB. Sebelumnya PPDB diatur dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Selanjutnya diatur dalam Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 11, dalam persentase pembagiannya meliputi: (1) untuk jalur zonasi paling sedikit 50 persen; (2) jalur afirmasi paling sedikit 15 persen; (3) jalur perpindahan tugas orang tua/wali lima persen; dan (4) jalur prestasi (sisa kuota dari pelaksanaan jalur zonasi, afirmasi dan perpindahan orang tua /wali (0-30 persen). Jelas ini berbeda dengan kebijakan PPDB pada tahun-tahun sebelumnya, setidaknya terdapat dua hal penting: (1) kuota penerimaan siswa baru lewat jalur berprestasi,

semula 15 persen, sekarang menjadi 30 persen; dan (2) adanya satu penambahan baru jalur PPDB, yaitu melalui jalur afirmasi, yang ditujukan terutama bagi mereka yang memegang Kartu IndonesiaPintar (KIP). Dengan demikian untuk PPDB 2020 masih tetap menggunakan sistem zonasi, akan tetapi dalam pelaksanaannya lebih bersifat fleksibel, dengan maksud agardapat mengakomodir ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Terpenting dalam proporsi finalisasinya, daerah berwenang untuk menentukan dan menetapkan wilayah zonasinya. Secara umum sistem zonasi dalam PPDB itu sudahbaik, karena dapat mendorong hilangnya diskriminasi bagi anggota masyarakat untuk bersekolah di sekolah-sekolah terbaik.

Selaku anggota DPD/ MPR RI 2019-2024, Prof.Dr. Hj. Sylviana Murni, SH, M.Si dalam Seminar Nasional “Merdeka Belajar: Dalam Mencapai Indonesia Maju 2045” yang diselenggarakan di Universitas Negeri Jakarta, pada tanggal 10 Maret 2020 menyatakan adanya peran strategis provinsi & kabupaten/ kota dalam menyikapi program “Merdeka Belajar” yaitu:

1. Pemerintah daerah hadir sebagai pelaksana kebijakan dari realisasi pada Pasal 31 ayat 3UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu

sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangkamencerdaskan kehidupan bangsa.

2. Pemerintah memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak Indonesia, utamanya mulai dari ketersediaan sarana dan prasarana.
3. UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah daerah wajib memberikan layanan, kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan berkualitas bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi.
4. Pemerintah harus menyadari bahwasanya anak-anak merupakan investasi masa depan sebuah bangsa.
5. Keterlibatan pemerintah dalam pendidikan adalah mencakup aspek mutu dan pemerataan.

Untuk mengimplementasi program “Merdeka Belajar”, langkah-langkah yang dapat dilakukan provinsi & kabupaten/ kota sebagaimana dipaparkan oleh Prof. Dr. Hj. Sylviana Murni, SH, M.Si dalam Seminar Nasional “Merdeka Belajar: Dalam Mencapai Indonesia Maju 2045” yang diselenggarakan di

Universitas Negeri Jakarta, pada tanggal 10 Maret 2020 yaitu sebagai berikut:

1. Menjalin sinergitas antara pemerintah daerah, kabupaten/kota dengan pembuat kebijakan (Mendikbud) dan lembaga pendidikan.
2. Pengoptimalisasian peran pemerintah daerah kabupaten/ kota hingga menyentuh pendidikan dan tenaga pendidik.
3. Memberikan pengawasan dan pendampingan dari pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap lembaga pendidikan.
4. Melakukan revitalisasi musyawarah antara pemerintah daerah kabupaten/kota dengan lembaga pendidikan.
5. Menyiapkan sarana dan prasarana demi menunjang proses pendidikan yang berkualitas.

Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd, selaku gurubesar tetap Universitas Negeri Jakarta sekaligus Ketua Umum Pengurus Besar PGRI dalam Seminar Nasional “Merdeka Belajar: Dalam Mencapai Indonesia Maju 2045” yang diselenggarakan di Universitas Negeri Jakarta, pada tanggal 10 Maret 2020 menyatakan bahwa untuk mengimplementasikan program

“Merdeka Belajar” perlu: Transformasi Kurikulum Sekolah dan Pembelajaran. Transformasi kurikulum sekolah terkait dengan kurikulum sekolah sesuai dengan undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20/ 2003: 1) Dalam undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20/ 2003, pasal 36 ayat 3 kurikulum disusun dengan memperhatikan keragaman potensi daerah dan lingkungan.

Pasal 37 ayat 1 kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat keterampilan/ kejuruan dan muatan local (muatan local bukan hanya sekedar mata pelajaran yang hanya 2 jam tetapi semua konten dan proses pendidikannya berorientasi wilayah). PP no 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 14 ayat 1: kurikulum SD/ SMP/ SMA dan/ atau merdeka belajar merupakan program kebijakan yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk mengembalikan sistem pendidikan nasional kepada esensi undang-undang dengan memberi kebebasan kepada sekolah, guru dan murid untuk bebas berinovasi, bebas untuk belajar dengan mandiri dan kreatif, dimana kebebasan berinovasi ini harus dimulai dari guru sebagai penggerak pendidikan nasional. Kebijakan program “Merdeka Belajar” diluncurkan untuk mewujudkan kualitas SDM Indonesia terutama di era revolusi industry 4.0.

Kebijakan program “Merdeka Belajar” meliputi empat pokok kebijakan yaitu Penilaian USBN Komprehensif, UN diganti dengan assessment penilaian, RPP dipersingkat dan zonasi PPDB lebih fleksibel. Untuk mengimplementasikan program “Merdeka Belajar” perlu tranformasi kurikulum sekolah dan pembelajaran; transformasi manajemen pendidikan nasional dan transformasi manajemen pendidikan daerah dan otonomi sekolah.

P

ROBLEMATIKA BELAJAR

“Belajar tidak semudah berbuat, karena tanpa belajar mustahil akan ada perbuatan baik, belajar yang baik akan menghasilkan perbuatan yang baik, itulah sebuah kualitas”

A. RANCANGAN BELAJAR

Lembaga pendidikan dan guru dewasa ini dihadapkan pada tuntutan yang semakin berat, terutama untuk mempersiapkan siswa agar mampu menghadapi berbagai dinamika perubahan yang semakin pesat. Perubahan yang terjadi berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, juga menyentuh perubahan dan pergeseran aspek nilai moral yang akan ada dalam masyarakat. Hal tersebut tidak akan terjadi jika dalam pendidikan selalu berorientasi pada tujuan pendidikan yang telah dirumuskan.

Berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 (Sisdiknas, pasal 3), pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadim Makariem mencanangkan program pendidikan baru. Program pendidikan tersebut dinamakan "merdeka belajar".

Konsep merdeka belajar yang di canangkan oleh Nadim Makariem adalah merdeka dalam berfikir. Guru sebagai komponen utama dalam pendidikan memiliki kebebasan secara mandiri untuk menerjemahkan kurikulum sebelum diajarkan kepada para siswa, dengan guru mampu memahami kurikulum yang sudah ditetapkan maka guru akan mampu menjawab kebutuhan dari para siswa selama proses pembelajaran. Dengan ini, rancangan program pendidikan merdeka belajar diharapkan mampu mengembangkan kompetensi guru dalam pem-

belajaran. Pembelajaran terkesan menarik, menyenangkan, dan bermakna, sehingga dalam pencapaian tujuan pendidikan dari pihak guru sebagai pendidik dan siswa sebagai peserta didik mampu terwujud. Merdeka belajar mencakup kondisi merdeka dalam mencapai tujuan, metode, materi, dan evaluasi pembelajaran, baik bagi guru maupun siswa.

Evaluasi pembelajaran merupakan kegiatan utama untuk mengetahui sejauh mana tingkat capaian kemampuan yang dimiliki siswa. Langkah tersebut diperlukan karena dapat dijadikan acuan dalam menetapkan suatu kebijakan pembelajaran selanjutnya. Evaluasi memiliki makna yang berbeda dengan penilaian dan pengukuran. Evaluasi didahului dengan penilaian (*assessment*), sedangkan penilaian didahului dengan pengukuran. Pengukuran dapat diartikan sebagai kegiatan membandingkan hasil pengamatan atau informasi karakteristik suatu objek. Oleh karena itu, penilaian menjadi proses terpenting dalam menentukan hasil evaluasi pembelajaran.

Penilaian (*assessment*) merupakan komponen penting dalam kegiatan pembelajaran. Upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dapat ditempuh melalui peningkatan kualitas penilaiannya. Menurut Mardapi dalam Widoyoko (2011) kualitas pembelajaran dapat dilihat dari hasil penilaiannya. Sistem penilaian

yang baik akan mendorong guru untuk menentukan strategi mengajar yang baik dan memotivasi siswa untuk belajar yang lebih baik. Dengan demikian, secara tidak langsung guru juga sudah sepatutnya untuk berupaya meningkatkan kualitasnya sebagai guru.

Riadi (2017) menyatakan bahwa guru merupakan sumber daya utama dari pembelajaran, sehingga evaluasi terhadap guru termasuk bagian penting dari kegiatan evaluasi pembelajaran di sekolah. Hal ini karena guru diyakini memiliki peran penting dalam meningkatkan keseluruhan kualitas pendidikan. Pada pelaksanaan evaluasi pembelajaran setiap guru seharusnya paham dengan tujuan dan manfaat dari evaluasi atau penilaian.

Tidak jarang terdapat pula guru yang tidak memperdulikan hal ini, yang terpenting ia masuk kelas, mengajar, monoton dalam dalam pelaksanaan evaluasi, berorientasi pada nilai akhir, kebiasaan guru dalam waktu pelaksanaan evaluasi yang sesuai atas kemauan dan kemudahan guru tanpa memperdulikan konsep dasar evaluasi untuk tujuan pendidikan, terlebih di era merdeka belajar. Anggapan guru yang terpenting pada akhir semester ia telah mencapai target kurikulum. Hal demikian yang menjadi problematika pendidikan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa terdapat per-

masalah pada pelaksanaan evaluasi pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan di era merdeka belajar.

Adanya evaluasi di era merdeka belajar, seharusnya menjadikan guru berperan sebagai perantara untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Guru mampu memahami tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran yang semestinya. Selain itu, guru mampu mewujudkan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan, dan menarik, yang menjadi ciri dari era merdeka belajar. Akhirnya, kegiatan evaluasi pun berfungsi sebagaimana mestinya sesuai konsep era merdeka belajar.

B. EVALUASI PEMBELAJARAN

Secara etimologis, evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *evaluation*, artinya penilaian. Menurut Arikunto (2013), dari kata *evaluation* ini diperoleh kata Indonesia *evaluasi* yang berarti menilai (tetapi dilakukan pengukuran terlebih dahulu). Pada kegiatan evaluasi terdapat dua langkah yang harus dilakukan terlebih dahulu yaitu mengukur dan menilai. Mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan satu ukuran, pengukuran bersifat kuantitatif. Adapun menilai adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu

dengan ukuran baik buruk, penilaian bersifat kualitatif. Sejalan dengan itu, definisi lain dijelaskan oleh Arifin dalam Asrul, Ananda, dan Rosnita (2014) bahwa evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas (nilai dan arti) daripada sesuatu, berdasar pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka mengambil suatu keputusan.

Pada bidang pendidikan, evaluasi memiliki beberapa pengertian. Menurut Tyler dalam Arikunto (2012), evaluasi adalah sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagian mana tujuan pendidikan sudah tercapai. Penjelasan lebih luas dikemukakan oleh Conbanch dan Stufflebeam dalam Arikunto (2012), bahwa proses evaluasi bukan sebatas mengukur sejauh mana tujuan tercapai, tetapi digunakan untuk membuat keputusan dalam program pembelajaran selanjutnya. Jadi, evaluasi pembelajaran dapat diartikan sebagai proses pengumpulan data untuk menentukan kualitas pembelajaran, mengetahui sejauh mana tujuan pendidikan sudah tercapai dalam rangka mengambil suatu keputusan untuk program pembelajaran selanjutnya.

Pada pembelajaran yang terjadi di sekolah, guru sebagai subjek evaluasi merupakan salah satu pihak

yang bertanggung jawab terhadap hasil belajar siswa. Oleh karena itu, dalam melakukan evaluasi sudah sepatutnya guru mengetahui tujuan dan fungsi evaluasi. Menurut Riadi (2017) tujuan evaluasi secara umum, yaitu: (a) Memperoleh data pembuktian yang akan menjadi petunjuk sampai mana tingkat kemampuan dan keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan kurikuler setelah menempuh proses pembelajaran dalam jangka waktu yang ditentukan; (b) Mengukur dan menilai sampai mana efektivitas pengajaran metode mengajar yang telah diterapkan oleh pendidik, serta kegiatan belajar yang dilaksanakan oleh siswa. Adapun fungsi evaluasi ialah untuk mengetahui faktor keberhasilan dan kegagalan siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar, sehingga dapat dicari dan ditemukan jalan keluar atau cara perbaikannya.

Menurut Slameto dalam Riadi (2017) secara garis besar fungsi evaluasi ialah untuk (a) Mengetahui kemajuan kemampuan belajar siswa; (b) Mengetahui status akademis siswa dalam kelas; (c) Mengetahui penguasaan, kekuatan dalam kelemahan siswa atas suatu unit pelajaran; (d) Mengetahui efisiensi metode mengajar yang digunakan guru; (e) Menunjang pelaksanaan BK di sekolah; (f) Memberi laporan kepada siswa dan orang tua; (g) Hasil evaluasi dapat

digunakan untuk keperluan promosi siswa, pengurusan (streaming), dan perencanaan pendidikan; (h) Merupakan feedback ba-gi siswa, guru, dan program pembelajaran; i) Sebagai alat motivasi breleajar mengajar; (j) Pegembangan dan perbaik-an kurikulum sekolah yang bersangkutan. Selain penting- nya pengetahuan guru terhadap tujuan dan fungsi evaluasi, maka guru juga perlu mengetahui beberapa model evaluasi yang tepat.

Menurut Purwanto dalam Muryadi (2017), mengemu- kakan model evaluasi yang diungkapkan Scriven ada 2, yaitu evaluasi formatif dan suamatif. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan pada sistem masih dalam pengembangan yang penyempurnaannya terus dilakukan atas dasar hasil evaluasi. Sementara itu, evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan setelah sistem su-dah selesai menempuh pengujian dan penyempurnaan.

Model evaluasi di atas tentunya disesuaikan dengan kebutuhan dalam pembelajaran. Pada proses pembelajaran, evaluasi merupakan komponen penting, kegiatan dan langkah utama yang harus dilakukan guru. Menurut Riadi(2017), penilaian dan evaluasi bertujuan untuk mengeta- hui kemampuan siswa apakah sudah memenuhi Standar Kompetensi Lulusan (SKL) atau belum. SKL merupak- an klasifikasi

kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) digunakan sebagai pedoman dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Tak jarang, setiap satuan pendidikan pada waktu tertentu dalam satu periode pendidikan akan menyelenggarakan evaluasi. Hal itu dimaksudkan bahwa setiap waktu tertentu selama satu periode pendidikan selalu melakukan penilaian terhadap hasil belajar mengajar yang telah dicapai oleh siswa ataupun guru.

Secara umum pendidikan ditujukan untuk mengubah manusia sebagai makhluk Tuhan dan warga negara yang berkepribadian baik, guna meningkatkan kualitas diri. Menurut Musanna (2017) tujuan pendidikan tercermin pada pengertian pendidikan yang dikemukakan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memaknai pendidikan sebagai proses pemberian tuntunan untuk menumbuhkembangkan potensi anak.

Tujuan pendidikan di atas mengarah pada pendampingan anak dalam proses penyempurnaan ketertiban tingkah laku. Lebih jelasnya, konsep pendidikan diarahkan pada pengembangan kompetensi siswa dengan memaksimalkan potensi alami siswa dan mengoptimalkan daya-daya yang

berada di sekelilingnya. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 (Sisdiknas, pasal3) juga menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

C. ERA MERDEKA BELAJAR

Menurut KBBI Edisi V, era memiliki arti kurun waktu dalam sejarah; sejumlah tahun dalam jangka waktu antara beberapa peristiwa penting dalam sejarah; masa. Sementara itu, ancaman program pendidikan "merdeka belajar" oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim menegaskan bahwa guru dan siswa memiliki kebebasan dalam berinovasi, mampu belajar dengan mandiri, dan kreatif (Aesthetic, 2019). Pada dunia pendidikan, merdeka belajar mencakup kondisi merdeka dalam mencapai tujuan, metode, materi, dan evaluasi pembelajaran baik bagi guru maupun siswa (Lubis, 2020).

Era merdeka belajar dapat diartikan sebagai masa di mana guru dan sis-wa memiliki kemerdekaan atau kebebasan berfikir, bebas dari beban pendidikan yang membelenggu agar mampu mengembangkan potensi diri mencapai tujuan pendidikan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2019- 2024, Nadiem Makarim, memperkuat program pendidikan "merdeka belajar" dengan meluncurkan 4 kebijakan pokok, yaitu: pertama, Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) akan diganti dengan assessment yang diselenggarakan oleh sekolah berbasis portofolio. Kedua, Ujian Nasional (UN) akan dihapus dan diganti asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Ketiga, terkait Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), guru dapat bebas memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP yang berisi tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan assessment. Keempat, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang lebih fleksibel di mana setiap daerah diberi wewenang dalam menentukan presentase PPDB. Berdasarkan hal tersebut, program pendidikan "merdeka belajar" memberi paradigma baru bahwa nantinya pendidikan tidak lagi hanya sebatas penilaian kognitif saja, namun juga penilaian afektif dan psikomotorik. (Wartoni,2019).

Fungsi dan tujuan pendidikan nasional tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 (Sisdiknas, pasal 3), pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, mencanangkan program pendidikan yang disebut "merdeka belajar". Ancangan tersebut diharapkan mampu membuat guru dan siswa merasakan kenyamanan dalam pembelajaran, termasuk dalam evaluasi.

Selain untuk mencapai tujuan pendidikan, hal yang pokok adalah menjadi jembatan untuk meningkatkan dan memperkuat kompetensi guru dalam mengevaluasi. Kompetensi guru dalam mengevaluasi siswa merupakan hal yang penting dan sangat berpengaruh dalam menyokong kemajuan pendidikan, terutama pencapaian tujuan pendidikan. Melalui pemahaman evaluasi, guru dapat mengetahui apakah pembelajaran yang selama ini

dilakukan dapat berjalan efektif dan mendatangkan perubahan yang lebih baik atau tidak. Oleh karena itu, sikap profesionalisme menjadi tuntutan bahkan tantangan bagi guru. Menurut Riadi (2017) profesi guru menjadi lebih berat tatkala menyangkut peningkatan kemampuan siswa. Sementara itu, kemampuan dirinya mengalami stagnasi, sehingga guru seharusnya juga meningkatkan kualitas dengan memperkuat kompetensi profesi keguruan. Namun kenyataannya, pada pendidikan kini masih ada permasalahan terlebih dalam ketidakberhasilan guru melakukan evaluasi pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan di era merdeka belajar.

Ketidakberhasilan guru dalam mengevaluasi bisa dilihat dengan kegagalan guru dalam menilai. Menurut Riadi(2017) beberapa kegagalan guru dalam melakukan penilaian, yaitu:

- 1) Pada mata pelajaran matematika hampir semua guru telah melaksanakan evaluasi di akhir proses pembelajaran. Namun, hasil yang diperoleh terkadang kurang memuaskan, hasil yang dicapai di bawah standar atau di bawah rata-rata. Pada mata pelajaran lainnya (selain matematika) evaluasi dilaksanakan pada akhir pelajaran dan saat proses pembelajaran berlangsung. Kapan waktu pelaksanaan evaluasi

tersebut tidak menjadi masalah bagi guru, yang terpenting dalam satu kali pertemuan ia telah melaksanakan penilaian terhadap siswa.

- 2) Selain kondisi tersebut, terdapat pula guru yang enggan melaksanakan evaluasi di akhir pembelajaran karena keterbatasan waktu. Guru beranggapan lebih baik menjelaskan semua materi sampai selesai untuk satu kali pertemuan. Pada pertemuan berikutnya di awal pembelajaran siswa diberi tugas atau beberapa soal yang berkaitan dengan materi tersebut.
- 3) Penilaian di akhir pembelajaran tidak mutlak dengan tes tertulis, bisa dengan tes lisan atau tanya jawab. Hal tersebut karena guru merasakan kepraktisan, guru tidak perlu susah payah mengoreksi hasil evaluasi siswa. Adapun akibat dari teknik tersebut adalah siswa merasa gugup sehingga tidak mampu menjawab dengan tepat meskipun tahu jawaban soal yang diajukan. Selain itu, tes lisan terlalu menghabiskan waktu dan guru harus memiliki banyak persediaan soal.
- 4) Pada tes lisan tersebut, terdapat pula guru yang mewakilkan beberapa siswa yang pandai, siswa yang kurang pandai, dan beberapa siswa yang sedang kemampuannya untuk menjawab

beberapa pertanyaan atau soal yang ber-kaitan dengan materi.

Permasalahan lain dalam evaluasi pembelajaran adalah teknik penilaian yang dilaksanakan di suatu instansi pendidikan sangat monoton, dalam bentuk tes tertulis, lisan, dan portofolio. Penyebabnya karena kurang pemahaman dari guru terkait evaluasi, termasuk dalam proses pembelajaran terkadang guru bukan karena mahir dalam hal tertentu melainkan karena tidak dikuasainya hal-hal lain. Selain itu, guru hanya menilai pada evaluasi hasil belajarsaja.

D. KELEKATAN GURU DAN SISWA

Guru tidak memperhatikan pada proses, jujur atau tidaknya dalam mengerjakan soal evaluasi bukanlah suatu hal yang utama. Realitanya pun menunjukkan hal serupa, yang mana nilai rapor atau ijazah yang tinggi dapat menentukan diterima atau tidaknya sang pemilik nilai dalam melamar kerja. Hal tersebut menjadikan sesuatu yang takaneh lagi ketika dalam instansi pendidikan, siswa lebih mengejar nilai akademik yang tinggi dan mengabaikan proses yang baik. Kaitannya dalam permasalahan evaluasi, saat interaksi pembelajaran siswa juga memerlukan

hubungan emosional dari guru. Guru perlu membentuk hubungan emosional dengan siswa sebagai pendukung proses pembelajaran. Ketika proses pembelajaran disertai dengan hubungan emosional antara guru dan siswa, maka proses pembelajaran menjadi menyenangkan dan suasana itulah yang diharapkan siswa. (Ali M, 2015).

Permasalahan evaluasi bahwa guru hanya menilai pada evaluasi hasil akhir, Sawali (2015) menambahkan terkait evaluasi yang dilakukan seharusnya bukan sebatas evaluasi hasil belajar, namun melibatkan evaluasi program, dan proses. Dengan demikian, guru perlu menyediakan bahan kajian evaluasi dari siswa, sehingga guru dapat berusaha mencari dan mengumpulkan data atau informasi tentang siswa yang akan dievaluasi. Setelah itu, guru bisa memberi keputusan sesuai tujuan evaluasi. Adanya hasil evaluasi tersebut dapat terlihat letak kekurangan dan memperbaiki untuk pembelajaran ke depannya. Selain itu, evaluasi juga dapat dijadikan feed back bagi guru sehingga memperbaiki dan menyempurnakan program dan kegiatan selanjutnya di sekolah.

Evaluasi yang selama ini menunjukkan bahwa pelaksanaan evaluasi sebatas sumatif saja. Padahal, dari model evaluasi yang ada, yaitu formatif dan

sumatif kedua-duanya saling melengkapi untuk menyempurnakan program pendidikan. Evaluasi formatif dilaksanakan pada sistem masih dalam pengembangan, sedangkan evaluasi sumatif dilakukan setelah sistem sudah selesai menempuh pengujian dan penyempurnaan. Dengan demikian, sudah sepatutnya guru mulai mengadakan perubahan. Evaluasi yang dilakukan harus mencakup evaluasi formatif dan sumatif, evaluasi yang dilaksanakan pada saat sistem pembelajaran masih dalam pengembangan dan setelah sistem tersebut sudah selesai menempuh pengujian dan penyempurnaan.

Beberapa masalah di atas menjadikan kegiatan evaluasi tidak berfungsi, terlebih di era merdeka belajar. Era merdeka belajar mengharapkan kondisi di mana siswa bisa mencapai tujuan pendidikan melalui evaluasi yang merdeka. Kemerdekaan evaluasi yang dimaksud adalah adanya rasa senang dan nyaman dari guru dan siswa dalam kegiatan evaluasi. Selain itu, bagi guru adanya kebebasan melakukan evaluasi tentunya berdasar kompetensi profesi keguruannya bukan karena unsur keuntungan pribadi. Sementara bagi siswa, kemerdekaan evaluasi ialah evaluasi yang mampu mengembangkan potensi sebagai peserta didik, sesuai tujuan pendidikan. Namun sebaliknya, evaluasi yang seharusnya mampu

menjadi tolak ukur kemampuan siswa dan mengetahui sejauh mana tingkat keefektifan pembelajaran, kini tidak sepenuhnya dapat dijadikan alat ukur pendidikan. Termasuk kebebasan guru yang berlebih tanpa disertai kompetensi. Pada pembelajaran, siswa tidak merasa tertarik dan nyaman. Rasa kemerdekaan belajar dalam evaluasi tersebut terhambat, baik bagi guru dan siswa.

Berdasarkan uraian di atas, evaluasi yang dilakukan saat ini tidak sesuai dengan tujuan pendidikan di era merdeka belajar. Oleh karena itu, peran guru sebagai evaluator perlu ditingkatkan. Begitu pula pemahaman guru dalam tujuan dan fungsi diadakannya evaluasi. Pada dasarnya, guru harus meningkatkan dan mengembangkan kompetensi profesi keguruan, dengan kompetensi yang ada mampu menjadikan guru yang profesional. Pada era merdeka belajar mencakup kondisi merdeka dalam mencapai tujuan, metode, materi, dan evaluasi pembelajaran. Kegiatan evaluasi inilah yang menjadikan guruberperan sebagai perantara untuk mewujudkan tujuan pendidikan di era merdeka belajar.

Guru harus memahami tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Selain itu, Guru diharapkan mampu mewujudkan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan, dan menarik, sehingga kegiatan evaluasi pun

berfungsi sebagaimana mestinya. Realitanya, terdapat guru yang tidak memperdulikan hal tersebut. Pada pembelajaran yang terpenting guru masuk kelas, mengajar, melakukan evaluasi yang monoton, mengutamakan pada nilai akhir, melaksanakan waktu evaluasi sesuai atas ke- mauan dan kemudahan guru tanpa memperdulikan konsep dasar evaluasi untuk tujuan pendidikan. Anggapan guru yang terpenting pada akhir semester ia telah mencapai target kurikulum. Hal tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara evaluasi pembelajaran dengan tujuan pendidikan di era merdeka belajar.

MERDEKA BELAJAR MENURUT FILSAFAT PENDIDIKAN HUMANISME

“Belajar, Berlatih, Berbagi, Berkolaborasi dan Berbahagia, Prinsip 5 B”

A. MANUSIA TANPA PENDIDIAN

Filsafat merupakan hal yang penting bagi pendidikan, karena tanpa filsafat pendidik akan bisa kehilangan pedoman ketika merancang, melaksanakan, dan meningkatkan kualitas pendidikan (Ornstein, 2007). Zais (1976) juga menjelaskan bahwa filsafat mengkaji *knowledge of the good life* yaitu membantu pendidik memahami hakikat hidup yang baik bagi individu dan masyarakat. Kehidupan yang baik inilah yang menjadi dasar dan domain pendidikan dan kurikulum. Filsafat dapat membantu pengembang kurikulum dalam menentukan kriteria tujuan, proses, dan sasaran kurikulum Pendidikan (Zais, 1976). Hal inilah yang mendasari alasan mengapa filsafat merupakan salah satu fondasi kurikulum, karena filsafat memuat

pengetahuan yang baik bagi siswa atau mahasiswa untuk mencapai keberhasilan hidup.

Terkait dengan filsafat pendidikan, Ornstein dan Hunkins (2013) mengemukakan bahwa filsafat pendidikan menentukan keputusan, alternatif dan pilihan kependidikan yang dipedomani pendidikan dan pengembang kurikulum (Ornstein & Hunkins, 2013). Filsafat pendidikan adalah aktivitas berpikir yang mengatur, menyelaraskan dan memadukan proses pendidikan. Pohan (2019) menyatakan bahwa filsafat pendidikan dijadikan dasar dan pandangan dasar bagi pelaksanaan Pendidikan (Pohan, 2019).

Konsep pendidikan dapat ditinjau dari dua aspek yaitu membantu dan menolong. Hakikat pendidikan membantu yaitu membantu seseorang menjadi manusia seutuhnya, karena manusia tidak bisa hidup secara individual namun ia membutuhkan bantuan dari orang lain. Salah satu bentuk membutuhkan bantuan itu adalah pendidikan. Berikutnya, hakikat pendidikan adalah menolong manusia menjadi manusia. Pada setiap manusia memiliki potensi ada yang menjadi manusia ada yang tidak menjadi manusia (memiliki sifat kebinatanga). Di sinilah pentingnya peranan pendidikan untuk memanusiaikan manusia. Oleh sebab itu, dengan pendidikan manusia diarahkan ke perbuatan yang benar dan mengembangkan potensi manusia agar

memiliki kompetensi dalam hidupnya.

Pendidikan dapat dikatakan sebagai aplikasi pemikiran filosofis. Oleh sebab itu filsafatlah yang memberikan kerangka konseptual yang holistik tentang manusia dan pendidikan. Pemaknaan pendidikanpun berawal dari pemaknaan hakikat manusia. Berbagai aliran filsafat yang berbicara tentang manusia melahirkan teori pendidikan yang dipraktikan dalam proses pembelajaran yang dirancang oleh pendidik atau pakar pendidikan. Filsafat dikatakan sebagai induk dari segala pemikiran dalam teori pendidikan

Munculnya kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun2020 ini dengan adanya Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) memberikan pergeseran pandangan di dunia pendidikan termasuk pendidikan di perguruan tinggi. Konsep Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka terkandung arti kemandirian dan kemerdekaan bagi lembaga pendidikan baik di sekolah maupun perguruan tinggi. Menurut Nadiem Makarim, konsep merdeka belajar dipilih karena terinspirasi dengan filsafat K.H Dewantara dengan esensi pendidikannya bermakna kemerdekaan kemandirian. Merdeka belajar dianggap relevan dan tepat dilaksanakan di era demokrasi pendidikan saat ini. Makna merdeka ini dapat diberlakukan bagi pendidik di kelas

untuk bebas memilih metode mengajar yang tepat untuk anak didiknya dan merdeka memilih elemen-elemen yang terbaik dalam kurikulum. Makna kemerdekaan dan kebebasan merupakan pendidikan yang menekankan pada demokrasi pendidikan.

Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka merupakan suatu bentuk reformasi yang dilakukan dalam pembelajaran mulai dari jenjang pendidikan prasekolah hingga pendidikan tinggi. Reformasi dalam pembelajaran merdeka belajar ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 15 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Dengan adanya kebijakan pemerintah di atas, maka perguruan tinggi di Indonesia melakukan perubahan kurikulum. Dalam Kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengikuti perkuliahan di luar program studi dalam perguruan tinggi yang sama selama satu semester atau setara dengan 20 sks. Untuk hal ini, perkuliahan terbatas pada mata kuliah wajib yang telah ditetapkan di universitas. Selanjutnya, mahasiswa juga diberi kesempatan maksimal dua semester untuk mengikuti perkuliahan di luar perguruan tinggi, namun masih dalam program studi yang sama. Misalnya, Mahasiswa Program Studi Pendidikan

Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang (UNP) dapat mengikuti perkuliahan di Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Dalam pelaksanaannya, kedua program studi melakukan kerjasama antar universitas. Selain mengikuti perkuliahan di luar perguruan tinggi, mahasiswa juga dapat mengikuti kegiatan magang, proyek desa, mengajar di sekolah-sekolah, penelitian, pertukaran mahasiswa atau membangun *start up*.

Dari pemaparan di atas, terlihat bahwa pada program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini terdapat suatu inovasi belajar sehingga dapat menghasilkan mahasiswa yang inovatif, kreatif dan sekaligus dapat mengembangkan potensi dirinya dalam bidang yang dipilih. Pelaksanaan di lapangan, mahasiswa dapat berperan sebagai pendipta kerja (*job creator*).

Beberapa artikel yang telah ditelusuri terkait dengan konsep merdeka belajar dalam pandangan filsafat pendidikan yaitu tulisan dari Dela Khoirul Ainia (2020) menjelaskan bahwa merdeka belajar memiliki relevansi dengan pemikiran filsafat Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang mempertimbangkan aspek keseimbangan cipta, rasa, dan karsa serta siswa diharapkan mengimplementasikan nilai-nilai karakter bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, Siti Mustaghfiroh (2020)

menjelaskan konsep merdeka belajar memiliki arah dan tujuan yang sama dengan konsep aliran filsafat pendidikan progresivisme John Dewey (Mustaghfiroh, 2020). Keduanya sama-sama memiliki konsep kemerdekaan dan keleluasaan kepada lembaga pendidikan untuk mengeksplorasi potensi peserta didik secara maksimal sesuai dengan minat dan bakatnya. Selanjutnya, juga dijelaskan bahwa merdeka belajar menjadi salah satu solusi kongkrit untuk mengatasi permasalahan pendidikan yang begitu komplit. Berbeda dengan tulisan ini, akan menjelaskan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka dalam pandangan filsafat pendidikan humanisme. Digunakannya filsafat pendidikan humanisme ini karena dalam Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka memberikan peluang atau kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mengembangkan potensi dirinya secara kreatif dan inovatif dalam perkuliahan di dalam perguruan tinggi, luar perguruan tinggi, dunia industri, dan masyarakat.

Dengan mengkaji merdeka belajar dan kampus merdeka dari sudut pandang filsafat pendidikan yang berbeda akan memberikan keberagaman pandangan dalam literatur, khususnya dalam kajian filsafat pendidikan. Keberagaman pandangan akan dapat mengungkap sisi merdeka belajar secara lebih dalam dan komprehensif. Untuk itu, fokus masalah dalam tulisan ini

adalah mengkaji Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) dalam pandangan filsafat pendidikan humanisme.

Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Ada dua konsep yang esensial dalam “Merdeka Belajar” dan “Kampus Merdeka”. *Pertama*, konsep merdeka belajar mengandung arti adanya kemerdekaan berpikir. Menurut Nadiem Makarim bahwa esensi kemerdekaan berpikir harus dimulai terlebih dulu oleh para pendidik. Pandangan seperti ini harus dilihat sebagai suatu upaya untuk menghormati perubahan dalam pembelajaran di lembaga Pendidikan baik di sekolah dasar, menengah maupun perguruan tinggi.

Kedua, kampus merdeka merupakan kelanjutan dari konsep merdeka belajar. Kampus merdeka merupakan upaya untuk melepaskan belenggu untuk bisa bergerak lebih mudah. Arti kampus merdeka adalah:

- a. Adanya otonomi perguruan tinggi baik perguruan tinggi negeri maupun swasta. Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk melakukan pembukaan atau mendirikan program studi baru. Otonomi akan diberikan bagi perguruan tinggi yang memiliki

akreditasi A dan B. Selanjutnya, perguruan tinggi tersebut telah melakukan Kerjasama dengan organisasi atau univertas yang termasuk dalam QS Top 100 World Universities. Kerjasama berbentuk penyusunan kurikulum, praktik kerja atau magang serta penempatan kerja bagi mahasiswa.

- b. Program re-akreditasi otomatis. Program ini bersifat otomatis bagi semua peringkat dan bersifat sukarela bila perguruan tinggi atau prodi telah siap untuk naik peringkat. Akreditasi yang telah ditetapkan oleh BAN-PT tetap berlaku selama lima tahun dan akan diperbaharui secara otomatis. Pengajuan Kembali dilakukan paling cepat 2 tahun setelah mendapatkan akreditasi terakhir. Bagi perguruan tinggi atau prodi yang telah memperoleh akreditasi A, maka diberikan kesempatan untuk memperoleh akreditasi Internasional.
- c. Kebebasan bagi perguruan tinggi negeri BLU (Badan Layanan Umum) dan Satker (Satuan Kerja) untuk menjadi PTN BH (Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum).
- d. Hak belajar selama tiga semester di luar program studi. Perguruan tinggi wajib memberikan hak

untuk mahasiswa secara sukarela mengambil atau tidak di luar perguruan tingginya sebanyak dua semester atau setara dengan 40 SKS. Selanjutnya, mahasiswa juga dapat mengambil sks di prodi lain di dalam kampus sebanyak satu semester.

Hak belajar tiga semester di luar program studi adalah menyiapkan kompetensi mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia industri dan kemajuan teknologi yang begitu pesat. Kompetensi mahasiswa harus disesuaikan dengan tuntutan zaman yang mengalami perubahan tersebut sehingga adanya *link and match* dengan dunia industri dan dunia kerja serta masa depan. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 15 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa:

1. Bentuk pembelajaran dilakukan dalam program studi dan di luar program studi.
2. Bentuk pembelajaran di luar program studi merupakan proses pembelajaran yang terdiri dari:
 - a) Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama;
 - b) Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda;

- c) Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda;
 - d) Pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi.
3. Proses pembelajaran di luar program studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama antara perguruan tinggi dengan perguruan tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester.
 4. Proses pembelajaran di luar program studi ditentukan oleh Kementerian dan/atau pemimpin perguruan tinggi.
 5. Proses pembelajaran di luar program studi dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.
 6. Proses pembelajaran di luar program studi dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan.

Hak belajar diberikan kepada mahasiswa tiga semester di luar program studi yaitu berupa satu semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan dua semester melaksanakan kegiatan pembelajaran di luar perguruan tinggi. Bentuk

kegiatan di luar perguruan tinggi dapat berupa magang atau praktik kerja di industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan Pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi atau proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan.

Tujuan MBKM adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills* agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Bentuk kegiatan pembelajaran mengacu pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 15 Ayat 1 dinyatakan dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi yang meliputi pertukaran pelajar, dosen dan program summer school, visiting scholar, visiting lecturer dan sebagainya.

B. PERTUKARAN PELAJAR; KONSEP MERDEKA BELAJAR

Pertukaran pelajar dilakukan antar perguruan tinggi dengan sistem transfer kredit. Pertukaran pelajar dapat membentuk sikap mahasiswa seperti menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama,

kepercayaan, pendapat atau temuan orisinal orang lain, bekerjasama, memiliki kepekaan sosial atau kepedulian sosial terhadap masyarakat dan lingkungan. Adapun tujuan pertukaran pelajar ini adalah: (1) Belajar lintas kampus (dalam dan luar negeri), sehingga terbangun persaudaraan lintas budaya dan suku. (2) Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama sehingga terbangun semangat persatuan dan kesatuan bangsa.

Melaksanakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas Pendidikan, baik antar perguruan tinggi dalam negeri maupun kondisi tinggi dalam negeri dengan luar negeri. Dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama, kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Bentuk pembelajaran yang diambil untuk menunjang tercapainya capaian pembelajaran yang telah tertuang dalam struktur kurikulum atau pengembangan kurikulum dalam memperkaya capaian pembelajaran lulusan dalam bentuk mata kuliah pilihan.

PRODI	CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)	KOMPETENSI TAMBAHAN	PRODI
Desain Produk	1) Mampu merancang produk	1) Mampu, Menyusun, menganalisis dan menginterpretasi rencana keuangan	Akuntansi
	2) Mampu Mengevaluasi obyek desain		Manajemen
	3) Mampu Menyusun dan menyampaikan solusi desain secara visual	2) Mampu melaksanakan fungsi pemasaran 3) Mampu merancang program dalam bidang periklanan	Komunikasi

Tabel 1. Capaian Pembelajaran Lulusan dan Kompetensi Tambahan

Sumber: Panduan MBKM 2020 Kemendikbud.

Sebagai salah satu contoh kegiatan pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama misalnya mahasiswa Prodi Desain Produk harus mampu menguasai minimal ketiga CPL prodi, tetapi memerlukan kompetensi tambahan yang dapat diambil dari prodi lain yaitu prodi Akuntansi yang menunjang kompetensi lulusan. Dengan demikian mahasiswa dapat mengambil mata kuliah di Prodi Akuntansi, prodi Manajemen atau Prodi Komunikasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Untuk memperkaya pengalaman dan keilmuan, mahasiswa dapat mengikuti bentuk pembelajaran di perguruan tinggi lain dengan prodi yang sama. Perguruan tinggi yang dipilih adalah yang memiliki kekhasan atau dapat menunjang pembelajaran dan mengoptimalkan CPL. Pembelajaran dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemdikbud. Sebagai contoh Prodi kehutanan pada PT A dan PT B memiliki CPL yaitu mampu merancang dan mengelola suatu ekosistem hutan. Mahasiswa PT A dapat mengambil mata kuliah yang ditawarkan oleh PT B atau sebaliknya.

PRODI	CPL PRODI	MK PRODI PT A	MK PRODI PT B
Kehutanan	Mampu merancang dan mengelola suatu ekosistem hutan	1) Pengelolaan ekosistem hutanmangrove 2) Pengelolaan ekosistem hutan pegunungan	1) Pengelolaan ekosistem hutan dataran rendah 2) Pengelolaan ekosistem hutanpantai

Sumber: Panduan MBKM 2020 Kemendikbud

Selain itu, kegiatan pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemdikbud. Contohnya mahasiswa Prodi Teknik Industri pada PT A harus mampu menguasai CPL untuk merancang sistem atau komponen, proses dan produk industri untuk memenuhi kebutuhan dalam batasan-batasan realistis misalnya ekonomi, lingkungan, dan kesehatan. Mereka memerlukan kompetensi tambahan dari prodi lain di PT berbeda. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah Energi dan Mesin Pertanian pada Prodi Teknologi Pertanian PT B, dan mata

kuliah Permodelan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan. Lebih jelasnya lihat tabel di bawah ini:

PRODI	CPL PRODI	KOMPETENSI TAMBAHAN	MK PRODI LAIN PT LAIN
Teknik Industri	Mampu merancang sistem/komponen, proses dan produk industri untuk memenuhi kebutuhan dalam batasan-batasan realistiknya (ekonomi, lingkungan, kesehatan)	Mampu merancang produk untuk kebutuhan pertanian Mampu membangun model untuk menganalisis sumber daya dan lingkungan	Energi dan Mesin Pertanian Permodelan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan

Tabel 3. CPL Prodi dan Kompetensi Tambahan

Sumber: Panduan MBKM 2020 Kemendikbud

C. MAGANG DAN PRAKTIK KERJA, ALUR PENDIDIKAN MERDEKA

Magang dilakukan 1-2 semester dengan melakukan pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*). Kegiatan selama 6 bulan disetarakan dengan 20 sks yang dinyatakan dalam bentuk kompetensi dalam bentuk *hard skills* dan *soft skills*. Kegiatan pembelajar-

an dilakukan melalui kerjasama dengan mitra seperti perusahaan, Yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, dan perusahaan rintisan. Mahasiswa memperoleh *hard skills* seperti keterampilan, *complex problem solving*, dan *analytical skills*. Sedangkan *soft skills* seperti etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama dan sebagainya. Kegiatan pembelajaran di industri menjadikan mahasiswa mengenal tempat kerja dan lebih siap memasuki dunia kerja nantinya. Bagi perguruan tinggi, juga memperoleh informasi terkait permasalahan yang dihadapi di dunia industri.

Ada dua bentuk penyetaraan bobot kegiatan yaitu bentuk bebas (*free form*) dan bentuk terstruktur (*structured form*). Selain bentuk bebas dan terstruktur, ada juga bentuk gabungan (hibrida). *Pertama*, bentuk bebas (*free form*) merupakan kegiatan selama 6 bulan disetarakan dengan 20 sks tanpa penyetaraan dengan mata kuliah, namun dinyatakan dalam bentuk capaian kompetensi *hard skills* dan *soft skills*. Misalnya mahasiswa magang di industri selama 6 bulan bentuk capaian kompetensinya adalah:

Hard Skills

- a. Merumuskan permasalahan keteknikan : 3 sks
- b. Menyesuaikan permasalahan teknis di lapangan : 3 sks
- c. Kemampuan sintesa dalam bentuk design : 4 sks

Soft Skills

- a. Kemampuan berkomunikasi : 2 sks
- b. Kemampuan bekerjasama : 2 sks
- c. Kerja keras : 2 sks
- d. Kepemimpinan : 2 sks
- e. Kreativitas : 2 sks

Kedua, bentuk berstruktur (*structured form*) dilaksanakan secara terstruktur sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. 20 sks dinyatakan dalam bentuk penyetaraan dengan mata kuliah dimana kompetensinya sejalan dengan kompetensi kegiatan magang. Contoh mahasiswa Teknik Kimia magang di Industri Petrokimia setara dengan belajar mata kuliah yaitu:

- a. Fenomena transport : 2 sks
- b. Unit operasi : 3 sks
- c. Industri proses kimia : 3 sks
- d. Rekayasa reaksi kimia : 3 sks
- e. Kontrol proses kimia : 3 sks
- f. Teknologi separasi : 2 sks
- g. Laporan Akhir sebagai pengganti skripsi : 4 sks

Kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar dapat dilakukan di sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Tempat praktik di sekolah bisa sekolah yang berada di daerah kota dan terpencil. Tujuan asistensi mengajar adalah (1) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang berminat dalam bidang pendidikan untuk memperdalam praktek dan keilmuan menjadi guru di sekolah; dan (2) Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan perguruan tinggi.

Seperti kegiatan penelitian, kegiatan ini memberi kesempatan kepada mahasiswa yang berminat menjadi peneliti. Bentuk kegiatan dapat dilakukan di lembaga riset atau pusat studi. Terlibatnya mahasiswa

dalam penelitian dapat membangun cara berpikir kritis sehingga mereka dapat mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik. Kegiatan dapat dilakukn selama 1-2 semester.

Ada tiga hal yang menjadi tujuan kegiatan penelitian yaitu (1) Mahasiswa diharapkan dapat ditingkatkan mutunya karena memperoleh pengalaman dalam proyek penelitian sehingga memperkuat peneliti secara topikal; (2) Memperoleh kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung di lembaga riset atau pusat studi; dan (3) Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium sehingga adanya regenerasi peneliti. Mahasiswa didampingi selama melakukan penelitian dan melakukan riset sesuai arahan lembaga riset, membuat *logbook* dan Menyusun laporan di akhir kegiatan.

Pelibatan pada proyek Kemanusiaan, di Indonesia banyak mengalami bencana alam seperti gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, bencana hidrologi dan sebagainya. Dengan adanya bencana tersebut mahasiswa dapat menjadi "*foot soldiers*" dalam proyek-proyek kemanusiaan dan pembangunan. Tujuan program proyek kemanusiaan ini adalah (1) Menyiapkan mahasiswa yang unggul dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika; dan (2) Melatih mahasiswa

memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada dan ikut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahlian masing-masing. Mahasiswa didampingi oleh dosen dan lembaga mitra untuk mengawasi, menilai dan mengevaluasi kegiatan yang dilakukan. Lembaga mitra bisa berada di dalam negeri maupun luar negeri. Lembaga mitra dalam negeri seperti Pemda, PMI, BPBD, BNPB dan sebagainya. Sedangkan Lembaga mitra luar negeri seperti UNESCO, WHO, UNHCR, UNOCHA dan sebagainya.

Kegiatan Wirausaha, kegiatan wirausaha mendorong pengembangan minat mahasiswa di bidang wirausaha. Tujuannya adalah (1) Mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha agar mengembangkan usahanya lebih dini dan secara terbimbing; dan (2) Menangani permasalahan pengangguran seperti pengangguran intelektual di kalangan sarjana. Kegiatan pembelajaran dilakukan dalam bentuk wirausaha yang belum atau sudah ditetapkan dalam kurikulum program studi. Selama melakukan kegiatan, mahasiswa dibimbing oleh dosen. Kegiatan dilakukan dapat memenuhi 20 sks/semester atau 40 sks/tahun. Ukuran keberhasilan capaian pembelajaran bila mahasiswa berhasil membuat *start up* di akhir, maka mendapatkan nilai A.

Studi/Proyek Independen, proyek independen untuk melengkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal

perkuliahan namun terdapat dalam silabus program studi atau fakultas. Mahasiswa bisa membuat karya inovatif untuk dilombakan di tingkat nasional dan internasional. Kegiatan ini dapat dijadikan sebagai pengganti mata kuliah yang harus diambil dan dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang berkoordinasi dengan dosen pembimbing.

Adapun tujuan studi/proyek independen ini adalah: (1) Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif; (2) Menyelenggarakan Pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D); dan (3) Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.

Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT), atau KKN Internasional (KKNTI). KKNTI adalah bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat, mengidentifikasi potensi, dan menangani masalah, mengembangkan potensi desa/daerah dan merumuskan solusi terhadap masalah yang dihadapi masyarakat. Setelah melakukan kegiatan, mahasiswa membuat laporan akhir. Tujuan program KKNT ini adalah (1) Kehadiran mahasiswa selama 6-12 bulan dapat memberikan kesempatan untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimiliki dan bekerjasama dengan

pemangku kepentingan di lapangan; (2) Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa PDT.

Aliran Humanisme tentang Pendidikan, humanistik adalah aliran dalam psikologi yang muncul tahun 1950-an sebagai reaksi terhadap aliran yang telah ada sebelumnya yaitu behaviorisme dan psikoanalisis. Aliran ini secara eksplisit memberi perhatian pada dimensi manusia dari psikologi dan konteks manusia dalam pengembangan teori psikologis. Humanisme berasal dari kata latin yaitu *humanus* dari kata *homo* yang berarti manusia dan diartikan sebagai sifat manusia. Humanisme secara filsafat adalah suatu aliran yang memandang manusia agar bermartabat luhur, mampu menentukan nasib sendiri, dan dengan kekuatan sendiri mampu mengembangkan diri dalam kemampuan berpikir untuk dirinya sendiri dan dunia.

Aliran ini ditelusuri pada masa klasik barat dan masa klasik timur. Dasar pemikiran filsafat pendidikan ditemukan dalam filsafat klasik Cina Konfusius dan pemikiran filsafat klasik Yunani. Pada masa *renaissance*, perkembangan filsafat, ilmu dan kemanusiaan mengalami kebangkitan setelah lama dikungkung oleh kekerasan dogma-dogma agama. Pada abad ke 18, pada masa pencerahan dipimpin oleh Rosseeu, dan pada abad ke 20 perkembangan humanisme merupakan

gerakan protes terhadap dominasi kekuatan-kekuatan yang megancam eksistensi nilai-nilai kemanusiaan yang ada pada diri manusia di era modern.

Beberapa ahli psikologi tidak mengakui psikologi humanistik sebagai teori psikologi, tetapi dikatakan sebagai suatu gerakan. Sebaliknya ahli juga memandang bahwa humanistik sebagai *a third force learning theory* (Ornstein & Hunkins, 2013) setelah behaviorisme dan kognitivisme. Teori humanistik termasuk *constructivist*, karena teori ini melibatkan proses kognitif dan afektif dalam tingkah laku. Artinya, teori memadukan, kapabilitas dan potensi sehingga manusia bisa mandiri memilih dan mengatur hidupnya.

Teori belajar humanistik pada dasarnya memiliki tujuan belajar untuk memanusiakan manusia. Oleh karena itu proses belajar dapat dianggap berhasil apabila si pembelajar telah memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Dengan kata lain, si pembelajar dalam proses belajar harus berusaha agar lambat laun mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Menurut Sukardjo & Ukim (2015) dijelaskan bahwa pendekatan humanistik dalam pendidikan memfokuskan pada pencarian manusia dalam menemukan potensi dirinya mencakup kemampuan interpersonal, sosial dan metode untuk mengembangkan diri. Tujuan pengembangankemampuan adalah untuk

memperkaya diri, menikmati keberadaan hidup dan masyarakat (Sukardjo & Ukim, 2015).

Sementara itu, Lefrancois (1988) mengatakan bahwa pendekatan humanistik mengkaji tentang keunikan, individualitas, dan kemanusiaan tiap individu. Kapabilitas dan potensi dipadukan sehingga manusia dapat mandiri untuk memilih dan mengatur hidupnya sendiri (Lefrancois, 1988). Berikutnya, Weiner (1992) dalam Shunk (2012) mengemukakan dua asumsi terkait dengan kajian humanistik ini yaitu: (1) untuk memahami orang secara holistik, maka perlumengkaji tingkah laku, pikiran, dan perasaan mereka, dan (2) pilihan manusia, kreativitas, dan aktualisasi diri perlu diteliti karena dapat mencakup fungsi organisme psikologis dan kreativitas manusia melalui optimalisasi kapabilitas dan potensinya. Implikasi dari asumsi tersebut, salah satunya diungkap oleh Ornstein & Hunkins (2013) bahwa motivasi adalah aspek penting tingkah laku yang melibatkan potensi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Ornstein & Hunkins, 2013).

Berdasarkan paparan di atas, dapat diidentifikasi hal-hal penting dalam pendekatan pendidikan humanistik ini yaitu:

1. Belajar Bagaimana Belajar

Dalam teori belajar humanistik mengorientasikan hasil belajar afektif dikembangkan melalui keterampilan belajar peserta didik sehingga dia dapat melakukan *learning how to learn*, meningkatkan kreativitas dan potensi kemampuan masing-masing peserta didik. Slavin menyatakan psikologi belajar ini mendorong peserta didik menjadi pembelajar mandiri (*self-directed learners* atau *self-motivated learners*) dari pada menjadi penerima pasif informasi dari guru (Slavin, 2008). Selanjutnya Schunk (2012) mengatakan bahwa motivasi penting untuk memaksimalkan potensi diri masing-masing peserta didik. Ini menunjukkan bahwa pengembangan afektif sejajar dengan kognitif dan psikomotorik dalam pembelajaran (Schunk, 2012). Oleh sebab itu, aliran humanistik terkait dengan cara pandang tentang diri kita sendiri (*selfconcept*) yang kemudian menentukan tingkah laku peserta didik, termasuk dalam tingkah laku belajar. Sebagaimana diungkapkan oleh Combs, et al (1974) "*the self has to be achieved; it is not given*" (diri kita adalah hasil ciptaan kita sendiri bukan bentukan orang lain) (Combs, 1974).

2. *Pembelajaran Mandiri*

Aliran humanisme memandang manusia adalah unik. Keunikan manusia tersebut menunjukkan kedirian (*self*) mereka masing-masing. Untuk itu fokusnya adalah pada diri individu dalam upaya mengkaji manusia untuk memanusiakan manusia. Implikasi dari pandangan ini mengarahkan bahwa peserta didik harus aktif mengarahkan dirinya sendiri dalam memilih apa yang akan dipelajarinya, seberapa jauh perlu dialami dan bagaimana mempelajarinya. Jadi, yang ditekankan adalah bagaimana mewujudkan kemandirian seseorang dalam belajar.

Untuk mewujudkan keaktifan peserta didik dalam mengarahkan dirinya, maka kurikulum harus berfungsi membantu peserta didik memiliki pengalaman instrinsik yang bermanfaat pada kebebasan dan pengembangan individu peserta didik (McNeil, 1977).

Tujuan pendidikan dalam pandangan teori humanistik yaitu proses dinamika pengembangan personel agar peserta didik mencapai perkembangan individu, integritas diri dan otonomi menuju aktualisasi diri (*self actualization*). Kurikulum humanistik tidak hanya menekankan

pengembangan aspek kognitif, namun juga mengembangkan aspek afektif.

3. Pendidikan Afektif

Ornstein & Hunkins (2013) mengemukakan untuk menjadi manusia seutuhnya, manusia Pendidikan humanistik lebih ditekankan pada ranah afektif bukan kognitif. Untuk itu, kurikulum harus berorientasi nilai-nilai seperti empati, toleransi, peduli, kerja sama, saling menghargai, kejujuran, berakhlak mulia, dan sebagainya. Aplikasinya tidak hanya terlaksana dalam pembelajaran di kelas (teori), namun juga terefleksi atau praktiknya pada budaya potensi sekolah sebagai pemberi teladan (Ornstein & Hunkins, 2013).

4. Motivasi Diri

Pendidikan dalam teori belajar humanistik mementingkan perlunya mengajar peserta didik agar belajar dalam keadaan menyenangkan, menilai tinggi dan bersikap positif terhadap belajar untuk dirinya. Belajar yang demikian menurut Slavin (Slavin, 2008) dapat dicapai dengan pembelajaran yang memotivasi peserta didik melakukan berbagai kegiatan belajar yang mengharuskan akses informasi, menetapkan keputusan, memecahkan masalah, dan menghasil-

kan suatu produk.

Dalam pembelajaran pendidik berperan sebagai fasilitator bukan penyaji materi pelajaran. Sekolah harus berfungsi sebagai tempat yang nyaman agar dapat memotivasi peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya sehingga dapat membelajarkan mereka menjadi manusia seutuhnya (*a whole person*) (Ansyar, 2015).

Arthur W. Combs berpendapat bahwa banyak pendidik membuat kesalahan dengan berasumsi bahwa peserta didik mau belajar apabila materi pelajarannya disusun dan disajikan sebagaimana mestinya. Peserta didik mengharapkan makna dari materi, tetapi tidak menyatu dalam materi tersebut. Yang terpenting adalah bagaimana membawa persepsi peserta didik untuk memperoleh makna belajar bagi dirinya dari materi pelajaran tersebut yang menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari (Sukardjo & Ukim, 2015).

Combs memberikan lukisan persepsi diri dan dunia seseorang seperti dua lingkaran (besar dan kecil) yang bertitik pusat satu. Lingkaran kecil adalah gambaran dari persepsi diri dan lingkaran besar adalah persepsi dunia. Makin jauh peristiwa-

peristiwa dari persepsi diri, makin berkurang pengaruhnya terhadap perilaku. Jadi, hal-hal yang sedikit hubungannya dengan diri peserta didik, maka makin mudah terlupakan oleh peserta didik.

Teori Maslow didasarkan pada asumsi yaitu 1) suatu usaha yang positif untuk berkembang; dan 2) kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan itu. Menurut Maslow, individu berperilaku dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat hirarkis. Pada diri setiap orang terdapat berbagai rasa takut seperti rasa takut untuk berusaha atau berkembang, takut untuk mengambil keputusan, takut dengan apa yang sudah ia miliki dan sebagainya. Disisi lain, individu juga memiliki dorongan untuk lebih maju ke arah keutuhan, keunikan diri, ke arah berfungsinya semua kemampuan, ke arah kepercayaan diri menghadapi dunia luar dan pada saat itu juga iadapat menerima diri sendiri.

Maslow membagi kebutuhan-kebutuhan (*needs*) manusia menjadi tujuh hirarki yaitu bila seseorang telah dapat memenuhi kebutuhan pertama seperti kebutuhan fisiologis, barulah ia menginginkan kebutuhan di atasnya yaitu kebutuhan mendapatkan rasa aman dan seterusnya.

nya. Hirarki kebutuhan ini mempunyai implikasi penting yang harus diperhatikan pendidik pada waktu mengajar. Motivasi belajar mungkin berkembang kalau kebutuhan dasar peserta didik belum terpenuhi.

Carl Rogers membedakan dua tipe belajar, yaitu kognitif (kebermaknaan) dan *experiential* (pengalaman atau signifikan). Pendidik menghubungkan pengetahuan akademik ke dalam pengetahuan terpakai seperti mempelajari mesin dengan tujuan untuk memperbaiki.

Experiential Learning menunjuk pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan peserta didik. Kualitas belajarnya adalah mencakup keterlibatan siswa secara personal, berinisiatif, evaluasi oleh peserta didik sendiri, dan adanya efek yang membekas pada peserta didik. Menurut Rogers, yang terpenting dalam proses pembelajaran adalah pentingnya pendidik memperhatikan prinsip pendidikan dan pembelajaran yaitu:

- 1) Menjadi manusia berarti memiliki kekuatan yang wajar untuk belajar (tidak harus belajar tentang hal-hal yang tidak ada artinya).
- 2) Siswa akan mempelajari hal-hal yang

bermakna bagi dirinya (mengorganisasi-kan ide dan bahan pelajaran yang bermakna bagi dirinya).

- 3) Pengorganisasian bahan pelajaran berarti mengorganisasikan bahan dan ide baru sebagaibagian hal yang bermakna.
- 4) Belajar yang bermakna dalam masyarakat modern berarti belajar tentang proses.

Aplikasi aliran humanisme dalam belajar, lebih menunjukkan pada roh atau spirit selama proses pembelajaran yang mewarnai metode-metode yang diterapkan. Peran pendidik dalam pembelajaran humanistik adalah menjadi fasilitator bagi para peserta didik dengan memberikan motivasi terkait dengan kesadaran tentang makna belajar dalam kehidupan peserta didik. Pendidik memberikan fasilitas pengalaman belajar peserta didik dan mendampingi mereka untuk memperoleh tujuan pembelajaran.

Makna adalah konsep dasar yang sering digunakan dalam teori belajar humanistik. Dengan demikian, belajar terjadi bila mempunyai arti bagi individu. Pendidik tidak dapat memaksakan materi yang tidak disukai atau tidak relevan dengan kehidupan mereka. Untuk itu pendidik harus

memahami perilaku peserta didik dengan mencoba memahami dunia persepsi mereka sehingga apabila ingin mengubah perilaku mereka. Pendidik harus berusaha mengubah keyakinan atau pandangan peserta didik.

Peserta didik berperan sebagai pelaku utama (*student centered*) yang memaknai proses pengalaman belajarnya sendiri. Dengan peran tersebut diharapkan siswa memahami potensi diri, mengembangkan potensi dirinya secara positif dan meminimalkan potensi diri negatif.

Sukardjo (2015) menjelaskan tujuan belajar pendidikan humanistik lebih ditekankan pada proses belajar daripada hasil belajar. Proses yang dilalui umumnya adalah:

1. Merumuskan tujuan belajar yang jelas.
2. Mengusahakan partisipasi aktif peserta didik.
3. Mendorong peserta didik untuk mengembangkan kemampuan untuk belajar atas inisiatif sendiri.
4. Mendorong peserta didik untuk peka berpikir kritis, memaknai proses pembelajaran secara mandiri.
5. Mendorong peserta didik untuk

mengemukakan pendapat, memilih pilihannya sendiri, melakukan apa yang diinginkan dan menanggung resiko. Pendidik menerima anak didik apa adanya dan berusaha memahami jalan pikiran mereka, mendorong bertanggung jawab dan resiko perbuatannya.

6. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk maju sesuai dengan kecepatannya. Evaluasi diberikan secara individual berdasarkan perolehan prestasi peserta didik.

Pembelajaran berdasarkan teori humanistik cocok diterapkan pada materi-materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Misalnya dalam mata pelajaran sosiologi materi sosialisasi dan kepribadian, perilaku menyimpang, masalah sosial, nilai dan norma, pengendalian sosial dan sebagainya.

Indikator keberhasilan belajar adalah peserta didik senang, bergairah, inisiatif dalam belajardan terjadi perubahan pola pikir, perilaku, sikap atas kemauan sendiri. Peserta didik diharapkan menjadi manusia yang bebas, berani, tidak

terikat oleh pendapat orang lain dan mengatur pribadinya sendiri secara bertanggung jawab tanpa mengurangi hak-hak orang lain atau melanggar aturan, norma, disiplin, atau etika yang berlaku.

D. MERDEKA BELAJAR DAN KAMPUS MERDEKA

Menurut H.A.R Tilaar (2005) pendidikan merupakan proses memanusiakan anak manusia yaitu menyadari akan manusia yang merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang kreatif yang terwujud dalam budayanya (Tilaar, 2005). Di Indonesia, pendidikan yang bersifat humanis menghargai nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan sebagai sumber yang membangun kehidupan menjadi harmonis di antara bermacam etnis, kelompok sosial, agama dan daerah. Nilai keagamaan dan kebudayaan harus menjadi nilai inti bagi masyarakat dalam mewujudkan kehidupan yang bersatu, bertoleransi, berkeadilan dan sejahtera.

Konsep pendidikan humanistik menuntut adanya kebebasan agar harkat dan martabat peserta didik terjamin. Kebebasan tidak akan terjadi bila seorang peserta didik tidak terisolasi oleh hal-hal di luar dirinya. Konsep “Merdeka Belajar” yang berarti kemerdekaan berpikir merupakan perwujudan agar peserta didik tidak terisolasi oleh hal-hal di luar dirinya. Sebab,

kemerdekaan berpikir membuka sudut pandang seluas-luasnya dalam menyikapi suatu masalah dalam kehidupan. Wattimena (2012) menjelaskan bahwa kemerdekaan berpikir merupakan suatu kemampuan untuk mempertimbangkan segala sesuatu secara jernih dan mandiri (Wattimena, 2012). Merdeka dalam berpikir menjadi solusi yang relevan dalam menghadapi berbagai problematika kualitas sumber daya manusia. Untuk itu dengan adanya proses berpikir yang tepat menjadi kunci utama dalam melahirkan sumber daya manusia yang unggul, adaptif dan kompeten (Lubaba, 2020).

Untuk memperoleh kemerdekaan berpikir, ada empat tahap yang harus dilalui oleh seseorang (Wattimena, 2012). Keempat tahap yang harus dilalui dalam kemerdekaan berpikir adalah (1) Peduli atau *aware* dengan cara berpikir kita sendiri yaitu dengan mengetahui dan memahami apakah cara berpikir kita sudah logis, kritis atau masih asumptif, dipenuhi hal negatif dan sebagainya; (2) Mengakui cara berpikir kita; (3) Membuka diri dan pikiran terhadap berbagai kemungkinan atau dengan kata lain perlu terbuka dengan sudut pandang baru; dan (4) Menjadikan seseorang memiliki perspektif luas sehingga menjadi orang yang bijak dalam mengambil sikap.

“Kampus Merdeka berarti upaya melepaskan belenggu untuk bisa bergerak lebih mudah dan memiliki otonomi mengatur diri sendiri. MBKM memadukan kapabilitas dan potensi mahasiswa dan perguruan tinggi untuk mandiri memilih dan mengatur kegiatan pembelajaran MBKM. Kebijakan kampus merdeka menginginkan perguruan tinggi di Indonesia diberi ruang yang cukup untuk beradaptasi mengikuti perkembangan zaman. Prinsip terpenting yang dikandung dalam kampus merdeka adalah kemerdekaan akademik (*academic freedom*). Konsep ini umumnya digunakan dalam dunia pendidikan di perguruan tinggi. Namun, sebetulnya kemerdekaan akademik pertama kali dirumuskan oleh filsuf Jerman bernama Wilhelm von Humboldt (1809). Arti kemerdekaan akademik adalah memberi kebebasan kepada mahasiswa untuk memilih apa yang akan dipelajari, dan bagaimana mereka mempelajari, sedang dosen memiliki kebebasan untuk mengajar ilmu sesuai dengan kepakarannya (Suteja, 2007).

Teori humanistik melibatkan proses kognitif dan afektif dalam tingkah laku. Dalam belajar, teori ini memadukan kapabilitas dan potensi manusia sehingga ia bisa mandiri memilih dan mengatur hidupnya. Proses belajar dapat dianggap berhasil apabila si pembelajar telah memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Si

pembelajar dalam proses belajar harus berusaha agar lambat laun mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya (Sukardjo & Ukim, 2015).

Hak belajar yang diberikan kepada mahasiswa sebanyak tiga semester di luar program studiyaitu satu semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan dua semester melaksanakan kegiatan pembelajaran di luar perguruan tinggi. Hak belajar ini sejalan dengan belajar dalam teori belajar humanistik peserta didik dijadikan sebagai subjek pembelajaran untuk mengembangkan potensi-potensi peserta didik agar mereka dapat menjadi orang yang diinginkan(*what man can become*). Implikasinya dapat dilihat pada kurikulum MBKM yang memberikan pengalaman belajar dalam kegiatan di luar perguruan tinggi seperti pertukaran mahasiswa, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, dan membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik.

Ketika mahasiswa terlibat dalam berbagai kegiatan itu dapat berkontribusi pada pengembangan potensi setiap mahasiswa secara optimal. Dosen hanya sebagai pembimbing, pendamping atau fasilitator dalam proses kegiatan yang dilakukan. Dosen membantu mahasiswa untuk mengenal diri dan mewujudkan

potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Ini berarti, mahasiswa dapat mengaktualisasikan diri dan mengembangkan semua potensi diri dengan sebaik-baiknya. Filsafat humanisme memandang belajar akan dianggap berhasil bila mahasiswa telah memahami lingkungan dan dirinya sendiri.

Dapat dikatakan bahwa bentuk kegiatan pembelajaran dalam MBKM berorientasi hasil belajar afektif yang dikembangkan melalui keterampilan belajar dimana mahasiswa dapat melakukan *learning how to learn*, meningkatkan kreativitas dan potensi kemanusiaan masing-masing mahasiswa. Kegiatan pembelajaran MBKM juga mendorong mahasiswa agar menjadi pembelajar mandiri (*self-directed learners* atau *self-motivated learners*) daripada sebagai penerima pasif pengajaran materi atau informasi. Motivasi sangat berperan tentunya bagi pemenuhan kebutuhan pokok orang, tetapi pilihan lebih besar adalah ketika mahasiswa memaksimalkan potensi diri masing-masing. Dalam ungkapan awam sering kita ketahui *learning how to learn* berarti “siswa jangan diberi ikan, tetapi ia di beri pancing sehingga ia dapat memancing ikan yang lebih besar dari gurunya”. Jadi, pembelajaran dalam MBKM sejalan dengan belajar dalam teori humanistik yang berfokus pada pengembangan aspek afektif belajar dengan kognitif dan psikomotorik dalam tiap proses

pembelajaran. Mahasiswa diberi kesempatan belajar yang menghasilkan pengalaman belajar sehingga berkontribusi pada optimalisasi pengembangan potensi dan kemampuannya.

Dari aspek kurikulum, aliran humanisme menganggap pentingnya mengembangkan kepedulian sosial, kreativitas dan suasana belajar yang gembira dan kerehatan berpikir dan jiwa anak didik. Sehingga memunculkan manusia unggul yang memiliki kemampuan intuisi, imajinasidan moral manusia (Bagir, 2019). MBKM telah memberi ruang atau kesempatan bagi perguruan tinggi dalam mengembangkan karakter-karakter belajar seperti kepedulian sosial, kreativitas, saling menghargai di antara budaya yang berbeda, mandiri, berpikir kritis dan sebagainya. Tentu saja dalam penerapannya, harus disikapi oleh pendidik secara bijaksana dan menjadikan mahasiswanya memiliki karakter-karakter tersebut sehingga menjadi mahasiswa yang unggul, memiliki kepribadian baik, bahagia dan pintar. Konsep “merdeka belajar” yang bermakna kemerdekaan berpikir dan “kampus merdeka” yang bermakna upaya melepaskan belenggu sehingga bisa bergerak lebih mudah dapat terwujud. Jika tidak, maka menjadi bertentangan apabila dalam pengembangannya mahasiswa merasa terbebani dan tertekan dalam MBKM.

Metode belajar MBKM yang memfokuskan pada *experience learning* membekali anak didik untuk terjun ke masyarakat sehingga dapat dilakukan pembelajaran autentik, pembelajaran kontekstual dan pembelajaran berbasis proyek. Ketiga metode ini sangat cocok dengan model pembelajaran saat ini yang berfokus pada kompetensi. Ketiga metode pembelajaran tersebut juga merupakan aplikasi dari teori belajar humanistik, dimana dosen lebih banyak berperan sebagai fasilitator dan mahasiswa sebagai pelaku utama (*student centered*) yang memaknai proses pengalamannya sendiri. Sehingga belajar menjadi bermakna bagi diri siswa.

Bagi Rogers, *experiential learning* memberikan kualitas belajar dan kebermaknaan dalam belajar. Kualitas belajar dan kebermaknaan belajar mahasiswa dalam MBKM dapat terpenuhi karena mereka terlibat secara personal dan berinisiatif dalam kegiatan pembelajaran yang telah diprogramkan sendiri pilihan bentuknya oleh mahasiswa. Mahasiswa berharap memperoleh makna dari materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Combs memberikan lukisan persepsi diri dan dunia seseorang seperti dua lingkaran (besar dan kecil) yang bertitik pusat satu. Lingkaran kecil adalah gambaran dari persepsi diri dan lingkaran besar adalah persepsi dunia. Makin jauh peristiwa-peristiwa dari persepsi diri, makin

berkurang pengaruhnya terhadap perilaku. Jadi, hal-hal yang sedikit hubungannya dengan diri siswa, maka makin mudahterlupakan oleh siswa.

Untuk tercapainya kualitas belajar dan kebermaknaan itu, yang terpenting dalam proses pembelajaran adalah dosen atau perguruan tinggi, memperhatikan prinsip-prinsip belajar humanistik yaitu: **Pertama**, hasil belajar afektif yang dikembangkan melalui keterampilan belajar sehingga dapat melakukan belajar bagaimana belajar (*learning how to learn*). **Kedua**, menjadi pembelajar yang mandiri (*self-directed learners* atau *self- motivated learners*) yang mengarahkan mahasiswa harus aktif mengarahkan dirinya sendiri memilih apa yang akan dipelajarinya, seberapa jauh perlu dialami dan bagaimana mempelajarinya. **Ketiga**, pendidikan afektif untuk menjadi manusia seutuhnya dengan menanamkan nilai-nilai seperti empati, toleransi, peduli, kerja sama, saling menghargai, kejujuran, berakhlak mulia, dan sebagainya. **Keempat**, mementingkan perlunya dosen mengajar dalam keadaan menyenangkan dan bersikap positif terhadap belajar dan berperan sebagai fasilitator. Selanjutnya, kampus dan tempat-tempat belajar mahasiswa harus berfungsi sebagai tempat yang nyaman agar dapat memotivasi mereka dalam mengembangkan potensi dirinya sehingga dapat membelajarkan mereka menjadi

manusia seutuhnya (*a whole person*). Sebagaimana dikemukakan oleh Maslow bahwa individu memiliki dorongan untuk lebih maju ke arah keutuhan, keunikan diri, ke arah berfungsinya semua kemampuan, ke arah kepercayaan diri menghadapi dunia luar dan pada saat itu juga ia dapat menerima diri sendiri. Dosen harus memperhatikan hirarki kebutuhan mahasiswa dalam belajar karena motivasi belajar mungkin berkembang kalau kebutuhan dasar mahasiswa belum terpenuhi.

Terkait dengan tujuan pendidikan, MBKM bertujuan meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills* menyiapkan mahasiswa lebih siap dan relevan dengan kebutuhan perkembangan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan dalam pendidikan humanistik yaitu proses dinamika pengembangan kemampuan personel agar seseorang mencapai perkembangan individu, integritas diri dan otonomi menuju aktualisasi diri (*self actualization*). Pengembangan kemampuan adalah untuk memperkaya diri, dan menikmati keberadaan hidup dalam masyarakat yang mengalami perkembangan. Tujuan pendidikan MBKM menekankan proses belajar dari padahasil seperti halnya dalam pendidikan humanistik yang juga

menekankan pada proses belajar bukan pada hasil belajar.

Kemitraan yang dilakukan oleh perguruan tinggi dengan dunia usaha (industri) dan negara dapat menjadi lompatan inovasi yang memberi manfaat terhadap ketiga komponen tersebut. Kerjasama perguruan tinggi dengan dunia kerja berdampak positif bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat seperti mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, pengusaha, masyarakat, negara dan sebagainya. Pengembangan inovasi harus difokuskan kepada pembelajaran mahasiswa, isi mata kuliah, metode belajar, keterampilan dan kompetensi yang diperlukan. Agar pengembangan inovasi dalam pembelajaran tersebut dapat terlaksana, maka kemitraan atau kerjasama mencakup mahasiswa, dosen dan pimpinan perguruan tinggi sebagai tiga aktor dalam membangun sinergisitas kebutuhan masa depan sesuai dengan perkembangan zaman.

Selanjutnya, kerjasama antara perguruan tinggi dan dunia usaha sebaiknya berdasarkan desain dalam kerangka meningkatkan profesionalitas civitas akademika. Desain ini akan mempengaruhi perumusan kurikulum dalam penentuan capaian pembelajaran (*learning outcomes*) dan penempatan kuliah di luar perguruan tinggi (Munadi, 2020).

Aliran Filsafat Humanisme melihat masing-masing individu peserta didik seperti mahasiswa memiliki keunikan/karakteristik, potensi dan motivasi yang berbeda-beda. Konsep ini mengarahkan pada pentingnya membelajarkan mahasiswa sesuai dengan karakteristiknya sehingga mereka sampai pada tingkat mampu mengaktualisasikan dirinya. Keseragaman kurikulum dan ruang lingkup praktek yang sama dapat mempersempit gerak mahasiswa untuk berekspresi dan memperoleh kompetensi utama dan kompetensi pendamping yang diharapkan. Sehingga diperlukan pengembangan kurikulum yang memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk memilih aspek pengembangannya sesuai dengan kerja sama mitra yang telah dirancang oleh program asal mahasiswa. Program ini diharapkan memberikan pengalaman baru kepada mahasiswa untuk memilih program sesuai dengan karakteristik dan minatnya, mendorong motivasi mahasiswa, menjadikannya alumni yang berdaya guna bagi kehidupan dan masyarakat di sekitarnya. Suatu pembelajaran akan berhasil jika dapat menciptakan perubahan pada diri peserta didik, baik kognitif, afektif maupun psikomotorik dengan mempertimbangkan kondisi peserta didik yang memiliki potensi dan karakteristik yang berbeda-beda.

Sebagai kesimpulan, merdeka Belajar dan Kampus Merdeka dapat dikaji dalam perspektif aliran humanisme. Humanisme sebagai salah satu aliran dalam filsafat pendidikan menekankan pada proses kognitif dan afektif dalam belajar, teori ini memadukan kapabilitas dan potensi manusia sehingga ia bisa mandiri memilih dan mengatur hidupnya. Si pembelajar dalam proses belajar harus berusaha agar lambat laun mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Metode belajar MBKM yang memfokuskan pada *experience learning* dapat membekali mahasiswa untuk terjun ke masyarakat dan memberikan kualitas belajar dan kebermaknaan dalam belajar. Kualitas belajar dan kebermaknaan belajar mahasiswa dalam MBKM dapat terpenuhi karena mereka terlibat secara personal dan berinisiatif dalam kegiatan pembelajaran yang telah diprogramkan sendiri pilihan bentuknya oleh mahasiswa.

Kualitas belajar dan kebermaknaan belajar dapat dicapai dengan menerapkan prinsip belajar humanistik yaitu belajar bagaimana belajar (*learning how to learn*), pembelajaran mandiri, memotivasi diri, dan pendidikan afektif. Dengan demikian, tujuan pendidikan MBKM yang diharapkan untuk mengembangkan *hard skills* dan *soft skills*, menyiapkan mahasiswa lebih siap dan relevan dengan kebutuhan perkembangan zaman, menyiapkan

lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian dapat dicapai secara optimal.

STRATEGI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

**“Pendidikan tanpa menjamin mutu penuntutnya,
niscaya tidak akan pernah memberikan apa-apa”**

A. PEMBARUAN PENDIDIKAN SERI B

Saat ini pendidikan nasional menghadapi berbagai tantangan yang sangat berat khususnya dalam upaya menyiapkan kualitas sumber daya manusia yang mampu menghadapi persaingan global. Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul turut mendukung kemajuan bangsa, terlebih dalam menghadapi era revolusi industri seperti sekarang ini, bangsa Indonesia harus menghadapi persaingan dengan kreativitas, inovasi, dan kecepatan.

Kualitas sumber daya manusia di Indonesia saat ini masih sangat rendah jika dibandingkan dengan negara lain. Salah satu faktor utama rendahnya kualitas sumber daya manusia tentu erat kaitannya dengan

dunia pendidikan. Program pendidikan nasional yang dirancang diyakini belum mampu menjawab harapan dan tantangan di masa depan. Dalam menghadapi hal ini, pendidikan yang bermutu merupakan sesuatu yang sangat berharga dan menjadi sebuah keharusan, karena pendidikan memainkan peranan yang sangat fundamental dimana cita-cita suatu bangsa dan negara dapat tercapai.

Menurut Mulyasa (2010) dewasa ini upaya peningkatan mutu pendidikan terus dilakukan oleh berbagai pihak dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia dan pengembangan watak bangsa. Peningkatan mutu pendidikan merupakan sasaran pembangunan dibidang pendidikan nasional dan merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia secara menyeluruh. Mutu pendidikan merupakan faktor penting yang harus diwujudkan dalam proses pendidikan.

Menghadapi masa depan yang sudah pasti akan dipenuhi dengan arus globalisasi dan keterbukaan serta kemajuan informasi dan teknologi, pendidikan akan semakin dihadapkan dengan berbagai tantangan dan permasalahan yang kompleks. Untuk itu, pembangunan di sektor pendidikan perlu dirancang agar berbagai tantangan dan permasalahan yang

muncul dapat diatasi. Dunia pendidikan nasional perlu dirancang agar mampu melahirkan generasi yang memiliki keunggulan pada era globalisasi seperti sekarang ini.

1. Hakikat Kebijakan

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kebijakan berasal dari kata bijak yang memiliki arti selalu menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuan), cerdas, dan pandai bercakap-cakap. Dalam bahasa Inggris kebijakan diartikan sebagai "*policy*" yang berarti *plan of action* atau *statemen of aims*. Adapun yang dimaksud kebijakan disini yaitu pernyataan cita-cita, tujuan, harapan, atau prinsip untuk mencapai sasaran. Dalam hal ini kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang diterima pemerintah atau lembaga sehingga dengan hal itu mereka bersama dalam mencapai tujuannya. Ketika berbicara mengenai kebijakan tentu pikiran kita akan tertuju dengan pemerintah dan urusan publik, dan yang akan dibahas disini adalah mengenai kebijakan pendidikan. Latar belakang diperlukannya kebijakan pendidikan salah satunya adalah tujuan negara, dimana tujuan negara tersebut

adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara, dan untuk itu setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya.

Menurut HAR. Tilaar (2009) Kebijakan pendidikan diartikan sebagai kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, yang tercakup di dalamnya tujuan pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh Nugroho dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Pendidikan, mengemukakan bahwa kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi bagi negara-negara dalam persaingan global, sehingga kebijakan pendidikan perlu mendapatkan prioritas utama dalam era globalisasi. Dengan demikian dapat disimpulkan landasan kebijakan pendidikan merupakan konsep hukum yang mendasari ditetapkannya suatu aturan dalam bidang pendidikan agar tercipta keselarasan antara kebutuhan dengan situasi dan kondisi dalam proses pendidikan. Kebijakan merupakan rumusan dari berbagai cara untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dijabarkan dalam

berbagai kebijakan pendidikan.

Undang-undang Sisdiknas merupakan pedoman yang digunakan dalam pelaksanaan proses pendidikan maupun mengadakan standarisasi pendidikan. Undang- undang ini mencakup kedalam komponen-komponen pendidikan baik dalam segi konsep, teknis maupun aplikasi yang tentunya berperan penting dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional. Selain itu, sistem pendidikan nasional juga menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan arah pendidikan, karena satu langkah keputusan untuk menentukan kebijakan pendidikan yang diambil akan sangat berpengaruh pada kualitas pendidikan itu sendiri. Agar dampak negatif dari suatu kebijakan dapat diminimalisir maka diperlukan suatu efektivitas dan efisiensi dalam proses penentuan kebijakan pendidikan.

2. Merdeka Belajar

Kementerian Pendidikan dan kebudayaan RI (Kemendikbud RI) beberapa bulan lalu menegaskan bahwa ada kebijakan baru dalam

dunia pendidikan, kebijakan tersebut yaitu “Merdeka Belajar”. Merdeka belajar merupakan kebijakan baru yang dicetuskan oleh Bapak menteri yang tergabung dalam kabinet Indonesia maju Nadiem Anwar Makarim. Merdeka belajar terlahir dari banyaknya problem yang ada dalam pendidikan, terutama yang terfokus pada pelaku atau pemberdayaan manusianya.

Setelah diterapkannya kebijakan Merdeka Belajar, nantinya akan terjadi banyak perubahan terutama dari sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran yang sekarang hanya dilaksanakan di dalam kelas akan berubah dan dibuat senyaman mungkin agar mempermudah interaksi antara murid dan guru. Salah satunya yaitu belajar dengan *outing class*, dimana *outing class* ini adalah salah satu program pembelajaran yang bertujuan untuk menumbuhkan kreativitas agar siswa memiliki keterampilan dan keahlian tertentu. *Outing class* juga merupakan metode belajar yang menyenangkan, mengajarkan para siswa untuk lebih dekat dengan alam dan lingkungan sekitar. Selama pembelajaran dengan menggunakan metode ini, guru dan siswa akan lebih dapat

membangun keakraban, lebih santai, dan tentunya lebih menyenangkan. Dengan setiap hari belajar di dalam kelas selama bertahun-tahun tentunya sudah menjadi hal yang lumrah atau bahkan membosankan, jadi tidak ada salahnya jika kita sebagai pendidik memberikan sesuatu yang berbeda pada proses pembelajaran.

Sistem pembelajaran akan didesain sedemikian rupa agar karakter siswa terbentuk, dan tidak terfokus pada sistem perangkingan yang menurut beberapa penelitian hanya meresahkan, tidak hanya bagi guru tetapi juga anak dan orang tuanya. Selain itu, dengan perangkingan nantinya juga akan muncul diskriminasi dimana ada pelebelan antara si pintar dan si bodoh. Hal ini tentu sangat keliru jika diterapkan dalam dunia pendidikan, karena pada hakekatnya anak memiliki kecerdasan masing-masing di dalam dirinya atau yang sering disebut dengan *multiple intelegent*. *Multiple intelegent* merupakan teori yang dikembangkan oleh Dr. Howard Gardner seorang ahli psikologi modern di Harvard University, dimana menurut Gardner kecerdasan diartikan sebagai kapasitas untuk memecahkan masalah dan untuk

menciptakan produk di lingkungan yang kondusif dan alamiah. Potensi yang dimiliki oleh anak sekecil apapun harus dihargai, banyak anak yang memiliki hambatan atau kesulitan dalam belajar akan tetapi jika kecerdasannya dihargai dan terus dikembangkan maka anak tersebut akan menjadi anak unggulan pada bidangnya. Sehingga nantinya akan terbentuk pribadi yang kompeten, serta memiliki karakter yang tertanam dalam dirinya.

3. Konsep Merdeka Belajar

Sebelum melaksanakan suatu kegiatan kita membutuhkan sebuah konsep agar apa yang akan kita lakukan dapat terurut dan terurus secara baik. Konsep merdeka belajar yang digaungkan oleh Nadiem Makarim terdorong dari keinginannya untuk menciptakan suasana belajar yang bahagia dan menyenangkan tanpa dibebani dengan nilai dan target pencapaian tertentu. Pokok-pokok kebijakan Kemendikbud RI terkait dengan konsep merdeka belajar adalah:

- 1) Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)
Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) resmi menghapus Prosedur

Operasional Standar (POS) pelaksanaa Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) mulai tahun ini. Penghapusan USBN merupakan amanat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 43 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian Yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional. Hal ini berarti pembuatan soal maupun penyelenggaraan USBN akan diserahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah. Sekolah diberikan kebebasan dan keleluasaan untuk menyelenggarakan ujian, karena diselenggarakan oleh sekolah maka menjadi tugas pemerintah daerah melalui dikbud untuk memonitor dan mengevaluasi serta memastikan bahwa ujian yang dilakukan oleh pihak sekolah adalah ujian yang berkualitas. Hal ini penting untuk dilakukan karena erat hubungannya dengan mutu pendidikan. Dikbudharus memfasilitasi terutama dari segi anggaran agar pelaksanaan ujian berjalan lancar, selain itu juga harus mengadakan pelatihan pembuatan soal yang sesuai dengan standar atau kriteria

yang harus dipenuhi.

2) Ujian Nasional (UN)

Ujian Nasional adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar, dan menengah. UN merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penjaminan mutu pada satuan pendidikan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam PP No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh pemerintah telah diselenggarakan sejak puluhan tahun lalu dan telah berulang kali mengalami perubahan pada setiap periodenya.

Ujian Nasional dalam beberapa tahun terakhir menjadi momok yang sangat menakutkan dan menjadi topik yang hangat untuk diperbincangkan. Banyak sekali paradigma dan anggapan-anggapan mengenai Ujian Nasional, namun tahun ini UN disambut dengan rasa penuh suka cita, pasalnya Menteri Pendidikan Nadiem Makarim telah memutuskan untuk menghapuskan UN. Dengan dihapuskan-

nya UN ini, diharapkan akan membuat siswa tidak mengalami tekanan beban mental, karena kelulusannya dari jenjang pendidikan tertentu tidak ditentukan oleh nilai yang diperoleh hanya dalam beberapa hari saja. Namun dengan begitu bukan berarti tidak ada yang digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa. Ujian Nasional akan diganti dengan sistem yang baru, yaitu Assesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Konsep ini merupakan penyederhanaan dari sistem UN, berbeda dengan UN yang dilakukan pada akhir jenjang pembelajaran, asesmen ini akan dilaksanakan ketika anak duduk di kelas 4, 8 dan 11. Dan hasil dari asesmen ini akan dijadikan sebagai bahan masukan bagi sekolah untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya. Selain asesmen kompetensi, akan diberlakukan juga survei karakter, dimana survei karakter ini digunakan untuk mengetahui karakter anak dan bagaimana keadaan lingkungan di sekolah. Survei karakter juga digunakan untuk menjadi indikator atau tolak ukur agar sekolah memberikan umpan balik bagi

kegiatan pembelajaran, terutama dalam mengimplementasikan nilai-nilai karakter ke dalam diri siswa. Sehingga nantinya nilai karakter tersebut akan terinternalisasi ke dalam diri siswa yang secara otomatis akan berdampak pada prestasi dan kualitas siswa tersebut.

3) RPP

Rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang sering disingkat dengan RPP merupakan pegangan seorang guru dalam mengajar. Seorang guru sebelum masuk kelas wajib menyusun RPP agar pembelajaran yang dilakukan lebih terarah dan sesuai indikator yang dikembangkan. Kebijakan baru terkait dengan penyusunan RPP telah dikeluarkan oleh menteri pendidikan yang tertuang dalam Surat Edaran No 14 tahun 2019 tentang Penyederhanaan RPP. Berbeda dengan RPP sebelumnya yang mencakup lebih dari sepuluh komponen, pada RPP yang baru terjadi penyederhanaan yaitu hanya terdapat 3 komponen inti dalam RPP yang sesuai dengan edaran menteri pendidikan no 14 tahun 2019 yaitu; tujuan pem-

belajaran, langkah kegiatan pembelajaran, dan penilaian atau assesment. Dengan adanya kebijakan ini, guru akan lebih mudah dan diberikan kebebasan untuk membuat dan mengembangkan RPP seefektif dan seefisien mungkin, akan tetapi tetap berorientasi pada perkembangan anak.

- 4) Memperluas sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru

Sistem zonasi adalah sistem pengaturan proses penerimaan siswa baru sesuai dengan wilayah tempat tinggal. Zonasi merupakan salah satu kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar tercipta pemerataan akses layanan pendidikan dan pemerataan kualitas pendidikan nasional. Sebenarnya sistem ini sudah diberlakukan sejak masa menteri sebelumnya, akan tetapi ada perbedaan dalam pelaksanaannya dengan sistem zonasi yang sekarang ini. Tentunya sebelum diterapkan, sistem ini sudah dilakukan pengkajian, serta memperhatikan rekomendasi dari lembaga-lembaga yang kredibilitasnya tidak diragukan lagi.

Salah satu perbedaan yang mendasar dari sistem zonasi yang lalu dengan era menteri sekarang adalah kuota siswa dari jalur zonasi. Sistem zonasi yang awalnya memiliki kuota minimum 80% dari kuota total 100%, sisanya diperuntukan untuk jalur prestasi dan perpindahan. Pada sistem zonasi yang sekarang berubah menjadi jalur zonasi 50%, afirmasi 15%, perpindahan 5%, dan jalur prestasi 30 persen. Perubahan persentase melalui jalur prestasi bertambah yang awalnya hanya 15% menjadi 30%, hal ini dilakukan karena ada kasus di beberapa daerah yang mengalami kesulitan atas diberlakukannya sistem zonasi lama, dengan adanya perubahan pada presentase tersebut diharapkan mekanisme penerimaan siswa baru bisa mengakomodasi perbedaan situasi dan kondisi pada setiap daerah. Zonasi ini tidak hanya mengatur pemerataan kualitas sekolah dan siswa, tetapi juga menitikberatkan pada kuantitas dan kualitas guru di suatu daerah yang nantinya akan menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah.

B. PENDIDIKAN BELUM BERMUTU

Mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang ditentukan oleh pelanggan. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu dapat dilihat mulai dari input, proses, dan output. Menurut Philip B. Crosby kualitas atau mutu adalah *conformance to requirement* yaitu sesuai yang diisyaratkan atau distandarkan. Suatu produk memiliki kualitas apabila sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan. Standar kualitas tersebut meliputi bahan baku, proses produksi, dan proses jadi.

Untuk menjawab tantangan Nasional dan Internasional maka perlu menerapkan pendidikan bermutu. Dimana pendidikan bermutu merupakan kunci untuk membangun manusia yang kompeten dan beradab dalam arti menghasilkan output yang sesuai dengan harapan masyarakat. Kesadaran akan mutu pendidikan akhir-akhir ini kian meningkat, hal ini terlihat dari keseriusan berbagai institusi pendidikan untuk meningkatkan daya saing, efektivitas, pelayanan, dan transparansinya. Oleh karena itu tidak mengherankan jika peningkatan mutu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam dunia

pendidikan. Meskipun kenyataannya pendidikan nasional Indonesia saat ini masih belum sesuai dengan harapan para peserta didik, pendidik, orang tua, masyarakat, dan pemerintah itu sendiri, baik dari kualitas maupun kuantitas.

Dari segi kuantitas merujuk pada suatu seberapa besar suatu program pendidikan dapat mencapai sasaran, sedangkan dari segi kualitas mengarah pada nilai dari suatu produk yang dikeluarkan. Dari segi kuantitas jumlah anak yang sekolah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, namun dari segi kualitas dunia pendidikan di Indonesia belum mampu memenuhi tuntutan dunia global. Dan yang paling memprihatinkan akhir-akhir ini kualitas akhlak masyarakat Indonesia semakin jauh dari nilai Pancasila. Hal ini dapat terlihat dari sikap anarkisme dari para demonstran yang menyuarakan aspirasinya, serta maraknya kejahatan yang terjadi.

Strategi peningkatan mutu pendidikan menjadi agenda penting pemerintah (Kemendikbud), berbagai terobosan dan kebijakan telah diambil dalam rangka meningkatkan akses pendidikan yang merata dan bermutu. Salah satu program pemerintah yang sekarang adalah kebijakan Merdeka Belajar. Salah satu ide pokok dari kebijakan Merdeka Belajar tersebut adalah terfokus pada kemerdekaan sumber

daya manusianya. Merdeka dalam arti terbebas dari ketakutan dan terbebas dari tuntutan. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang berlaku secara nasional, dan harus benar-benar direalisasikan pada setiap satuan pendidikan, mulai dari jenjang pendidikan dasar hinggamengah.

Dalam kebijakan merdeka belajar, terdapat faktor utama yang menjadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan mutu pendidikan, yaitu:

- 1) Proses pembelajaran

Pembelajaran merupakan kegiatan belajar mengajar yang berperan dalam menentukan keberhasilan belajar siswa. Dari proses pembelajaran akan terjadi hubungan timbal balik antara guru dengan siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Proses pembelajaran hendaknya dirancang agar dapat menumbuhkan motivasi dan mendukung siswa untuk memiliki empat kompetensi yang harus dimiliki oleh generasi bangsa dalam menghadapi abad 21. Keempat kompetensi tersebut sering disebut dengan 4C yaitu *communication* (komunikasi), *collaboration* (kerjasama), *critical thinking* (berpikir kritis), *creativity* (daya cipta). Selain empat kompetensi tersebut, pendidikan

juga harus menumbuhkan karakter pada diri siswa. Dimana pendidikan karakter dalam konteks saat ini sangat relevan untuk mengatasi krisis moral yang menimpa generasi muda di negara ini. Dengan dimasukkannya keempat kompetensi dengan ditambah penguatan pendidikan karakter diharapkan akan menghasilkan mutu lulusan yang berkualitas.

2) Kemerdekaan dan komitmen guru

Dalam pendidikan guru memiliki peran yang sangat penting, karena sebaik apapun sistem pendidikan tanpa didukung dengan adanya guru yang bermutu maka sistem itu tidak akan berfungsi. Guru juga merupakan orang yang paling bertanggungjawab untuk menyediakan lingkungan pendidikan yang serasi agar terjadi proses belajar yang efektif. Terkait pada point pertama yaitu proses pembelajaran, dimana proses pembelajaran yang menyenangkan, penuh dengan kreativitas dan inovasi akan mendorong termotivasinya anak dalam belajar. Oleh karena itu, dalam kebijakan ini, guru lebih ditekankan pada proses pembelajarannya, bukan pada administrasinya. Dengan berkurangnya beban guru terkait dengan administrasi maka diharapkan para guru akan

lebih meningkatkan kompetensi profesionalnya dalam pembelajaran. Selain itu, dalam kebijakan ini guru juga diharapkan memiliki dua kompetensi tambahan yaitu *Computational Logic* dan *Compassion*. *Cumputational logic* adalah kemampuan berpikir untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara menyeluruh dan logis. Ketika sudah terbiasa dengan kompetensi ini, guru akan lebih berpikir kritis sehingga dapat memecahkan suatu permasalahan secara efektif dan efisien. *Compassion* ini merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru ketika mengajar, karena *compassion* ini secara tidak langsung akan membangun integritas. Seorang guru harus memiliki minat dan bakat yang tinggi dalam profesinya. Dalam artian guru harus mencintai profesi yang ditekuninya, karena ketika seseorang telah memiliki *compassion* maka akan memiliki motivasi yang tinggi untuk terus memperbaiki dan mengembangkan diri. Dengan menguasai kompetensi yang sudah ada, dengan ditambah dua kompetensi baru tersebut, diharapkan kemampuan guru tidak diragukan lagi dan guru bebas melaksanakan aktivitas pembelajaran secara kreatif dan inovatif.

3) Kepemimpinan kepala sekolah

Salah satu kunci yang sangat menentukan keberhasilan sekolah dalam mencapai tujuannya adalah kepala sekolah. Keberhasilan kepala sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan secara dominan ditentukan oleh keandalan manajemen sekolah yang bersangkutan, sedangkan manajemen sekolah sangat dipengaruhi oleh kapasitas kepemimpinan kepala sekolah. Dalam lingkungan pendidikan, kepemimpinan pendidikan adalah kepemimpinan yang fokus pada peningkatan mutu pendidikan. Dalam manajemen sekolah, kepala sekolah harus memastikan hubungan ekosistem yang ada disekolah antara kepala sekolah dengan guru, guru dengansiswa, dan seluruh warga sekolah harus terjalin dengan baik. Selain itu, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan visioner dan memiliki kreatifitas yang tinggi. Kedua kemampuan tersebut terlihat dari sikap demokratis, kreatif, dan keteladanan yang tampak dalam diri kepala sekolah.

- (1) Demokratis, yang dimaksud demokratis disini yaitu kepala sekolah harus memahami keberadaan guru, baik segi

kelebihannya maupun kelemahannya. Kepala sekolah yang demokratis selalu menerima masukan dari guru dan secara terus menerus memberikan bimbingan yang efektif. Kepala sekolah yang demokratis harus memberikan kesempatan kepada guru untuk lebih kreatif, dan tidak menghambat setiap kemajuan yang tampak dalam diri guru yang menjadi mitra kerjanya.

- (2) Kreatif, kepala sekolah harus memiliki kreativitas yang tinggi untuk kemajuan sekolah yang dipimpinnya. Kreativitas tinggi ini menyangkut tiga dimensi yaitu proses, person, dan produk. Dalam artian dengan menggunakan proses yang bervariasi sebagai kriteria dari kreativitas maka segala produk yang dihasilkan akan menjadi produk yang kreatif.

Menjadi teladan baik secara moral maupun profesional. Secara moral artinya perilaku kepala sekolah benar-benar menjadi teladan baik bagi guru, siswa maupun masyarakat. Secara profesional kepala sekolah harus mampu membuktikan bahwa dalam bekerja tidak hanya didasarkan pada ego atau keinginannya saja, akan tetapi menggunakan

pedoman dan prinsip yang jelas. Dengan demikian sasaran yang dicapai akan sesuai dengan kriteria profesional yang ditetapkan. Dalam rangka pencapaian mutu, kepala sekolah menjadi vital peranannya, karena sekolah yang bermutu akan tergambar dari kebijakan kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya.

Mutu dalam dunia pendidikan merupakan suatu hal yang membedakan antara baik dan yang sebaliknya. Sehingga jelaslah bahwasannya mutu merupakan masalah pokok yang akan menjamin suatu lembaga pendidikan dalam meraih status di tengah-tengah persaingan dunia pendidikan. Pendidikan merupakan proses pemberdayaan yang diharapkan mampu memperdayakan peserta didik menjadi manusia yang cerdas, manusia berilmu dan berpengetahuan, serta manusia terdidik. Oleh karena itu pendidikan yang bermutu merupakan suatu keharusan yang harus dibenahi oleh seluruh institusi pendidikan. Pemerintah juga memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan, tidak hanya sekedar menjadi pihak yang berwenang menyalurkan dana, akan tetapi pemerintah juga berwenang untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan mutu. Sepertihalnya gebrakan baru mengenai merdeka

belajar yang diharapkan akan memberikan kontribusi lebih terhadap pengembangan sumber daya manusia, karena sumber daya manusia yang berkualitas merupakan aset dan potensi bangsa yang sangat penting untuk mengisi pembangunan di berbagai bidang.

C. PROBLEMATIKA; MANAJEMEN MUTU PENDIDIKAN

Pentingnya manajemen dalam penyelenggaraan sebuah organisasi merupakan hal yang mutlak diperlukan, demikian halnya dalam pendidikan manajemen merupakan hal yang penting. Lembaga/perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan barang memerlukan manajemen yang baik. Lembaga pendidikan adalah lembaga yang mengelola manusia dan bertujuan menciptakan manusia-manusia berkualitas, tentunya hal ini lebih memerlukan pemikiran yang lebih ekstra dibandingkan lembaga-lembaga pengelolabarang.

Hoy, Jardine and Wood (2005: 11-12) *quality in education is an evaluation of the process of educating which enhances the need to achieve and develop the talents of the customers of the process, and at the same time meets the accountability standards set by the clients who pay for the process or the outputs from the process of educating.* Pendapat ini menjelaskan bahwa mutu

dalam pendidikan adalah evaluasi proses pendidikan yang meningkatkan kebutuhan untuk mencapai dan proses mengembangkan bakat para pelanggan (peserta didik), dan pada saat yang sama memenuhi standar akuntabilitas yang ditetapkan oleh klien (*stakeholder*) yang membayar untuk proses atau output dari proses pendidikan.

Untuk mengukur pendidikan yang berkualitas tentunya diperlukan kriteria/ indikator. Sallis (2005: 1-2) mengungkapkan ada banyak indikator mutu yang baik di lembaga pendidikan. Antara lain: 1) *high moral values*; 2) *excellent examination results*; 3) *the support of parents, business and the local community*; 4) *plentiful resources*; 5) *the application of the latest technology*; 6) *strong and purposeful leadership*; 7) *the care and concern for pupils and students*; 8) *a well-balanced and challenging curriculum*. Pandangan ini menjelaskan bahwa sekolah yang bermutu dan baik harus memiliki: 1) nilai-nilai moral/ karakter yang tinggi; 2) hasil ujian yang sangat baik; 3) dukungan orang tua, dunia usaha dan masyarakat setempat; 4) sumber daya berlimpah; 5) implementasi teknologi terbaru; 6) kepemimpinan yang kuat dan memiliki tujuan (visi); 7) kepedulian dan perhatian bagi siswa; 8) kurikulum yang seimbang dan relevan.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan perlu dilihat dari banyak sisi. Telah banyak pakar pendidikan

mengemukakan pendapatnya tentang faktor penyebab dan solusi mengatasi kemerosotan mutu pendidikan di Indonesia. Hadis dan Nurhayati (2010:3) menjelaskan dalam perspektif makro banyak faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan, diantaranya faktor kurikulum, kebijakan pendidikan, fasilitas pendidikan, aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan, khususnya dalam kegiatan proses belajar mengajar, aplikasi metode, strategi dan pendekatan pendidikan yang mutakhir dan modern, metode evaluasi pendidikan yang tepat, biaya pendidikan yang memadai, manajemen pendidikan yang dilaksanakan secara profesional, sumberdaya manusia para pelaku pendidikan yang terlatih, berpengetahuan, berpengalaman dan profesional.

Mutu adalah hal yang esensial sebagai bagian dalam proses pendidikan. Proses pembelajaran adalah tujuan organisasi pendidikan. Mutu pendidikan adalah mutu lulusan dan pelayanan yang memuaskan pihak terkait pendidikan. Mutu lulusan berkaitan dengan lulusan dengan nilai yang baik (kognitif, afektif, dan psikomotorik) diterima melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yang berkualitas dan memiliki kepribadian yang baik. Sedangkan mutu pelayanan berkaitan dengan aktivitas melayani keperluan peserta didik, guru dan pegawai serta masyarakat secara tepat dan tepat

sehingga semua merasa puas atas layanan yang diberikan oleh pihak sekolah.

Taylor, West dan Smith (2006) pada lembaga CSF (*Central for the School of the Future*) Utah State University mengungkapkan indikator sekolah bermutu adalah: 1) dukungan orang tua, 2) kualitas pendidik, 3) komitmen peserta didik, 4) kepemimpinan sekolah, 5) kualitas pembelajaran, 6) manajemen sumber daya di sekolah 7) kenyamanan sekolah. Di samping kriteria diatas, Sitompul (2006: 57) menambahkan kualitas pendidikan yang berhasil ditandai dari:

- 1) Tingginya rasa kepuasan pengajaran, termasuk tingginya pengharapan murid,
- 2) Tercapainya target kurikulum pengajaran,
- 3) Pembinaan yang sangat baik terhadap spiritual, moral, social dan pengembangan budaya pengajar,
- 4) Tidak ada murid yang bermasalah dalam kejiwaan atau resikoemosional
- 5) Tidak ada pertentangan antara hubungan murid dengan para guru/staf.

Dari berbagai pandangan, kriteria serta indikator yang di paparkan diatas maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa pendidikan/ sekolah yang bermutu

dapat ditingkatkan apabila sekolah memiliki 1) dukungan dari pemerintah, 2) Kepemimpinan Kepala sekolah yang efektif, 3) Kinerja guru yang baik, 4) kurikulum yang relevan, 5) lulusan yang berkualitas, 6) budaya dan iklim organisasi yang efektif, 7) dukungan masyarakat dan orang tua siswa. Untuk lebih jelasnya berikut ini di paparkan masing-masing indikator tersebut.

1. Dukungan Pemerintah

Salah satu amanata dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Indonesia harus dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa adalah dengan cara meningkatkan mutu pendidikan serta pemerataanya pada setiap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Tidak dapat dipungkiri sebenarnya telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam usaha peningkatan mutu pendidikan. Misalnya peningkatan anggran pendidikan 20% dari APBN dan APBD, bantuan operasional sekolah (BOS), sertifikasi guru dan peningkatan kesejahteraannya, standarisasi dan

akreditasi sekolah serta berbagai kebijakan lainnya. Pemerintah memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, mulai dari ketersediaan sarana dan prasarana sampai pada guru-guru yang berkualitas.

Pemerintah baik pusat maupun daerah memiliki perannya masing-masing. Sagala (2011:83) mengungkapkan adanya dukungan pemerintah pusat kaitannya dengan standarisasi, dukungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kaitannya dengan pelayanan anggaran dan fasilitas sekolah. Selain penyediaan sarana dan sumberdaya manusia, peranan lainnya dari pemerintah yang tak kalah pentingnya ialah memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan bebas dari kepentingan, intervensi serta hal-hal lainnya yang dapat mengganggu dan menghambat tercapainya tujuan pendidikan yang bermutu. Untuk itu maka diperlukan komitmen yang kuat dan berkelanjutan dari pemerintah baik pemerintah pusat, provinsi maupun daerah.

2. Kepemimpinan Kepala Sekolah

Banyak defenisi yang telah dikemukakan oleh para ahli mengenai kepemimpinan. Namun jika dianalisis maka elemen yang paling sentral dari

defenisi-defenisi yang diungkapkan dalam kepemimpinan yaitu adanya proses mempengaruhi. Rosmiati dan Kurniady (2010: 125) memberikan gambaran bahwa secara umum defenisi Kepemimpinan adalah kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, mengarahkan dan kalau perlu memaksa orang atau kelompok agar menerima pengaruh tersebut dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu tercapainya suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Pada intinya kepemimpinan adalah orang yang harus mampu menggerakkan anggota organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi.

Kepemimpinan merupakan faktor penentu dalam keberhasilan suatu organisasi. Sebagaimana diungkapkan Fred, Robbins dan Lussier yang dikutip Mesiono (2012: 66) pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang menata kelembagaan organisasinya secara sangat terstruktur, dan mempunyai hubungan persahabatan yang sangat baik, saling percaya, saling menghargai, dan senantiasa hangat dengan bawahannya. Artinya pemimpin harus dapat menciptakan suasana yang penuh dengan

kekeluargaan dengan bawahan.

Senada dengan pandangan dari Fred dkk di atas Adair (2004: 119) memberikan pendapat bahwa pemimpin harus memiliki: (1) *give direction*, (2) *provide inspiration*, (3) *build teams*, (4) *set an example*, (5) *be accepted*. Artinya pemimpin harus memiliki kelima aspek tersebut yaitu: memberikan pengarahan, memberikan inspirasi, membangun tim, memberikan contoh, dan dapat diterima. Selanjutnya Adair (2004: 120) menambahkan bahwa seorang pemimpin adalah orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk memimpin sebuah kelompok dalam rangka mencapai tujuan akhir dari sebuah organisasi. Hal ini yang dinamakan sebagai kualitas dan fungsi kepemimpinan. Kepribadian dan karakter tidak dapat ditinggalkan dari kepemimpinan. Artinya pemimpin memang harus dapat membawa organisasinya mencapai tujuan akhir dari organisasi bukan sekedar tujuan sementara dari organisasi. Untuk dapat mewujudkannya maka dibutuhkan pemimpin yang berkualitas dalam organisasi.

Layaknya kepemimpinan dalam organisasi lainnya baik profit maupun non profit dalam organisasi pendidikan kepemimpinan juga

merupakan faktor utama dalam meningkatkan keefektifan organisasinya/ sekolahnya. Dalam dunia pendidikan atau yang lebih spesifiknya di sekolah, pemimpinnya disebut dengan Kepala Sekolah atau Kepala Madrasah.

Sebagai pemimpin di dalam sekolah maka Kepala Sekolah dituntut agar dapat menciptakan sekolah yang bermutu apalagi pada zaman sekarang ini yang serba dinamis dan perubahan-perubahan harus direspon cepat agar dapat mengikuti perkembangan zaman serta tuntutan *stakeholder* pendidikan sehingga menciptakan lulusan-lulusan terbaik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bush (2008: 1) *there is great interest in educational leadership in the early part of the twentyfirst century. This is because of the widespread belief that the quality of leadership makes a significant difference to school and student outcomes. In many parts of the world, including both developed and developing countries, there is recognition that schools require effective leaders and managers if they are to provide the best possible education for their students and learners.*

Pendapat ini memberikan keyakinan yang luas bahwa kualitas kepemimpinan membuat akan memberikan perbedaan yang signifikan terhadap sekolah dan siswa (*output*). Diberbagai

belahan dunia, termasuk negara maju maupun negara berkembang, ada pengakuan bahwa sekolah memerlukan para pemimpin yang efektif jika mereka berkeinginan untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi peserta didik mereka.

Hammond dkk (2010: 14) menyatakan pentingnya kepemimpinan untuk sekolah dan perbaikan instruksional telah didokumentasikan dengan baik. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa para pemimpin dapat mempengaruhi hasil belajar kelas melalui dua jalur utama. Jalur pertama melibatkan praktek kepemimpinan yang secara langsung mempengaruhi belajar mengajar, misalnya, melalui dukungan pengembangan guru. Yang kedua meliputi kegiatan yang secara tidak langsung mempengaruhi praktek dengan menciptakan kondisi organisasi di sekolah yang kondusif untuk perubahan positif. Masing-masing jalur telah dikaitkan dengan hasil prestasisiswa.

Sebagai pemimpin/ manajer dalam pendidikan kepala sekolah dituntut memiliki intelegensia yang tinggi dalam menjalankan roda organisasinya/ sekolah. Kydd, Crawford dan Riches (2004) dalam Siahaan dkk (2006: 109- 111) menyatakan

intelegensia manajerial/ kepala sekolah yang harus di miliki kepala sekolah adalah sebagai berikut: (1) mencipta, (2) merencanakan, (3) mengorganisasikan, (4) berkomunikasi, (5) memotivasi, (6) mengevaluasi. Enam intelegensia tersebut merupakan mutlak diperlukan oleh kepala sekolah untuk mencapai tujuan sekolah yang efektif dan efisien.

Jadi, dari berbagai penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Kepemimpinan merupakan proses pemimpin mempengaruhi pengikut untuk:

(1) menginterpretasikan keadaan (lingkungan sekolah); (2) memilih tujuan sekolah; (3) pengorganisasian kerja dan memotivasi pengikut untuk mencapai tujuan sekolah; (4) mempertahankan kerjasama dan tim kerja; (5) mengorganisasi dukungan dan kerjasama orang dari luar sekolah. Dalam lingkungan pendidikan, secara spesifik kepemimpinan pendidikan dimaknai sebagai kemampuan mempengaruhi suatu kelompok ke arah tercapainya tujuan pendidikan.

Fungsi kepemimpinan pendidikan di sekolah sebagai kepemimpinan manajerial adalah pengelola mutu, yang meliputi perencanaan

mutu, pengembangan produk dan proses yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Oleh karena itu pemimpin pendidikan harus memiliki kemampuan sebagai berikut: (1) mengorganisasikan; (2) membangkitkan dan memupuk kepercayaan; (3) membina dan memupuk kerjasama dalam mengajukan dan melaksanakan program-program supervisi; dan (4) mendorong dan membimbing guru beserta staf agar bertanggungjawab pada setiap usaha untuk mencapai tujuan sekolah.

Proses kepemimpinan kepala sekolah meliputi: (1) mengambil keputusan; (2) mengembangkan imajinasi; (3) mengembangkan kesetiaan pengikutnya; (4) memprakarsai, menggiatkan, dan mengendalikan rencana; (5) melaksanakan keputusan dengan memberikan dorongan kepada para pengikutnya; (6) memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya; (7) melaksanakan kontrol dan perbaikan-perbaikan atas kesalahan; (8) memberikan tanda penghargaan; (9) men-delegasikan wewenang kepada bawahannya.

Kepala sekolah adalah orang yang memiliki tanggungjawab terbesar dalam upaya memajukan pendidikan (pendidikan bermutu) di setiap

satuan pendidikan yang di pimpinnya. Besarnya tanggung jawab yang diemban oleh Kepala sekolah tentunya menuntut orang yang memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi sehingga dapat menjalankan tugas dalam upaya menciptakan pendidikan bermutu disekolah yang pada akhirnya menciptakan pendidikan yang bermutu secara nasional.

3. Kinerja Guru

Guru merupakan ujung tombak dalam pendidikan (proses pembelajaran), karena guru orang yang berhadapan langsung dengan peserta didik. Untuk itu guru harus mampu bekerja dengan baik sehingga peserta didik yang dihasilkan akan memiliki kompetensi yang sesuai dengan harapan. Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 4 menegaskan bahwa guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Untuk dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, guru wajib untuk memiliki syarat tertentu, salah satu di antaranya adalah kompetensi.

Dalam proses pendidikan guru memiliki peranan sangat penting dan strategis dalam

membimbing peserta didik ke arah kedewasaan, kematangan dan kemandirian, sehingga guru sering dikatakan ujung tombak pendidikan. Dalam melaksanakan tugasnya seorang guru tidak hanya menguasai bahan ajar dan memiliki kemampuan teknis edukatif tetapi memiliki juga kepribadian dan integritas pribadi yang dapat diandalkan sehingga menjadi sosok panutan bagi peserta didik, keluarga maupun masyarakat (Sagala, 2011: 99).

Dalam undang-undang guru dan dosen nomor 14 tahun 2005 pasal 8, guru yang baik dituntut memiliki empat (4) kompetensi yakni kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Untuk lebih jelasnya tentang uraian standar kompetensi guru berdasarkan Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 sebagai berikut:

O	KOMPETENSI	INDIKATOR
	Pedagogik	Kemampuan dalam pengelolaan pembelajaran peserta

didik yang sekurang-kurangnya meliputi:1) pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, 2) pemahaman terhadap peserta didik, 3) pengembangan kurikulum/silabus, 4) perancangan pembelajaran, 5) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, 6) pemanfaatan teknologi pembelajaran, 7) evaluasi proses dan hasil belajar, 8) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya

Kepribadian	Pemilikan sifat-sifat kepribadian yang:1) berakhlak
-------------	---

mulia, 2) arif dan bijaksana, 3) mantap,
4) berwibawa,
5) stabil, 6) dewasa, 7) jujur, 8) menjadi
teladan bagi
peserta didik dan masyarakat, 9) secara
objektif
mengevaluasi kinerja sendiri, 10) mau
dan siap
mengembangkan diri secara mandiri
dan berkelanjutan

Profesional Kemampuan dalam menguasai
pengetahuan bidang
ilmu, teknologi, dan/atau seni yang
diampunya yang
sekurangkurangnya meliputi
penguasaan:1) materi
pelajaran secara luas dan mendalam
sesuai standar isi
program satuan pendidikan, mata
pelajaran, dan/atau
kelompok mata pelajaran yang akan
diampunya, 2)

konsep-konsep dan metode disiplin keilmuan,

teknologi, atau seni yang relevan yang secara

konseptual menaungi atau koheren dengan program

satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu

Sosial

Kemampuan individu sebagai bagian dari masyarakat

yang sekurang-kurangnya mencakup kemampuan

untuk: 1) Berkomunikasi lisan, tulisan, dan/atau isyarat,

2) menggunakan teknologi komunikasi dan informasi

secara fungsional, 3) bergaul secara efektif dengan

peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan,

pimpinan satuan pendidikan, orang

tua/wali peserta didik, 4) bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta system nilai yang berlaku, dan 5) menerapkan prinsip-prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan

Berdasarkan Tabel di atas dapat terlihat bahwa banyak hal yang harus dimiliki dan dipelajari oleh guru. Guru haruslah orang yang memiliki jiwa yang tulus dan mengabdikan dirinya kepada pendidikan. Untuk itu menjadi guru harus memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, idealisme, tanggung jawab dan memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Kinerja Guru akan menjadi optimal, bilamana diintegrasikan dengan komponen sekolah baik kepala sekolah, budaya/iklim sekolah, guru, karyawan, maupun anak didik. Pidarta (2005: 179) mengemukakan ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja guru dalam me-

laksanakan tugasnya antara lainya itu: 1) kepemimpinan Kepala sekolah, 2) budaya/ iklim sekolah, 3) harapan-harapan, dan 4) kepercayaan personalia sekolah.

Kinerja guru merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sebuah sistem mulai dari input, proses dan output, dalam upaya pencapaian tujuan suatu lembaga pendidikan. Oleh karena itu, upaya peningkatan kinerja guru dari segi profesionalisme sebagai tenaga pendidik mutlak diperlukan.

4. Kurikulum Yang Relevan

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 dijelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum merupakan suatu sistem yang memiliki komponen-komponen tertentu. Sudarsyah dan Nurdin (2010:191) menjelaskan komponen-komponen kurikulum terdiri dari tujuan, isi, metode dan evaluasi.

D. KURIKULUM KEKINIAN

Diagram 1. Sistem Kurikulum

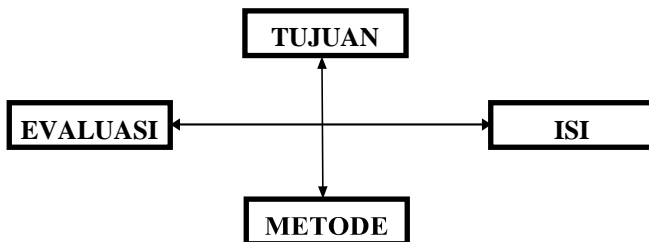


Diagram diatas menjelaskan bahwa kurikkulu dibentuk oleh empat komponen yaitu tujuan, isi kurikulum, metode atau strategi pencapain tujuan dan komponen evaluasi. Komponen-komponen ini merupakan satu kesatuan yang memiliki keterkatikan/ hubungan satu dengan lainnya, untuk itu dalampencapaian kurikulum yang baik harus melaksanakan keempat komponen tersebut secara holistik dan menyeluruh.

Pentingnya kurikulum yang baik dan relevan sebagai salah satu upaya dalam peningkatan mutu pendidikan. Namun dalam penggunaan/ pengembangannya kurikulum tidak dapat diadopsi secara keseluruhan dari tempat/ Negara lainnya walaupun Negara tersebut memiliki pendidikan yang sangat bermutu. Hal ini dikarenakan berbedanya harapan dan tujuan tentang pendidikan yang bermutu dari masing-masing Negara.

Sudarsyah dan Nurdin (2010:191) mengungkapkan landasan pokok dalam pengembangan kurikulum dikelompokkan dalam empat jenis yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologis, dan landasan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

Pengembangan kurikulum merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan. Hal ini dilakukan guna merelevansikan/ menyesuaikan antara mutu lulusan dengan perkembangan/ tuntutan zaman. Pada tahun 2013 pemerintah Indonesia melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan mengeluarkan kebijakan yakni merubah kurikulum 2006 atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menjadi kurikulum 2013. Alasan utama pemerintah merubah kurikulum yakni menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 di sektor pendidikan. Perubahan kurikulum dilakukan untuk menjawab tantangan zaman yang terus berubah agar peserta didik mampu bersaing di masa depan (relevansi). Alasan lain dilakukannya perubahan kurikulum adalah kurikulum sebelumnya dianggap memberatkan peserta didik. Terlalu banyak materi pelajaran yang harus dipelajari oleh peserta didik, sehingga malah membuatnya terbebani. Perubahan kurikulum ini juga melihat kondisi yang ada selama

beberapa tahun ini. KTSP yang memberi keleluasaan terhadap guru membuat kurikulum secara mandiri untuk masing-masing sekolah ternyata tak berjalan mulus.

Salah satu isu dalam perubahan kurikulum ini yakni relevansi antara kurikulum yang diajarkan dengan tantangan masa depan yang akan dihadapi oleh anak-anak bangsa Indonesia guna persiapan menghadapi persaingan global. Pencapaian tujuan pendidikan merupakan fungsi dari kurikulum. Untuk itu kurikulum yang dibangun harus memiliki relevansi dengan tujuan pendidikan dan perkembangan zaman.

Lulusan yang berkualitas/bermutu merupakan tujuan utama dalam pendidikan. Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan pada Pasal 3 menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Lulusan yang bermutu tidak hanya bila siswa/ lulusan memiliki kemampuan/kompetensi hanya pada aspek kognitif saja, tetapi semua aspek yakni kognitif, psikomotorik, dan afektif, hal ini sesuai dengan PP 32 tahun 2013 tentang standart nasional pendidikan pasal 25 ayat 4 dinyatakan standar kompetensi lulusan sebagaimana mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Untuk lebih jelasnya mengenai uraian tentang standar kompetensi lulusan sebagaimana pada PP 32 tahun 2013 dapat dilihat dalam peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan nomor 54 tahun 2013 tentang standarkompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah. Lulusan SMA/ MA/ SMK/ MAK/ SMALB/ Paket C memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai berikut:

**Tabel 2. Standar Kompetensi Lulusan
SMA/MA/SMK/MAK/SMALB/Paket C**

DIMENSI	KUALIFIKASI KEMAMPUAN
Sikap	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
Pengetahuan	Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan meta-kognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab serta dampak fenomena dan kejadian.
Keterampilan	Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sebagai

	pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri.
--	--

Ketiga dimensi ini harus dimiliki oleh lulusan-lulusan peserta didik yang menempuh pendidikan di Indonesia. Ketiga dimensi ini (sikap, pengetahuan dan keterampilan) harus dimiliki secara holistik oleh peserta didik. Artinya tidak dikatakan lulusan itu berkualitas apabila lulusan hanya memiliki aspek pengetahuan dan keterampilannya saja tetapi tidak memiliki sikap yang baik atau sebaliknya.

Sikap yang baik tentunya ditempuh dengan memprakarsai budaya positif dalam sebuah organisasi, atau biasa disebut budaya organisasi. Budaya organisasi adalah salah satu isu utama dalam penelitian akademik dan pendidikan, teori organisasi serta dalam praktek manajemen. Alasannya adalah dimensi budaya dalam organisasi merupakan hal yang sentral dalam semua aspek kehidupan berorganisasi. Bahkan dalam organisasi dimana masalah-masalah budaya hanya mendapatkan perhatian yang sedikit.

Mendefinisikan tentang budaya bukanlah hal yang mudah dan banyak menimbulkan perdebatan. Namun dapat dimulai memahami tentang budaya melalui perkiraan deskripsi. Budaya berhubungan dengan orang/ manusia (bukan hewan), dan maka dari itu

karena berhubungan dengan manusia secara langsung akan berhubungan dengan sejarah khusus manusia dalam kehidupan bersama, bahasa manusia (komunikasi, kebiasaan, adat-istiadat, dan nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan manusia (Merry, 2007:15).

Kebudayaan adalah sesuatu yang dinamis, berubah dari waktu ke waktu dan sesuai dengan tempat dan keadaan. Meskipun budaya membentuk pemikiran, pengalaman, makna, dan kesempatan anggotanya yang telah tersedia bagi anggota organisasi, mereka tidak penerima pasif dari budaya, melainkan seperti aktor, membentuk dan memproyeksikan budaya ke masadepan.

Berdasarkan asal katanya atau secara *etimologis*, bentuk jamak dari budaya adalah kebudayaan yang berasal dari bahasa sansekerta *budhayah* yang merupakan bentuk jamak dari budi, yang artinya akal atau segala sesuatu yang berhubungan dengan akal fikiran manusia (Komariah dan Triatna, 2010: 96) . Artinya budaya merupakan hasil dari buah perbuatan atau akal fikiran manusia. Budaya organisasi merupakan pola tingkah laku yang dikembangkan oleh suatu organisasi yang dipelajarinya ketika menghadapi masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal, yang telah terbukti cukup baik untuk disahkan dan diajarkan kepada anggota baru sebagai cara untuk menyadari,

berpikir dan merasa.

Hellriegel dan Slocum (2008: 503) budaya organisasi adalah pola kepercayaan dan harapan bersama oleh anggota organisasi. Ini termasuk filosofi umum, norma, dan nilai. Dengan kata lain, ia menyatakan "aturan permainan" untuk bergaul dan mendapatkan sesuatu dan cara berinteraksi dengan pihak luar, seperti pemasok dan pelanggan. Beberapa aspek budaya organisasi adalah simbol budaya, pahlawan, ritual, dan upacara.

Budaya organisasi berkembang sebagai jawaban atas tantangan adaptasi eksternal dan kelangsungan hidup dan integrasi internal. Pembentukan budaya organisasi juga dipengaruhi oleh budaya masyarakat yang lebih luas dimana organisasi harus berfungsi. Metode utama untuk kedua mempertahankan dan mengubah budaya organisasi mencakup: (1) mengidentifikasi apa yang para pemimpin dan tim memperhatikan, ukuran kontrol, dan, (2) mengenali cara-cara dimana para pemimpin dan karyawan bereaksi terhadap krisis, (3) menggunakan manajerial dan tim role-model, pengajaran, dan pelatihan, (4) mengembangkan dan menerapkan kriteria yang adil untuk mengalokasikan reward dan status; (5) menggunakan kriteria yang konsisten untuk rekrutmen, seleksi, dan promosi dalam organisasi dan penghapusan dari itu; dan (6)

menekankan ritual organisasi , upacara, dan cerita. (Hellriegel dan Slocum, 2008: 503).

Selanjutnya tentang karakteristik budaya organisasi Robbins (2002:156), menyatakan ada 10 (sepuluh) karakteristik budaya organisasi. Kesepuluh karakteristik budaya organisasi tersebut adalah sebagai berikut: (1) inisiatif Individual, (2) toleransi terhadap tindakan berisiko, (3) pengarahan, (4) integrasi, (5) dukungan manajemen, (6) kontrol, (7) identitas, (8) sistem imbalan, (9) toleransi terhadap konflik, (10) pola komunikasi.

Seluruh karakteristik yang dikemukakan di atas harus menjadi fokus organisasi yang bertujuan mencapai organisasi yang efektif. Demikian halnya dalam organisasi pendidikan khususnya di sekolah juga harus dapat menamakan karakteristik-karakteristik yang dikemukakan Robbin di atas untuk pencapaian keefektifan dalam organisasi sekolah.

Mulyasa (2012: 91-92) menyatakan terdapat beberapa indikator iklim dan budaya sekolah yang baik sebagai berikut a) tujuan-tujuan sekolah yang mencerminkan keunggulan yang ingin dicapai diperlihatkan dengan jelas kepada seluruh warga sekolah, ditetapkan dan diumumkan secara luas di sekolah, b) tujuan-tujuan pembelajaran akademik di

sekolah dirumuskan dengan cara yang dapat diukur, c) fasilitas-fasilitas fisik sekolah dirawat dengan baik, termasuk segera diperbaiki fasilitas yang rusak, d) penampilan fisik sekolah yang bersih, rapi, dan nyaman serta memperhatikan keamanan, pekarangan dan lingkungan sekolah ditata sedemikian rupa sehingga memberi kesan asri, teduh, dan nyaman, f) poster-poster afirmasi (poster berisi pesan-pesan positif) digunakan dan dipajang di berbagai tempat strategis yang mudah dan selalu dilihat oleh peserta didik, g) sekolah menciptakan rasa memiliki sehingga guru dan peserta didik menunjukkan rasa bangga terhadap sekolahnya, h) kondisi kelas yang menyenangkan sehingga tercipta suasana yang mendorong peserta didik belajar, i) acara-acara penting di sekolah dijadwal sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu waktu belajar, j) ada transisi/peralihan yang lancar dan cepat antar kegiatan-kegiatan di sekolah maupun di dalam kelas, k) guru mau mengubah metode-metode mengajar, bila metode yang lebih baik diperkenalkan kepadanya, l) Penggunaan sistem moving-class, m) penciptaan relasi kekeluargaan dan kebersamaan, n) sekolah menciptakan suasana yang memberikan harapan, dimana para guru percaya bahwa peserta didik dapat mencapai tingkat prestasi yang tinggi, o) sekolah menekankan kepada peserta didik dan guru bahwa belajar merupakan alasan yang paling penting

untuk bersekolah, p) harapan terhadap prestasi peserta didik yang tinggi disampaikan kepada seluruh peserta didik, q) harapan terhadap prestasi peserta didik yang tinggi disampaikan kepada seluruh orang tua peserta didik, r) seluruh staf dan guru berkomitmen untuk mengembangkan budaya mutu dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Sementara itu fungsi budaya sekolah menurut Triguno (2000) dalam Komariah dan Triatna (2010: 109) budaya organisasi yang terpelihara dengan baik, mampu menampilkan perilaku iman, takwa, kreatif, inovatif, dan dapat bergaul harus terus dikembangkan. Manfaat yang dapat diambil dari budaya demikian adalah dapat menjamin hasil kerja dengan kualitas yang lebih baik, membuka seluruh jaringan komunikasi, keterbukaan, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, menemukan kesalahan dan cepat memperbaiki, cepat menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi di luar (faktor eksternal seperti pelanggan, teknologi, sosial, ekonomi, dan lain-lain), mengurangi laporan berupa data-data dan informasi yang salah dan palsu.

Budaya dan iklim memberikan identitas dan tuntunan kepada setiap anggota organisasi sekolah (Kepala sekolah, guru, pegawai, staff dan siswa) untuk dapat bekerja dengan baik dan sesuai dengan nilai-nilai dan karakter organisasi yang ada di sekolah. Untuk itu

budaya dan iklim organisasi yang berorientasi mutu perlu dibentuk oleh anggota organisasi sekolah agar setiap anggota dapat bekerja dengan baik sehingga mutu sekolah yang baik dapat dicapai.

Selain itu adalah Dukungan Orang Tua Dan Masyarakat. Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama semua elemen bangsa, mulai dari pemerintah baik pusat maupun daerah, dunia usaha dan industri (DUDI), dan seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat adalah orang-orang yang bersentuhan langsung dengan dunia pendidikan untuk itu masyarakat dan orang tua memiliki peranan penting dalam kemajuan pendidikan. Tanpa dukungan masyarakat pendidikan tidak akan berhasil dengan maksimal.

Dalam Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan beberapa peran yang dapat dilakukan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, yang diatur dalam pasal 54 ayat 1, peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Kemudian dalam pasal 2 dinyatakan bahwa masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana dan pengguna hasil pendidikan. Sedangkan hak dan kewajiban masyarakat diatur dalam pasal 8 dan

9, masyarakat berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan. Masyarakat wajib memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Selain dalam UU Sisdiknas di atas, dalam Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam pendidikan pada pasal 3 disebutkan bahwa partisipasi masyarakat dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk seperti: a) pendirian dan penyelenggaraan pendidikan; b) pengadaan dan pemberian bantuan tenaga kependidikan; c) pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli; c) pengadaan dan/ atau penyelenggaraan program pendidikan yang belum dilaksanakan pemerintah menunjang pendidikan nasional; d) pengadaan dana dan pemberian bantuan lainnya; e) pengadaan dan pemberian bantuan sarana belajar; e) pemberian kesempatan untuk magang; f) pemberian pemikiran dan pertimbangan; g) pemberian bantuan manajemen dan; h) pemberian bantuan dalam bentuk kerjasama.

Berdasarkan UU Sisdiknas dan PP 39 tahun 1992 tersebut di atas dapat terlihat besarnya peran yang harus diambil/ dilakukan oleh masyarakat dalam pendidikan. Hal ini tentunya memiliki tujuan tertentu. Suryosubroto (2012:72) menjelaskan tujuan penyelenggaraan hubung-

an sekolah dengan masyarakat adalah:

- 1) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sekolah
- 2) Meningkatkan pemahaman sekolah tentang keadaan dan aspirasi masyarakat terhadap sekolah
- 3) Mengembangkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peranan pendidikan dalam era pembangunan
- 4) Menjalinkan kerja sama untuk memenuhi kebutuhan anak didik dalam setiap kegiatan pendidikan disekolah.

Lebih lanjut Nasution (2006: 40) mengungkapkan tujuan yang hendak dicapai dari adanya hubungan antara masyarakat dengan sekolah sebagai berikut: 1) mengembangkan pemahaman kepada masyarakat tentang maksud dan sasaran dari sekolah, 2) memberikan penilaian program kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sekolah, 3) menjalin dan meningkatkan hubungan harmonis antara orang tua siswa dengan guru-guru dalam memenuhi kebutuhan anak didik, 4) membangun kesan positif dan memelihara kepercayaan tentang sekolah, 5) menginformasikan kepada masyarakat tentang rencana program dan kegiatan sekolah, 6) mencari

bantuan dan dukungan bagi pemeliharaan dan peningkatan program sekolah, sekolah sebagai jasa lembaga pendidikan memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan (siswa, keluarga dan masyarakat lain), 8) supaya kreativitas mencari dana pendidikan alternatif dalam bentuk kerjasama dengan lembaga lain.

Selanjutnya Aedi dan Rosalin (2010:280) menjelaskan tujuan konkrit hubungan antara sekolah dan masyarakat antara lain:

- 1) Guna meningkatkan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan peserta didik
- 2) Berperan dalam memahami kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang sekaligus menjadi desakan yang dirasakan saat ini
- 3) Berguna dalam mengembangkan program-program sekolah kearah yang lebih maju dan lebih membumi agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat pengguna jasa pendidikan

Secara umum dapat dilihat bahwa tujuan adanya kerjasama orangtua dan masyarakat dengan sekolah adalah usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan. Besarnya peranan yang harus dilakukan/ diambil oleh masyarakat dan orangtua tentu bermaksud untuk pencapain mutu pendidikan. Hal ini tentunya harus

terus diupayakan dan terus ditingkatkan oleh pihak sekolah. Sekolah harus mampu menjaga hubungan baik dan harmonis dengan masyarakat dan orangtua guna membantu usaha-usaha sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Rendahnya mutu pendidikan di Indonesia harus mendapatkan penyelesaian dengan segera. Untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan maka diperlukan usaha yang serius dan nyata dari semua pihak mulai dari pemerintah baik pusat maupun daerah, kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, masyarakat serta dunia usaha dan industri. Kehadiran manajemen dalam upaya peningkatan mutu pendidikan tidak lagi terbantahkan. Manajemen merupakan bagian penting dalam kegiatan-kegiatan untuk peningkatan dan relevansi mutu pendidikan. Atas dasar itu diharapkan seluruh stakeholder dalam dunia pendidikan dapat memahami peranannya bahkan dapat mengimplementasikannya.

Pendidikan Sesuai Zaman

**“Pendidikan yang baik adalah Pendidikan yang
Memanusiakan Manusia”**

A. KAMPUS MERDEKA

Kehadiran merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) memunculkan paradigma baru dalam dunia pendidikan termasuk pendidikan tinggi. Kebijakan menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 dengan konsep MBKM dianggap relevan dan tepat dilaksanakan di era demokrasi saat ini. Menurut Nadiem Makarim, yang menjadi konsep dasar memilih merdeka belajar adalah karena terinspirasi dari filsafat K.H. Dewantara dengan penekanan pada kemerdekaan dan kemandiriannya. MBKM terdiri dari dua konsep yang esensial yakni “Merdeka Belajar” dan “Kampus Merdeka”. *Pertama*, konsep merdeka belajar bermakna adanya kemerdekaan berpikir. Menurut

Nadiem Makarim bahwa esensi kemerdekaan berpikir harus dimulai terlebih dulu oleh para pendidik. Pandangan seperti ini harus dilihat sebagai suatu upaya untuk menghormati perubahan dalam pembelajaran di lembaga Pendidikan baik di sekolah dasar, menengah maupun perguruan tinggi. *Kedua*, kampus merdeka merupakan kelanjutan dari konsep merdeka belajar. Kampus merdeka merupakan upaya untuk melepaskan belenggu untuk bisa bergerak lebih mudah.

Adapun Tujuan MBKM adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills* agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Kebijakan MBKM sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Aturan itu dilaksanakan oleh sejumlah pihak yang terkait, antara lain; perguruan tinggi (PT), fakultas, program studi (Prodi), mahasiswa, dan mitra. Bagi pengelola PT, wajib memfasilitasi hak bagi mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk: (a) dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS dan (b) dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang

sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 sks.

Bagi pihak fakultas, harus (a) menyiapkan fasilitasi daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi dan (b) menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.

Adapun yang menjadi tanggung jawab program studi yakni; harus (a) menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka, (b) memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam PT, (c) menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar PT beserta persyaratannya, (d) melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar PT, dan (e) jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar PT disiapkan alternatif mata kuliah daring. Bagi pihak mahasiswa, harus (a) merencanakan bersama dosen pembimbing akademik mengenal program mata kuliah/program yang akan diambil di luar prodi, (b) mendaftarkan program kegiatan luar prodi, (c) melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, termasuk mengikuti seleksi bila ada, dan (d) mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada. Terakhir, bagi mitra, harus (a) membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) bersama

PT/fakultas/program studi dan (b) melaksanakan program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).

Ada sejumlah kajian ilmiah mengenai kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka telah terbit, baik dalam wujud artikel jurnal maupun makalah dalam prosiding, seperti Nehru (2019), Elihami (2019), Abidah, dkk. (2020), Asfiati & Mahdi (2020), Fadhil (2020), Fira (2020), Halitopo (2020), Hartoyo (2020), Haryanto (2020), Hastuti (2020), Izza, dkk. (2020), Kurniawan (2020), Mu'amalah (2020), Mustaghfiroh (2020), Naufal, dkk. (2020), Pendi (2020), Piong (2020), Yulian (2020), Yamin & Syahrir (2020), Wardhana (2020), Sugiri & Priatmoko (2020), Sesfao (2020), Sabardila (2020), Ramadania & Aswadi (2020), dan Priatmoko & Dzakiyyah (2020). Dari kedua puluh lima kajian di atas, hanya Haryanto (2020) yang mengaitkan konsep Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dengan pembelajaran sastra Indonesia. Artinya, para akademisi di bidang pendidikan belum banyak mengulas/mengkaji keterkaitan konsep Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dengan bidang ilmu yang ditekuninya selama ini. Untuk itulah, tulisan ini ingin berfokus ke arah tersebut. Dengan mengambil judul Konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Aplikasinya dalam Pendidikan Biologi.

B. 8 PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)

Berdasarkan Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1, bentuk kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan di dalam Prodi dan di luar Prodi (Gambar 1) meliputi:

1. Pertukaran Pelajar;
2. Magang/Praktik Kerja;
3. Asistensi mengajar di satuan pendidikan;
4. Penelitian/riset;
5. Proyek Kemanusiaan;
6. Kegiatan Wirausaha;
7. Studi/Proyek Independen; dan
8. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik.

Gambar 1. Bentuk Kegiatan Pembelajaran

(Ditjen Dikti Kemdikbud, 2020)



Penjelasan bentuk kegiatan pembelajaran dalam MBKM ini dijelaskan secara lengkap pada bagian berikut ini.

1) Pertukaran Pelajar

Program pertukaran pelajar dilakukan antar perguruan tinggi dengan sistem transfer kredit. Pertukaran pelajar dapat membentuk sikap mahasiswa seperti menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, kepercayaan, pendapat atau temuan orisinal orang lain,

bekerjasama, memiliki kepekaan sosial atau kepedulian sosial terhadap masyarakat dan lingkungan. Adapun tujuan dari program pertukaran pelajar ini antara lain: (1) Belajar lintas kampus (dalam dan luar negeri), sehingga terbangun persaudaraan lintas budaya dan suku. (2) Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama sehingga terbangun semangat persatuan dan kesatuan bangsa. (3) Melaksanakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas Pendidikan, baik antar perguruan tinggi dalam negeri maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri. Ada beberapa bentuk kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam program pertukaran belajar ini, antara lain sebagai berikut; a) pertukaran pelajar antar prodi pada perguruan tinggi yang sama, b) pertukaran pelajar antar prodi lain pada perguruan tinggi yang sama, c) pertukaran pelajar dalam prodi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda, d) pertukaran pelajar antar prodi dan perguruan tinggi yang berbeda. Dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama, kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Bentuk pembelajaran yang diambil untuk menunjang

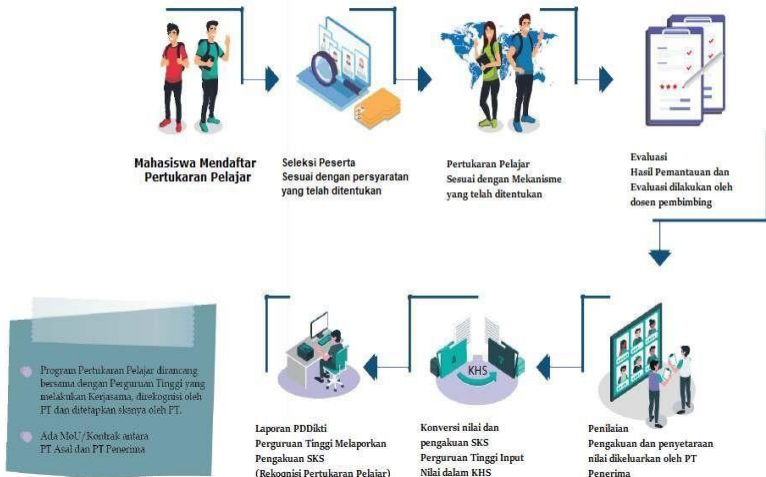
tercapainya capaian pembelajaran yang telah tertuang dalam struktur kurikulum atau pengembangan kurikulum dalam memperkaya capaian pembelajaran lulusan dalam bentuk mata kuliah pilihan.

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari program pertukaran pelajar ini dapat dibagi menjadi tiga yakni, manfaat bagi mahasiswa, manfaat bagi perguruan tinggi/program studi asal dan manfaat bagi kampus mitra. Manfaat yang akan diperoleh dari mahasiswa yang mengikuti program pertukaran pelajar antara lain; 1) memiliki wawasan kebangsaan, integritas, dan solidaritas melalui pembelajaran antar budaya. 2) mendapatkan kesempatan dalam mengembangkan kemampuan dan potensi diri serta menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman di kampus yang berbeda. 3) memperoleh pengalaman baru dalam suasana belajar serta mengenal kebudayaan dan suasana pembelajaran yang baru baik itu secara nasional maupun internasional. 4) membangun dan memperkuat nasionalisme mahasiswa dan yang terakhir 5) meningkatkan komunikasi mahasiswa lintas perguruan tinggi dan lintas budaya.

Manfaat yang akan diperoleh bagi perguruan tinggi/program studi asal yaitu; 1) perguruan tinggi/program studi asal dapat merekonstruksi kurikulum jurusan/ prodi agar dapat menyesuaikan antara Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), sub pembelajaran Matakuliah CPMK, bahan kajian, materi, bentuk dan metode pembelajaran, serta jenis evaluasi yang tercakup dalam program pertukaran pelajar. 2) dapat membangun jejaring dengan perguruan tinggi/program studi secara luas dan tidak terbatas baik nasional maupun internasional dalam aspek akademik maupun nonakademik. Adapun manfaat bagi mitra ialah; 1) perguruan tinggi/program studi dapat menyesuaikan kurikulum jurusan/prodi agar terdapat kesesuaian antara Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Matakuliah(CPMK), Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub CPMK), bahan kajian, materi, bentuk dan metode pembelajaran, serta jenis evaluasi yang tercakup didalam program pertukaran mahasiswa. 2) dapat membangun jejaring dengan perguruan tinggi/program studi secara lebih luas baik untuk aspek akademik maupun nonakademik.

Mekanisme Pelaksanaan Program Pertukaran Mahasiswa diperlihatkan pada Gambar 2.

Proses Program Pertukaran Pelajar



Gambar 2. Mekanisme Pelaksanaan Program Pertukaran Mahasiswa

(Ditjen Dikti Kemdikbud, 2020)

2) Magang dan Praktikum

Program magang dilahirkan karena kurangnya pengalaman kerja para lulusan perguruan tinggi sehingga kurang siap bekerja di industri/ dunia profesi. Program magang dilakukan 1-2 semester dengan melakukan pembelajaran langsung di

tempat kerja (*experiential learning*). Kegiatan selama 6 bulan disetarakan dengan 20 sks yang dinyatakan dalam bentuk kompetensi dalam bentuk *hard skills* dan *soft skills*. Kegiatan pembelajaran dilakukan melalui kerjasama dengan mitra seperti perusahaan, Yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, dan perusahaan rintisan. Mahasiswa memperoleh *hard skills* seperti keterampilan, *complex problem solving*, dan *analytical skills*. Sedangkan *soft skills* seperti etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama dan sebagainya. Kegiatan pembelajaran di industri menjadikan mahasiswa mengenal tempat kerja dan lebih siap memasuki dunia kerja nantinya. Bagi perguruan tinggi, juga memperoleh informasi terkait permasalahan yang dihadapi di dunia industri. Adapun mekanisme pelaksanaan magang antara lain, perguruan tinggi harus; 1) membuat kesepakatan dalam bentuk MoU dengan mitra yang ingin diajak bekerjasama dalam program magang, 2) menyusun program magang bersama mitra, 3) menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang, 4) bila memungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitor dan evaluasi, 5) dosen pembimbing dan supervisor

menyusun logbook dan melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang, dan 6) pemantauan proses magang dilakukan melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

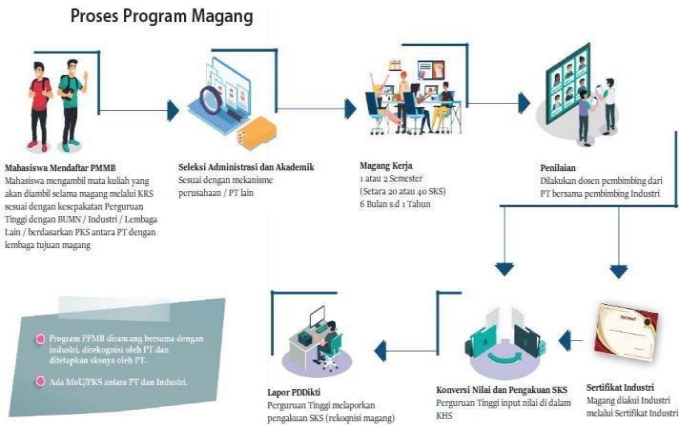
Adapun manfaat yang akan diperoleh dari program magang/praktik kerja dapat dirasakan baik bagi mahasiswa, bagi program studi maupun lembaga/industri mitra magang. Manfaat yang akan dirasakan oleh mahasiswa antara lain;1) Melatih keterampilan mahasiswa sesuai bidang ilmu masing-masing melalui pengalaman ril yang diperoleh selama proses Program Magang/Praktik Kerja; 2) Memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa dalam pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*). 3) Mengenal praktik dunia kerja mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi program pada unit-unit kerja dengan mengembangkan wawasan berfikir keilmuan kreatif dan inovatif; 4) Melatih kemampuan adaptasi mahasiswa dengan budaya kerja dan interaksi dengan semua unsur dan pihak, mulai dari unsur pimpinan, pegawai/karyawan, hingga masyarakat dan *customer* lembaga/industri tempat Program Magang/Praktik Kerja. 5) Selama magang

mahasiswa akan mendapatkan *hardskills* (keterampilan, *complex problem solving*, *analytical skills*, dan lainnya), maupun *soft skills* (etika profesi/kerja, komunikasi,kerjasama, dan lain sebagainya).

Sementara manfaat yang akan diperoleh oleh program studi adalah 1) Dapat melakukan penyesuaian kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja sebagai pengguna lulusan; 2) Membangun jejaring (*networking*) dengan *stakeholders* yang lebih luas. 3) Melalui kegiatan ini, permasalahan industri akan mengalir ke perguruan tinggi sehingga meng-update bahan ajar dan pembelajaran dosen serta topik-topik riset di perguruan tinggi akan makin relevan. Adapun manfaat bagi lembaga/industri mitra magang antara lain; 1) Memperoleh tenaga kerja yang diharapkan dapat berperan serta dalam pelaksanaan pekerjaan dan pemecahan permasalahan yang ada; 2) Menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan, baik dalam bentuk pengenalan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh oleh mahasiswa dari perguruan tingginya, maupun kemudahan bagi lembaga/Industri mitra PMBB dalam memperoleh *input* SDM sebagai tenaga

kerja baru. 3) Industri mendapatkan talenta yang bila cocok nantinya bisa langsung di-recruit, sehingga mengurangi biaya recruitment dan training awal/induksi. Mahasiswa yang telah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih mantab dalam memasuki dunia kerja dan karirnya.

Mekanisme Pelaksanaan Program Magang diperlihatkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Mekanisme Pelaksanaan Program Magang

(Ditjen Dikti Kemdikbud, 2020)

3) Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Program ini dimunculkan karena kualitas pendidikan di sekolah dasar dan menengah

masih sangat rendah (PISA 2018 peringkat Indonesia berada pada posisi nomor 7 dari bawah). Program ini menjadikan sekolah sebagai tempat praktek mengajar baik sekolah yang berada di kota maupun daerah terpencil. Kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar dapat dilakukan di sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Tujuan asistensi mengajar adalah (1) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang berminat dalam bidang pendidikan untuk memperdalam praktek dan keilmuan menjadi guru di sekolah; dan (2) Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan perguruan tinggi serta mengikuti perkembangan zaman dengan era digitalisasi 4.0; (3) membantu mengisi keterbatasan guru serta kurangnya kualitas tenaga pendidik di daerah yang membutuhkan; (4) program asisten mengajar di satuan pendidikan dapat menjadi wahan belajar bagi mahasiswa dari Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK), khususnya mahasiswa dari program studi pendidikan (KIP) agar dapat meningkatkan kompetensi dalam proses mengajar di sekolah; (5) dapat menjadi

jembatan bagi masyarakat di desa-desa mengikuti kemajuan dengan kehadiran mahasiswa dalam program asisten mengajar, sehingga dapat mendidik, memberi dan berbagi pengalaman belajar yang update serta menginspirasi.

Adapun manfaat yang akan diperoleh oleh mahasiswa, program studi asal, maupun mitra dalam program asisten mengajar di satuan pendidikan antara lain; manfaat bagi mahasiswa yakni; 1) memperoleh tambahan informasi terkini dan pengetahuan serta pengalaman tentang menjadi guru, sekolah, dan dinamika pendidikan secara langsung di sekolah. 2) Memperoleh pengalaman tentang cara mengemas pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dantingkat perkembangan peserta didik. 3) Memperoleh daya penalaran dalam melakukan penelaahan, perumusan, dan pemecahan masalah pendidikan yang ada disekolah. 4) Memperoleh pemahaman tentang cara peserta didik belajar, berpikir, dan mengemukakan gagasan. 5) Meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepedulian mahasiswa bagi pendidikan di daerah 3T dan desa.

Kemudian manfaat untuk program studi asal antara lain; 1) PT/Prodi asal dapat mengetahui dinamika dan iklim pembelajaran di sekolah yang dapat diimplementasikan pada perkuliahan melalui perubahan dan pengembangan kurikulum jurusan/Prodi yang disesuaikan dengan program hak belajar tiga semester di luar Prodi kampus merdeka. 2) Terciptanya kemitraan antara Program studi asal dan sekolah yang ditunjukkan oleh komitmen bersama untuk mengembangkan program-program tindak lanjut dalam peningkatan kualitas pembelajaran dalam berbagai bentuk dan berkelanjutan serta mendukung pelaksanaan Praktek Pembelajaran Lapangan (PPL) mahasiswa. Sedangkan manfaat bagi mitra antara lain; 1) Menunjang kemajuan daerah 3T karena mahasiswa diturunkan untuk mengajar, mendidik, dan menginspirasi masyarakat. 2) Masyarakat di desa mendapat intelektual muda karena mahasiswa diberikan kesempatan mengajar di wilayah tersebut. 3) Mitra memperoleh input, ide, dan masukan mahasiswa yang dapat berperan dalam pengembangan suatu organisasi/lembaga/wilayah dan menjadi solusi dalam pemecahan masalah yang ada. 4) Kemudahan bagi mitra dalam memperoleh input

SDM lulusan perguruan tinggi yang telah memiliki kompetensi. 5) Meningkatkan hubungan kemitraan antara mitra dengan perguruan tinggi.

Mekanisme Pelaksanaan Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan diperlihatkan pada Gambar 4.



Gambar 4. Mekanisme Pelaksanaan Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

(Ditjen Dikti Kemdikbud, 2020)

4) Penelitian

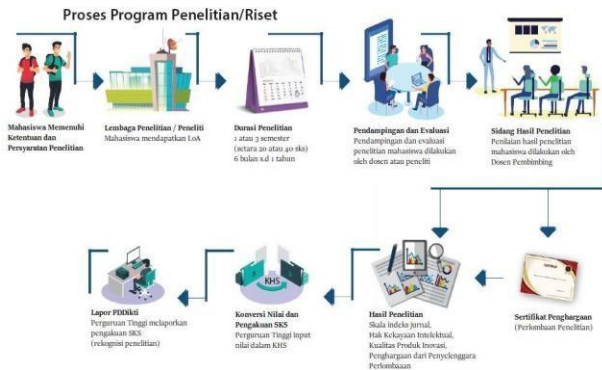
Program penelitian ini memberi kesempatan kepada mahasiswa yang mempunyai *passion* menjadi peneliti. Terlibatnya mahasiswa dalam

penelitian dapat membangun cara berpikir kritis sehingga mereka dapat mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik. Kegiatan dapat dilakukan selama 1-2 semester. Ada lima hal yang menjadi tujuan program kegiatan penelitian yaitu (1) meningkatkan ekosistem dan kualitas penelitian di laboratorium dan lembaga penelitian Indonesia dengan menyediakan sumber daya peneliti melalui regeerasi peneliti sejak dini; (2) untuk menumbuh kembangkan minat dan rasa ingin tahu mahasiswa terhadap persoalan, kebutuhan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia disertai dengan solusi penyelesaiannya (3) Menemukan solusi ilmiah yang tepat sehingga mampu menghasilkan karya penelitian yang bermanfaat baik bagi masyarakat akademik maupun masyarakat luas; dan (4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas riset yang dapat dilakukan oleh mahasiswa untuk menghasilkan luaran yang lebih optimal. (5) Memicu intelektual mahasiswa dalam menemukembangkan produk-produk kreatif dan inovatif secara ilmiah.

Adapun manfaat yang akan diperoleh oleh mahasiswa yang mengambil program ini yakni; 1) dapat mengaplikasikan pengetahuan dan

keterampilan untuk menemukan masalah dan mengungkap solusi secara saintifik untuk menjawab permasalahan yang ada dimasyarakat berdasarkan bidang ilmu masing-masing. 2) dapat menghasilkankarya saintifik yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. 3) dapat menghasilkan publikasi ilmiah dan HKI dari proses penelitian. 4) dapat meningkatkan pengetahuan serta keterampilan penelitian yang diaplikasikan dalam menyelesaikan tugas akhir. 5) membuka peluang mendirikan lembaga penelitian yang kompetitif, baik dengan cara kelompok maupun individu yang independen.

Mekanisme Pelaksanaan Program Penelitian diperlihatkan pada Gambar 4.



Gambar 4. Mekanisme Pelaksanaan Program Penelitian

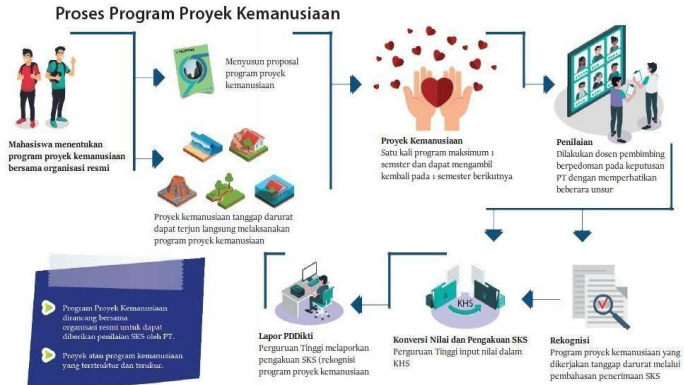
(Ditjen Dikti Kemdikbud, 2020)

5) Proyek Kemanusiaan

Program ini muncul dikarena karena Indonesia banyak mengalami bencana alam seperti gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, bencana hidrologi dan sebagainya. Dengan adanya bencana tersebut mahasiswa dapat menjadi *“foot soldiers”* dalam proyek-proyek kemanusiaan dan pembangunan. Tujuan program proyek kemanusiaan ini adalah (1) Menyiapkan mahasiswa yang unggul dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika; dan (2) Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada dan ikut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahlian masing-masing. Mahasiswa didampingi oleh dosen dan lembaga mitra untuk mengawasi, menilai dan mengevaluasi kegiatan yang dilakukan. Lembaga mitra bisa berada di dalam negeri maupun luar negeri. Lembaga mitra dalam negeri seperti Pemda, PMI, BPBD, BNPB dan sebagainya. Sedangkan Lembaga mitra luar negeri seperti UNESCO, WHO, UNHCR, UNOCHA dan sebagainya.

Adapun manfaat yang akan diperoleh oleh mahasiswa yang mengambil program proyek kemanusiaan adalah 1) terciptanya kompetensi sikap mahasiswa sebagai makhluk sosial, khususnya dalam mengembangkan karakter berupa kepedulian dan peran serta dalam mengatasi masalah kemanusiaan yang hadir di masyarakat. 2) dapat membangun dan memperluas jaringan di luar kampus melalui kegiatan kolaborasi antara mahasiswa, masyarakat, dan organisasi formal. Bagi program studi program proyek kemanusiaan akan dapat memberikan manfaat antara lain; 1) sebagai wadahasosialisasi program studi sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan penerimaan lulusan di lingkungan masyarakat, 2) dapat memperkuat kemitraan program studi dengan organisasi eksternal, khususnya organisasi formal yang bergerak di bidang kemanusiaan baik pada lingkup nasional maupun internasional. 3) dapat menghasilkan pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang melibatkan dosen dan mahasiswa.

Mekanisme Pelaksanaan Program Proyek Kemanusiaan diperlihatkan pada Gambar 5.



Gambar 5. Mekanisme Pelaksanaan Program Proyek Kemanusiaan

(Ditjen Dikti Kemdikbud, 2020)

6) Kegiatan Wirausaha

Program wirausaha dimunculkan untuk mendorong dan mengembangkan minat mahasiswa di bidang wirausaha. Tujuan dari program kewirausahaan secara rinci adalah (1) agar mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha agar dapat mengembangkan usahanya lebih dini dan secara terbimbing; dan (2) mahasiswa dapat mengaplikasi rencana bisnis yang telah didapatkan saat mengikuti kuliah kewirausahaan menjadi sebuah usaha yang dapat dirintis sejak kuliah. 3) mahasiswa dapat

mengaplikasikan keterampilan kewirausahaan dengan memberikan pendampingan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar dapat mengembangkan produk dan inovasi bisnisnya. 4) mahasiswa dapat mengembangkan program-program kewirausahaan untuk pemberdayaan masyarakat dengan bekerjasama dengan instansi terkait. Adapun manfaat yang akan diperoleh oleh mahasiswa yang mengambil program kewirausahaan antara lain; 1) menerapkan ilmu dan keterampilan dari perguruan tinggi, khususnya dalam bidang kewirausahaan, 2) mengaplikasikan ide dan rencana bisnis dengan merintis usaha sejak kuliah, 3) memberikan pendampingan bagi UMKM dalam mengembangkan produk dan inovasi usahanya dan 4) memberikan kesempatan untuk menciptakan pekerjaan sebagai upaya penanganan masalah pengangguran intelektual.

Mekanisme Pelaksanaan Program Proyek Kemanusiaan diperlihatkan pada Gambar 6.



Gambar 6. Mekanisme Pelaksanaan Program Kewirausahaan

(Ditjen Dikti Kemdikbud, 2020)

7) Studi/Proyek Independen

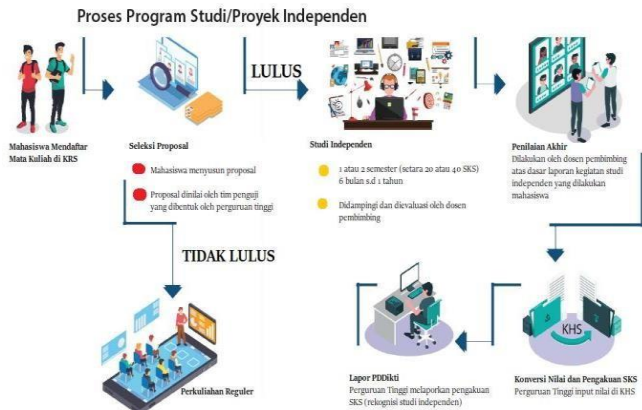
Program proyek independen dihadirkan untuk melengkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan namun terdapat dalam silabus program studi atau fakultas. Mahasiswa bisa membuat karya inovatif untuk dilombakan di tingkat nasional dan internasional. Kegiatan ini dapat dijadikan sebagai pengganti mata kuliah yang harus diambil dan dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang berkoordinasi dengan dosen pembimbing. Adapun

yang menjadi tujuan studi/proyek independen ini adalah: (1) Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif; (2) Menyelenggarakan Pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D); dan (3) Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional, 4) meningkatkan pengalaman dan kompetensi mahasiswa sesuai dengan bidang keilmuan program studi dan 5) dapat mengimplementasikan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bagian pengabdian kepada masyarakat.

Beberapa manfaat yang akan diperoleh oleh mahasiswa yang mengambil program studi/proyek independen adalah sebagai berikut; a) mahasiswa dapat melaksanakan gagasan dalam proses mengembangkan produk, karya, ide dan inovasi yang menjadi gagasan dalam proyek independen. b) mahasiswa akan memperoleh pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D). c) mahasiswa akan dapat memperoleh prestasi tingkat lokal, nasional maupun internasional. d) dapat melatih keterampilan mahasiswa sesuai dengan bidang ilmunya dalam melaksanakan program proyek independen dan e) mahasiswa dapat lebih

mandiri dalam melaksanakan program kerja.

Mekanisme Pelaksanaan Program Studi/Proyek Independen diperlihatkan pada Gambar 7.



Gambar 7. Mekanisme Pelaksanaan Program Studi/Proyek Independen

(Ditjen Dikti Kemdikbud, 2020)

8) Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT)

Program KKNT adalah bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat, mengidentifikasi potensi, dan menangani masalah, mengembangkan potensi desa/daerah dan merumuskan solusi terhadap

masalah yang dihadapi masyarakat. Setelah melakukan kegiatan, mahasiswa membuat laporan akhir. Tujuan program KKNT ini adalah (1) Kehadiran mahasiswa selama 6-12 bulan dapat mendampingi perencanaan program, mulai dari kajian potensi desa, masalah dan tantangan pembangunan di desa, menyusun prioritas pembangunan, merancang program, mendesain, sarana prasarana, memberdayakan masyarakat, pengelolaan BUMDes, mensupervisi pembangunan sehingga monitoring dan evaluasi; (2) memberikan pengalaman profesional dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk mempersiapkan mahasiswa sebagai generasi optimal, memberikan kesempatan untuk mengembangkan bidang ilmunan dan minat mahasiswa dengan luran akhir dalam bentuk karya tertulis, audio-visual, maupun bentuk karya laporan akhir mahasiswa lainnya.

Adapun manfaat yang diperoleh oleh mahasiswa dari program membangun desa/KKNT adalah dapat menerapkan ilmu atau keterampilan yang diperoleh selama masa studi diperguruan tinggi untuk membantu desa melalui proyek yang bermanfaat, serta dapat

meningkatkan kemampuan adaptasi mahasiswa dengan situasi dan kondisi di masyarakat sehingga menambah pengalaman untuk dapat hidup bermasyarakat.

Mekanisme Pelaksanaan Program Studi atau Proyek Independen diperlihatkan pada Gambar 8.



Gambar 8. Mekanisme Pelaksanaan Program Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik

(Ditjen Dikti Kemdikbud, 2020)

C. APLIKASI MBKM PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI

Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Program Studi Pendidikan Biologi telah terlaksana pada program 1) pertukaran pelajar, pada semester genap tahun 2020/2021 telah menjalankan program pertukaran pelajar antar Prodi Pendidikan Biologi Universitas Abulyatama dengan Prodi Pendidikan Biologi Universitas Almuslim. 2) asisten mengajar di satuan pendidikan dalam mata kuliah praktik pengalaman lapangan dengan bobot 4 SKS; semester 7. 3) membangun desa/kuliah kerja nyata tematik dalam mata kuliah KKN dengan bobot 4 SKS pada semester 7.

Pertama, pertukaran pelajar antara Universitas Abulyatama (Unaya) dengan Universitas Almuslim, dengan jumlah mahasiswa pada Prodi Pendidikan Biologi Unaya yang dikirim ke Prodi Pendidikan Biologi Almuslim sebanyak empat mahasiswa dengan mengambil mata kuliah Seminar Biologi dengan dosen pengampu mata kuliah berasal dari Universitas Almuslim. Proses perkuliahan berjalan lancar dengan menggunakan media LMS Almuslim yang didalamnya sudah memiliki berbagai menu diantaranya menu materi, RPS, Tugas, Video, Mitem dan bahkan Finalnya. Berikut bentuk LMS Universitas Almuslim

yang dapat dimanfaatkan oleh dosen dan mahasiswa dalam proses perkuliahan.

Demikian juga dengan absensi kehadiran mahasiswa juga dilakukan melalui media LMS, dengan menggunakan LMS semua materi, absensi bahkan proses evaluasi dapat direkam dan bila sewaktu-waktu dibutuhkan dapat dipanggil dan didownload kembali, berikut adalah bentuk absensi dengan menampilkan nama-nama mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah seminar biologi.

Kedua, asisten mengajar di satuan pendidikan dalam mata kuliah praktik pengalaman lapangan dengan bobot 4 SKS; semester 7. Mahasiswa dikirim ke Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) demikian juga Sekolah Dasar (SD). Mahasiswa yang lulus proram Kementria dalam program Kampus Mengajar akan diberikan fasilitas antara lain; 1) konversi sebesar 12 SKS, 2) uang saku Rp. 700.000/bulan, 3) potongan UKT maksimal Rp. 2.400.000-satu kali, 4) piagam penghargaan sebagai peserta kampus mengajar.

Adapun kontribusi mahasiswa dalam kampus mengajar adalah membantu guru dalam pelaksanaan belajar dari rumah atau tatap muka di sekolah khususnya dalam pembelajaran literasi dan numerasi;

membantu adaptasi teknologi dalam proses pembelajaran; mendukung kepala sekolah dalam bidang administrasi dan manajerial sekolah; sosialisasi produk pembelajaran Kemendikbud; sosialisasi materi promosi profil pelajar pancasila dan duta edukasi perubahan perilaku di masa pandemi. Yang terlibat dalam program kampus mengajar tidak hanya mahasiswa, dosen juga mengambil peran sebagai dosen pendamping lapangan yang kemudian bertugas mendampingi mahasiswa bertemu dinas pendidikan dan sekolah; melakukan sesi pendampingan selama program berlangsung; melakukan komunikasi dengan guru pamong; sharing session dengan seluruh mahasiswa bimbingan; memberikan nilai akhir dan memberikan rekomendasi untuk pengembangan diri mahasiswa bimbingan. Ketiga, membangun desa/kuliah kerja nyata tematik dalam mata kuliah KKN dengan bobot 4 SKS pada semester 7. Mahasiswa akan berada di desa dengan melaksanakan berbagai program bina desa seperti pembuatan pupuk organik dari kohe ayam untuk meningkatkan produksi tanaman, meningkatkan kreatifitas anak-anak sekolah dasar, serta membuat posko kampung tangguh Covid 19.

GURU PENGGERAK DAN INKUIRI APRESIATIF

“Kesuksesan seseorang bukan karena kecerdasan yang dimilikinya, namun karena keinginan dan keatifitasnya, yang mampu menggerakan orang lain”

A. GURU GROWTH MINDSET

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan Program Merdeka Belajar sebagai satu paket inisiatif pemerintah dalam mereformasi mutu pendidikan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengungkapkan bahwa reformasi pendidikan di Indonesia tidak bisa dilakukan dengan semata-mata menggunakan pendekatan administratif (*administrative approach*), melainkan harus melakukan transformasi budaya (*culture transformation*). Setiap unit pendidikan harus memiliki kapasitas untuk mengubah budaya sekolahnya menjadi berorientasi pada *culture of learning and innovation* alih-alih

terfokus pada wilayah administrasi (Nadiem, 2020).

Nadiem (2020) juga menjelaskan bahwa Program Merdeka Belajar pada dasarnya merupakan upaya pemerintah dalam merampingkan beban administratif yang membelenggu fleksibilitas sekolah dan guru dalam melakukan inovasi. Melalui Merdeka Belajar, guru diharapkan dapat memiliki “*growth mindset*”, sehingga mampu melakukan aneka inovasi pembelajaran yang efektif bagi peserta didik. Selain itu, dalam perspektif peserta didik, Merdeka Belajar diharapkan dapat menciptakan “*psychological safety*” dalam proses belajar sehingga peserta didik dapat menumbuhkan kebiasaan banyak tanya, banyak coba, dan banyak karya tanpa harus khawatir mengalami kegagalan.

Beberapa penelitian mengaitkan Merdeka Belajar dengan aliran-aliran dalam filsafat pendidikan. Program Merdeka Belajar dinyatakan memiliki kesejajaran dengan filsafat pendidikan progresivisme yang sama-sama menekankan adanya kemerdekaan dan keleluasaan lembaga pendidikan dalam mengeksplorasi secara maksimal kemampuan, kecerdasan, dan potensi peserta didik dengan cara fleksibel, natural, menyenangkan dan demokratis (Mustaghfiroh, 2020). Merdeka Belajar juga dinilai memiliki kesamaan esensial dengan konsep Pedagogi Kritis terutama

dalam merealisasikan otonomi institusi pendidikan, kebebasan guru dari belenggu birokrasi, dan kebebasan siswa dalam belajar sesuai dengan preferensinya (Prahani et al., 2020). Menurut penelitian Hendri (2020)Merdeka Belajar bahkan dinilai relevan dengan teori humanistik, konstruktivistik dan konsep belajar Taman Siswa yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara.

Salah satu program yang termuat di dalam paket kebijakan merdeka belajar adalah program guru penggerak. Program ini bertujuan untuk mendongkrak potensi guru dan meningkatkan kemandirian murid dalam belajar. Guru penggerak merupakan bagian dari proses reformasi pendidikan ke arah perubahan yang lebih baik, dan memiliki peran yang fundamental dalam implementasi merdeka belajar. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada peluncuran merdeka belajar episode 5 tentang guru penggerak menjelaskan bahwa “guru penggerak adalah suatu program identifikasi dan pelatihan calon pemimpin-pemimpin pendidikan di masa depan. Guru penggerak adalah agen-agen yang di masa depan akan jadi calon-calon kepala sekolah, pengawas sekolah dan pelatih-pelatih program pelatihan”. Program guru penggerak pada dasarnya mengubah secara total pendekatan reformasi pendidikan yang selama ini berjalan secara

terpusat alias tersentralisasi menjadi lebih terdesentralisasi dengan memindahkan otonomi dan zona perubahan kepada komponen paling kecil dari sistem pendidikan yakni guru. Melalui program guru penggerak, guru ditempatkan sebagai agen pembaharu yang berperan penting dalam mentransformasi budaya sekolah menjadi lebih unggul dan inovatif (Nadiem, 2020).

Berdasarkan beberapa literatur dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan konseptual antara istilah perubahan dan transformasi. Menurut Tosey dan Robinson (2002), transformasi dapat dibedakan dari istilah perubahan berdasarkan beberapa perspektif. Pertama, transformasi adalah bagian dari perubahan. Namun, istilah transformasi digunakan untuk proses perubahan yang bersifat esensial yakni mengubah bentuk, struktur, dan hakekat sesuatu. Kedua, transformasi merupakan bentuk tertinggi dari perubahan organisasi yang memperantarai fase antara perubahan biasa dan evolusi. Menurut Kotter dan Schlesinger (2008),

Istilah transformasi juga terbedakan dengan istilah perubahan pada banyaknya pemangku kepentingan atau *stakeholders* yang terlibat dan imbasnya pada nilai-nilai inti yang dianut oleh organisasi. Scharmer (2018) menjelaskan bahwa transformasi berarti

mengubah paradigma/mental model dan bukan sekedar mengubah perilaku. Berdasarkan perspektif ini dapat diketahui bahwa transformasi bersifat lebih besar, lebih luas, dan lebih dalam daripada istilah perubahan organisasi karena tidak hanya melibatkan aspek material, melainkan juga aspek spiritual (Scharmer, 2018).

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat isyarat yang jelas bahwa guru penggerak akan mengambil peran strategis dalam mentransformasi sistem pendidikan. Guru penggerak diharapkan berperan penting dalam membangun visi dan budaya positif di sekolah. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Iwan Syahril(2020) menjelaskan bahwa guru penggerak akan berperan memajukan pendidikan Indonesia dengan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan menggerakkan ekosistem pendidikan yang lebih baik melalui perubahan mindset pembelajaran. Menurut Iwan (2020), semua itu dapat dilakukan dari kesungguhan hati yang kuat dan semangat untuk terus belajar dan berbagi di antara para Calon Guru Penggerak dan inilah kunci untuk terus menjalani proses pendidikan dan melakukan transformasi pendidikan.

Artikel ini berupaya mencari dan menelaah diskursus penting tentang peran agen perubahan di

dalam proses perubahan organisasi dengan memfokuskan penelaahan pada peran guru penggerak dalam menggerakkan proses perubahandi sekolah khususnya dalam memulai mencanangkan visi perubahan, mempraktikkan perubahan proses pembelajaran, hingga menjadi pemimpin pembelajaran dalam mengembangkan sekolah.

B. PERUBAHAN MINDSET

Perubahan adalah sebuah fenomena yang niscaya dan lazim terjadi di dalam organisasi. Menurut Kotter dan Rathgeber(2006:21), perubahan yang dialami oleh organisasi dapat meliputi perubahan struktur, proses, bahkan perubahan dan transformasi budaya. Proses perubahan menjadi semakin kompleks seiring semakin tingginya interaksi dan hubungan saling terkait antar komponen di dalam organisasi. Penjelasan tersebut mengisyaratkan bahwa untuk memetakan dan mengkonstruksi pengetahuan yang utuh tentang peran guru penggerak sebagai agen perubahan dalam transformasi budaya sekolah perlu terlebih dahulu menengahkan kajian dan diskursus tentang konsep dan karakteristik perubahan yang terjadi di sekolah.

Sekolah sebagai tempat pembentukan karakter peserta didik senantiasa mengalami perubahan yang

dinamis. Dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul sekolah memiliki peran yang sangat strategis, dimana sekolah merupakan tempat tenaga pendidik atau guru mentransfer ilmu pengetahuan, penanaman budaya, dan juga tempat pembentukan karakter kepada murid. Perubahan dan transformasi di dalam lembaga pendidikan sejatinya berangkat dari dua faktor, yakni faktor eksternal dan internal. Demi menjaga relevansinya, lembaga pendidikan kontemporer dituntut mengikuti arah gerak zaman, sehingga harus memiliki bahkan menganut asas keterbukaan yang tidak reaktif, melainkan selalu mengedepankan sikap proaktif dalam menghadapi dinamika lingkungan sehingga proses perubahan dan transformasi akan menjadi suatu keharusan yang melekat pada organisasi sekolah (Joesoef, 2011). Faktor internal yang mendorong perubahan dalam sekolah antara lain yaitu (1) persoalan hubungan antar komponen sekolah, (2) persoalan terkait mekanisme kerja, dan (3) persoalan keuangan (Herita Dewi, 2020).

Menurut Utari (2020:452-455) dinamika yang terjadi dari aspek internal maupun eksternal sekolah yang menyebabkan adanya tekanan sekolah untuk berubah adalah sebagai berikut: 1) dorongan untuk menjadi lebih *accountable*, 2) terjadinya perubahan

kependudukan, 3) kurangnya SDM baik dari segi kualitas maupun kuantitas, 4) proses yang dilakukan anggota organisasi dan keadaan anggota organisasi itu sendiri yang mempengaruhi jalannya proses.

Transformasi sekolah sebagaimana yang dikemukakan di atas kemudian dapat dilasifikasikan kedalam beberapa muatan perubahan fundamental sebagaimana yang diutarakan oleh Utari(2020:452-455) dan Kasali(2007:66)yaitu: perubahan struktural, perubahan program, danperubahan yang menyangkut sumber daya manusia (SDM). Menurut Lunenburg dan Ornstein(2004:52-61)transformasi dan perubahan sekolah yang berhasil setidaknya memerlukan lima tahapan perubahan. Tahap-tahap tersebut adalah: mengarah pada bentuk dan karakteristik yang lebih baik atau tidak. Transformasisekolah juga perlu dipersiapkan secara berkelanjutan dan terus menerus supaya kontribusi perubahan terhadap peningkatan kompetensi kinerja dan seluruh staf pendidikan betul-betul terasa sehingga mampu membawa dampak yang baik terhadap peningkatan kualitas pendidikan.

Proses perubahan di sekolah diperlukan adanya “pembaharu” atau *agent of changed* dan *agent of transformation*,yaitu subjek-subjek tertentu di sekolah yang mampu membawa perubahan dan pembaruan secara total(Widodo, 2017:287-306).Menurut Shaked

dan Schechter(Shaked& Schechter, 2016:7) agen yang terlibat dalam proses transformasi memiliki tanggungjawab besar dalam membawa dan menghubungkan aspirasi perubahan dari seluruh pemangku kepentingan.

Apabila mengacu pada konsep transformasi organisasi, keberadaan dan peran agen pembaharuan sangat penting terutama dalam memandu pembaharuan dan perubahan menjadi satu jenis budaya baru di dalam organisasi(Rogers, 1983). Agen perubahan adalah setiap individu yang memiliki pengetahuan dan kekuasaan yang cukup dalam memandu dan memfasilitasi upaya transformasi organisasi (Kasali, 2007:276). Transformasi organisasi berperan sebagai penghubung antara sumber perubahan dengan sistem anggota organisasi yang menjadi sasaran transformasi. Selain itu, agen perubahan juga berperan untuk membangun kesadaran akan perlunya perubahan, mengembangkan hubungan saling tukar informasi, mengidentifikasi permasalahan-permasalahan mendasar, mentransformasi niat dan visi menjadi tindakan, mengadopsi transformasi dan inovasi, merawat adopsi terhadap transformasi, dan mengembangkan hubungan dengan anggota yang menjadi sasaran transformasi, agar mereka dapat mengadopsi

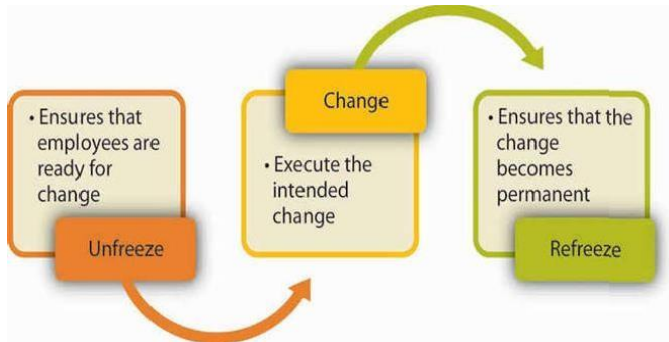
perubahan ke dalam paradigma dan kebiasaan baru secara berkelanjutan (Anwar, 2008). Keberadaan, peran, dan aktivitas agen perubahan sangat penting dalam strategi perubahan terutama untuk memperkuat daya penggerak dan sekaligus memperlemah bahkan menghilangkan daya penahan perubahan (McShane & Glinow, 2008:492).

Proses transformasi di sekolah memerlukan adanya pengembangan rencana-rencana yang kreatif, dukungan sumberdaya yang mewujudkannya, disertai dengan pelembagaan (Andriani, 2008:52-61). Seorang agen perubahan perlu memahami dan menganalisis keadaan yang ada di sekolah ketika akan melakukan langkah-langkah perubahan di sekolah agar perubahan yang dilaksanakan mencapai keberhasilan secara efektif dan efisien. Menurut Fullan (2020:15), asumsi-asumsi perubahan organisasi yang perlu dipahami adalah sebagai berikut: (1) perubahan merupakan transformasi dan pengembangan ide-ide baru secara terus menerus; (2) perubahan berhubungan dengan ambiguitas, ambivalensi dan ketidakpastian bagi para pelakunya; (3) konflik dan tidaksepemahaman menjadi aspek fundamental yang dibutuhkan untuk keberhasilan perubahan; (4) memerlukan upaya pemotivasian kepada individu untuk berubah; (5) membutuhkan waktu; (6) berhadapan dengan

berbagai alasan penolakan perubahan; (7) tidak semua membutuhkan perencanaan didasarkan pemahaman atas individu atau kelompok dapat menerima perubahan; (8) evolusioner dan model-model pemecahan masalah yang proses perubahan; (9) membutuhkan kombinasi keputusan-keputusan tindakan spontanbudaya. (*on the spot*) serta intuisi; dan (10)membutuhkan perubahan

C. GURU PENGGERAK DAN PROSES TRANSFORMASI SEKOLAH

Menurut Lewin(1951:54), proses perubahan secara umum terdiri dari tiga tahapan, yakni *unfreezing*, *changing*, dan *refreezing*. Proses tersebut menjelaskan bagaimana situasi terkini diubah dan digerakkan menuju kondisi yang diinginkan dan kemudian menjadikan system baru/ pembaharuan tersebut sebagai budaya yang dipertahankan secara berkelanjutan. Berikut ilustrasinya:



Sumber:

McShane dan Von Glinow, *Organizational Behavior: Emerging Realities for The Workplace Revolution*

McShane dan Glinow(2008:492)menjelaskan alur di atas bahwa dengan mengacu pada proses“mencairkan” (*unfreezing*) situasi saat ini dapat dilakukan apabila daya kekuatan penggerak perubahan lebih besar daripada kekuatan yang menahan perubahan. Penjelasan tersebut mengisyaratkan bahwa perubahan organisasi dapat ditempuh manakala pemimpin perubahan dapat memilih di antara tiga pendekatan, yaitu memberbesar daya penggerak perubahan lebih dari kekuatan yang menahan perubahan, memperlemah atau menghilangkan kekuatan yang menahan perubahan, atau mengombinasikan dua hal tersebut sekaligus. Apabila pilihan jatuh pada pendekatan yang pertama, maka

pemimpin perubahan harus meningkatkan daya penggerak untuk memotivasi terjadinya perubahan. Namun, perubahan sangat jarang terjadi hanya dengan meningkatkan daya penggerak karena kekuatan yang menahan perubahan akan selalu mengimbangi kekuatan penggerak perubahan. Kondisi ini sesuai dengan hukum dinamika sistem bahwa semakin besar daya dorong diberikan kepada suatu sistem semakin kuat pula daya penahan untuk mendorong balik. *The harder you push, the harder the system pushes back* (Senge, 2004:43). Antagonisme seperti ini justru akan mengancam upaya perubahan karena akan menghasilkan tensi dan konflik di dalam organisasi.

Menurut McShane, pilihan terbaik adalah dengan mengombinasikan upaya memperkuat daya penggerak dan sekaligus memperlemah bahkan menghilangkan daya penahan perubahan. Memperkuat daya penggerak perubahan dapat dilakukan dengan menciptakan urgensi/ kemendesa-kan untuk berubah. Menurut McShane dan Glinow (2008), pemimpin perubahan perlu menjelaskan dinamika eksternal organisasinya baik dengan menjelaskan perkembangan kompetitor ataupun perubahan kecenderungan *customer* serta menghubungkan semua itu dengan peluang dan

ancaman yang dihadapi organisasi. Penjelasan seperti itu dapat mendorong anggota organisasi untuk merasakan signifikansi dan urgensi dari perubahan organisasinya.

Berdasarkan perspektif perubahan organisasi di atas, keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk menjalankan program guru penggerak sebagai penopang dari realisasi merdeka belajar adalah satu upaya yang sistemis apabila mengacu pada perspektif teori perubahan organisasi. Nadiem (2020) dalam peluncuran merdeka belajar episode 5 tentang guru penggerak pada tanggal 3 Juli 2020 menjelaskan bahwa “guru penggerak adalah suatu program identifikasi dan pelatihan calon pemimpin-pemimpin pendidikan di masa depan. Guru penggerak adalah agen-agen yang di masa depan akan jadi calon kepala sekolah, pengawas sekolah dan pelatih-pelatih program pelatihan”. Berdasarkan konteks tersebut, program guru penggerak dapat dikatakan merupakan satu inisiasi awal dalam mewujudkan merdeka belajar. Hadirnya guru penggerak di sekolah sejak awal ditujukan untuk mengubah budaya sekolah dengan melibatkan kekuatan sumber daya dari dalam sekolah itu sendiri dan bukan dari kekuatan eksternal. Menurut Kotter dan Rathgeber (2006) setiap proses transformasi yang diambil dari dalam organisasi seperti melalui

program guru penggerak ini dapat memperkuat kekuatan penggerak perubahan dan sekaligus memperkecil resistensi atau penolakan terhadap perubahan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga menuturkan bahwa Guru penggerak sebagai pendorong transformasi pendidikan Indonesia diharapkan dapat mendukung tumbuh kembang murid secara holistik sehingga berkembang menjadi pelajar pancasila, menjadi pelatih atau mentor guru lainnya untuk pembelajaran yang berpusat pada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi bagi ekosistem pendidikan”(Kholisdinuka, 2020). Guru penggerak menjadi agen perubahan yang dapat mentransformasi ekosistem pendidikan, dan memiliki dampak yang lain terhadap guru yang lain dan lembaga pendidikannya. Selain itu guru penggerak diprioritaskan dan dipersiapkan menjadi bibit-bibit kepala sekolah yang unggul sehingga di masa yang akan datang sudah ada generasi penggerak yang mampu memimpin proses transformasi sekolah menuju skala perbaikan kualitas pendidikan yang lebih komprehensif.

Guru penggerak akan mengalami pendidikan dan pelatihan yang dilakukan melalui pendekatan andragogi dan berbasis pada pengalaman mereka selama mengajar. Prosedur pelaksanaan guru penggerak yang

diprogramkan oleh Kemendikbud dimulai dengan mengadakan perekrutan terhadap guru, kemudian setelah itu diadakan pendidikan calon guru penggerak, dan selanjutnya diharapkan mampu menghasilkan generasi baru guru pemimpin pendidikan yang kelak akan menjadi kepala sekolah, pengawas sekolah, dan instruktur pelatihan guru. Selama masa pelatihan dan pendidikan calon guru penggerak ini akan dilatih tentang bagaimana kepemimpinannya, dilatih tentang mentorshipnya dan kemampuan mereka untuk melakukan perubahan di sekolah, setelah lulus maka akan menjadi guru penggerak.

Diriktetorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) menyatakan bahwa “proses pendidikan dan penilaian guru penggerak yang berbasis pada pendekatan andragogi itu kita harus berfokus pada *on the job learning* jadi artinya pembelajaran yang relevan, kontekstual, sehingga memberikan dampak yang sebaik baiknya sehingga proses pendidikan dan penilaian guru penggerak ini berbasis pada dampak dan bukti”(Syahril, 2020). Sehingga dapat kita pahami bahwa pendidikan guru penggerak memang benar-benar menciptakan guru yang tidak hanya pandai dalam mendidik akan tetapi secara jangka panjang program guru penggerak ini adalah uapaya mempersiapkan calon pemimpin di masa depan yang

tentu membawa perubahan terhadap ekosistem pendidikan menuju ke arah yang lebih baik.

Pembekalan yang diberikan selama pendidikan guru penggerak yaitu guru diberikan pemahaman mengenai paradigma tentang guru penggerak, dan visi guru penggerak yang antara lain adalah refleksi filosofi pendidikan Indonesia, nilai-nilai, peran, dan visi guru penggerak, serta pemahaman mengenai membangun budaya positif di sekolah. Selain itu program guru penggerak juga bertujuan memberikan pemahaman tentang praktik pembelajaran yang berpihak pada murid, dan pemahaman mengenai memimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah.

Menurut Cooperrider, Whitney, dan Stavros (2008:49), inkuiri apresiatif adalah sebuah filosofi yang mengintegrasikan suatu pendekatan dan proses yang melibatkan banyak orang di berbagai tingkatan untuk menghasilkan perubahan yang positif dan efektif. Sebagai sebuah filosofi dan kerangka kerja, inkuiri apresiatif dapat diadaptasi dan dikombinasikan dengan berbagai proses organisasional yang lain seperti kepemimpinan, redesain struktur dan sistem, bahkan transformasi kultural (nilai dan keyakinan) organisasi. Inkuiri apresiatif dapat juga didefinisikan sebagai pencarian koevolusioner terhadap apa yang terbaik dari yang dimiliki oleh individu, organisasinya, dan realitas

yang relevan di sekitar mereka. Pada fokusnya yang terluas, kerangka inkuiri apresiatif melibatkan pencarian dan penemuan sistematis dari apa-apa yang dapat memberi kehidupan pada sistem hayati berupa segala sesuatu yang paling efektif dan konstruktif secara ekonomis, ekologis, dan kemanusiaan (Cooperrider & Suresh, 1987:132). Menurut Whitney dan Trosten-Bloom (2010:1) inkuiri apresiatif adalah sebuah kajian terhadap segala sesuatu yang dapat memberi kehidupan kepada sistem manusia ketika berfungsi pada fungsinya yang terbaik.

Apabila mengacu pada Berdasarkan modul 1.3 guru penggerak, proses transformasi sekolah yang digerakkan oleh guru penggerak dilakukan melalui pendekatan inkuiri apresiatif. Meskipun berbeda dalam terminologi, pendekatan inkuiri apresiatif sebenarnya telah menjadi bagian esensial dari perubahan organisasi. Scharmer (2018:177) menjelaskan pendekatan inkuiri apresiatif ini adalah bagian dari *action research* yang dapat digunakan untuk mengkreasi budaya baru di dalam organisasi. Melalui pendekatan inkuiri apresiatif para guru penggerak mengelola proses transformasi pendidikan di tingkat sekolah dengan mengeksplorasi keinginan bersama setiap warga sekolah, menghimpun daya dan kekuatan penggerak, mengapresiasi setiap upaya perbaikan sekecil apapun

serta menyelaraskan kepentingan-kepentingan yang berbeda di dalam sekolah guna menghindari resistensi yang kontraproduktif bagi kemajuan sekolah.

Kerangka kerja inkuiri apresiatif di sisi lain juga memiliki relevansi asumsi dan metodologi dengan prinsip kodrat alam yang dimuat dalam konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Prinsip tersebut menjelaskan bahwa pendidikan dilakukan untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya (Dewantara, 1994:133).

Kesesuaian prinsip tersebut dengan kerangka inkuiri apresiatif terletak pada kesamaan asumsinya, bahwa setiap individu dan organisasi memiliki aspek-aspek yang baik dan positif, sesuatu yang melekat sebagai bagian yang sangat dihayati, bersifat efektif, dan berhasil menciptakan hubungan yang sehat pada berbagai dimensi komunitas dan pemangku kepentingan. Inkuiri apresiatif dimulai dengan mengidentifikasi aspek-aspek positif tersebut dan menghubungkannya dengan potensi transformasi yang tertinggi yakni energi, visi, dan tindakan individu atau organisasi untuk berubah (Cooperrider et al., 2008). Menurut Whitney dan Trosten-Bloom (Whitney

& Trosten-Bloom, 2010), inkuiri apresiatif mengasumsikan bahwa perubahan personal dan organisasional akan efektif jika didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan dan dialog tentang berbagai kekuatan, keberhasilan, nilai, harapan, dan impian yang transformasional. Asumsi ini setara dan relevan dengan visi dan konsepsi Ki Hajar Dewantara tentang prinsip kodrat alam dan sistem among dalam pendidikan. Kesamaan- kesamaan asumsi inilah yang menjadi dasar penggunaan inkuiri apresiatif dalam menggerakkan proses transformasi di sekolah (Dharma, 2020).

Menurut Whitney dan Trosten-Bloom (2010:6), proses inkuiri apresiatif terdiri dari beberapa tahapan yang tergabung dalam sebuah siklus atau biasa disebut siklus 4D yakni *Discovery* (pencarian), *Dream* (impian), *Design* (perancangan), dan *Destiny* (perwujudanimpian). Siklus 4D dalam inkuiri apresiatif tersebut dimodifikasi agar semakin relevan dengan kebutuhan transformasi di sekolah menjadi Siklusmodel 5D (*Define, Discover, Dream, Design, Deliver*), suatu modelanak tangga perubahan bertahap yang menyerupai gerak melingkar spiral, mulai dari tahap penetapan, pencarian/penemuan, membangun mimpi, rancangan dan implementasi/eksekusi.Pada Modul 1.3 Guru Penggerak, model 5D tersebut diberi tajuk BAGJA (Buat Pertanyaan, Ambil Pelajaran, Gali

Mimpi, Jabarkan Rencana, Atur Eksekusi) yang dalam pengertian Bahasa Sunda berarti bahagia.

Berdasarkan kajian terhadap teks Modul 1.3 Pelatihan Guru Penggerak, model inkuiri apresiatif BAGJA dapat diilustrasikan sebagai berikut: (1) Buat pertanyaan (*define*), pada tahap ini guru melihat dan mendefinisikan suatu masalah dengan mencari solusi yang telah ada, (2) Ambil pembelajaran (*discover*), guru melihat dan mengidentifikasi suatu proses yang sudah dan sedang berjalan dengan baik, memperkuat yang bekerja, fokus pada hal-hal positif yang menjadikannya hidup dan yang terbaik, (3) Gali mimpi (*dream*) pada tahap ini guru melihat gambaran ke masa depan, dari proses tersebut dipilih mimpi/gambaran yang mungkin bekerja dengan baik di masa yang akan datang, karena keberhasilan masa lalu digunakan sebagai titik beranjak dalam menggambarkan suatu kondisi ideal yang dikehendaki terjadi di masa depan, (4) Jabarkan rencana (*design*) berarti guru merencanakan dan memprioritaskan proses-proses yang mungkin bekerja dengan baik untuk masa depan yang dirancang secara mengesankan, (5) Atur eksekusi (*deliver*) dari rancangan (*design*) yang diajukan tersebut, diimplementasikan oleh guru kedalam tindakan nyata yang merujuk pada kompetensi dan pengalaman yang pernah dilakukan. Pandangan logis menunjukkan, jika sesuatu beranjak

dari 'eksisting' pengalaman yang dimiliki, dapat membangkitkan rasa percaya diri komunitas tersebut. Maka impian menjadi sesuatu yang sangat mungkin terjadi (*destiny*), (Dharma, 2020).

Apabila mengacu modul 1 tentang visi guru penggerak di atas, gerakan transformasi di sekolah dimulai dengan merumuskan pertanyaan utama untuk menentukan arah penelusuran terkait transformasi yang diinginkan. Pada tahap ini guru penggerak menjelajahi alam pikiran dan persepsi warga sekolah dalam menilai apa yang selama ini menghambat kemajuan sekolah. Guru penggerak berupaya mendengar dan memperhatikan setiap aspirasi pemangku kepentingan dan membentuk satu inisiatif bersama untuk berubah ke arah yang lebih baik dalam perspektif pemangku kepentingan itu sendiri. Guru penggerak sebagai pemimpin proses transformasi di sekolah memperbesar dampak dari inisiatif bersama ini pada skala sistem yang lebih luas lagi. Pada tahapan ini, guru penggerak mengapresiasi setiap inisiatif perubahan yang disepakati dan mengubah inisiatif tersebut menjadi inspirasi yang menggerakkan segenap sumber daya sekolah. Tahap berikutnya adalah dengan mengidentifikasi berbagai unsur positif yang teramati dalam berbagai kegiatan di sekolah.

Proses ini melibatkan upaya guru dalam merekam dan mendokumentasikan berbagai pengalaman positif yang dimiliki oleh siswa terhadap kegiatan di sekolah dan mewawancarai beberapa tokoh penting di sekolah demi menemukan kekuatan fundamental yang dimiliki oleh sekolah.

Temuan yang dihasilkan oleh guru penggerak didiskusikan dan diintegrasikan ke dalam visi perubahan tentang kemungkinan-kemungkinan terbentuknya sekolah yang ideal. Visi tentang sekolah ideal ini dibentuk untuk mengarahkan perhatian segenap warga sekolah untuk memberi kesempatan kepada para guru dan kepala sekolah untuk bersama-sama merancang skenario perubahan sekolahnya sendiri. Melalui pendekatan inkuiri partisipatif dalam proses transformasi sekolah dapat mengurangi resistensi terhadap perubahan karena pendekatan tersebut membawa pikiran pribadi yang dimiliki oleh warga sekolah terpublikasi ke dalam kelompok melalui proses dialog. Pada konteks guru penggerak, proses dialog dilakukan oleh guru penggerak sejak menginisiasi visi dan paradigma pembelajaran yang berpihak pada siswa. Proses dialog yang dilakukan antara guru penggerak, kolega, dan pimpinan sekolah pada akhirnya dituntaskan dengan ditetapkannya aneka sasaran dan arah perubahan yang spesifik beserta

ukuran-ukuran keberhasilan dari ketercapaian sasaran dan arah yang sudah disepakati tersebut.

Pemaparan modul 1.3 Guru Penggerak menekankan beberapa keterampilan dalam memimpin dan menggerakkan perubahan seperti *visioning*. Melalui keterampilan *visioning* guru penggerak dapat memiliki gambaran mental dan imaji yang kuat terkait perannya sebagai pemimpin transformasi di sekolah sehingga mampu menyelaraskan kekuatan penggerak yang dimiliki oleh sekolah agar kelemahan sistem sekolah menjadi tidak relevan. Visi guru penggerak yang menjadi dasar dalam memulai perubahan di sekolah adalah sebuah visi yang mampu memandu peserta didik menjadi peserta didik yang unggul dan inovatif dengan ciri banyak tanya, banyak coba, dan banyak berkarya (Dharma, 2020). Berdasarkan modul 1.3, guru penggerak dilatih untuk mempertajam visinya melalui riset untuk meneliti dan menganalisis kodrat muridnya melalui beragam teknik dan instrument penelitian. Hasil riset ini nanti akan dijadikan sebagai peta jalan (*road map*) bagi guru penggerak dalam mengenali dan menggali potensi, kecenderungan, dan gaya belajar yang dibawa oleh peserta didik sebagai kodrat alamiahnya. Melalui proses pemetaan tersebut guru dapat memformulasikan suatu layanan pembelajaran yang sesuai visi perubahannya yakni berorientasi pada

keunggulan dan kebutuhan kodrati yang dibawa oleh masing-masing peserta didik.

Pada tahap ini guru juga dibekali dengan keterampilan mendiseminasikan visinya kepada koleganya dan kepala sekolah melalui berbagai teknik seperti artikel, infografis, komunikasi positif, dan memberi berbagai usulan yang dapat dijadikan dasar bagi Kepala Sekolah untuk membuat berbagai kebijakan di level sekolah yang mampu mengkondisikan terjadinya proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sehingga secara perlahan akan mengubah budaya guru dalam melaksanakan proses perubahan dalam pembelajaran. Tidak hanya itu, pada modul 1.3 ini guru penggerak diminta menggali berbagai potensi budaya local di sekitar sekolah untuk dijadikan sebagai model, metode, dan media pembelajaran. Perubahan sistemik di sekolah pada dasarnya dapat terjadi dengan sebab eksternal maupun sebab internal. Perubahan eksternal lebih bersifat reaktif karena inisiatif dan pengendalian prosesnya cenderung terpusat atau tersentralisasi. Perubahan kurikulum dan regulasi adalah salah satu bentuk perubahan yang bersifat terpusat. Wacana program guru penggerak yang diinisiasi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengubah pola pikir perubahan yang tadinya bersifat terpusat tersebut

menjadi terdesentralisasi dengan mengalihkan peran, inisiatif, dan pengendalian proses perubahan ke unit pendidikan terkecil, yakni sekolah dimana guru berperan sebagai penggerak.

Transformasi di sekolah harus memadukan dua cara sekaligus, yakni memperkuat daya penggerak perubahan sekaligus meminimalisir bahkan mengeliminasi daya penahan yang mungkin muncul selama proses transformasi. Perspektif manajemen perubahan ini diadopsi ke dalam program guru penggerak melalui kerangka inkuiri apresiatif dimana guru penggerak menggali potensi dan kekuatan penggerak dari dalam sekolah melalui proses dialog sehingga dapat meminimalisir terjadinya resistensi yang dapat menahan proses transformasi sehingga kontra produktif.

Guru Baper (Bawa Perubahan)

“Bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang.” – Soekarno.

A. KEPEMIMPINAN GURU

Kepemimpinan menjadi tema yang selalu menarik dikaji dalam konteks dunia pendidikan. Maju tidaknya pendidikan sangat berkaitan dengan aspek kepemimpinan sebagai salah satu variabel penentu kualitas, karena di dalam kepemimpinan terdapat manajerial yang menyelaraskan setiap perencanaan atas kebijakan pendidikan yang akan dijalankan. Guru dan tenaga kependidikan memainkan peranan kepemimpinan di sekolah. Masing-masing memiliki peran tersendiri dengan kepemimpinannya mengelola pendidikan, terlebih lagi guru yang memiliki tanggungjawab besar selain berperan sebagai tenaga pengajar juga dituntut mampu mengemban

tanggungjawab sebagai kepala sekolah.

Guru memiliki gaya kepemimpinan yang khas dalam ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan. Sosoknya menjadi karakter teladan bagi peserta didik. Dengan demikian, karakteristik guru menjadi acuan peserta didiknya sehingga harus selalu dinamis dan mengayomi untuk mendorong peserta didiknya secara bersama-sama mencapai tujuan pembelajaran. Sikap kepemimpinan memang harus dimiliki oleh guru karena selalu bersentuhan dengan perencanaan dan pengelolaan pembelajaran. Guru juga selalu diperhadapkan dengan kompleksitas masalah peserta didik, profesionalitas dan masalah internal kelembagaan.

Mulyasa (2004: 107) mengemukakan gaya kepemimpinan seseorang mempengaruhi orang lain dapat membentuk perilaku sehari-hari. Dengan demikian, guru mengemban tugas mulia mendidik peserta didiknya menjadi manusia beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, melalui kepemimpinannya. Kinerja guru dapat menentukan corak kepemimpinannya sebagai seorang profesional yang meliputi berbagai aspek pembelajaran seperti perencanaan pembelajaran, pelaksanaannya, hingga evaluasi.

Guru juga harus memiliki wawasan pendidikan secara luas karena selain bersentuhan dengan peserta didik, guru juga hidup dalam lingkungan sistem yang berkaitan dengan komunitas guru lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa guru menjadi sumberdaya yang harus komunikatif dan interaktif dalam institusi pendidikan.

Kualitas guru perlu ditingkatkan kualitasnya meliputi seluruh aspek, khususnya kepemimpinan, karena aspek ini yang sangat berpengaruh terhadap ketercapaian tujuan diselenggarakannya proses pembelajaran. Mudasir (2011: 139) mengemukakan bahwa kepemimpinan guru dituntut terkoneksi dengan situasi dalam pembelajaran. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan situasi belajar secara efektif dan efisien. Setidaknya ada tiga bentuk gaya kepemimpinan guru yaitu; gaya otoriter, gaya demokratis partisipatif, dan gaya bebas atau *laissez faire*.

Tiga bentuk gaya kepemimpinan tersebut dalam konsepsi Sagala (2013: 87) mengemukakan bahwa sebaiknya guru melaksanakan tugas cenderung menggunakan kepemimpinan demokratis berbasis rasa percaya dalam memecahkan berbagai macam masalah dalam kesulitan pembelajaran. Sejalan dengan pendapat tersebut, Rohani dan Ahmadi (2001: 122) menjelaskan bahwa kepemimpinan demokratis

ini akan memungkinkan persahabatan guru dengan peserta didik terbina dalam suatu jalinan yang saling memahami serta saling mempercayai. Keterjalinan ini dapat menciptakan iklim pembelajaran secara optimal dan produktif. Neolaka (2017: 541) menegaskan aspek kaya kepemimpinan ini sangat memberikan pengaruh pada peserta didik berbagai pendapat dan membuat suatu keputusan.

Saat ini, aspek kepemimpinan guru menjadi fokus pengembangan melalui program Guru Penggerak yang dilaksanakan oleh Kemendikbud-Ristek. Program Guru Penggerak terorientasi pada usaha menciptakan figur guru pemimpin. Dengan demikian, dalam konsep ini memiliki substansi wawasan kepemimpinan guru (*teacher leadership*) untuk membentuk tokoh sentral pemimpin dalam pembelajaran.

Observasi literatur (sekolah. penggerak. Kemdikbud.go.id) menunjukkan bahwa model figur pembelajaran ini diharapkan menumbuhkembangkan potensi peserta didik secara holistik, aktif dan proaktif. Peserta didik menjadi pusat utama pembelajaran yang harus didorong menjadi Pelajar Pancasila. Dengan demikian, guru penggerak diplot sebagai pemimpin pendidikan pada masa yang akan datang dalam mewujudkan generasi Indonesia unggul. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis tertarik melakukan kajian

berkaitan dengan wawasan kepemimpinan guru (*teacher leadership*) melalui konsep guru penggerak. Berdasarkan pendahuluan di atas, maka rumusan masalah penulisan ini, yaitu; bagaimana deskripsi wawasan kepemimpinan guru (*Teacher Leadership*) dan konsep guru penggerak.

Penelitian ini menggunakan adalah penelitian kualitatif yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Melalui penelitian ini diharapkan adanya sesuatu penemuan yang dapat diangkat menjadi hipotesis bagi penelitian kuantitatif dan dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrument utamanya. Sehingga dapat dipahami bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan hitungan atau rumus statistik akan tetapi penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi seseorang atau kelompok secara holistik dengan menggunakan data jenuh serta peneliti sebagai instrument kunci (utamanya). Kemudian jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan

memanfaatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan, kisah-kisah sejarah.

B. GURU MENJADI FIGUR

Guru menjadi figur sentral dalam pembelajaran sekaligus menjadi kompoenen penting dalam sistem pengelolaan pendidikan secara umum. Oleh karena itu, kapasitas guru merupakan suatu agenda berkesinambungan yang penting diprioritaskan. Kapasitas guru meliputi semua aspek potensi yang dimiliki oleh guru, terutama berkaitan dengan aspek kepemimpinannya dalam sistem pendidikan.

Guru yang menjadi patron pembelajaran merupakan pemimpin yang harus selalu mengasah kemampuan dirinya untuk tampil lebih mencerahkan dan lebih profesional. Disinilah pentingnya memiliki wawasan kepemimpinan guru dan pendalaman wawasan lainnya melalui literasi diri maupun melalui berbagai program yang dicanangkan oleh Pemerintah, seperti kebijakan guru penggerak yang dapat menjadi wadah membentuk dan lebih memampukan karakter kepemimpinan seorang guru.

Wawasan kepemimpinan guru bertemali dengan konsep guru penggerak sebagai kebijakan yang sangat

konstruktif terhadap sumber daya yang dimiliki oleh guru di Indonesia. Konsep ini memberikan peluang kepada setiap guru mengasah kemampuan kepemimpinannya dalam pembelajaran maupun dalam kemampuan lainnya. Dua konsep yang saling bertemali ini penulis uraikan sebagai berikut.

Kepemimpinan memberikan pengaruh terhadap orang-orang untuk berbagai kebutuhan akan perubahan. Antara pemimpin dan orang yang dipimpin terbangun suatu relasi hubungan untuk mencapai tujuan secara timbal balik yang saling menguntungkan. Harsey dan Blanchard (2015: 67) mengemukakan bahwa kepemimpinan sebagai suatu proses yang dapat berpengaruh pada aktivitas setiap orang maupun suatu kelompok dengan maksud mencapai tujuan pada situasi tertentu.

Moeheriono (2012: 382) menguraikan pengertian kepemimpinan yang dikemukakan oleh beberapa pakar sebagai berikut:

- 1) Kootz dan O'donnel mengemukakan kepemimpinan adalah suatu upaya mempengaruhi sekelompok orang. Pengaruh yang diberikan dengan tujuan kelompok tersebut bekerja dalam meraih tujuan kelompoknya.

- 2) Terry merumuskan perspektifnya berkaitan dengan kepemimpinan sebagai kegiatan yang bertujuan memberikan pengaruh kepada setiap orang untuk mencapai tujuan secara bersama-sama.
- 3) Slamet, mengemukakan kepemimpinan yaitu potensi kemampuan melalui suatu proses yang memiliki fungsi secara umum memberikan pengaruh pada orang untuk pencapaian tujuan tertentu.
- 4) Thoha memberikan definisi kepemimpinan sebagai aktivitas mempengaruhi aspek perilaku orang lain, sehingga terarahkan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Defenisi tersebut di atas menunjukkan bahwa kepemimpinan merupakan variabel penting untuk memberikan pengaruh secara menyeluruh pada setiap individu maupun komunitas tertentu. Pengaruh yang diberikan dimaksudkan untuk pencapaian tujuan. Sejalan dengan beberapa defenisi tersebut, Siagian (2010: 48-70) merumuskan beberapa penanan kepemimpinan meliputi beberapa aspek sebagai berikut.

Pertama, pemimpin sebagai penentu arah memegang kendali atas tujuan organisasi dan

pengambilan keputusan. Aspek kepemimpinan merupakan hal penting yang menjadi faktor pendorong utama perwujudan visi misi yang diimplementasikan secara terencana dan secara bertahap.

Kedua, pemimpin sebagai wakil sekaligus juru bicara. Dalam konteks peranan ini pemimpin menjalin komunikasi dengan banyak pihak terkait untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi.

Ketiga, pemimpin sebagai komunikator yang berperan penting dalam mengomunikasikan sasaran dan strategi serta tindakan dan berbagai keputusan yang diambil. Penyampaian ini bisa berupa secara lisan maupun tertulis kepada para pelaksana kegiatan operasional melalui jalur komunikasi yang terdapat dalam organisasi.

Keempat, pemimpin sebagai mediator memainkan peranan sebagai penengah masalah dalam penyelesaian konflik dalam organisasi maupun di lingkungannya.

Kelima, pemimpin sebagai integrator berperan sebagai penyatu dalam individu maupun kelompok dengan pola pikir yang berbeda untuk bersama menuju pada satu tujuan. Berdasarkan peranan kepemimpinan tersebut dapat dipahami bahwa

kepemimpinan sangat multifungsi. Nawawi (1996: 76) mengemukakan bahwa kepemimpinan memiliki berbagai fungsi sebagai berikut.

Pertama, pemimpin berfungsi secara interaktif dalam artian komunikasi yang dilakukan satu arah sehingga secara efektif seorang pemimpin harus memiliki kemampuan yang dapat memberikan motivasi sehingga orang lain bergantung pada seorang pemimpin.

Kedua, fungsi konsultatif mengharuskan pemimpin memiliki fungsi dua arah. Meskipun demikian, dari aspek pelaksanaannya kembali kepada pemimpin.

Ketiga, pemimpin berfungsi partisipatif dalam artian tidak hanya berlangsung dua arah, namun pemimpin harus secara efektif terhubung dengan orang yang dipimpin.

Keempat, pemimpin berfungsi sebagai pengendali yang cenderung melakukan komunikasi satu arah, namun tetap mengutamakan kemungkinan komunikasi dua arah. Kaitannya dengan kepemimpinan guru dalam pendidikan harus mengimplementasikan fungsi-fungsi tersebut sebagai suatu gaya kepemimpinan dalam pengelolaan pembelajaran. Nawawi (1988: 83) lebih lanjut menjelaskan fungsi

kepemimpinannya tersebut yang dikaitkannya dalam konteks pendidikan sebagai berikut.

- 1) Kepemimpinan harus mengembangkan serta menyalurkan kebebasan berfikir. Kepemimpinan dalam konteks ini pula harus menstimulus pendapat perorangan maupun berkelompok untuk memperoleh data berdasarkan situasi perorangan atau kelompok tersebut yang akan menjadi bahan perumusan kebijakan yang inspiratif. Dengan demikian, guru sebagai pemimpin haruslah mampu mengelola kebebasan berfikir peserta didiknya sehingga dapat memperoleh bahan pembelajaran yang mampu menginspirasi.
- 2) Pemimpin harus mendinamisasi suasana kerja sama secara efektif dengan cara pemberian penghargaan. Setiap kemampuan orang dipimpin juga harus diakui untuk membentuk kepercayaan diri dan penghargaan kepada orang lain berdasarkan kemampuan masing-masing.
- 3) Kepemimpinan dalam dunia pendidikan haruslah mengusahakan serta mendorong temu pendapat dengan sikap saling menghargai. Hal ini dimaksudkan agar menimbulkan perasaan

keterlibatan dalam kelompok dan mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab sebagai bagian dari usaha pencapaian tujuan.

- 4) Dapat menjadi figur yang membantu penyelesaian berbagai masalah individu maupun kelompok dengan cara mengarahkan dan memberikan petunjuk yang mampu mengatasi berbagai masalah tersebut sehingga individu maupun kelompok tersebut terlatih memecahkan masalah sesuai kemampuan sendiri.

Effendi (2011: 188-189) mengemukakan kepemimpinan sebagai pemandu, penuntun, memberikan bimbingan dan membangun, memberikan motivasi dan mengarahkan organisasi. Pemimpin juga mengembangkan jejaring komunikasi secara baik dan harus mampu memberikan pengawasan secara efisien untuk bersama orang-orang yang dipimpin mencapai sasaran yang menjadi target perencanaan. Untuk lebih efektif, seorang pemimpin haruslah memahami fungsi utamanya yaitu pemecahan masalah melalui pemberian saran penyelesaian, informasi dan pendapat. Selain itu, pemimpin harus melakukan pemeliharaan kelompok sosial untuk berjalan bersama kelompok lain mengikis perbedaan kelompok. Sejalan dengan penjelasan

tersebut, Kartono (1998: 24) mengemukakan bahwa seseorang yang memiliki keahlian memimpin tentunya mempunyai keahlian mempengaruhi orang lain maupun sekelompok orang yang secara aktif membuat berbagai rencana, membangun koordinasi, serta melakukan percobaan melalui kepemimpinannya dalam pekerjaan untuk pencapaian tujuan secara bersama.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat dipahami bahwa kepemimpinan diemban oleh seseorang yang berjiwa pemimpin. Eksistensinya sebagai pengarah, mengkomunikasikan, merancang, dan bahkan memimpin secara langsung setiap kegiatan untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, dalam dunia pendidikan guru merupakan salah satu pemimpin yang bertanggung jawab di bidangnya sebagai perencana dan pelaksana pembelajaran untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran. Berkaitan dengan hal ini, Dirawat dkk (Nasution, 2015) mengemukakan bahwa kepemimpinan dalam pendidikan dipahami sebagai kemampuan mempengaruhi, mengkoordinir maupun mengkoordinir individu lain untuk melakukan pengembangan pendidikan yang berkaitan dengan ilmu dan pengajaran menuju efisiensi pencapaian tujuan.

Secara spesifik, Davis (Sriyono, 1992) menjelaskan bahawa guru sebagai pemimpin dimaksudkan untuk memotivasi, mendorong maupun memberikan bimbingan kepada peserta didik sehingga menjadi individu pembelajaran yang siap dalam pencapaian tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Peran guru dalam konteks ini kemudian melahirkan berbagai gaya kepemimpinan guru. Sriyono (1992) secara spesifik menjelaskan hubungan relasi antara guru dan peserta didik sebagai suatu konteks kepemimpinan melahirkan tipe atau gaya kepemimpinan seorang guru dalam memimpin peserta didiknya, sebagaimana diuraikan berikut.

Pertama, guru otoriter. Tipe guru semacam ini cenderung mementingkan kerja keras dan protektif dalam melakukan kontrol peserta didik. Dengan demikian, semua peserta didik dimasukkan dalam kerangka rencana tujuan yang telah dibuat. Dinamika peserta didik cenderung menerima dan menonjolkan sikap pasif. Kepemimpinan semacam ini memiliki banyak kekurangan, di antaranya menimbulkan sikap apatis, peserta didik akan sangat bergantung pada guru, dan melahirkan kecanggungan dalam bekerja sama antara peserta didik. Banyak guru bersikap otoriter dalam pencapaian tujuan pembelajaran tanpa mempertimbangkan aspek perkembangan peserta

didik yang dipimpin dalam pembelajaran.

Kedua, guru bebas. Dalam hal ini guru enggan memberikan pembimbingan pada peserta didik dalam artian mereka dibebaskan belajar untuk mencapai apa yang dipelajari. Peserta didik cenderung membentuk relasi dengan teman yang lebih paham, dan ragu dalam berbuat sehingga selalu bertanya kepada guru. *Ketiga*, guru demokratis. Tipe ini menjadikan guru sebagai pemimpin dalam pembelajaran sebagai fasilitator belajar dalam kelompok. Proses pembimbingan secara intens diberikan kepada peserta didik. Selain itu, peserta didik juga diberikan kesempatan mengoreksi penyampaian guru untuk penciptaan suasana belajar harmonis melalui curah gagasan. Tipe ini cenderung melahirkan banyak hal positif seperti menumbuhkan sikap bersahabat, kreatif, terbuka dan kerja sama dalam pembelajaran.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa masing-masing gaya kepemimpinan guru tersebut memiliki perbedaan pada aspek efek yang ditimbulkan dalam pembelajaran. Guru yang secara otoriter akan lebih memonopoli pengambilan keputusan dalam pembelajaran tanpa memberikan ruang pada peserta didiknya. Guru yang memimpin dengan memberikan kebebasan belajar tanpa kontrol juga memberikan hasil kurang efektif dalam

pencapaian tujuan pembelajaran. Kepemimpinan yang efisien dalam pembelajaran yaitu dilakukan guru secara demokratis, kepemimpinan ini akan mampu membuat guru lebih terbuka dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran serta membuat guru dan peserta didiknya mengkolaborasikan gagasan yang dapat menumbuhkan relasi keakraban yang harmonis dalam pembelajaran.

C. GURU BAPER (BAWA PERUBAHAN)

Guru secara sederhana dipahami sebagai suatu profesi yang berkaitan dengan mengajar. Profesi ini umumnya bersentuhan dengan dunia pendidikan untuk mentransmisi ilmu pengetahuan maupun menstimulus perubahan perilaku peserta didik. Syah (1997: 222) mengemukakan bahwa istilah guru dalam bahasa Arab disebut *muallim*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *teacher* yang didefinisikan sebagai seseorang yang pekerjaannya mengajari orang lain.

Firdaus dan Bardawi (2012: 16) mengemukakan guru sebagai agen pembelajaran. Dengan demikian, guru sangat dituntut melaksanakan pembelajaran dengan baik dalam ruang lingkup pembangunan nasional. Sedangkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diuraikan bahwa

pendidik merupakan tenaga yang profesional merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Selain itu, pendidik juga menilai hasil belajar serta melakukan bimbingan, pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Beberapa defenisi tersebut menunjukkan bahwa guru menjadi figur sentral dalam desain dan pelaksanaan suatu pembelajaran. Eksistensinya menunjukkan dinamika pembangunan nasional yang akan terus dilakukan secara berkesinambungan melalui pendidikan yang berkontribusi pada sumber daya manusia Indonesia yang unggul.

Guru Penggerak merupakan kebijakan nasional yang secara konseptual diperuntukkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya guru di Indonesia. Maksud dari program ini diarahkan untuk membentuk guru berkapasitas sebagai pemimpin dalam pembelajaran dengan model pembelajaran yang dapat mendorong perkembangan peserta didik secara holistik. Pembelajaran yang diberikan oleh guru penggerak juga diharapkan secara aktif dan proaktif mengembangkan pendidik (guru) lainnya dalam mengimplementasikan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Guru penggerak juga diharapkan menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidik mewujudkan pelajar pancasila.

Dalam mengemban tugas sebagai guru harus memenuhi sejumlah kriteria profesionalitas. Hal ini sebagaimana dirumuskan dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, diuraikan sebagai berikut.

- 1) Guru harus memiliki standar kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran. Guru juga harus sehat secara jasmani maupun rohani serta berkemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- 2) Kualifikasi akademik guru menjadi ukuran tingkat pendidikan minimal dengan ijazah maupun sertifikat keahlian lainnya yang sesuai undang-undang.
- 3) Untuk menjadi agen pembelajaran jenjang pendidikan dasar dan menengah maupun anak usia dini, seorang guru harus memenuhi kompetensi secara spesifik meliputi; (a) pedagogik, (b) kepribadian, (c) sosial, dan (d) profesional.
- 4) Seseorang yang tidak berijazah atau sertifikat keahlian, tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik melewati uji kelayakan dan kesetaraan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa guru merupakan tenaga pendidikan yang secara profesional harus memiliki kemampuan akademik karena peranan guru sangat penting dalam proses pembelajaran. Guru menjadi figur sentral transformasi ilmu pengetahuan maupun patron figur yang senantiasa menjadi panutan bagi peserta didik. Sejalan dengan rumusan syarat kualifikasi tersebut, konsep guru penggerak dapat memberikan kontribusi penguatan kompetensi dan memaksimalkan kerja guru sebagai agen pembelajaran.

Peranan guru penggerak sangat penting, di satu sisi mendorong pembelajaran bermutu yang berpusat pada peserta didik juga mendorong pemberdayaan guru lainnya untuk memaksimalkan model pembelajaran yang sama. Konsep guru penggerak sebagaimana diuraikan dalam laman Sekolah Penggerak (kemdikbud.go.id) dirumuskan memiliki peran, sebagai berikut.

Pertama, berperan sebagai tokoh yang menggerakkan komunitas belajar dan rekanan guru di sekolah maupun di wilayah tempat tugasnya. Kaitannya dengan menggerakkan komunitas belajar, Isjoni (2009: 11) mengemukakan bahwa guru harus menggagas rencana dengan seksasama yang mampu memberikan kesempatan belajar bagi peserta didik.

Melalui rancangan ini kualitas mengajar juga diperbaiki sehingga perubahan pengorganisasian kelas mengharuskan penggunaan metode mengajar, strategi mengajar, sikap dan karakteristik guru.

Kedua, menjadi figur pengajar praktik bagi guru lainnya, secara khusus hal ini berkaitan dengan pengembangan pembelajaran. Dengan demikian, guru penggerak menjadi guru percontohan atau panutan (*role model*) yang akan dirujuk oleh guru lainnya dalam hal teknis pengembangan pembelajaran di sekolah.

Ketiga, berperan membentuk kepemimpinan peserta didik. Pada konteks ini guru memiliki peran penentu stimulus potensi pemimpin yang dimiliki peserta didik. Dengan demikian, pembelajaran yang dilakukan guru penggerak harus secara demokratis memberikan ruang maksimal bagi peserta didik mengembangkan potensi kepemimpinannya.

Keempat, guru penggerak diplot sebagai komunikator yang secara aktif membuka ruang diskusi secara positif dalam pemajuan pembelajaran. Komunikasi ini dilakukan secara kolaboratif antara guru dengan pemangku kepentingan secara internal maupun eksternal sekolah.

Kelima, berperan mendorong mendorong *well-being* ekosistem pendidikan di sekolah melalui kepemimpinan dalam melaksanakan pembelajaran. Berdasarkan uraian peranan guru penggerak tersebut menunjukkan bahwa guru penggerak mengemban tugas sebagai pengajar dan pendidik, menjadi administrator, manager kelas, dan konselor bagi guru lainnya. Sardiman (2014: 142) menjelaskan beberapa peranan guru sebagai berikut:

- 1) Peranan guru sebagai pengajar dan pendidikan menyampaikan gagasan pengetahuan dan informasi serta menyampaikan nilai-nilai hidup. Guru berperan penting terhadap keterampilan dan sikap hidup peserta didik.
- 2) Peranan guru sebagai administrator merencanakan seluruh proses kegiatan pembelajaran maupun rancangan evaluasi hasil pembelajaran peserta didiknya untuk mengetahui keberhasilan tujuan pembelajaran yang dicapai.
- 3) Peranan guru sebagai manager kelas menjadikan guru harus mampu memimpin kelas dan mengarahkan pembelajaran bersama peserta didiknya. Selain itu, guru juga berperan memberikan stimulus berupa motivasi.

- 4) Peranan guru sebagai konselor memberikan bimbingan. Guru harus mengetahui masalah pribadi peserta didik dan mampu melakukan pemecahan masalah tersebut sebagai suatu penunjang kegiatan pembelajaran peserta didik secara efektif.

Rohani dan Ahmadi (2001: 1) menjelaskan bahwa guru memiliki tugas dan tanggung jawab utama dalam pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan tersebut dilakukan secara efektif, dinamis, efisien, dan positif yang mengembangkan kesadaran dan pelibatan aktif antara guru dan peserta didiknya. Guru hanya berperan sebagai pemantik partisipatif awal untuk mengaktifkan peserta didik memperoleh perubahan diri dalam pembelajaran yang dilakukan.

D. GURU REKOMENDED

Guru penggerak harus memenuhi beberapa kriteria seleksi, meliputi; (1) menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid; (2) memiliki kemampuan untuk fokus pada tujuan; (3) memiliki kompetensi menggerakkan orang lain dan kelompok; (4) Memiliki daya juang (*resilience*) yang tinggi; (5) memiliki kompetensi kepemimpinan dan bertindak mandiri; (6) memiliki kemampuan untuk belajar hal

baru, terbuka pada umpan balik, dan terus memperbaiki diri; (7) memiliki kemampuan berkomunikasi dengan efektif dan memiliki pengalaman mengembangkan orang lain; dan (8) memiliki kedewasaan emosi dan berperilaku sesuai kode etik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa guru penggerak menjadi figur yang multitalenta di lingkungan pendidikan mendorong peserta didiknya menjadi pemimpin. Roestiyah (2011: 48) menjelaskan bahwa guru haruslah mampu menimbulkan motivasi individual peserta didiknya dalam belajar. Setiap anak memiliki perbedaan pengalaman dan sifat pribadi. Oleh karena itulah guru harus memberikan kesempatan bagi setiap peserta didik mengembangkan potensi berfikir secara kreatif.

Guru penggerak sangat proaktif terhadap peserta didik dan lingkungan pendidikannya. Usman(2005: 7) mengemukakan bahwa secara profesi guru itu mendidik, mengajar dan melatih. Konteks mendidik di sini yaitu suatu proses di mana terjadi penerusan dan pengembangan nilai kehidupan. Konteks mengajar dijelaskan sebagai penerusan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk konteks melatih dimaksudkan guru mengembangkan aspek keterampilan peserta didiknya.

Desain kurikulum guru penggerak dilaksanakan dalam kerangka topik utama “pemimpin pembelajaran” meliputi pembelajaran yang dilakukan untuk guru berdiferensiasi, berbasis komunitas praktik, dan pembelajaran sosial dan emosi. Model pelatihan yang diberikan kepada guru melalui program ini dalam bentuk pelatihan daring, lokakarya, konferensi dan pendampingan meliputi; (1) belajar di tempat kerja dan komunitas praktik meliputi pemberian umpan balik dari atasan, rekan, dan siswa (70%); (2) belajar dari rekan dan guru lain (20%); dan (3) pelatihan formal(10%).

Teknik asesmen yang dilakukan meliputi asesmen terhadap hasil tugas dan praktik peserta pelatihan. Guru yang mengikuti pelatihan juga akan diasesmen dari segi umpan balik rekan sejawat, fasilitator dan kepala sekolah. Selanjutnya asesmen yang berkaitan dengan peserta didik difokuskan pada aspek peningkatan hasil belajar yang telah dilaksanakan. Dilihat dari aspek materi dalam konsep guru penggerak dibagi menjadi empat modul pembelajaran. Hal ini diuraikan dalam Sekolah Penggerak (kemdikbud.go.id) sebagaimana penulis kutipkan sebagai berikut.

Pertama, Modul 1 tentang Paradigma dan Visi Guru Penggerak. Capaian pembelajaran ini meliputi;

(1) seorang guru penggerak mampu memahami filosofi pendidikan Ki Hadjar Dewantara serta mampu merefleksi secara kritis terhadap nilai-nilai tersebut dalam konteks lokal maupun nasional; (2) mampu menjalankan strategi sebagai seorang pemimpin pembelajaran serta berupaya menjadikan sekolah menjadi pusat pengembangan karakter dan budaya positif; dan (3) setiap calon guru penggerak mampu mengembangkan dan mampu mengomunikasikan visi sekolah yang berpihak pada murid kepada guru dan pemangku kepentingan.

Kedua, Modul 2 tentang Praktik Pembelajaran yang Berpihak pada Murid. Capaian pembelajaran pada tahapan ini, calon guru penggerak; (1) dapat mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodasi kebutuhan belajar siswa yang berbeda; (2) mampu mengelola emosi dan mengembangkan keterampilan sosial yang menunjang pembelajaran; (3) mampu melakukan praktik komunikasi yang memberdayakan sebagai keterampilan dasar seorang *coach*; dan (4) mampu menerapkan praktik *coaching* sebagai pemimpin pembelajaran.

Ketiga, Modul 3 tentang Pemimpin Pembelajaran dalam Pengembangan Sekolah. Capaian pembelajaran pada tahapan ini yaitu calon guru

penggerak; (1) mampu melakukan praktik pengambilan keputusan yang berdasarkan prinsip pemimpin pembelajaran; (2) mampu melakukan strategi pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, waktu, dan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berdampak pada murid; (3) mampu merencanakan, mengorganisasikan, dan mengarahkan program perbaikan dan perubahan sekolah, serta memantanya agar berjalan sesuai rencana dan mengarah pada tujuan; dan (4) mampu mengembangkan kegiatan berkala yang memfasilitasi komunikasi murid, orangtua dan guru serta menyediakan peran bagi orangtua terlibat dalam proses belajar yang berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran.

Keempat, Modul 4 tentang Selebrasi, Refleksi, Kolaborasi dan Aksi. Capaian pembelajaran pada tahapan ini yaitu guru penggerak; (1) merefleksikan perannya sebagai guru penggerak dan strategi yang telah dijalankan sebagai guru penggerak; (2) berbagi praktik baik dengan rekan sejawat; (3) membuat rencana tindak lanjut dan kolaborasi dengan rekan sejawat; dan (4) calon guru penggerak membuat rencana tindak lanjut dan berkolaborasi dengan rekan sejawat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kurikulum guru penggerak bertujuan melahirkan pemimpin pembelajaran bertumpu pada filosofi pendidikan Ki Hadjar Dewantara yang harus mampu direfleksi oleh seorang pemimpin pembelajaran. Refleksi yang dilakukan secara kritis untuk mengkontekstualisasikan nilai filosofis tersebut dalam konteks lokalitas maupun nasional. Konsep ini juga memberikan praktik pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang dapat membentuk pula pemimpin pembelajaran sebagai pelopor pengembangan sekolah yang berkemampuan selebrasi, refleksi, mampu berkolaborasi dan aksi.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dapat merumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut. Kepemimpinan guru (*teacher leadership*) merupakan kemampuan mempengaruhi peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran serta mampu membangun komunikasi dengan ekosistem pendidikan lainnya. Peranan kepemimpinan guru sebagai figur yang interaktif, konsultatif, partisipatif, dan sebagai pengendali. Guru menjadi figur sentral pengelolaan dan pelaksanaan pembelajaran. Kepemimpinan guru secara efisien dapat dilakukan dengan gaya demokratis yang membuat gurulebih terbuka dalam pembelajaran serta menjadi ruang

kolaborasi dengan peserta didik sehingga dapat menumbuhkan harmonisasi keakraban.

Konsep guru penggerak merupakan formulasi kebijakan pendidikan yang terarah untuk melahirkan guru sebagai pemimpin pembelajaran. Karakteristik guru penggerak didesain sebagai patron pendidikan masa depan yang melaksanakan pembelajaran berpusat pada peserta didik serta melakukan pemberdayaan pada rekan guru di wilayahnya. Secara substansial, kebijakan ini menerapkan kurikulum yang bertumpu pada filosofi pendidikan Ki Hadjar Dewantara dimana seorang pemimpin pembelajaran harus mampu direfleksi secara kritis untuk mengkontekstualisasikan nilai filosofis tersebut dalam konteks lokalitas maupun nasional.

PROGRAM GURU PENGGERAK PROTOTYPE PEMBELAJARAN MANUSIA

“Di mana ada kemerdekaan di situ harus ada disiplin yang kuat. Dan peraturan itu harus ada di dalam suasana yang merdeka.”

A. PENGAJARAN YANG MENUNTUN

Pendidikan dan pengajaran adalah salah satu upaya mencapai target atau tujuan yang secara runtut mengarah pada perbaikan tingkah laku menuju kedewasaan anak didik. Perubahan-perubahan itu menunjukkan tahap-tahap yang harus dilewati. Tanpa proses itu tujuan tidak dapat tercapai, proses yang dimaksud adalah proses pendidikan dan pengajaran. Pengajaran adalah proses dengan fungsi menuntun peserta didik dalam menjalani kehidupan, yaitu menuntun serta memaksimalkan potensi diri sesuai dengan amanat perkembangan yang harus dilalui para peserta didik.

Tugas-tugas perkembangan tersebut meliputi kebutuhan bertahan hidup sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial serta sebagai makhluk yang diciptakan Sang Pencipta.¹ Pendidikan merupakan rangkaian humanisasi berasal dari pemikiran faham humanistik. Hal tersebut relevan dengan arti fundamental faham humanistik sebagai pengedukasi-an manusia. Sistem edukasi Islam yang disusun di atas fondasi nilai-nilai kemanusiaan sedari awal kelahirannya sejalan dengan esensi Islam sebagai agama yang humanistik.

Islam memposisikan aspek kemanusiaan sebagai arah pendidikannya. Edukasi dan proses pembelajaran di bangku sekolah dipandang kurang demokratis. Minimnya wadah bagi siswa atau siswi untuk mengembangkan daya imajinasi dan kreasi dengan sudut pandang mereka. Padahal, daya kreasi dan kompetensi kritis dalam berpikir adalah modal berharga bagi anak supaya dapat mengatasi tantangan dan lebih kompetitif. Kritik dan rasa prihatin tersebut tentu muncul dengan alasan. Kenyataan proses edukasi di sekolah sejauh ini tidak memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk memaksimalkan kreatifitas dan kecakapan berpikir kritis. Peserta didik belum bisa lepas dari anggapan sebagai obyek.

Peserta didik dipandang sebagai orang yang tergilas, yang tidak mengerti apapun, orang yang tidak bisa lepas dari belas kasihan, maka dari itu harus disuapi serta dijejali. Anak-anak masih saja menjadi korban indoktrinasi dan pencucian otak. Demi profit tertentu anak-anak terus menerus disuapi kepentingan dan bahan-bahan bagaikan wadah yang tak terisi. Lebih dari satu dekade peserta didik dibenturkan dengan materi hafalan tanpa peluang guna mengembangkan bakat dan kreatifitasnya. Sehingga untuk mengembangkan kedua daya tersebut, diperlukan sebuah bentuk pendidikan yang efektif, guna tercapainya kedua daya tersebut. Beranjak dari problematika tersebut, anak-anak tidak pantas dianggap sebagai wadah kosong yang berharap diisi dalam rangkaian kegiatan belajar.

Hakikat pendidikan sebagai proses pemanusiawian manusia (humanisasi) sering tidak terwujud karena terjebak pada penghancuran nilai kemanusiaan (dehumanisasi). 1 Hal ini merupakan akibat adanya perbedaan antara konsep dengan pelaksanaan dalam lembaga pendidikan. Kesenjangan ini mengakibatkan kegagalan pendidikan dalam mencapai misi sucinya untuk mengangkat harkat dan martabat manusia. Pendidikan belum berhasil memanusiawikan peserta didik. Islam sebagai ajaran suci sangat memperhatikan

kearifan kemanusiaan sepanjang zaman.² Ajaran Islam memberikan perlindungan dan jaminan nilai-nilai kemanusiaan kepada semua umat.

Setiap muslim dituntut mengakui, memelihara, dan menetapkan kehormatan diri orang lain. Tuntutan ini merupakan cara mewujudkan sisi kemanusiaan manusia yang menjadi tugas pokok dalam membentuk dan melangsungkan hidup umat manusia. Pendidikan sebagai proses pemanusiawian manusia (humanisasi) bersumber dari pemikiran humanisme. Hal ini sejalan dengan makna dasar humanisme sebagai pendidikan manusia.³ Sistem pendidikan dalam Islam yang dibangun atas dasar nilai-nilai humanistik sejak awal kemunculannya sesuai dengan esensinya sebagai agama kemanusiaan. Islam menjadikan dimensi kemanusiaan sebagai orientasi pendidikannya. Sangatlah naif kalau dikatakan bahwa konsep pendidikan humanistik Islami merupakan konsep pendidikan Barat yang diberi label Islam.

Pendidikan dan pembelajaran di sekolah selama ini dinilai kurang demokratis. Kurangnya ruang bagi peserta didik untuk berimajinasi dan berkreasi menunjukkan eksistensinya dengan perspektif mereka sendiri menunjukkan hal itu. Padahal, kreativitas dan kemampuan berpikir kritis merupakan kecakapan yang menjadi modal anak agar mampu menghadapi

tantangan dan lebih kompetitif . Kritik dan keprihatinan tersebut sangat beralasan. Realitas proses pembelajaran yang terjadi di sekolah-sekolah selama ini sama sekali tidak memberikan peluang kepada peserta didik untuk mengembangkan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis mereka. Peserta didik masih saja menjadi obyek. Mereka diposisikan sebagai orang yang tertindas, orang yang tidak tahu apa-apa, orang yang harus dikasihani, oleh karenanya harus dijejali dan disuapi. Setiap hari diindoktrinasi dan brainwashing terus saja terjadi terhadap anak-anak. Anak-anak terus saja dianggap sebagai bejana kosong yang siap dijejali aneka bahan dan kepentingan demi keuntungan semata. Berpuluh-puluh tahun anak-anak dihadapkan pada hafalan kering tanpa adanya kesempatan untuk mengembangkan daya eksplorasi dan kreativitas.

Sehingga untuk mengembangkan kedua daya tersebut, diperlukanlah sebuah bentuk pendidikan yang efektif, guna tercapainya kedua daya tersebut. Bertolak dari masalah diatas, peserta didik tidak boleh dipandang sebagai bejana kosong yang butuh diisi, tidak lagi disuapi dalam proses pembelajaran. Pendidikan adalah proses memanusiakan manusia, pengangkatan manusia ke taraf insani. Di dalamnya, pembelajaran merupakan komunikasi eksistensi

manusiawi yang otentik kepada manusia, untuk dimiliki, dilanjutkan, dan disempurnakan. Artinya, pendidikan adalah usaha membawa manusia keluar dari kebodohan, dengan membuka tabir aktual-transenden dari sifat alami manusia (humanis).

B. TEORI PEMBELAJARAN HUMANISTIK

Secara luas definisi teori belajar humanistik ialah sebagai aktivitas jasmani dan rohani guna memaksimalkan proses perkembangan. Sedangkan secara sempit pembelajaran diartikan sebagai upaya menguasai khazanah ilmu pengetahuan sebagai rangkaian pembentukan kepribadian secara menyeluruh. Pertumbuhan yang bersifat jasmaniyah tidak memberikan perkembangan tingkah laku. Perubahan atau perkembangan hanya disebabkan oleh proses pembelajaran seperti perubahan habit atau kebiasaan, berbagai kemampuan dalam hal pengetahuan, sikap maupun keterampilan.

Dalam pandangan humanism, manusia memegang kendali terhadap kehidupan dan perilaku mereka, serta berhak untuk mengembangkan sikap dan kepribadian mereka. Masih dalam pandangan humanism, belajar bertujuan untuk menjadikan manusia selayaknya manusia,

keberhasilan belajar ditandai bila peserta didik mengenali dirinya dan lingkungan sekitarnya dengan baik. Peserta didik dihadapkan pada target untuk mencapai tingkat aktualisasi diri semaksimal mungkin. Teori humanistic berupaya mengerti tingkah laku belajar menurut pandangan peserta didik dan bukan dari pandangan pengamat.⁵ Humanisme meyakini pusat belajar ada pada peserta didik dan pendidik berperan hanya sebagai fasilitator. Sikap serta pengetahuan merupakan syarat untuk mencapai tujuan pengaktualisasian diri dalam lingkungan yang mendukung. Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang spesial, mereka mempunyai potensi dan motivasi dalam pengembangan diri maupun perilaku, oleh karenanya setiap individu.

Pembelajaran humanistik memandang manusia sebagai subyek yang bebas merdeka untuk menentukan arah hidupnya. Manusia bertanggung-jawab penuh atas hidupnya sendiri dan juga atas hidup orang lain. Pendidikan yang humanistik menekankan bahwa pendidikan pertama-tama dan yang utama adalah bagaimana menjalin komunikasi dan relasi personal antara pribadi-pribadi dan antar pribadi dan kelompok di dalam komunitas sekolah. Relasi ini berkembang dengan pesat dan menghasilkan buah-buah pendidikan jika dilandasi oleh cinta kasih antar

mereka. Pribadi-pribadi hanya berkembang secara optimal dan relatif tanpa hambatan jika berada dalam suasana yang penuh cinta, hati yang penuh pengertian (understanding heart) serta relasi pribadi yang efektif (personal relationship). Pendapat-pendapat para pakar psikologi tentang pendidikan humanistik.

Seperti Abraham Maslow Bagi penganut teori humanistic, rangkaian pembelajaran berangkat dan kembali kepada individu. Dari teori-teori belajar behavioristik, kognitif dan konstruktivistik, teori inilah yang paling abstrak, yang mendekati dunia filsafat. Realitasnya pandangan ini membahas pembelajaran dan segala aspeknya dalam kemasannya paling ideal. Artinya pandangan ini menaruh minat pada pemikiran pembelajaran yang paling ideal dan relevan dari pada pembelajaran pada umumnya. Biografi Abraham Maslow Maslow hidup di masa dimana banyak pandangan dan aliran psikologi baru yang hadir sebagai cabang keilmuan.

William James mengembangkan aliran Fungsionalisme yang berkembang di Amerika. Di Jerman lahir psikologi gestalt, di wina hadir Sigmund Freud serta aliran behaviorisme John B Watson yang mulai populer di Amerika. Di tahun 1954 Abraham Maslow mempublikasikan karyanya berupa buku dengan judul Motivation and Personality, dua aliran yang

mendapat tempat di perguruan tinggi Amerika ialah Sigmund Freud dengan Psikoanalisisnya dan John B. Watson dengan Behaviorismenya. Sedangkan Maslow ialah psikolog yang oleh banyak pihak digelari sebagai bapak psikologi humanistic. Kepopulerannya dapat ditemukan melalui sumbangsuhnya dalam ilmu geografi serta demografi. Berkat teori hierarki kebutuhan yang dicetuskannya, namanya menjadi populer. Teori kebutuhan adalah pemikiran kesehatan rohani berdasarkan pemenuhan kebutuhan alami manusia guna pengaktualisasian diri.¹⁰ Maslow lahir di New York pada 1908, ia dikenal dengan jasanya membidani lahirnya pandangan pengaktualisasian diri. Ia wafat pada 1970 di California, Amerika.

Maslow adalah lelaki yang cerdas, semasa kecil ia menjalin hubungan yang kurang baik dengan ibunya yang keras dan kerap melakukan tingkah laku yang tidak ganjil. Ia menceritakan dirinya di waktu anak-anak sebagai pemalu namun gemar membaca buku. Namun Maslow hanya sementara tidak menyukai dirinya pribadi. Ia sadar akan potensi yang dimilikinya, serta menjadi bapak psikologi humanistic populer yang mendorong adanya perubahan social yang positif.^{11b} Teori belajar humanistik Abraham Maslow Dalam perspektif humanistik (humanistic

perspective) menuntut potensi peserta didik dalam proses tumbuh kembang, kebebasan menemukan jalan hidupnya.¹² Humanistic menganggap peserta didik sebagai subjek yang merdeka guna menetapkan tujuan hidup dirinya. Peserta didik dituntun agar memiliki sifat tanggung jawab terhadap kehidupannya dan orang di sekitarnya.¹³ Pembelajaran humanistic menaruh perhatian bahwa pembelajaran yang pokok yaitu upaya membangun komunikasi dan hubungan individu dengan individu maupun individu dengan kelompok.

Edukasi bukan semata-mata memindah khazanah pengetahuan, menempa kecakapan berbahasa para peserta didik, tapi sebagai wujud pertolongan supaya siswa mampu mengaktualisasikan dirinya relevan dengan tujuan pendidikan. Edukasi yang berhasil pada intinya adalah kecakapan menghadirkan makna antara pendidik dengan pembelajar sehingga dapat mencapai tujuan menjadi manusia yang unggul dan bijaksana. Maksudnya ialah menuntun peserta didik bahwa mereka butuh pendidikan karakter. Pendidik memfasilitasi siswa menggali, mengembangkan dan menerapkan kecakapan-kecakapan yang mereka punya supaya mampu memaksimalkan potensinya.

Maslow terkenal sebagai bapak aliran psikologi humanistic, ia yakin bahwa manusia berperilaku guna mengenal dan mengapresiasi dirinya sebaik-baiknya. Teori yang termasyhur hingga saat ini yaitu teori hirarki kebutuhan. Menurutny manusia terdorong guna mencukupi kebutuhannya. Kebutuhan-kebutuhan itu mempunyai level, dari yang paling dasar hingga level tertinggi. Dalam teori psikologinya yaitu semakin besar kebutuhan maka pencapaian yang dipunyai oleh individu semakin sungguh-sungguh menggeluti sesuatu.¹⁵Perspektif ini diasosiasikan secara dekat dengan keyakinan Abraham Maslow (1954, 1971) bahwa kebutuhan dasar tertentu harus dipenuhi sebelum kebutuhan yang lebih tinggi dapat dipuaskan. Menurut hierarki kebutuhan Maslow, pemuasan kebutuhan seseorang dimulai dari yang terendah yaitu: 1) fisiologis, 2) rasa aman, 3) cinta dan rasa memiliki, 4) harga diri, 5) aktualisasi diri.

C. NILAI, MORAL, KEBIASAAN, KEPERCAYAAN DAN KETERAMPILAN

Pendidikan merupakan proses memfasilitasi pembelajaran, atau perolehan pengetahuan, keterampilan, nilai, moral, kepercayaan, dan kebiasaan

(Suardi, M., 2018; Hodson, D., 2009). Melalui pendidikan orang dapat memiliki pemahaman terhadap sesuatu yang membuat dirinya menjadi manusia yang kritis dalam berpikir dan bertindak. Ukuran keberhasilan pendidikan dilihat dari keterlibatan dan peran serta guru sebagai pendidik, siswa sebagai peserta didik, materi pembelajaran yang diberikan, metode pengajaran dan sarana prasarana yang disediakan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia yang baru, Nadiem Makarim, sejak menerbitkan surat edaran nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan merdeka belajar dalam penentuan kelulusan peserta didik menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan, “Merdeka Belajar” atau “Kebebasan Belajar”. Konsep “Kebebasan Belajar”, yaitu membebaskan institusi pendidikan dan mendorong peserta didik untuk berinovasi dan mendorong pemikiran kreatif. Konsep ini kemudian diterima mengingat visi misi Pendidikan Indonesia ke depan demi terciptanya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing diberbagai bidang kehidupan.

Menghadapi era revolusi industry 4.0, yang menekankan konsep merdeka belajar, setiap lembaga pendidikan diharapkan memiliki daya saing dan inovasi yang mampu berkolaborasi supaya tidak mengalami

ketertinggalan. Di era revolusi 4.0, sistem pendidikan diharapkan mampu mewujudkan peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir kritis dan mampu menyelesaikan masalah, kreatif dan inovatif serta memiliki ketrampilan untuk berkomunikasi dan berkolaborasi (Yamin dan Syahrir, 2020).

Konsep merdeka belajar merupakan respons terhadap kebutuhan sistem pendidikan pada era revolusi industry 4.0. Nadiem Makarin sebagai Menteri Pendidikan RI, sebagai mana yang dikutip oleh tempo. com 2019, menegaskan bahwa merdeka belajar merupakan kemerdekaan berfikir yang dimulai dari guru. Menurut Bell Hooks pada Osman, ahmed., and special akello (2015) mendidik sebagai praktik kebebasan adalah bentuk pengajaran dan pembelajaran yang menarik dan mengasyikan bagi guru dan peserta didik. Dalam praktik kebebasan ini, kedua belah pihak sama-sama pemain dalam berkontribusi dan berbagi pengalaman belajar (Simonson, M., Zvacek, S. M., & Smaldino, S., 2019). Peserta didik tidak hanya diajarkan informasi yang mereka harapkan untuk diingat dan diingat ketika ditanya, sebaliknya mereka belajar untuk berpikir kritis dengan cara yang tidak konformis dan tidak terkekang. Guru yang mendidik sebagai praktik kebebasan mengajar tidak hanya untuk berbagi informasi tetapi untuk berbagi dalam

pertumbuhan intelektual dan spiritual peserta didik .

Pembelajaran merdeka belajar menciptakan peserta didik tidak hanya pintar dalam menghafal pembelajaran tetapi memiliki analisa dan penalaran yang tajam dalam mengatasi suatu masalah. Peserta didik juga diharapkan mampu memiliki karakter. Dalam pembelajaran merdeka belajar guru harus memiliki kemampuan dalam menguasai materi pembelajaran dan mengembangkannya secara mendalam menjadi materi yang menarik dan menyenangkan untuk didiskusikan dengan menggunakan teknologi sebagai media dalam pembelajaran, sehingga peserta didik memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan yang ada pada dirinya. Daya cipta dan kreatif siswa akan tumbuh jika guru mampu mendesain pembelajaran yang menantang mereka untuk berkreasi secara aktif.

Pendidikan berpusat pada peserta didik dengan fokus pada pribadi peserta didik, pengalaman, perspektif, latar belakang, bakat, minat, kapasitas dan kebutuhan mereka pada pembelajaran. Dalam konteks ini, strategi pendidikan baru harus mendorong interaksi antara guru dan peserta didik. Praktik kreatif dalam pendidikan harus membantu peserta didik untuk bekerja membangun pengetahuan mereka melalui

mendefinisikan hal-hal, yang sangat penting di mata mereka, dan dalam prosesnya, memperkuat rasa percaya diri dan individualitas mereka. Mereka juga melibatkan pengembangan kualitas pribadi peserta didik, termasuk rasa tanggung jawab yang kuat dalam diri sendiri dan orang lain.

Dengan perkembangan kebijakan pendidikan, tentu guru harus mampu untuk beradaptasi dengan kebijakan yang berlaku. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam pembelajaran, Sebagai tenaga profesional maka guru harus mampu menyelenggarakan pembelajaran yang bermutu, yang dapat menghasilkan generasi yang terdidik, generasi yang mampu bersaing secara global dan memiliki moral yang baik (Murniarti, 2021). Guru harus mampu mengubah paradigma yang lama dengan mengikuti kebijakan-kebijakan yang baru. Dalam menghadapi era industry 4.0, guru harus mampu meng*Upgrade* dirinya dengan mengembangkan kompetensi pedagogiknya, sehingga mampu membimbing dan mengarahkan peserta didik untuk menggunakan daya nalarnya dengan baik. Guru yang memiliki kemerdekaan berpikir tentu mampu memberikan stimulus yang merangsang peserta didik untuk menggunakan daya nalarnya dengan baik dan memiliki daya cipta sesuai dengan bakat dan kemampuan yang mereka miliki.

Untuk menciptakan pembelajaran yang merdeka bagi peserta didik, tentu guru harus mampu menggunakan daya kreatifnya dalam mendesain pembelajaran dengan menggunakan berbagai metode dan media pembelajaran yang ada. Proses pembelajaran akan menarik dan menyenangkan jika guru mampu mendesain pembelajaran dengan kreatif. Guru bisa memilih metode-metode yang cocok dengan menggunakan media pembelajaran untuk membantu peserta didik mampu mengerti dan memahami materi yang diajarkan. Dengan metode pembelajaran yang bervariasi dan penggunaan media pembelajaran yang tepat akan tercipta pembelajaran yang tidak monoton. Dengan demikian, tujuan dan kebijakan pemerintah tentang merdeka belajar akan tercapai dengan baik.

Fenomena yang terjadi bahwa masih banyak guru merasa bingung dan tidak terbiasa dengan penggunaan media pembelajaran. Metode yang digunakan guru dalam pembelajaran hanya metode caramah atau penugasan saja. Guru ibarat teko dan peserta didik sebagai gelas. Guru memberi materi dan peserta didik hanya menunggu dengan pasif. Dalam hal ini pembelajaran tidak berpusat pada peserta didik, namun pada guru. Proses pembelajaran yang seperti ini mengerdilkan daya pikir dan kreatifitas peserta didik,

karena peserta didik tidak diberi kesempatan dalam mengekspresikan dirinya secara bebas dan merdeka. Dalam hal penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), selama ini masih ada beberapa guru hanya melakukan *copy paste*. Hal ini terjadi karena banyaknya komponen-komponen yang harus dimuat secara rinci dalam RPP sehingga banyak menghabiskan waktu, padahal guru harus melakukan proses pembelajaran.

Dalam program merdeka belajar guru harus memiliki pemikiran yang bebas dan merdeka dalam mendesain pembelajaran yang ada sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Guru memiliki kemerdekaan dalam memilih elemen-elemen dari kurikulum untuk dikembangkan dalam proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kebebasan yang dimiliki guru dalam memilih elemen-elemen yang ada dalam kurikulum harus mampu menciptakan pembelajaran yang menantang peserta didik untuk memiliki pemikiran yang kritis dalam memecahkan berbagai masalah yang ada, mampu menumbuhkan daya cipta yang kreatif serta memiliki karakter yang baik dalam menjalin komunikasi dan kerja sama dengan orang lain.

Maka untuk mewujudkan program merdeka belajar, pemerintah merekrut program guru penggerak dalam

menggerakkan para guru untuk melaksanakan tugasnya sebagai guru dalam pembelajaran merdeka belajar. Maka artikel ini diharapkan mampu memberikan informasi tentang guru penggerak dan perannya dalam merdeka belajar di Indonesia.

D. KEBEBASAN KONDISI TERPENTING DALAM SETIAP ASPEK KEHIDUPAN MANUSIA

Kebebasan atau merdeka adalah kondisi terpenting dalam hampir semua aspek kehidupan manusia. Kebebasan atau merdeka itu sendiri adalah persoalan utama dalam kehidupan manusia. Sejarah mencatat bahwa banyak orang dari berbagai lapisan masyarakat bergerak dan memprotes untuk mencari kebebasan atau merdeka dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam kaitannya dengan dunia pendidikan, belajar adalah salah satu isu yang selalu menjadi topik hangat dalam literatur kebebasan. Colin Lankshear seorang professor di University of Auckland pernah berpendapat; "Kebebasan atau merdeka dan pembelajaran telah dikaitkan dalam filsafat dan teori pendidikan dalam tradisi barat sejak zaman Yunani, dan sangat penting dalam debat Pendidikan pada abad ke-21."

Konsep merdeka belajar bukanlah konsep yang baru di dunia pendidikan. Negara- negara lain di dunia

seperti Amerika, Brasil, Philipines sudah lama menerapkan konsep ini. Di Indonesia sendiri, konsep tentang Merdeka belajar sudah dimulai sejak Nadiem Makarim sebagai terpilih menjadi pendidikan. Ide dari gagasan ini dilandasi oleh esensi kemerdekaan berpikir untuk menciptakan suasana belajar yang bahagia tanpa dibebani dengan pencapaian skor atau nilai tertentu (Sudaryanto, S., Widayati, W., & Amalia, R., 2020). Konsep merdeka belajar pertama-tama hendaknya dimulai dalam pola pikir para guru sebelum mereka mengajarkannya kepada peserta didik.

Association of American Colleges & Universities (AAC & U) pernah menyebutkan bahwa: “Kebebasan akademis tidak hanya menyiratkan kebebasan dari batasan tetapi juga kebebasan bagi pengajar dan mahasiswa untuk bekerja dalam komunitas ilmiah untuk mengembangkan kualitas intelektual dan pribadi yang dibutuhkan warga negara dalam demokrasi yang dinamis dan dalam ekonomi yang kuat.” Setiap Guru dituntut untuk mampu menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dan merdeka bagi para peserta didiknya, sehingga murid dapat berdiskusi dengan guru untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuannya serta peserta didik diharapkan mampu memiliki karakter yang pemberani, mampu berpikir secara mandiri, trampil dalam bergaul, memiliki etika

serta kecakapan dalam berpikir secara kritis.

Kita semua tahu bahwa sistem pendidikan yang baik adalah memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam menggali kemampuan dan potensi pribadi. Dengan cara ini, peserta didik diberi kebebasan untuk belajar, menciptakan suasana kelas yang baru di mana mereka mampu mengembangkan pemikiran, pertanyaan, dan imajinasi mereka. Dalam konteks merdeka belajar, pendidik atau guru harus mendorong peserta didik untuk bekerja secara kolaboratif dan mengajukan pertanyaan secara kreatif tentang ide dan masalah dalam berbagai disiplin ilmu (Wagner, C. S., Wagner, C. S., & Graber., 2018; Bashan, B., & Holsblat, R., 2017). Sebagai pemikir kreatif, mereka mencoba membayangkan dan mengeksplorasi berbagai alternatif, dan berpikir dengan cara yang berbeda.

Pendekatan seperti itu diperlukan sebagai landasan akademis yang kokoh untuk meningkatkan kecerdasan mereka, termasuk “soft skill” seperti pemahaman, empati dan keterampilan dalam berkomunikasi. Penggunaan bahan pembelajaran yang berbeda dan berbagai sumber memungkinkan peserta didik dengan berbagai gaya belajar memahami informasi dengan cara yang paling efektif (Siahaan, C., & Sihotang, H., 2021). Pembelajaran dipupuk oleh interaksi

multidimensi antara peserta didik dan guru. Untuk belajar sendiri, peserta didik membutuhkan waktu yang tidak terbatas untuk bermain, bereksplorasi, mengatasi kebosanan, menemukan minat sendiri, dan mengejar minat tersebut. Hal ini tentunya membantu peserta didik mengembangkan keterampilan penalaran analitis dan kritis dengan penekanan khusus pada mengeksplorasi dan mengevaluasi sesuatu yang bersaing dengan perspektif yang berbeda. Kebebasan peserta didik untuk belajar membutuhkan kebebasan guru untuk mengajar, dan ini berhubungan erat satu sama lain. Sistem pendidikan saat ini perlu mengadopsi metode dan strategi baru yang mampu mendukung tujuan pendidikan dan menjamin kebebasan belajar dan mengajar.

Filosofi merdeka belajar mengandung makna yang sangat mendalam yakni mengajarkan semangat dan cara mendidik anak menjadi manusia yang merdeka batinnya, merdeka pikirannya dan merdeka fisiknya. Dengan merdeka belajar, tercipta suatu ekosistem pendidikan nasional yang lebih sehat sehingga menghadirkan iklim inovasi yang mampu menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter. Konsep merdeka belajar sangat memperhitungkan kemampuan dan keunikan kognitif individu peserta didik. Berbagai kebijakan dari Nadiem

Makarin tentang konsep-konsep dalam merdeka belajar adalah:

a. Kebijakan tentang penghapusan Ujian Sekolah Berstandar Nasional

Sesuai dengan amanat Nadiem Makarin yang ada pada peraturan Menteri dan kebudayaan No.43 pada tahun 2019 bahwa pelaksanaan ujian sekolah yang berstandar nasional terakhir dilaksanakan pada tahun 2020. Ujian sekolah dikembalikan pada esensinya bahwa penilaian tersebut dilakukan oleh guru dan sekolah. Maka kelulusan dari peserta didik diakhir jenjang merupakan wewenang dari sekolah. Sekolah diberi kebebasan dan keleluasaan dalam penyelenggaraan ujian tersebut. Pengawasan dan evaluasi dari pelaksanaan ujian di sekolah menjadi tugas dan tanggung jawab dari pemerintah daerah melalui dikbud. Pemerintah daerah akan memeriksa dan memastikan apakah ujian yang dilakukan di sekolah adalah ujian yang berkualitas sesuai dengan mutu yang diharapkan. Maka untuk mencapai mutu yang diharapkan pemerintah daerah harus mengumpulkan beberapa guru dalam sekolah di wilayahnya untuk melaksanakan pelatihan dalam menyusun soal-soal sesuai dengan kriteria yang telah

ditetapkan.

Penggantian Ujian Nasional menjadi penilaian assesmen kompetensi minimum dan survei karakter Sesuai dengan keputusan Menteri pendidikan pelaksanaan ujian nasional yang terakhir adalah tahun 2020. Penyelenggaraan UN untuk tahun 2021 dilaksanakan melalui penilaian assesmen kompetensi minimum (AKM) dan survei karakter menjadi akan diganti dengan sistem yang baru, yaitu Assesmen kompetensi minimum dan survei karakter.

Assesmen kompetensi minimum (AKM) dalam merdeka belajar, peserta didik diharapkan memiliki kemampuan berliterasi dan kemampuan numerik. Dalam bidang literasi, peserta didik tidak hanya mampu menghafal dan menerapkan materi yang dibaca, namun diharapkan mampu untuk memiliki pemikiran yang kritis dalam memahami materi yang diberikan. Dalam hal kemampuan numerik, peserta didik diharapkan mampu berpikir secara luas, tidak hanya sekedar mampu menghafal rumus-rumus atau formula yang ada namun lebih dari itu, peserta didik harus mampu menemukan dan memiliki konsep dasarnya dalam penyelesaian masalah yang lebih luas. Fokus dari AKM ini adalah menciptakan peserta didik yang mampu berfikir

secara kritis dengan menggunakan kemampuan kognitifnya.

Survei karakter dilaksanakan di sekolah bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik memiliki pengetahuan, pemahaman dan pengaplikasian dari asas Pancasila dalam berinteraksi dengan sesamanya di sekolah. Menurut Nadiem Makarin, survei karakter sangat penting dilakukan di sekolah dalam mengetahui bagaimana keadaan peserta didik dalam hal keamanan dan sikap toleransi yang diimplementasikan dalam sikap gotong royong dan saling menghargai satu sama lain. Maka bentuk test yang dikerjakan oleh peserta didik berupa test yang sifatnya personal terkait opini peserta didik mengenai gotong royong, Bhinneka tunggal ika, tetapi juga terkait esensi dan behavior dari topik-topik tersebut.

Dalam konsep ini penilaian tidak berfokus pada ujian nasional seperti penilaian sebelumnya namun pada penugasan dan portofolio. Maka peserta didik akan memiliki ruang dalam mengembangkan minat dan bakat mereka. Dengan konsep ini diharapkan kedepan tidak ada lagi stigma peserta didik yang pintar dan bodoh karena setiap manusia telah tercipta dengan bakat alami yang dimiliki

masing-masing. Semua anak punya potensi yang berbeda dan pasti akan menghasilkan suatu karya yang besar jika diasah dan dilatih. Maka cara penilaiannya tidak bisa dilakukan dengan test yang sama secara formal kepada setiap orang.

b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Sebelum melakukan pembelajaran guru harus melakukan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). RPP harus disusun dengan 13 komponen secara rinci dan mendetail sehingga RPP terdiri dari lembaran-lembaran yang sangat banyak. Guru terbebani dengan tugas-tugas administrasi dan kurang fokus pada pembelajaran. Untuk menyikapi hal ini, menteri pendidikan membuat kebijakan baru terkait dengan penyusunan RPP. Komponen dalam kebijakan yang baru tentang rencana pelaksanaan pembelajaran, terdiri dari (1) Tujuan pembelajaran (2) Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses pembelajaran. (3) Penilaian yang terdiri dari penilaian kognitif, afektif dan sikap. Dengan RPP yang selembat ini, guru diberi kebebasan untuk lebih kreatif dalam mengembangkannya secara efektif dan efisien sesuai dengan situasi yang ada demi perkembangan peserta didik.

- c. Kebijakan dalam penentuan penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi yang lebih luas.

Dalam kebijakan ini, penerimaan siswa baru dilaksanakan dengan sistem zonasi yang lebih luas dan fleksibel. Tujuan dari kebijakan zonasi ini adalah untuk meningkatkan akses dan kualitas yang merata dari beberapa daerah yang ada. Pemerataan kualitas pendidikan diharapkan mampu menjadikan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah di Indonesia dengan tujuan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu mengelola sumber daya alam yang ada. Komposisi PPDB adalah jalur zonasi minimal 50%, Jalur Afirmasi minimal 15%, jalur perpindahan 5% sedangkan jalur prestasi adalah sisanya 30 % yang disesuaikan dengan kondisi daerah.

Indonesia adalah salah satu negara yang menerapkan pola pendidikan dengan Guru Penggerak dalam pembelajaran merdeka belajar. Guru penggerak dalam merdeka belajar merupakan seseorang yang mampu mengarahkan peserta didik dalam mengembangkan dirinya secara menyeluruh, yang memiliki pemikiran yang kritis, dan daya cipta yang kreatif. Dalam pembelajaran merdeka belajar, guru penggerak

harus mampu melaksanakan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, sehingga pendidikan profil pelajar pancasila dapat terwujud dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Nadiem Makariem, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI menegaskan bahwa ujung tombak dari transformasi Pendidikan merdeka belajar adalah guru penggerak. Guru penggerak tak hanya mengikuti kurikulum yang ditentukan, melainkan, berupaya mengubah semua aktivitas belajar untuk mencapai atau menjaga standar Profil Pelajar Pancasila, yaitu peserta didik yang beriman, bertakwa, memiliki akhlak yang mulia, lebih kreatif, mampu bergotong royong, memiliki jiwa kebhinekaan yang global, berpikir kritis, serta memiliki kemandirian. Guru penggerak dalam pembelajaran harus mampu menyeimbangkan tuntutan zaman dalam era modern dalam hal pendidikan karakter sebagai dasar bagi peserta didik untuk tetap bijaksana dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin berkembang, dan memiliki sikap yang kritis dalam menanggapi segala informasi yang ada.

Guru penggerak adalah guru yang menggerakkan guru yang lain dalam pembelajaran merdeka belajar untuk mengembangkan potensi peserta didik secara holistic. Guru penggerak dalam merdeka belajar tidak hanya memiliki kemampuan dalam mengelola pembelajaran secara efektif tetapi harus mampu menciptakan hubungan yang baik dengan peserta didik dalam komunitas persekolahan dengan menggunakan teknologi yang ada demi peningkatan mutu pembelajaran serta harus melakukan refleksi dan evaluasi terus menerus dalam perbaikan praktek pembelajaran yang terus menerus. Guru penggerak harus mampu menjadi teladan yang memiliki kemampuan dan daya juang untuk membawa suatu perubahan yang baik dalam ekosistem pendidikan dalam sekolahnya maupun dalam unit sekolah yang lain.

Sesuai dengan program menteri pendidikan dan kebudayaan tentang guru penggerak dalam merdeka belajar, diharapkan para guru mampu untuk bersinergi dan berkolaborasi untuk mencapai perubahan pendidikan kearah yang lebih baik dalam meningkatkan mutu pendidikan yang berkualitas dan memiliki daya saing. Guru penggerak harus mampu

menggerakkan rekan guru yang lain untuk selalu berinovasi. Sebagai guru dalam Pendidikan merdeka belajar, tentu harus mampu memiliki kompetensi kepribadian yang matang, baik secara moral maupun dalam hal spiritual sehingga menjadi menjadi role model bagi peserta didik dan semua warga sekolah.

Guru penggerak merupakan pemimpin pembelajaran dalam merdeka belajar yang memiliki kemampuan dalam menggerakkan ekosistem pendidikan untuk mewujudkan Pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Menjadi guru penggerak, harus lulus seleksi dan mengikuti program pendidikan dan pelatihan selama sembilan bulan. Hasil yang diharapkan dari pelatihan atau pendidikan dari program guru penggerak adalah:

1. Guru memiliki kemampuan yang mandiri dan merdeka dalam mengembangkan kompetensinya sebagai pengajar sekaligus mampu menggerakkan rekan guru yang lain untuk mampu berinovasi dalam meningkatkan kualitas *output* dari Pendidikan.
2. Dalam pembelajaran merdeka belajar, guru harus mampu berpihak pada peserta didik.

Guru harus mampu menggerakkan peserta didiknya untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimilikinya, untuk mencapai tujuan dari pendidikan sesuai dengan visi sekolah.

3. Guru harus memiliki kemampuan untuk berinovasi dalam mengembangkan kualitas dari sekolahnya. Untuk meningkatkan kualitas dari pendidikan sekolah, guru harus mampu menjalin kerja sama dengan orang tua dan komunitas sehingga bertumbuh sikap mandiri dan memiliki jiwa kepemimpinan.
4. Guru harus memiliki kompetensi kepribadian yang baik. Seorang guru diharapkan memiliki kematangan emosional, baik secara moral maupun spiritual dalam bersikap dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari, sesuai dengan kode etik yang berlaku di masyarakat.
5. Guru harus mampu mengelola pembelajaran dengan berpusat pada peserta didik dengan menciptakan komunikasi yang baik dengan

orang tua dari peserta didik.

Revolusi industry 4.0 dan peradaban 5.0 telah memberikan pengaruh terhadap bidang kehidupan, sehingga terjadi disrupsi teknologi dan inovasi, termasuk dalam pendidikan. Guru menghadapi tantangan yang sangat besar di era disrupsi teknologi sekarang karena informasi dan sumber belajar sangat mudah diperoleh. Meskipun demikian tentu peran guru tidak sepenuhnya dapat tergantikan oleh canggihnya teknologi, karena teknologi merupakan hasil dari otak manusia yang bisa salah dan keliru atau bisa disalah gunakan. Teknologi juga tidak bisa diteladani, karena tidak punya perasaan dan tidak punya empati.

Pendidikan selalu terjadi di rumah dan juga di sekolah. Di rumah orang tua adalah guru utama Pendidikan dan di sekolah Guru adalah pendidik utama. Maka benar yang dikatakan nadiem Nadiem (2019) bahwa “ pendidikan merupakan apa yang terjadi di ruang kelas dan di rumah. Teknologi tidak mungkin menggantikan koneksi itu. Harus ada koneksi batin agar *trust* tercipta dan proses belajar mengajar menjadi lebih efektif”. Maka secanggih apapun teknologi tidak dapat menggantikan peran guru karena sentuhan sang guru kepada peserta didik memiliki kekhasan yang tidak bisa diberikan oleh teknologi. Menghadapi pesatnya perkembangan teknologi

sekarang ini, guru dituntut untuk terus belajar dan belajar dalam mengikuti perkembangan teknologi supaya pengetahuan yang dimiliki *terupdate* dan tidak ketinggalan dari peserta didik dalam hal penggunaan dan pemanfaatan teknologi. Dengan kemampuan yang dimiliki, guru harus mampu membimbing dan mengarahkan peserta didik dalam menggunakan teknologi dengan baik dan memiliki manfaat bagi proses pembelajaran. (Mulyasa, 2021:1-2).

Guru harus mampu mengembangkan dirinya dalam mengikuti perkembangan teknologi yang semakin berkembang. Guru harus mampu menerima hal-hal baru dalam setiap perubahan yang ada dengan membimbing dan mengarahkan peserta didik untuk siap menghadapi karakteristik kehidupan yang berbeda khususnya dalam menghadapi era industry 4.0. (Dadang dalam bandungkita.id 2020). Untuk menghadapi era industry 4.0 guru harus mampu mengubah pola pikirnya. Guru harus memiliki visi kedepan dalam mengembangkan pembelajaran yang lebih bermutu. Untuk meningkatkan kualitas peserta didik, tentu salah satu yang paling dibutuhkan adalah kualitas guru sebagai tenaga pengajar dan pendidik. Hanya guru yang memiliki kualitas yang tinggi mampu menciptakan peserta didik yang berkualitas tinggi pula. Tugas guru tidak sebatas mengajarkan materi kepada

peserta didik namun harus mampu memberi teladan bagi yang lain sebagai pemimpin dalam pendidikan dimasa yang akan datang.

Guru penggerak tidak sebatas melaksanakan tugasnya sebagai pengajar dalam menyiapkan perencanaan pembelajaran, menyampaikan materi kepada peserta didik namun harus memiliki kemauan dan kemampuan dalam hal memimpin, berinovasi serta melakukan perubahan (Sirait, S., Murniarti, E., & Sihotang, H. ,2021). Guru penggerak merdeka belajar harus mampu mengajar dan mengelola pembelajaran dengan efektif dengan menggunakan teknologi yang ada, mampu berbahasa Inggris untuk meningkatkan mutu pendidikan serta harus melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran terus menerus (Pendi, Y. O., 2020). Sebagai seorang guru penggerak harus memiliki kemampuan untuk berkreasi secara inovatif dan dengan energik melayani peserta didik serta mampu membangun hubungan yang baik antara guru dan sekolah dengan komunitas yang lebih luas menjadi pembelajar sekaligus agen penggerak perubahan.

Adapun peran dari guru penggerak dalam pendidikan (Sutikno, M. S., 2007; Manizar, E. ,2015)

- 1) Guru menjadi penggerak dalam komunitas belajar bagi rekan guru disekolah dan

wilayahnya. Menjadi pelatih bagi rekan guru merupakan peran dari guru penggerak. Diharapkan kehadiran guru penggerak mampu membawa suatu perubahan yang baik bagi guru yang digerakkan khususnya dalam kualitas mengajar peserta didik dan kemandirian guru dalam mengembangkan dirinya secara mandiri.

- 2) Guru penggerak berperan dalam melatih rekan guru dalam mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Guru yang digerakkan oleh guru penggerak harus mampu mendesain dan mengelola pembelajarannya semenarik mungkin sehingga peserta didik termotivasi untuk belajar dan berkreasi sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Motivasi yang ada dalam diri peserta didik memampukan dirinya untuk meningkatkan prestasi akademiknya secara mandiri.
- 3) Guru penggerak menjadi agen perubahan dalam hal peningkatan kualitas kepemimpinan peserta didik di sekolah
- 4) Guru penggerak harus mampu menciptakan suatu ruang sebagai wadah untuk berdiskusi dan berkolaborasi bersama dengan rekan guru dan mereka yang memiliki kepentingan atau

pemangku kepentingan baik yang ada di lingkungan pendidikan sekolah maupun di luar sekolah dengan tujuan peningkatan kualitas dalam pembelajaran.

- 5) Guru penggerak harus menjadi pemandu dalam proses pembelajaran yang menciptakan suasana nyaman dan damai dalam ekosistem pembelajaran. Dengan pembelajaran yang nyaman peserta didik terdorong untuk mengembangkan dirinya menjadi pribadi yang bernalar kritis, kreatif, berhati mulia dan memiliki sikap toleransi.
- 6) Mengembangkan diri secara aktif. Guru penggerak harus selalu *upgrade* dirinya dalam mengikuti perkembangan zaman. Guru harus mampu meningkatkan dan mengembangkan kompetensinya sebagai guru secara mandiri.
- 7) Menjadi motivator. Guru merupakan motivator dalam pembelajaran dalam memacu aktivitas belajarnya. Guru penggerak harus menjadi panutan yang mampu mengarahkan dan mengubah perilaku dan karakter peserta didik kearah yang lebih baik. Melahirkan generasi bangsa yang berkualitas yang memiliki keilmuan dan kedalaman spritual sebagai ujung tombak bagi

kemajuan bangsa.

Merdeka belajar merupakan kemerdekaan berpikir baik bagi guru maupun peserta didik dalam pembelajaran. Ide dari gagasan merdeka belajar dilandasi oleh esensi kemerdekaan berpikir untuk menciptakan suasana belajar yang bahagia tanpa dibebani dengan pencapaian skor atau nilai tertentu. Konsep merdeka belajar pertama-tama hendaknya dimulai dalam pola pikir para guru sebelum mereka mengajarkannya kepada peserta didik. Pembelajaran dalam merdeka belajar memberi keleluasaan dan kebebasan bagi guru dalam mendesain pembelajaran yang kontekstual dan bermakna sesuai dengan standar profil pelajar pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, berkebhinekaan global, bernalar kritis dan mandiri.

Pokok-pokok kebijakan merdeka belajar adalah (1). Pelaksanaan ujian sekolah yang berstandar nasional berakhir tahun 2020. Pada tahun 2021 pemerintah memberi wewenang kepada sekolah dalam pelaksanaan ujian sekolah dibawah pengawasan pemerintah daerah. (2) Penggantian ujian nasional menjadi penilaian assesmen kompetensi minimum dan

survei karakter. (3) Penyederhanaan rencana pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dari 13 komponen menjadi 3 komponen. (4) Kebijakan dalam penentuan penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi yang lebih luas.

Peran guru penggerak dengan guru biasa (guru tidak penggerak) tidak memiliki perbedaan yang sangat signifikan, karena sama-sama memiliki tugas sebagai guru penggerak dalam pembelajaran untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menarik dan menyenangkan sehingga peserta didik termotivasi untuk mengembangkan potensinya secara mandiri. Namun yang membedakan adalah bahwa guru penggerak memiliki peran khusus dalam merdeka belajar yaitu menjadi guru yang mampu mengelola pembelajaran dengan menggunakan teknologi yang ada dengan melakukan refleksi dan perbaikan terus menerus sehingga peserta didik terdorong untuk meningkatkan prestasi akademiknya secara mandiri. Peserta didik dalam merdeka belajar harus memiliki kemampuan dalam berpikir kritis, kreatif, bertakwa kepada Tuhan yang maha esa, memiliki akhlak yang mulia, mampu bergotong royong, memiliki kebhinekaan yang global dan memiliki kemandirian.

Di samping tugasnya sebagai pengajar, guru penggerak bertugas menjadi pelatih dan penggerak

bagi guru yang lain dalam mengembangkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif yang berpusat pada peserta didik serta mampu menjadi panutan dan pembawa perubahan yang baik dalam ekosistem pendidikan.

Tentang Penulis



Ali Halidin, dilahirkan di kendari, 25 April 1976, anak ke-7 dari 7 bersaudara. Ini adalah tulisan ke-enam penulis, ditengah kesibukan beliau sebagai Direktur Pascasarjana IAIN Bone 2022-2026. Pembelajaran Model Halaqah, Pembelajaran Cinta Lingkungan, Pendidikan Multikulturalisme, Islamic Study the leiden Landcape, Integrasi Keilmuan Islam, merupakan buku yang pernah ditulis. Kedua orang tua penulis memiliki latar belakang dalam bidang pendidikan dan kepemimpinan, sehingga penulis banyak menghabiskan waktunya dalam dunia pendidikan.

Penulis sangat konsen dalam pengembangan dunia pendidikan, selain sebagai dosen juga sebagai Pembina pada Yayasan Khairul Ummah, Pondok Pesantren Al-Hannan DDI Seppange, Kecamatan Bengo Kabupaten Bone. Konsep integrasi keilmuan yang digagas dengan metode Sentuhan Keilmuan Akademik yang lebih progressif dan dinamis. Karena prinsipnya semua bidang keilmuan pasti memiliki persinggungan dengan ilmu lainnya.

Masa sekolah Dasar beliau ditamatkan di SD Inpres Tello Baru ½ Makassar, MTS dan MA, diselesaikan di Pondok Pesantren Darullughah Waddakwah Kabupaten Pasuruan Jatim. S.1 Fakultas UMI Makassar, S.2, IAIN Alauddin Makassar, S.3, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selama Sembilan 2022 mengawal calon Guru Pengerak di Kabupaten Bone, banyak memberikan pengalaman tersendiri tentang program merdeka belajar. Peserta Community Engagement di UWS (University of Western Sydney) Australia (2015), Peserta Short Course Methodology Research di Leiden University (2018), sebagai pembicara pada Internasional Conference baik Nasional maupun Internasional.

Motto: *“Belajarlah pada siapa saja dan apa saja”*